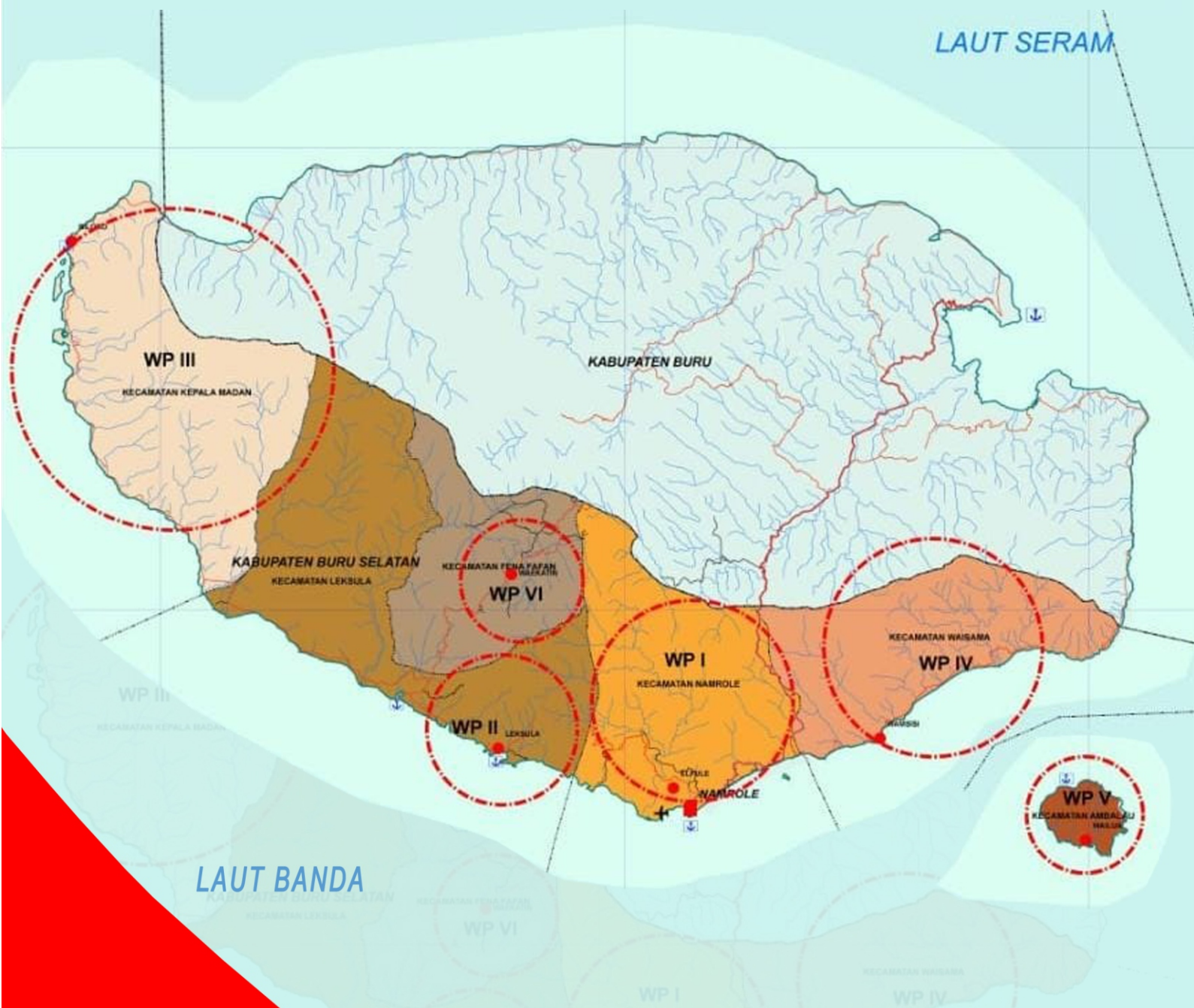




RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2021 - 2026



**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPELITBANG)
KABUPATEN BURU SELATAN**

NAMROLE 2021



BUPATI BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN
TAHUN 2021 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional, sehingga perlu diselenggarakan secara seimbang dan serasi untuk menjamin keselarasan pembangunan antar daerah tanpa mengurangi kewenangan daerah sesuai semangat desentralisasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015;
- b. bahwa konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan sinergitas pembangunan antar daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan perlu dilakukan secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- c. bahwa untuk pedoman dan acuan dalam menetapkan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum program satuan kerja perangkat daerah maupun program kewilayahan yang disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan bersifat indikatif, diperlukan perencanaan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021 -2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID

- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan, (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4878);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta dan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1312);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 29 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009-2029, Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2012 Nomor 30;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009-2029, Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2013 Nomor 48.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN
dan
BUPATI BURU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN
2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Buru Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan.
5. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut BAPELITBANG adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru Selatan.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

7. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
8. Pembangunan Daerah adalah bagian dari kesatuan sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah menurut prakarsa daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-OPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
20. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
21. Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah.
22. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar Satuan Kerja

Perangkat Daerah mengenai suatu atau beberapa wilayah, daerah atau kawasan.

23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
24. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah tolok ukur kinerja daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.
25. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan RPJM Daerah adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sebagai penjabaran aspirasi masyarakat Daerah guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan penyusunan RPJMD adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA RPJM DAERAH

Pasal 4

- (1) Sistematika RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026, disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH

BAB IX PENUTUP.

(2) RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak
terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan daerah ini dengan menempatkan
dalam Lembaran Daerah kabupaten Buru selatan.

Ditetapkan di Namrole
pada tanggal 21 Desember 2021

BUPATI BURU SELATAN,

SAFITRI MALIK SOULISA

Diundangkan di Namrole
pada tanggal 21 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ISKANDAR WALLA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN, PROVINSI
MALUKU NOMOR 4/58/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2021-2026

I. MUM

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026 dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN NOMOR 4

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan hidayat-Nya, sehingga Dokumen RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021–2026 dapat diselesaikan.

Dokumen RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026 ini disusun, telah mengkolaborasikan pendekatan politik, yaitu memasukkan komponen Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 47 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan RPJMD ini mencakup penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD, penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, perumusan program pembangunan Daerah, perumusan program Perangkat Daerah, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Secara umum, Dokumen RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026 ini disusun dalam 9 (Sembilan) bab. Bab I membahas tentang Pendahuluan, Bab II membahas tentang Gambaran Umum Kondisi Daerah, Bab III membahas tentang Gambaran Keuangan Daerah, Bab IV membahas Permasalahan dan Isu Strategis Daerah dan Bab V membahas Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Bab VI membahas Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah, Bab VII membahas Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah, Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Bab IX Penutup.

Dokumen RPJMD ini juga disempurnakan berdasarkan masukan-masukan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik yang telah dituangkan dalam Berita Acara. Selanjutnya. Harapan kami, dokumen ini dapat menjadi pijakan dalam tahapan selanjutnyadari proses penyusunan RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026. Tak lupa kami mohon diberikan kritik dan saran yang membangun dan senantiasa kami terima dengan senang hati demi hasil yang lebih baik di masa depan.

Namrole, 22 Nopember 2021

BUPATI BURU SELATAN



SAFITRI MALIK SOULISA

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-5
1.3. Hubungan antar dokumen	I-7
1.4. Maksud dan Tujuan	I-15
1.5. Sistematika Penulisan	I-16
BAB II KONDISI UMUM DAERAH	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1. Karakteristik Wilayah Kabupaten Buru Selatan dan Wilayah Administrasi	II-1
2.1.2. Demografi	II-16
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-18
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II-18
2.2.2. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Sosial.....	II-36
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-39
2.3. Aspek Pelayanan Umum	II-39
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar	II-39
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar.....	II-51
2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan	II-67
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-80
2.4.1. Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Per Bulan	II-81
2.4.2. Nilai Tukar Petani	II-82
2.4.3. Capaian Pembangunan Kabupaten Buru Selatan	II-83
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Kondisi Perekonomian Nasional	III-2
3.2 Kondisi Perekonomian Daerah	III-3
3.2.1 Provinsi Maluku	III-3
3.2.2 Kabupaten Buru Selatan	III-3
3.3 Kinerja Keuangan Tahun 2016-2020	III-4
3.3.1 Kinerja Pelaksanaan APBD	III-6
3.3.2 Kinerja Neraca Daerah	III-24
3.4 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kab Buru Selatan 2016-2020	III-33
3.4.1 Proporsi Penggunaan Anggaran	III-33
3.4.2 Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah	III-41
3.4.3 Analisis Pembiayaan	III-44
3.5 Kerangka Pendanaan	III-45

3.5.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah	III-46
3.5.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan	III-54
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	IV-1
4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	IV-1
4.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar	IV-2
4.1.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan	IV-10
4.2 Isu Strategis	IV-13
4.2.1 Isu Strategis Internasional (Global)	IV-13
4.2.2 Isu Strategis Nasional	IV-23
4.2.3 Isu Strategis Provinsi Maluku	IV-27
4.2.4 Isu Strategis Kabupaten Buru Selatan	IV-33
4.2.5 Isu Strategis Jangka Pendek Dampak Covid-19	IV-38
4.2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Kajian TPB berdasarkan KLHS	IV-43
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V-1
5.1. Visi Pembangunan Daerah	V-2
5.2. Misi Pembangunan daerah.....	V-3
5.3. Tujuan dan Sasaran	V-6
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM	VI-1
PEMBANGUNAN DAERAH	
6.1. Penjabaran Strategi dan Arah Kebijakan berdasarkan Misi	VI-1
6.1.1. Strategi dan Arah Kebijakan untuk mewujudkan Misi Pertama	VI-1
6.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan untuk mewujudkan Misi Kedua	VI-3
6.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan untuk mewujudkan Misi Ketiga	VI-4
6.1.4. Strategi dan Arah Kebijakan untuk mewujudkan Misi Keempat.....	VI-6
6.1.5. Strategi dan Arah Kebijakan untuk mewujudkan Misi Kelima	VI-7
6.1.6. Strategi dan Arah Kebijakan untuk mewujudkan Misi Keenam	VI-8
6.1.7. Strategi dan Arah Kebijakan untuk mewujudkan Misi Ketujuh	VI-10
6.2. Rancangan Agenda Kebijakan Pembangunan Daerah	VI-12
6.2.1. Agenda Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah ...	VI-14
6.2.2. Agenda Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan.....	VI-22
6.2.3. Agenda Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Dan Daya Saing SDM	VI-24
6.2.4. Agenda Kebijakan Reformasi Birokrasi	VI-29
6.2.5. Agenda Kebijakan Sarana Prasarana Wilayah	VI-32
6.3. Artikulasi Campaign Programs (Program-program kampanye)	VI-35
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan	VII-1
7.2. Skenario Pinjaman Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah	VII-43

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VIII-1
8.1. Penetapan Indikator Kinerja Daerah	VIII-1
BAB IX PENUTUP	IX-1
9.1. Pedoman Transisi	IX-1
9.2. Kaidah Pelaksanaan	IX-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Matriks Hubungan Antar Dokumen Perencanaan.....	I-12
Tabel 2.1. Pembagian wilayah Administrasi Kabupaten Buru Selatan	II-3
Tabel 2.2. Data Klimatologi Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020	II-8
Tabel 2.3. Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Buru Selatan (Ha).....	II-9
Tabel 2.4. Rencana Pola Ruang Kabupaten Buru Selatan (Ha).....	II-10
Tabel 2.5. Rencana Hirarki Pusat Pelayanan Di Kabupaten Buru Selatan	II-15
Tabel 2.6. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Buru Selatan 2015-2020	II-16
Tabel 2.7. Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Buru Selatan 2015-2020	II-17
Tabel 2.8. Persentase Penduduk Menurut Kepadatan Penduduk di Kabupaten Buru Selatan 2020	II-17
Tabel 2.9. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Buru Selatan 2016-2020 Menurut Lapangan Usaha ADHB	II-22
Tabel 2.10. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Buru Selatan 2016-2020 Menurut Lapangan Usaha ADHK 2010	II-24
Tabel 2.11. Rata-rata Pengeluaran Perkapita, Konsumsi Kalori dan Protein Berdasarkan Kelompok Pengeluaran Kabupaten Buru Selatan 2020	II-29
Tabel 2.12. Analisis Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Buru Selatan 2020	II-32
Tabel 2.13. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buru Selatan Berdasarkan Komponen IPM Tahun 2016-2020	II-37
Tabel 2.14. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2016-2020	II-38
Tabel 2.15. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator bidang pendidikan Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2016-2020	II-40
Tabel 2.16. Capaian Kinerja Indikaor Bidang Pendidikan Di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020	II-43
Tabel 2.17. Capaian Indikator Kesehatan Di Provinsi Maluku Tahun 2016-2020	II-45
Tabel 2.18. Rasio Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan Per 100.000 Penduduk Di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020	II-45
Tabel 2.19. Rasio Jumlah Fasilitas Kesehatan Per 100.000 Penduduk Di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020	II-46
Tabel 2.20. Kondisi Kemantapan Jalan dan Jembatan Di Kabupaten Buru Selatan Pada Tahun 2014 dan Tahun 2019	II-48
Tabel 2.21. Capaian Indikator Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020	II-49
Tabel 2.22. Capaian Indikator Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020	II-50

Tabel 2.23.	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018	II-51
Tabel 2.24.	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Provinsi Maluku Tahun 2018	II-51
Tabel 2.25.	Capaian Indikator Ketenagakerjaan Di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020	II-52
Tabel 2.26.	Jumlah Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018 – 2019	II-53
Tabel 2.27.	Capaian Indikator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kab Buru Selatan Tahun 2016-2020	II-54
Tabel 2.28.	Capaian Indikator Bidang Ketahanan Pangan di Kab Buru Selatan Tahun 2016-2020	II-54
Tabel 2.29.	Sertifikasi Hak Atas Tanah di Kab Buru Selatan Tahun 2016-2020	II-55
Tabel 2.30.	Capaian Indikator Bidang Pertanahan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020	II-55
Tabel 2.31.	Capaian Indikator Bidang Lingkungan Hidup di Kab Buru Selatan Tahun 2016-2020	II-56
Tabel 2.32.	Capaian Pembangunan Bidang Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk Di Kab Buru Selatan Tahun 2016-2020	II-57
Tabel 2.33.	Angka Indeks Desa Membangun di Kab Buru Selatan Tahun 2018-2020	II-57
Tabel 2.34.	Capaian Indikator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Di Kab Buru Selatan Tahun 2016-2020	II-58
Tabel 2.35.	Prosentase Peserta KB Aktif Di Kab Buru Selatan Tahun 2016-2020	II-58
Tabel 2.36.	Jenis Kendaraan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020	II-59
Tabel 2.37.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020	II-60
Tabel 2.38.	Lapangan Terbang Menurut Frekuensi Penerbangan, Kapasitas, Ukuran, serta Konstruksinya Tahun 2020	II-60
Tabel 2.39.	Jumlah Infrastruktur Transportasi Di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020	II-60
Tabel 2.40.	Jumlah Tower Telkomsel Menurut Kecamatan serta jenis tower Tahun 2020	II-61
Tabel 2.41.	Capaian indikator Bidang Koperasi dan UMKM Kabupaten Buru Selatan tahun 2016-2020	II-62
Tabel 2.42.	Capaian Kinerja Bidang Penanaman Modal dan PTSP di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2014-2018	II-63
Tabel 2.43.	Jumlah sarana dan prasarana Olahraga Di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020	II-63
Tabel 2.44.	Jumlah Organisasi Kepemudaan dan olahraga Di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020	II-64
Tabel 2.45.	Ketersediaan Dokumen Pendukung Perencanaan Di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020	II-64
Tabel 2.46.	Prosentase OPD yang telah menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020.....	II-65
Tabel 2.47.	Capaian indikator bidang kebudayaan Di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020	II-65

Tabel 2.48.	Capaian indikator bidang Perpustakaan Di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020	II-66	
Tabel 2.49.	Capaian indikator bidang kearsipan Di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020	II-66	
Tabel 2.50.	Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018-2019	II-67	
Tabel 2.51.	Produksi Perikanan Di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020	II-68	
Tabel 2.52.	Komoditas Unggulan Di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2014-2018	II-68	
Tabel 2.53.	Capaian indikator bidang perikanan Di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020	II-69	
Tabel 2.54.	Kunjungan Wisatawan Mancanegara, Nusantara dan Lokal Di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015-2020	II-69	
Tabel 2.55.	Realisasi kontribusi sektor pariwisata Terhadap PDRB Di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2014-2018	II-69	II-71
Tabel 2.56.	Produksi Tanaman Pangan Kab Buru Selatan Tahun 2014-2018	II-71	
Tabel 2.57.	Produksi Tanaman Perkebunan Di Kab Bursel Tahun 2016-2020	II-72	
Tabel 2.58.	Populasi Ternak Di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020	II-73	
Tabel 2.59.	Rencana Pola Ruang Kehutanan Di Kab Buru Selatan (Ha)	II-75	
Tabel 2.60.	Jumlah Pelanggan, Daya Tersambung, Kwh Terjual serta Listrik Terjual pada PT. PLN (Persero) Cabang/Ranting PLN Thn 2020	II-76	
Tabel 2.61.	Jumlah Perusahaan Menurut Jenis Kegiatan dan Jumlah Tenaga Kerja Di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018	II-79	
Tabel 2.62.	Capaian Indikator Bidang Transmigrasi Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020	II-80	
Tabel 2.63.	Capaian indikator daya saing Daerah Di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2014-2018	II-81	
Tabel 2.64.	Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016 – 2020	II-81	
Tabel 2.65.	Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020	II-82	
Tabel 2.66.	Capaian Kinerja urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020	II-84	
Tabel 3.1.	Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020	III-5	
Tabel 3.2.	Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020	III-7	
Tabel 3.3.	Perkembangan Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020	III-9	
Tabel 3.4.	Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020	III-12	
Tabel 3.5.	Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020	III-15	
Tabel 3.6.	Perkembangan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020	III-16	
Tabel 3.7.	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020	III-16	
Tabel 3.8.	Perkembangan Realisasi Belanja Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020	III-17	

Tabel 3.9.	Perkembangan Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015-2020	III-20
Tabel 3.10.	Perkembangan Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015-2020	III-22
Tabel 3.11.	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020 Menurut Kelompok dan Jenis Belanja (dalam Rupiah)	III-23
Tabel 3.12.	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020	III-25
Tabel 3.13.	Analisis Rasio Likuiditas Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018-2020	III-31
Tabel 3.14.	Rasio Solvabilitas Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018-2020	III-32
Tabel 3.15.	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020	III-33
Tabel 3.16.	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020	III-35
Tabel 3.17.	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020	III-36
Tabel 3.18.	Realisasi Belanja Periodik Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020	III-37
Tabel 3.19.	Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020	III-44
Tabel 3.20.	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020	III-45
Tabel 3.21.	Rekap Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2016-2020	III-47
Tabel 3.22.	Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2021 s/d Tahun 2026 Kabupaten Buru Selatan	III-48
Tabel 3.23.	Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2021 s/d 2026 Kabupaten Buru Selatan	III-51
Tabel 3.24.	Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Buru Selatan	III-53
Tabel 3.25.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026	III-55
Tabel 3.26.	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026	III-57
Tabel 4.1.	Dampak covid 19 terhadap tenaga kerja di Indonesia, 2020	IV-41
Tabel 4.2.	Dampak covid 19 terhadap penduduk usia kerja <agustus, 2020> Di Provinsi Maluku	IV-41
Tabel 4.3.	Jumlah penerima kartu prakerja gelombang 1-9 Kabupaten Kota Oktober, 2020	IV-42
Tabel 4.4.	Kategori Capaian Indikator TPB Di Kabupaten Buru Selatan	IV-43
Tabel 4.5.	Kategori Capaian Indikator TPB Berdasarkan Jenis Urusan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di Kabupaten Buru Selatan	IV-45
Tabel 4.6.	Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial Kabupaten Buru Selatan	IV-47

Tabel 4.7.	Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Ekonomi Kabupaten Buru Selatan	IV-48
Tabel 4.8.	Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan Kabupaten Buru Selatan	IV-48
Tabel 4.9.	Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Hukum dan Tata Kelola Kabupaten Buru Selatan.....	IV-49
Tabel 5.1.	Visi, Pokok-Pokok Visi dan Penjelasan Visi	V-3
Tabel 5.2.	Keterkaitan antara Pokok Pokok Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	V-8
Tabel 6.1.	Keterkaitan tujuan, sasaran, dan strategi beserta indikator kinerja Peningkatan daya saing Ekonomi daerah	VI-19
Tabel 6.2.	Keterkaitan tujuan, sasaran, dan strategis beserta indikator kinerja Penanggulangan kemiskinan	VI-23
Tabel 6.3.	Keterkaitan tujuan, sasaran, dan strategi beserta indicator Kinerja Pembangunan kualitas hidup dan daya saing SDM	VI-27
Tabel 6.4.	Keterkaitan tujuan, sasaran, dan strategis beserta indikator kinerja Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	VI-31
Tabel 6.5.	Keterkaitan tujuan, sasaran, dan strategis beserta indicator kinerja Pengurangan kesenjangan wilayah	VI-34
Tabel 6.6.	Target Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026	VI-36
Tabel 7.1.	Proyeksi anggaran pendapatan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026	VII-3
Tabel 7.2.	Proyeksi anggaran belanja daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026	VII-4
Tabel 7.3.	Proyeksi pembiayaan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026	VII-5
Tabel 7.4.	Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026	VII-6
Tabel 7.5.	Alokasi pendanaan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026	VII-8
Tabel 7.6.	Alokasi Pendanaan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026	VII-9
Tabel 8.1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026	VIII-2
Tabel 8.2.	Target Indikator Kinerja Kunci RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026	VIII-11

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistim perencanaan pembangunan	I-10
Gambar 1.2	Bagan alur keterkaitan perencanaan dan pembangunan daerah	I-10
Gambar 2.1	Peta Kabupaten Buru Selatan	II-1
Gambar 2.2	Peta Tol Laut dan ALKI III Kabupaten Buru Selatan	II-2
Gambar 2.3	Peta Kawasan Potensi Tambang Logam non Logam di Kabupaten Buru Selatan	II-5
Gambar 2.4	Peta Wilayah Pengembangan Kabupaten Buru Selatan.....	II-11
Gambar 2.5	Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Buru Selatan.....	II-13
Gambar 2.6	Konsep Struktur Ruang Kabupaten Buru Selatan	II-14
Gambar 2.7	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2016-2020	II-19
Gambar 2.8	Perkembangan PDRB Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015-2020	II-20
Gambar 2.9	Laju Inflasi Kabupaten Buru Selatan Terhadap Provinsi Maluku, Nasional dan Target RPJMD Tahun 2015-2020	II-26
Gambar 2.10	Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015-2020	II-28
Gambar 2.11	Perkembangan Garis Kemiskinan Buru Selatan Tahun 2021-2026.	II-29
Gambar 2.12	Analisis Efektivitas Persentase Penduduk Miskin (%) Kabupaten Buru Selatan, Tahun 2016 – 2020	II-33
Gambar 2.13	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (Indeks) Kabupaten Buru Selatan, Tahun 2016 – 2020	II-34
Gambar 2.14	Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (Indeks) KabupatenBuru Selatan, Tahun 2016 – 2020	II-34
Gambar 2.15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020	II-35
Gambar 2.16.a	Rata-rata IPM Berdasarkan Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku tahun 2020	II-36
Gambar 2.16.b	Perkembangan Indeks Pembangunan Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2016-2020	II-37
Gambar 2.17	Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air	

	Minum Layak di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2014-2018	II-47
Gambar 2.18	Perkembang Capaian Akses Sanitasi Layak Di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2014-2018	II-47
Gambar 2.19	Realisasi PAD Sektor Pariwisata di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2014 – 2018	II-70
Gambar 2.20	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB ADHB di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021 – 2020	II-71
Gambar 2.22	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020.....	II-77
Gambar 2.23	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020	II-78
Gambar 2.24	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020	II-78
Gambar 4.1	Pertumbuhan ekonomi di Maluku Tahun 2020	IV-39
Gambar 4.2	Persentase Capaian Indikator TPB Terhadap Target Nasional	IV-45
Gambar 4.3	Persentase Capaian Indikator TPB Berdasarkan Pilar Di Kabupaten Buru Selatan	IV-46
Gambar 5.1	Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026 Dengan Misi RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024	V-7
Gambar 6.1	Peningkatan daya saing ekonomi daerah	VI-16
Gambar 6.2	Penanggulangan Kemiskinan	VI-22
Gambar 6.3	Pembangunan kualitas hidup dan daya saing SDM	VI-26
Gambar 6.4	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	VI-30
Gambar 6.5	Sarana prasarana wilayah	VI-33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Buru Selatan yang telah memasuki usia ke-13 tahun sesuai dengan pembentukannya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008, hasil pemekaran dari Kabupaten Buru, dan telah melaksanakan pembangunan sebagai daerah otonom. Sebagai kabupaten yang terbilang masih muda, namun telah banyak capaian kemajuan hasil pembangunan dalam dua periode kepemimpinan Bupati Buru Selatan (2011-2016) dan (2016-2021).

Berbagai capaian pembangunan dalam dua periode ini tercermin melalui beberapa indikator ekonomi dan sosial melalui data statistik Kabupaten Buru dalam angka, maupun Statistik Provinsi Maluku antara lain: (1) Secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru Selatan mengalami fluktuasi, namun rata-rata mengalami pertumbuhan diatas Provinsi dan Nasional, di tahun 2019 sebesar 5,88 persen; dan mengalami kontraksi *year on year* (-0,01) pada tahun 2020 akibat pandemik covid-19, namun kontraksi masih di bawah nilai Provinsi (-3,42) dan Nasional (-2,19); (2) Pendapatan Perkapita masyarakat mengalami trend yang meningkat setiap tahun sejak tahun 2016 (18,44) meningkat menjadi (22,20) di tahun 2019, namun pada tahun 2020 sebesar (22,10) atau mengalami penurunan sebesar 0,1 persen dibandingkan dengan tahun 2019. Secara umum lebih dipengaruhi oleh dampak covid-19; (3) Tingkat kemiskinan mengalami penurunan, walaupun mengalami fluktuasi setiap tahun akan tetapi, tercatat merupakan angka kemiskinan terendah kedua di Maluku setelah Kota Ambon tahun 2018, dan pada tahun 2020 juga merupakan kantong kemiskinan yang paling terendah urutan kedua dari 11 kabupaten kota di Maluku; sebesar 15,75 persen; (4) Kemajuan pada pencapaian Indeks Desa Membangun dengan status desa sangat tertinggal mengalami penurunan yang sangat tinggi di tahun 2020 tersisa 15 desa dengan status sangat tertinggal di tahun 2020, sedangkan status desa berkembang mengalami peningkatan sebanyak 17 desa tahun 2017 menjadi 22 desa di tahun 2020; (5) Tingkat

pengangguran terbuka mengalami penurunan dan paling terendah di Maluku, walaupun pada tahun 2020 mengalami fluktuasi akibat pandemic covid-19 namun tercatat Kabupaten Buru Selatan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka paling terendah di Provinsi Maluku sebesar 2,31 persen; (6) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan setiap tahun, dan dalam keadaan pandemic covid-19 di tahun 2020, justru IPM mengalami peningkatan sebesar 0,27 poin dari 64,42 di tahun 2019 menjadi 64,69 persen di tahun 2020, dengan persentasi kenaikan masih lebih tinggi dari persentasi kenaikan di Provinsi Maluku; (7) Tingkat inflasi terkendali dan mengalami penurunan setiap tahun dengan target pencapaian penurunan inflasi di Kabupaten Buru Selatan melampaui target yang ditetapkan di Provinsi dan Nasional. Pencapaian kemajuan juga tercapai pembangunan infrstruktur transportasi jalan maupun pembebasan lahan bagi perluasan Bandara Udara Namrole, maupun pada pencapaian infrastruktur lainnya. Tentunya pembangunan yang telah tercapai selama periode 2011-2021 menjadi acuan dalam melakukan tahapan perencanaan untuk menguatkan, meningkatkan, merencanakan pembangunan yang menjadi kebutuhan selama periode lima tahun ke depan (2021-2026).

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah, disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Untuk keberlanjutan pembangunan sebagai wujud proses demokrasi yang telah menghasilkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Buru Selatan masa bakti Tahun 2021-2026, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan berkewajiban menyusun dan menetapkan RPJMD dengan peraturan daerah sebagai pedoman pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam menyusun RPJMD Kabupaten Buru Selatan, perlu mempertimbangkan kondisi global, nasional, regional dan lokal. Kondisi global yang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pembangunan Kabupaten Buru Selatan kedepan antara

lain, perekonomian global yang sulit diprediksi karena pengaruh COVID-19 yang berdampak pada perkembangan industri pariwisata. Pergeseran peran ekonomi Kawasan Asia Pasifik dalam perekonomian global, stabilitas politik global yang dinamis, keterbukaan pasar ASEAN dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat. Selain itu, tantangan dan peluang secara nasional yang harus diperhatikan antara lain kebhinekaan bangsa Indonesia dari segi geografis, etnis, ras, budaya, agama, dan adanya bonus demografi, serta kebijakan pembangunan nasional di Buru Selatan.

Untuk mendukung pembangunan Provinsi Maluku dan Nasional maka penyusunan RPJMD Buru Selatan harus memperhatikan dan menindaklanjuti kebijakan Provinsi Maluku dan Nasional yang termuat dalam RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 dan RPJMN Tahun 2020-2024, memperhatikan kebijakan-kebijakan strategis melalui dokumen perencanaan spasial yakni: rencana struktur ruang, rencana pola ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan pembangunan kewilayahan, program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, penentuan program/kegiatan dan pengalokasian anggaran dengan prinsip *money follow programme priority*, serta pendekatan paradigma *Holistik, Tematik, Integratif*, dan Spasial (HTIS), serta untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar kebijakan pembangunan lima tahun ke depan, maka perumusan RPJMD telah teintegrasi dan menindaklanjuti rekomendasi hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan kebijakan umum pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dengan demikian kebijakan yang dirumuskan dalam RPJMD ini diharapkan benar-benar dapat meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan pada saat yang sama lebih terjaminnya keberlanjutan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buru Selatan.

Pembangunan Kabupaten Buru Selatan tahun 2021-2026 merupakan tahap pembangunan jangka menengah keempat pada periode RPJPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009-2029 dengan visi pembangunan yang akan dicapai adalah

“Meningkatkan Kemandirian Buru Selatan Secara Berkelanjutan Sebagai Kabupaten Yang Rukun, Adil, Dan Sejahtera Berbasis Agro-Marine”.

Rencana Pembangunan Kabupaten Buru Selatan tahun 2021-2026, diarahkan pada peningkatan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang untuk mewujudkan Kabupaten Buru Selatan sebagai Kabupaten Agro-marine Yang Maju, Sejahtera dan Berkeadilan, dengan menekankan peningkatan daya saing berbasis agroindustri dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berlandaskan pada keunggulan sumberdaya manusia yang berkualitas, pelayanan dasar yang makin luas, fasilitas infrastruktur wilayah yang makin meningkat; kondusivitas wilayah yang makin mantap; serta kemampuan ilmu dan teknologi yang makin meningkat.

Upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Buru Selatan dan menyikapi bonus demografi yang saat ini sedang terjadi, maka kebijakan pembangunan lima tahun kedepan akan lebih menempatkan manusia sebagai fokus pembangunan. Sumberdaya manusia tidak saja dipandang sebagai objek pembangunan, namun menempatkannya dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan. Pengembangan sumberdaya manusia dilakukan melalui pemberdayaan (*empowering*), peningkatan kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensi yang dimiliki dan menumbuhkan kesadaran diri (*self hood*). Sumberdaya manusia sebagai bagian dari masyarakat akan mampu memandang secara kritis situasi sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang melingkupinya. Dengan demikian diharapkan sumberdaya manusia Buru Selatan akan menjadi sumber dinamika dan motor penggerak pembangunan dalam upaya mewujudkan kemandirian, kemajuan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan pembangunan daerah dan memenuhi ketentuan peraturan perundangan, dengan memaksimalkan peran seluruh stakeholders melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026 selanjutnya akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, dan dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) selama periode RPJMD. Untuk itu, dasar

hukum penyusunan RPJMD mengacu pada ketentuan perundang undangan yang telah ditetapkan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan rancangan RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026 dilakukan dengan memperhatikan regulasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang tata Ruang Nasional (Tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4725);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Di Provinsi Maluku (Tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4878);
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5490);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3078 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019. Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 29 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru Selatan tahun 2009-2029;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009-2029;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2012 Nomor 30);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan tahun 2021;
18. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 03 tahun 2021 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan tahun 2021.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, RPJMD disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi, dan program kepala daerah. Oleh karenanya, penyusunan RPJMD harus selaras dan bersinergi dengan dokumen perencanaan lainnya. Penyusunan RPJMD Kabupaten Buru Selatan berpedoman pada RPJPN, RPJMN, dan RPJPD serta memperhatikan RPJMD provinsi dan RPJMD kabupaten/kota sekitar. Selanjutnya RPJMD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-Pembangunan Daerah) sesuai dengan tugas dan fungsinya dan juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD.

Sinergitas dan hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dijelaskan sebagai berikut:

1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Buru Selatan dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Maluku

Penyusunan RPJMD Kabupaten Buru Selatan 2021-2026, memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Maluku sebagaimana diamanatkan dalam Undang – undang Nomor 25 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. RPJMN 2015 – 2019 dan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 dilakukan melalui penyelarasan

pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dengan arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional/ provinsi dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah.

1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Buru Selatan dengan RPJPD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

RPJPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 – 2029 yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan merupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD. Penyusunan rancangan RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021 – 2026 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap ketiga RPJPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 – 2029.

RPJMD menjadi pedoman bagi penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Renstra perangkat daerah merupakan rencana kerja lima tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana termuat dalam RPJMD serta penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten. Selanjutnya, RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja. Dalam pelaksanaan setiap tahunnya, RPJMD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun perencanaan.

1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Buru Selatan dengan RTRW Kabupaten Buru Selatan

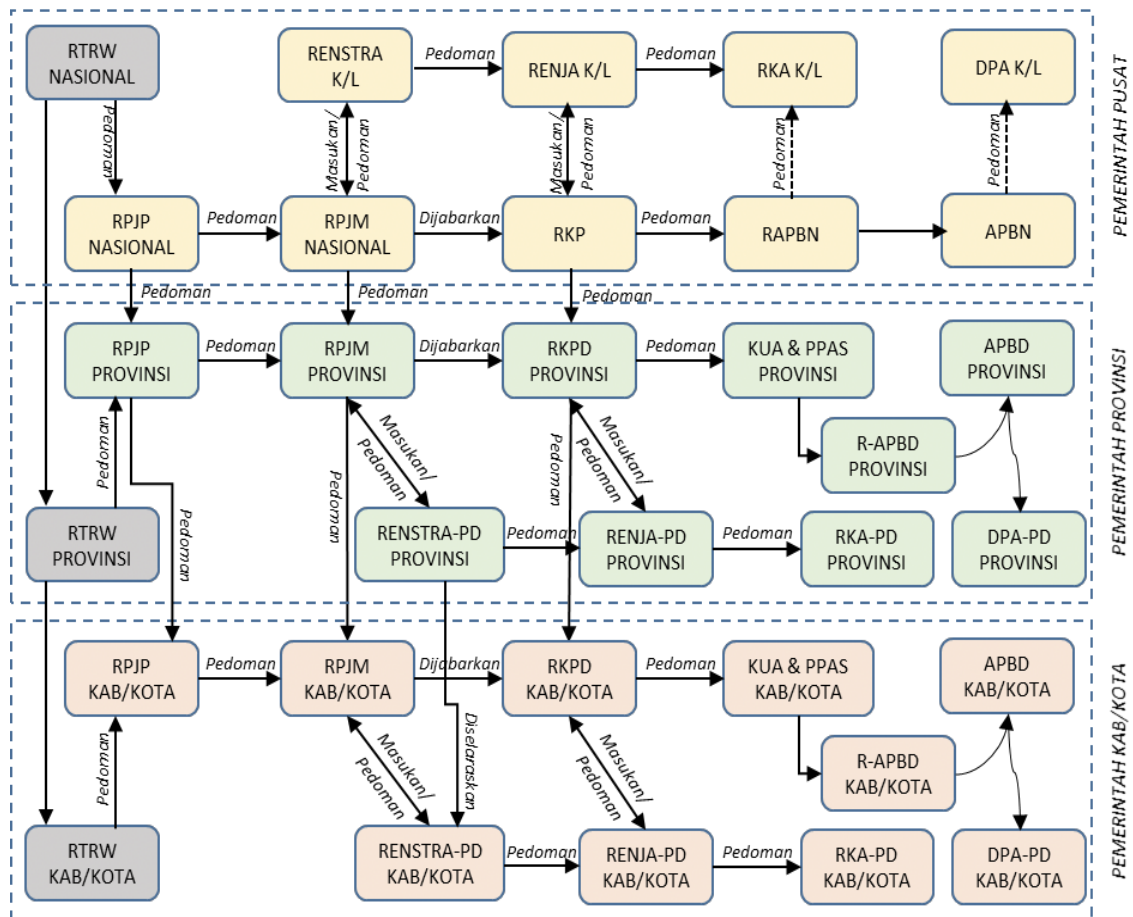
Penyusunan RPJMD Kabupaten Buru Selatan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2009 – 2029 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 29 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009-2029. RTRW dipedomani dengan maksud untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah

Kabupaten Buru Selatan dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang.

1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Buru Selatan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Buru Selatan

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan program. KLHS merupakan kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah.

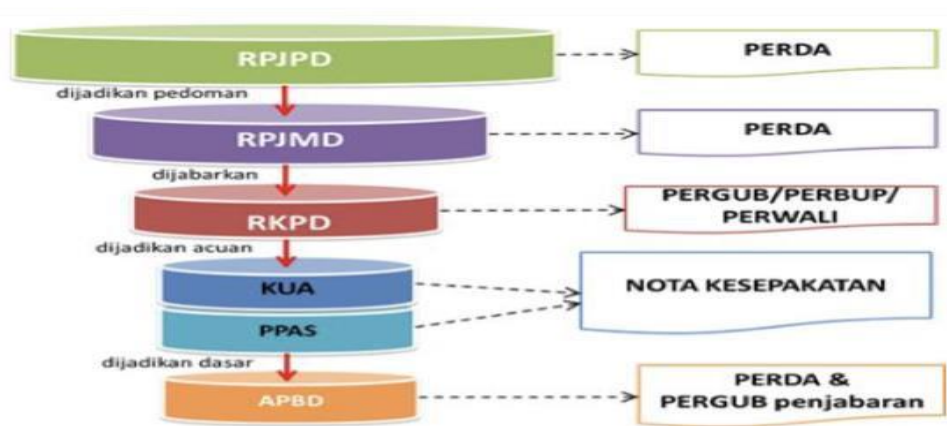
Sinergitas dan hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya digambarkan sebagai berikut :



Sumber: <https://www.Bappenas.go.id>

Gambar. 1.1. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan

Rencana pembangunan tidak akan berjalan jika tidak dianggarkan dalam rencana anggaran. Keterkaitan dokumen rencana pembangunan dan anggaran dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: <https://www.Bappenas.go.id> 2020

Gambar 1.2. Bagan Alur Keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Bagan alur di atas menunjukkan bagaimana dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang saling terkait hingga menjadi dasar dalam penyusunan dokumen anggaran. RPJPD yang ditetapkan dengan peraturan daerah, dilaksanakan melalui RPJMD yang juga ditetapkan dengan peraturan daerah, dan selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan melalui RKPD setiap tahun yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Untuk menjembatani penyusunan APBD yang akan ditetapkan dengan peraturan daerah, maka disepakati terlebih dahulu KUA dan PPAS yang disusun dengan berpedoman pada RKPD. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa RPJMD sebagai dokumen perencanaan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah, sejajar dan saling berhubungan dengan APBD yang juga ditetapkan dengan peraturan daerah. Sehingga, evaluasi R-APBD merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk menguji kesesuaian R-APBD dengan KUA dan PPAS, RKPD dan RPJMD, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.

Tabel 1.1. Matriks Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

No	RPJMD Tahap IV (RPJPD Kab. Buru Selatan)	Visi dan Misi Bupati – Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021- 2026	RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024		RPJMN Nasional 2020 – 2024	
			Visi Misi RPJMD Provinsi	Program Unggulan	Visi Misi RPJMN	Agenda Pembangunan
VISI	“Terwujudnya Buru Selatan Sebagai Kabupaten Agrobisnis Yang Maju, Sejahtera dan Berkeadilan”	VISI : “Meningkatkan Kemandirian Buru Selatan Secara Berkelanjutan Sebagai Kabupaten Yang Rukun, Adil, Dan Sejahtera Berkas Agro- Marine”. MISI : 1. Memperkuat Sektor Perhubungan untuk peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat. 2. Pembentukan pusat pengembangan	VISI : “ Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan ” MISI : 1. Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani 2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau 3. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	1. Rapat koordinasi bulanan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan para Bupati/ Walikota 2. Koordinasi provinsi dan kabupaten /kota berbasis <i>e goverment</i> 3. Integrasi <i>e planning</i> dan <i>e budgeting</i> 4. Pertemuan rutin bulanan dengan para pemangku kepentingan (<i>cofee morning</i>) 5. Penyelenggaraan pendidikan berbasis teknologi informasi 6. Program sarjana mengajar di daerah tertinggal, terdepan dan terluar 7. Pemberdayaan agen	VISI : “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” MISI : 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan 5. Kemajuan budaya yang	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan

		produksi perikanan dan pertanian berbasis potensi unggulan wilayah 3. Penguatan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan pusat pengembangan ekonomi kecamatan dengan mempertimbangkan geostrategis, geopolitik dan potensi sumberdaya wilayah. 4. Pengembangan sektor pendidikan berbasis potensi/komoditas unggulan daerah	4. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau 5. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata 6. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi	perdamaian berbasis agama dan budaya lokal 8. Bea siswa bagi mahasiswa kurang mampu dan berprestasi serta dosen 9. Revitalisasi BUMD 10. Satu produk satu desa 11. Gerakan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal wilayah 12. Revitalisasi tanaman rempah (pala dan cengkih) 13. Peningkatan daya saing produk olahan perikanan 14. Tata niaga produk pertanian dan perikanan (sistem resi gudang) 15. Banda sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata 16. Festival budaya tahunan	mencerminkan kepribadian bangsa, Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan	Ekonomi dan Pelayanan Dasar 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
--	--	--	---	--	---	--

		5. Perluasan akses kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat 6. Penguatan adat, budaya, dan nilai-nilai kearifan lokal sebagai modal sosial untuk mendorong akselerasi pembangunan pariwisata daerah 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, professional, dan bersih dari KKN		17. Pekan pemuda kreatif 18. Pekan olah raga unggulan pemuda		
--	--	---	--	--	--	--

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun (2021-2026).

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buru Selatan adalah untuk menjamin keberlanjutan Pembangunan Daerah Jangka Panjang serta menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun dalam rangka mewujudkan cita-cita masyarakat Buru Selatan serta visi dan misi Pemerintah Kabupaten Buru Selatan periode 2021-2026.

1.4.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai berikut:

- 1) Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah serta kebijakan dan strategi pembangunan daerah tahun 2021-2026;
- 2) Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2026;
- 3) Sebagai tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan tahun 2021 sampai dengan tahun 2026;
- 4) Sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis (Renstra) tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, termasuk di dalam menentukan program-program prioritas;
- 5) Sebagai instrumen untuk menggunakan seluruh perangkat daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
- 6) Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam

- mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan;
- 7) Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan menggunakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh perangkat daerah dalam mengimplementasikan kebijakan, program, dan kegiatan operasional tahunan;
 - 8) Sebagai instrumen untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian.

1.5. Sistematika Penulisan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Buru Selatan 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

2. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab dua memuat gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Buru Selatan beberapa tahun terakhir yang disajikan dalam empat aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

3. BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat kondisi dan kinerja pengelolaan keuangan daerah beberapa tahun terakhir sebagai dasar untuk merancang kerangka pendanaan untuk membiayai pembangunan 5 (lima) tahun ke depan.

4. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab empat memuat rangkaian proses yang menghasilkan isu-isu strategis pembangunan daerah. Tahapan dimulai dengan perumusan permasalahan pembangunan, menelaah dokumen perencanaan lainnya maupun kebijakan isu tingkat regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam kurun waktu jangka menengah.

5. BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat rumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih. Selanjutnya, misi dijabarkan ke tujuan dan sasaran serta indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

6. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab enam menyajikan rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Selanjutnya, ditetapkan program pembangunan daerah yang akan menunjang pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan strategi yang telah dipilih.

7. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun pembangunan Kabupaten Buru Selatan yang disertai dengan pendanaan bersifat indikatif.

8. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disajikan beserta target setiap tahun sampai tahun 2026.

9. BAB IX PENUTUP

Bab Sembilan penutup, memuat hal – hal yang perlu untuk dilaksanakan dan diperhatikan dalam pelaksanaan RPJMD secara terpadu dan berkesinambungan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

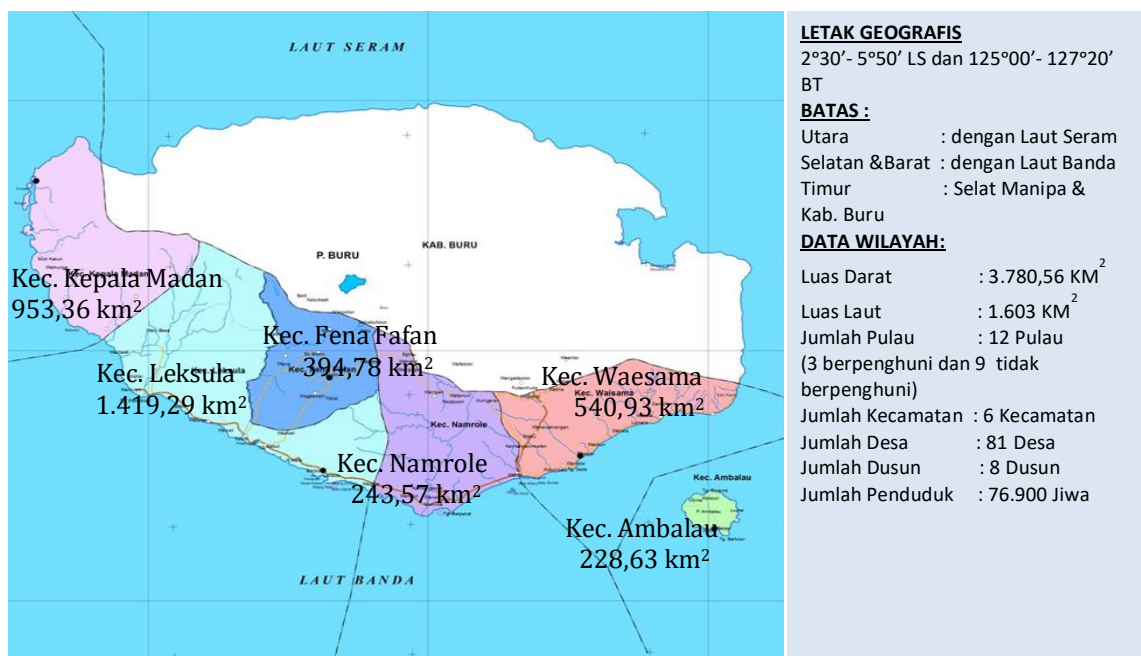
2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Wilayah Kabupaten Buru Selatan dan Wilayah Administrasi

Gambaran umum kondisi daerah sangat penting sebagai dasar dalam pengembangan suatu wilayah. Aspek geografi dan demografi merupakan dasar utama dalam melakukan perencanaan pembangunan yaitu adanya identifikasi potensi awal suatu wilayah, untuk mengetahui aspek geografi dan demografi dalam menyusun perencanaan untuk mencapai hasil pembangunan yang maksimal pada suatu wilayah.

2.1.1.1. Letak dan Kondisi Geografis

Secara Astronomis, Kabupaten Buru Selatan terletak antara 2°30' Lintang Selatan dan 5°50' Lintang Selatan dan antara 125°00' Bujur Timur dan 127°00' Bujur Timur (Gambar 2.1) dan terletak di jalur utama lalu lintas Laut (Tol Laut) dan Alur Laut Kepulauan Indonesia III (ALKI III). seperti terlihat pada Gambar 2.2.



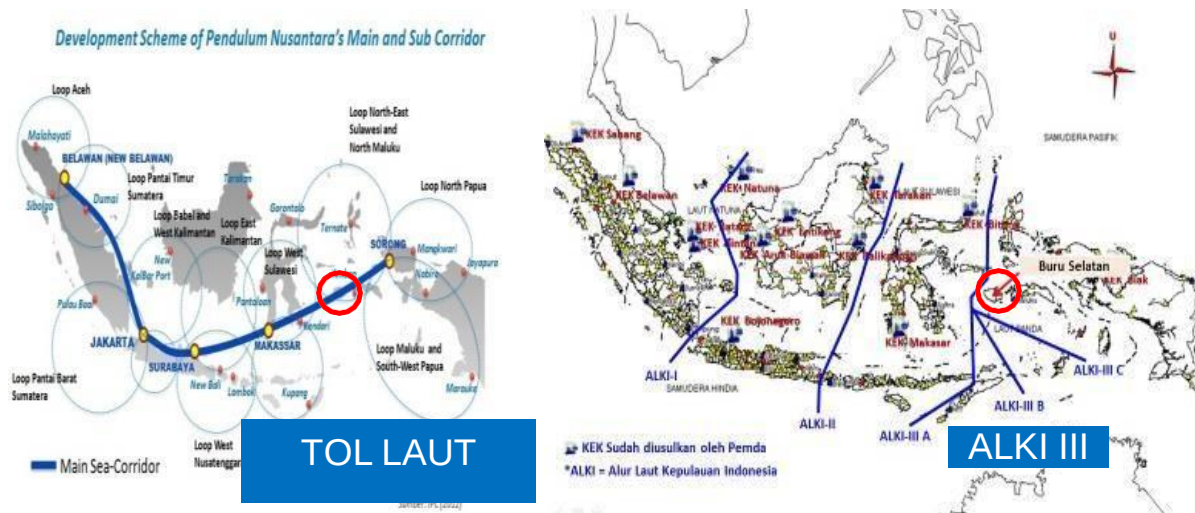
Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Buru selatan

Gambar. 2.1. Peta Kabupaten Buru Selatan.

Secara geografis Kabupaten Buru Selatan di Sebelah Utara dibatasi oleh Laut Seram, Laut Banda di sebelah Selatan dan Barat, serta Selat Manipa dan Kabupaten Buru di sebelah Timur Kabupaten Buru Selatan memiliki luas sekitar 3.780,56 km² dan wilayahnya meliputi sebagian dari Pulau Buru dan pulau-pulau lain di sekitarnya, baik yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni.

Kondisi Geostrategis dan Geopolitik Kabupaten Buru Selatan dalam peran strategisnya secara nasional dan internasional berada pada posisi strategis jalur lintas alur kepulauan Indonesia ALKI III. UNCLOS 1982 ratifikasi undang-undang 17 tahun 1985 memberikan penguatan peran terhadap posisi jalur ALKI III dimana Kabupaten Buru Selatan berada pada alur lintas kapal internasional yang bila dikembangkan akan dapat memanfaatkan peluang ini sebagai potensi ekonomi yang akan mendorong pertumbuhan kawasan di Indonesia timur.

Untuk mendorong aktifitas arus barang dari pusat produksi di Kabupaten Buru Selatan jalur transportasi nasional yang dikembangkan dengan memperhitungkan kemampuan dan sistem tata transportasi wilayah yang mengkoneksikan wilayah Buru Selatan dengan pasar di wilayah Sulawesi dan Jawa telah dikembangkan Tol Laut sebagai stabilisator harga untuk memberikan nilai ekonomi terhadap setiap kebutuhan konsumsi dan hasil produksi masyarakat yang dijual ke pasar. Jalur laut ALKI III dan tol laut dapat dilihat pada Gambar berikut.



Sumber: Dok. Rencana Pengembangan KEK Buru selatan

Gambar. 2.2. Peta Tol Laut dan ALKI III Kabupaten Buru Selatan

2.1.1.2. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Buru Selatan merupakan salah satu wilayah yang strategis di Provinsi Maluku. Luas wilayah Kabupaten Buru Selatan 3,780,56 Km² terbagi menjadi 6 wilayah administrasi kecamatan. Secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 2.1.

Adapun batas administrasi wilayah Kabupaten Buru Selatan sebagai berikut.

- Sebelah Utara : Kabupaten Buru dan Laut Seram
- Sebelah Timur : Kabupaten Buru dan Selat Manipa
- Sebelah Selatan : Laut Banda
- Sebelah Barat : Laut Banda

Tabel. 2.1. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Buru Selatan

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km ²)	Desa
1	Leksula	Leksula	1.419,29	19
2	Kepala Madan	Biloro	953,36	16
3	Waesama	Wamsisi	540,93	11
4	Namrole	Elfule	243,57	17
5	Ambalau	Siwar	228,63	7
6	Fenafafan	Waekatin	394,78	11
Total			3,780,56	81

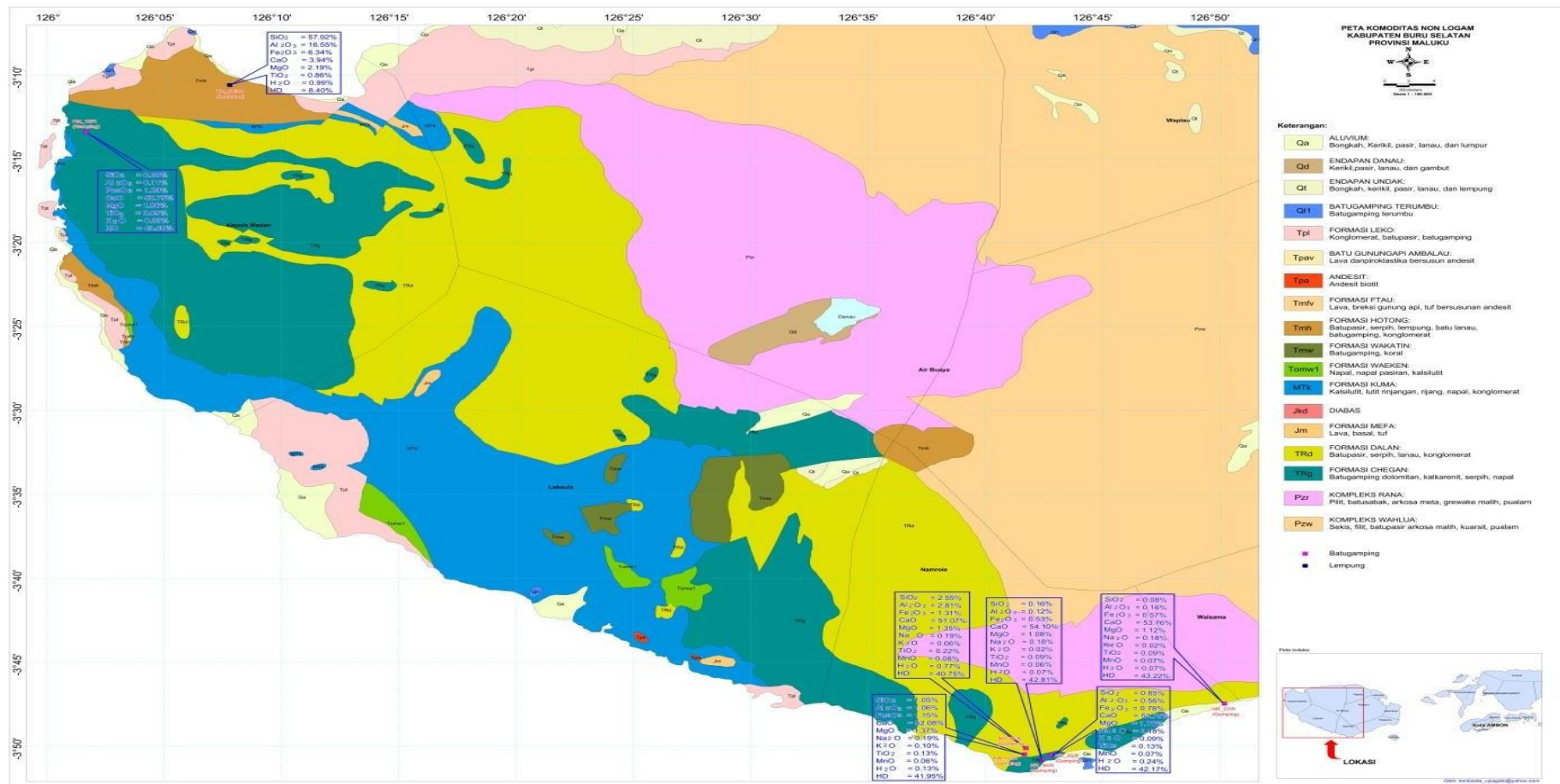
Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Buru Selatan, 2021

Ditinjau dari luasan kecamatan di Kabupaten Buru Selatan, maka Kecamatan terluas yaitu kecamatan Leksula (1.419,29 km² atau 37,54 persen), Kecamatan Kepala Madan (953,36 km² atau 25,52 persen), Kecamatan Waesama (540,93 km² atau 14,31 persen), Kecamatan Fena Fafan (394,78 km² atau 10,44 persen), Kecamatan Namrole (243,57 km² atau 6,44 persen) dan yang terkecil adalah kecamatan Ambalau (228,63 km² atau 6,05 persen).

2.1.1.3. Karakteristik Geologi

Kabupaten Buru Selatan memiliki karakteristik geologi yang terdiri dari beberapa jenis batuan dengan penyebaran hampir merata di setiap kecamatan. Hal ini dipengaruhi oleh klasifikasi umur pulau/kepulauan yang terbentuk selama jutaan tahun.

Berdasarkan dokumen survey logam non logam Kabupaten Buru Selatan, potensi pertambangan yang dikelola dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat hanyalah bahan tambang galian golongan C seperti: batu gamping yang banyak terdapat di Kecamatan Namrole, Leksula dan Kepala Madan; Batu Pasir, Serpih, lanau dan konglomerat lebih dominan terdapat pada Kecamatan Namrole, Fenafafan dan Kepala Madan. Komposisi galian C ini dimanfaatkan untuk pembuatan batu bata. Pasir dan batu kali yang banyak terdapat di sungai Waetina, sungai Waekolo, dan Sungai-sungai besar lain yang berada pada Kecamatan Fenafafan dan Kepala Madan (Gambar 2.3)



Sumber : Bapelitbang Kabupaten Buru Selatan, 2019

Gambar 2.3. Peta Kawasan Potensi Tambang Logam non Logam Kabupaten Buru Selatan

1) Mineral Logam

Bahan galian yang ada di Kabupaten Buru Selatan menurut hasil penelitian yang ada dan belum dikelola secara maksimal, seperti: bahan tambang galian B yaitu batuan lava andesit yang mengandung bijih logam dasar dan logam mulia dan bahan tambang galian C yaitu kaolin, batuan beku, tras dan belerang.

1.1. Lava Basal

Lava basa (basal) sebagai *sources rock* merupakan satuan batuan dari anggota batuan gunung api Lompobattang (Qlvb). Secara umum bahwa penyebaran logam dasar diperkirakan mengikuti aliran lava basal yang sebarannya berada di Kabupaten Buru Selatan bagian utara yang berbatasan dengan Kabupaten Buru dan Kecamatan Ambalau.

2) Batuan

2.1. Batugamping

Batugamping merupakan batuan sedimen dengan mineral penyusun utamanya terdiri dari kalsit, umumnya terbentuk dalam lingkungan air laut. Batugamping di daerah Buru Selatan lebih banyak tersebar pada wilayah kecamatan Namrole, Leksula, Fenafafan dan Kepala Madan. Kenampakan secara megaskopis merupakan batugamping terumbu, sehingga banyak mengandung mineral dolomite (dolomitan), sedangkan secara mikroskopis sebagian besar menunjukkan tekstur bioklastik, mengandung fosil foaminifera besar mineral kalsit dan dolomite yang tinggi.

2. 2. Andesit dan Basal

Lokasi sebaran dan sumberdaya Andesit dan Basal meskipun kecil dapat dijumpai tersingkap di daerah bagian pesisir Kecamatan Leksula. Kegunaan bahan galian ini umumnya dimanfaatkan untuk keperluan bahan konstruksi, yaitu sebagai pondasi tetapi dengan teknologi pemotongan wire saw dan teknik pemolesan yang semakin berkembang menjadi andesit dan basal dapat dimanfaatkan sebagai batu temple baik interior maupun eksterior.

2.3. Batu Lempung

Endapan lempung di kabupaten Buru Selatan secara genetic terbentuk dari hasil pelapukan satuan batu pasir, dalam bentuk residu (*Residualsoil*).

Penyebaran endapan lempung/tanah liat di daerah ini, menyebar di daerah Kecamatan Kepala Madan Desa Waehotong dan sekitarnya.

2.4. Pasir Sungai

Endapan pasir sungai di daerah ini, berdasarkan tipe endapannya, merupakan tipe endapan sedimen aktif dan sedimen dataran banjir. Komponennya terutama terdiri dari hasil rombakan batuan Gunung. Penyebaran endapan dijumpai sungai waetina yang melewati Dusun Kawalale dan desa Namrinat Kecamatan Namrole.

2.5. Batu Sungai

Endapan batu sungai di daerah ini berdasarkan type endapannya terbagi atas dua jenis antara lain: Endapan batu sungai sekarang, yaitu endapan sedimen aktif dan sedimen dataran banjir. Penyebarannya dijumpai di Sungai Waetina, sungai Waelua, sungai Waemala, dan sungai-sungai besar lainnya di Kabupaten Buru Selatan.

2.1.1.4. Klimatologi

Iklim di Kabupaten Buru Selatan dipengaruhi oleh iklim tropis dan iklim musim yang disebabkan oleh kondisi Kabupaten Buru selatan yang lebih dominan daratan, beberapa pulau kecil dan laut Banda.

Berdasarkan data klimatologi di stasiun meteorologi Pulau Buru pada tahun 2020 menunjukkan bahwa rata-rata temperatur tertinggi tercatat di Kabupaten Buru Selatan yaitu sebesar 29,0°C pada Bulan November, sementara terendah pada Bulan Juni-Juli yaitu sebesar 27,3°C. Rata-rata jumlah hari hujan terbanyak pada Bulan Juni yaitu sebanyak 23 hari dan yang terendah pada Bulan Oktober yaitu sebanyak 9 hari. Kondisi curah hujan, tercatat tertinggi pada Bulan Februari sebesar 325,9 mm dan terendah pada Bulan Oktober sebesar 27,9 mm. Secara umum, tekanan udara di Kabupaten Buru Selatan selama tahun 2018 bervariasi berkisar antara 1011,2 mb sampai dengan 1011,8 mb. Sementara kecepatan angin, tertinggi terjadi pada Bulan Juli sebesar 7,6 knot dan terendah sebesar 5knot pada Bulan Maret dan April.

Tabel. 2.2. Data Klimatologi Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020

Bulan	Rata-rata (Average)					
	Suhu Udara/Temperatur (°C)	Hari Hujan (Hari)	Curah Hujan (mm)	Tekanan Udara (mb)	Penyinaran Matahari (%)	Kecepatan Angin (Knot)
Januari	28,3	13	173,5	1010,8	64,8	5,7
Februari	27,8	19	325,9	1011,8	63,1	5,7
Maret	27,7	16	230,1	1011,4	54,9	5
April	28,1	16	99,2	1011,6	69,8	5
Mei	28,5	11	108,0	1011,6	71,7	5,6
Juni	27,3	23	183,2	1011,4	54,6	6,2
Juli	27,3	16	26,3	1010,8	63,7	7,6
Agustus	27,5	12	88,3	11011,7	65,1	7,0
September	27,7	17	55,3	1011,2	57,0	6,3
Oktober	28,8	9	27,9	1010,6	76,5	5,6
November	29,0	12	124,8	1010,5	74,3	5,3
Desember	27,9	17	193,3	1009,3	56,8	5,2

Sumber : Buru Selatan Dalam Angka 2021

2.1.1.5. Penggunaan Lahan

Kabupaten Buru Selatan memiliki lima dataran dengan luas sekitar 5.750 Ha. Luas dataran Waekatin 1.500 Ha, dataran Waekanu 1.250 Ha, dataran Waemala 1.250 Ha, dataran lembah Rana 1.250 Ha, dataran Waelo 500 Ha. memiliki 12 sungai yang merupakan anak sungai dari sungai besar di Kabupaten Buru Selatan yaitu Waemala, Waetina dan Waekuma. Kabupaten Buru Selatan memiliki sebuah gunung yaitu gunung Kapala Madan yang terletak di kecamatan Kapala Madan dengan ketinggian mencapai 2.429 meter dari permukaan laut.

Secara umum jenis penggunaan lahan di Kabupaten Buru Selatan terdiri dari lahan terbangun dan lahan tidak terbangun. Lahan terbangun meliputi guna lahan perumahan, perdagangan, jasa, perkantoran, pendidikan, peribadatan dan sarana permukiman lainnya. Sedangkan lahan tidak terbangun meliputi guna lahan pertanian, kehutanan, semak/belukar, lahan kosong dan lahan terbuka lainnya. Luas lahan terbangun Kabupaten Buru Selatan adalah 1.159,50 Ha dan lahan tidak terbangun seluas 504.840,50 Ha (total lahan di luar pemukiman dan sarana transportasi udara/bandara).

Tabel 2.3. Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Buru Selatan (Ha)

No	Penggunaan Lahan	Kecamatan						Total
		Kepala Madan	Leksula	Fena Fafan	Namrole	Waesama	Ambalau	
1	Hutan Lahan Kering Primer	14,462.46	18,807.11	278.84	1,760.76	2,173.69	-	37,482.86
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	65,246.98	94,963.11	12,817.65	54,132.22	38,375.29	-	265,535.25
3	Hutan Mangrove Sekunder	259.6	122.74	-	315.38	1,098.92	-	1,796.64
4	Pertanian Lahan Kering	14,208.17	7,358.21	22.9	1,951.26	1,400.20	6,532.54	31,473.28
5	Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak	5,453.76	6,456.63	-	3,102.34	3,087.29	6,527.01	24,627.03
6	Savanna / Padang Rumput	2,348.28	14,357.08	3,939.29	227.24	-	-	20,871.89
7	Semak Belukar	24,873.73	47,446.46	11,731.54	10,698.80	6,514.61	16,660.76	117,925.90
8	Semak Belukar Rawa	-	-	36.77	-	-	572.34	609.11
9	Tanah Terbuka	549.86	64.85	3,773.00	4.6	-	-	4,392.31
10	Rawa	116.66	-	-	-	-	-	116.66
11	Danau	-	-	-	9.57	-	-	9.57
12	Permukiman	80.5	384.81	-	195.52	189.01	307.35	1,157.19
13	Sarana Transprtasi udara	-	-	-	2.31	-	-	2.31
Jumlah		127,600.00	189,961.00	32,599.99	72,400.00	52,839.01	30,600.00	506,000.00

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009-2029

Kondisi Fisiografi dan Topografi Wilayah Buru Selatan dikelompokkan berdasarkan pendekatan fisiografi (makro relief), yaitu Dataran, Pantai, Perbukitan dan Pegunungan termasuk di dalamnya Dataran Tinggi (plateau/Pedmont) dengan kelerengan yang bervariasi. Kabupaten Buru Selatan didominasi oleh kawasan pegunungan dengan elevasi rendah, berlereng agak curam dengan kemiringan lereng lebih besar dari 40 %, yang meliputi luas 15,43% dari keseluruhan luas Daerah ini. Jenis kelerengan lain yang mendominasi kawasan ini adalah elevasi rendah berlereng bergelombang dan agak curam serta elevasi sedang berlereng bergelombang dan agak curam, dengan penyebaran lereng di bagian Utara dan Barat rata-rata berlereng curam terutama di sekitar Gunung Kepala Madan.

Secara geomorfologis, bentangan alam di Kabupaten Buru Selatan dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) bentangan alam, yaitu bentang alam asal vulkanik yang dicirikan dengan adanya topografi bergunung-gunung dan lereng terjal, bentangalam asal denudasional yang membentuk rangkaian pegunungan dan perbukitan berbentuk kubah, bentangalam asal solusial dan bentangan alam asal

fluvial yang cenderung membentuk topografi datar pada lembah-lembah sungai.

Tabel. 2.4. Rencana Pola Ruang Kabupaten Buru Selatan (Ha)

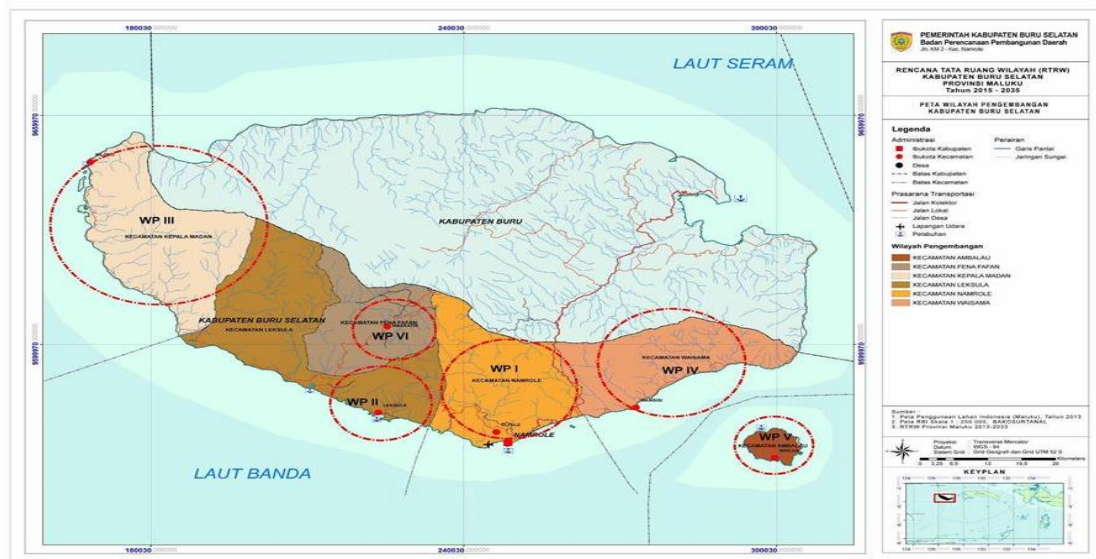
No	Pola Ruang	Luas Pola Ruang per Kecamatan (ha)						Total
		Kepala Madan	Leksula	Fena Fafan	Namrole	Waesama	Ambalau	
A	Lindung							138,469.96
1	Hutan Lindung	29,517.31	51,190.66	3,623.74	6,063.33	9,760.92	10,542.17	110,698.14
2	Perlindungan Setempat							24,398.49
A	Sempadan Pantai	1,449.73	1,391.19	-	459.31	451.33	1,648.02	5,399.60
B	Sempadan Sungai	4,626.18	7,503.30	1,085.85	2,653.71	2,437.13	692.72	18,998.89
3	Suaka Alam	2,352.63	1,020.70	-	-	-	-	3,373.33
B	Budidaya							367,530.05
1	Hutan Produksi							317,349.88
A	HPT	53,450.32	31.94	2,215.60	28,717.59	14,506.86	-	98,922.30
B	HP	8,934.68	47,307.40	3,075.38	20,771.98	22,487.46	-	102,576.91
C	HPK	25,245.49	61,097.24	3,181.91	10,121.54	1,506.58	14,697.91	115,850.67
2	Pertanian							34,576.53
A	Lahan basah	842.32	1,588.57	-	-	-	-	2,430.89
B	Lahan kering	-	8,017.18	18,613.63	2,245.77	-	1,908.60	30,785.18
C	LP2B	-	-	364.71	-	995.75	-	1,360.46
3	Perkebunan	-	-	-	-	-	347.09	347.09
4	Industri							9,033.20
A	Industri	-	76.30	-	-	57.06	-	133.36
B	Industri KEK	-	8,507.48	392.37	-	-	-	8,899.84
5	Pariwisata	230.55	-	-	-	-	-	230.55
6	Permukiman							5,992.80
A	Perkotaan	340.82	1,845.11	-	1,137.65	399.22	-	3,722.80
B	Pedesaan	485.79	383.94	46.82	229.12	114.41	763.49	2,023.56
C	Transmigrasi	124.17	-	-	-	122.28	-	246.44
Jumlah		127,600.00	189,961.00	32,600.00	72,400.00	52,839.00	30,600.00	506,000.00

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009-2029

Wilayah Kabupaten Buru Selatan sesuai hasil analisis potensi dan daya dukung wilayah dan pemanfaatan ruang wilayah pada dasarnya membagi habis wilayah atas dua jenis pemanfaatan, yaitu **Kawasan Budidaya** dan **Kawasan Lindung**. Kedua kawasan tersebut diarahkan untuk dimanfaatkan sesuai fungsi, karakteristik, potensi dan daya dukung wilayahnya. Rencana pola pemanfaatan ruang untuk wilayah Kabupaten Buru Selatan yang terbagi atas dua kawasan (lindung dan budidaya) sampai akhir tahun perencanaan (tahun 2029) dengan rencana pola ruang.

2.1.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Kabupaten Buru Selatan diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buru Selatan guna membangun Buru Selatan sebagai Kabupaten yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pada potensi unggulan daerah. Untuk lebih jelas pembagian wilayah pengembangan di Kabupaten Buru Selatan dapat dilihat pada Gambar 2.4.



Sumber: RTRW Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009-2029

Gambar 2.4. Peta Wilayah Pengembangan Kabupaten Buru Selatan

Untuk peningkatan perekonomian masyarakat, potensi pengembangan wilayah dibagi berdasarkan 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP), setiap wilayah pengembangan tersebut memiliki wilayah pelayanannya masing-masing, sesuai dengan daya jangkau pusat pelayanan dari wilayah pengembangan tersebut. Keenam Wilayah Pengembangan tersebut sebagai berikut :

- (1) Wilayah Pengembangan I yang meliputi Kecamatan Namrole dengan pusat pelayanan di Kota Namrole. Fungsi utama WP sebagai berikut :
 - (a) Pusat Pemerintahan dan Pelayanan Jasa,
 - (b) Pusat Transportasi Regional,
 - (c) Sentra produksi pertanian tanaman pangan,
 - (d) Sentra produksi kehutanan.
 - (e) Sentra produksi perikanan, dan
 - (f) Wisata

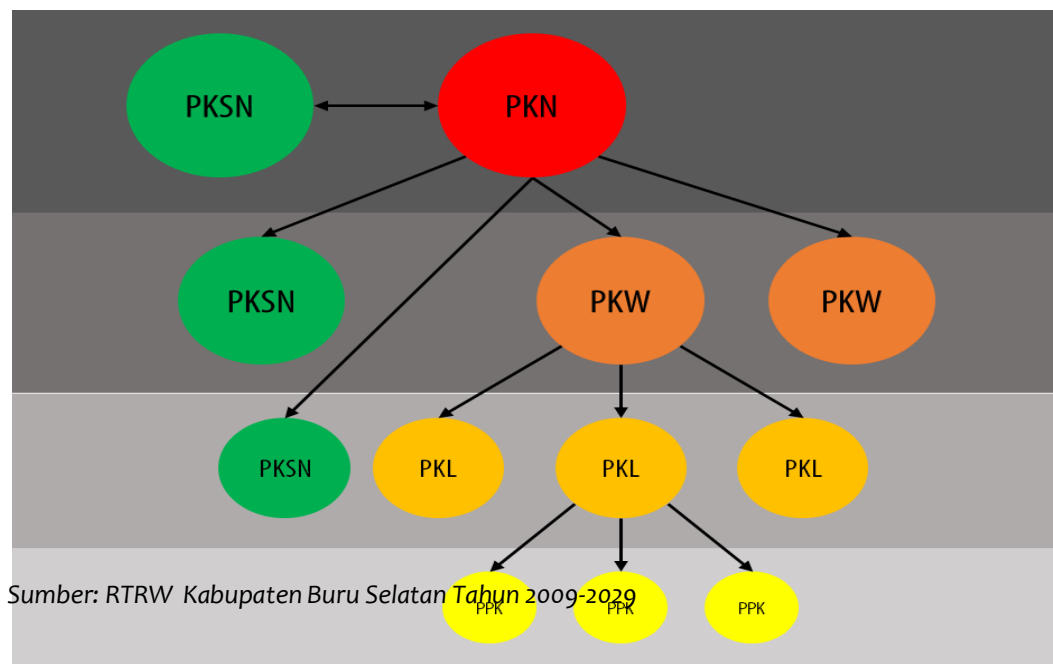
- (2) Wilayah Pengembangan II yang meliputi Kecamatan Leksula dengan pusat pelayanan di Kota Leksula. Fungsi utama WP II adalah :
- (a) Pusat Perdagangan,
 - (b) Pusat Pelayanan Jasa,
 - (c) Kawasan Ekonomi Khusus,
 - (d) Sentra produksi kehutanan, dan
 - (e) Sentra produksi pertanian (hortikultura),
 - (f) Sentra produksi perkebunan
 - (g) Sentra produksi perikanan
 - (h) Wisata
- (3) Wilayah Pengembangan III yang meliputi Kecamatan Fena Fafan dengan pusat pelayanan di Kota Waekatin. Fungsi utama WP III adalah :
- (a) Sentra produksi kehutanan,
 - (b) Sentra produksi pertanian (hortikultura),
 - (c) Sentra produksi perkebunan
 - (d) Sentra produksi perikanan
 - (e) Pendukung utama Kawasan Ekonomi Khusus
- (4) Wilayah Pengembangan IV yang meliputi Kecamatan Kepala Madan dengan pusat pelayanan di Kota Biloro. Fungsi utama WP IV adalah :
- (a) Sentra produksi pertanian
 - (b) Sentra produksi perkebunan,
 - (c) Sentra Produksi Perikanan
 - (d) Pusat pelayanan jasa,
 - (e) Wisata.
- (5) Wilayah Pengembangan V yang meliputi Kecamatan Waisama dengan pusat pelayanan di Kota Wamsisi. Fungsi utama WP V adalah :
- (a) Sentra produksi pertanian,
 - (b) Sentra produksi perkebunan,
 - (c) Pusat pelayanan jasa,
- (6) Wilayah Pengembangan VI yang meliputi Kecamatan Ambalau dengan pusat pelayanan di Kota Waelua. Fungsi utama WP VI adalah :

- Sistem pusat-pusat permukiman atau sistem perkotaan di Kabupaten Buru Selatan, yang direncanakan tidak terlepas dari rencana struktur kota di ibukota kabupaten maupun kota kecamatan, karena kota merupakan salah satu unsur penting dalam membentuk struktur ruang. Sistem Perkotaan diarahkan sesuai dengan hierarki jumlah penduduk, potensi dan kegiatan ekonominya. Pengembangan sistem kota-kota diarahkan sedemikian rupa, agar selaras dengan arahan pengembangan wilayah, terutama berkaitan dengan kondisi fisik yang sebagian merupakan pulau-pulau dan kondisi bencana alam. Di pihak lain kawasan perkotaan memerlukan pengelolaan secara individual yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi dalam rangka mendukung fungsi kotanya di wilayah yang lebih luas, serta mendukung pengembangan wilayah yang berkelanjutan (*Sustainable Development*). Rencana struktur ruang Kabupaten Buru Selatan dapat dilihat pada Gambar 2.5



Sesuai dengan arahan RTRW Kabupaten Buru Selatan tahun 2009-2029 bahwa pengembangan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Buru Selatan akan

tetap mengacu pada hierarki fungsional dengan mengingat perkembangannya serta skala pelayanannya. Kota yang merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berdasarkan RTRW Provinsi Maluku di Kabupaten Buru Selatan adalah Namrole dan Leksula di Kecamatan Leksula. Kota yang merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Buru Selatan untuk masa mendatang diusulkan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), adalah kota yang merupakan Ibukota Kabupaten Buru Selatan yaitu Kota Namrole. Konsep struktur ruang Kabupaten Buru Selatan dapat dilihat pada Gambar 2.6.



Gambar 2.6 Konsep Struktur Ruang Kabupaten Buru Selatan

Kota yang merupakan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kabupaten Buru Selatan untuk masa mendatang yaitu :

- (1) Desa Elfule di Kecamatan Namrole
- (2) Desa Biloro di Kecamatan Kepala Madan
- (3) Desa Waekatin di Kecamatan Leksula yang diusulkan menjadi PKL (PKLp);
dan
- (4) Desa Wamsisi di Kecamatan Waesama.

Kota yang merupakan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kabupaten Buru Selatan untuk masa mendatang diusulkan menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Desa Lena di Kecamatan Waesama dan Desa Elara di Kecamatan Ambalau. Desa yang merupakan Pusat Pelayanan Lokal (PPL) di Kabupaten Buru Selatan untuk masa mendatang yaitu :

- (1) Desa Waemulang (Kecamatan Leksula)
- (2) Desa Tifu (Kecamatan Leksula)
- (3) Desa Nanali (Kecamatan Kepala Madan)
- (4) Desa Sekat (Kecamatan Kepala Madan)
- (5) Desa Fogi (Kecamatan Kepala Madan)
- (6) Desa Fakal (Kecamatan Fena Fafan)
- (7) Desa Labuang (Kecamatan Namrole)
- (8) Desa Wamkana (Kecamatan Namrole)
- (9) Desa Waetawa (Kecamatan Waesama)
- (10) Desa Ulima (Kecamatan Ambalau)
- (11) Desa Lumoy (Kecamatan Ambalau)

Untuk memantapkan sistem perkotaan di Kabupaten Buru Selatan sesuai dengan masing-masing hierarki pusat pelayanan dan skala pelayanan yang direncanakan, dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang maka perlu arahan fungsi untuk masing-masing kota yang berada di Kabupaten Buru Selatan hingga akhir tahun perencanaan (tahun 2035) seperti terlihat pada Tabel 2.5, dan Gambar 2.6.

Tabel 2.5 Rencana Hirarki Pusat Pelayanan di Kabupaten Buru Selatan

No	Hirarki Perkotaan	Pusat Permukiman	Skala Pelayanan		A	B	C	D	E	F	G	H
			Fungsi	Kewenangan								
1	PKWp	Namrole	Regional	Kabupaten	X	X	X	X	X	X	X	X
2	PKL	Leksula	Regional	Kabupaten		X	X	X	X	X	X	X
3	PKLp	Waekatin (Kecamatan Leksula)	Lokal	Kecamatan		X	X	X	X	X		X
4	PPK	Elfule (Kecamatan Namrole)	Lokal	Kecamatan		X	X	X	X	X		X
5	PPK	Biloro (Kecamatan Kepala Madan)	Lokal	Kecamatan		X	X	X	X	X		X
6	PPK	Wamsisi (Kecamatan Waesama)	Lokal	Kecamatan		X	X	X	X	X		X
7	PPK	Lena (Kecamatan Waesama)	Lokal	Kecamatan			X		X	X		X
8	PPK	Elara (Kecamatan Ambalau)	Lokal	Kecamatan		X	X		X	X		X
9	PPL	Waemulang (Kecamatan Leksula)	Lokal	Kecamatan			X		X	X		
10	PPL	Tifu (Kecamatan Leksula)	Lokal	Kecamatan			X		X	X		
11	PPL	Nanali (Kecamatan Kepala Madan)	Lokal	Kecamatan			X		X	X		
12	PPL	Sekat (Kecamatan Kepala Madan)	Lokal	Kecamatan			X		X	X		

No	Hirarki Perkotaan	Pusat Permukiman	Skala Pelayanan Fungsi Kewenangan		A	B	C	D	E	F	G	H
13	PPL	Fogi (Kecamatan Kepala Madan)	Lokal	Kecamatan			X		X	X		
14	PPL	Fakal (Kecamatan Fena Fafan)	Lokal	Kecamatan			X		X	X		
15	PPL	Labuang (Kecamatan Namrole)	Lokal	Kecamatan			X		X	X		
16	PPL	Wamkana (Kecamatan Namrole)	Lokal	Kecamatan			X		X	X		
17	PPL	Waetawa (Kecamatan Waesama)	Lokal	Kecamatan			X		X	X		
18	PPL	Ulima (Kecamatan Ambalau)	Lokal	Kecamatan			X		X	X		
19	PPL	Lumoy (Kecamatan Ambalau)	Lokal	Kecamatan			X		X	X		

Sumber : Hasil Analisis, 2009, RTRW Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009-2029

Keterangan:

- A. : Pusat administrasi kabupaten
- B. : Pusat administrasi kecamatan
- C. : Pusat perdagangan, jasa dan pemasaran
- D. : Pusat perhubungan dan komunikasi
- E. : Pusat produksi pengolahan
- F. : Pusat pelayanan sosial (kesehatan, Pendidikan, dll)
- G. : Pusat pendidikan tinggi
- H. : Pusat kegiatan pariwisata

2.1.2. Demografi

Perkembangan penduduk Kabupaten Buru Selatan dilihat dari jumlahnya pada tahun 2015-2020 mengalami peningkatan pada tahun 2020 dengan rata-rata laju pertumbuhan 0,42%. Secara rinci perkembangan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Buru Selatan (Tabel 2.6).

Tabel 2.6. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015-2020

No.	Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan (%)
1	2015	72,191	1.01
2	2016	72,774	0.81
3	2017	74,208	1.97
4	2018	76,179	2.66
5	2019	76,575	0.52
6	2020	76.900	0.42

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru Tahun 2021

Bila dilihat dari rata-rata pertumbuhan penduduk per Kecamatan di Kabupaten Buru Selatan, maka Kecamatan Namrole dan Waesama tercatat sebagai wilayah dengan rata-rata pertumbuhan penduduk tertinggi selama tahun 2019-2020 dengan rata-rata pertumbuhan 1,12% dan 2,04% dan Kecamatan yang memiliki rata-rata pertumbuhan penduduk terendah adalah Kecamatan Leksula sebesar -1,15%.

Kota Namrole sebagai ibukota Kabupaten, memiliki fungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) merupakan pintu masuk arus barang dan migrasi penduduk. Tingginya laju pertumbuhan penduduk Kota Namrole bukan hanya disebabkan oleh tingkat kelahiran tetapi juga disebabkan oleh adanya migrasi masuk dari Provinsi Sulawesi tenggara, Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kota Ambon dan wilayah lain di Indonesia.

**Tabel 2.7. Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan
Di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015-2020**

No	Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Laju Pertumbuhan 2019-2020 (%)
1	Kepala Madan	11,289	11,841	2,209	12,220	12,434	12,311	-0.99
2	Leksula	15,243	14,753	4,628	15,356	14,807	14,636	-1.15
3	Fenafafan	3,556	3,818	4,007	4,101	4,132	4,090	-1.02
4	Namrole	17,728	18,505	9,054	20,037	20,201	20,614	2.04
5	Waesama	14,457	14,350	4,770	14,809	15,445	15,618	1.12
6	Ambalau	9,918	9,507	9,540	9,656	9,556	9,631	0.78
Buru Selatan		72,191	72,774	74,208	76,179	76,575	76,900	0,42

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru Tahun 2021

Dalam hal penyajian data kepadatan penduduk di Kabupaten Buru Selatan sampai dengan tahun 2020, Kota Namrole merupakan wilayah tingkat kepadatan penduduk tertinggi dengan tingkat kepadatan mencapai 84,63 penduduk per km² dan yang terendah terletak pada Kecamatan Leksula 10,31 penduduk per km².

**Tabel 2.8. Persentase Penduduk Menurut Kepadatan Penduduk
Di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020**

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk Per Km ²
1	Kepala Madan	953,36	12.311	12,91
2	Leksula	1.419,58	14.636	10,31
3	Fenafafan	394,49	4.090	10,37
4	Namrole	243,57	20.614	84,63
5	Waesama	540,90	15.618	28,87
6	Ambalau	228,63	9.631	42,12
Buru Selatan		3.780,53	76.900	20,34

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru Tahun 2021

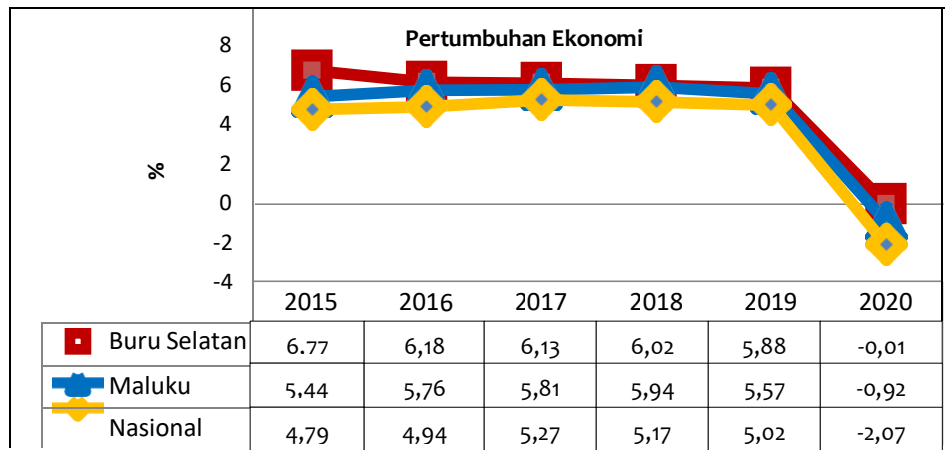
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru Selatan mengalami fluktuasi dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sebesar 6,77 persen adalah perolehan tertinggi dari lima tahun ke depannya. Sejak tahun 2016- 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, dan kontraksi tertinggi terjadi di tahun 2020 sebesar -0,01, kondisi ini baru pertama kali terjadi sejak berdirinya Kabupaten Buru Selatan. Kontraksi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buru masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Maluku maupun secara nasional, akibat Pandemic Covid-19.

Perubahan pola pergerakan masyarakat maupun barang akibat diberlakukannya Penutupan Sosial Berskala Regional (PSBR di bulan April-Mei 2020) dan ditingkatkan menjadi Penutupan Sosial Berskala Besar (PSBB di mulai pada bulan Juni, 2020) di Kota Ambon sebagai Tindakan pemutusan rantai penularan Covid-19, telah berdampak pada seluruh aktivitas produksi, distribusi terhenti di Maluku termasuk di Kabupaten Buru Selatan. Kondisi tersebut memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dalam lima tahun sebelumnya rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru Selatan diatas 5 persen lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2016-2020. Secara rata-rata dalam lima tahunan (2016-2020) pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru Selatan tumbuh sebesar 4,84 persen, masih lebih tinggi dari Provinsi maupun Nasional. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku 4,43 persen atau selisih sebesar 0,41 persen dengan Kabupaten Buru Selatan, sedangkan pertumbuhan Nasional rata-rata 3,67 persen selisih dengan Kabupaten Buru selatan 1,17 persen. Secara jelas dapat di lihat pada Gambar 2.7.



Sumber: BPS Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021

Gambar 2.7. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2016-2020

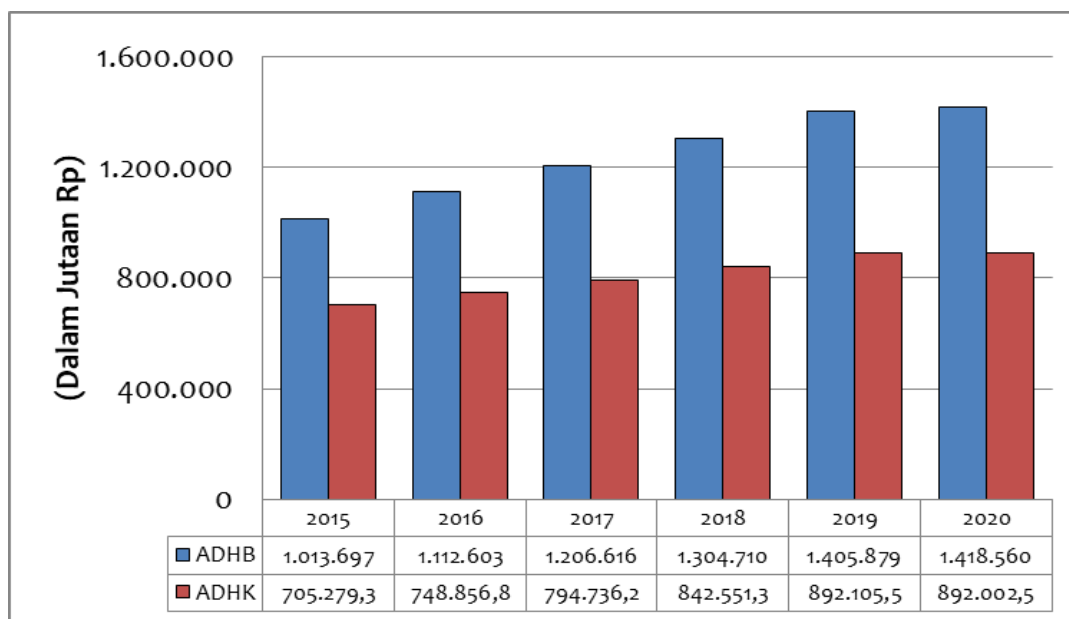
Dengan melihat nilai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru Selatan selama 2015-2020 memberikan gambaran bahwa pembangunan sangat baik, walaupun secara trend mengalami pertumbuhan yang menurun sejak tahun 2015-2020, kondisi ini alamiah karena secara regional atau di tingkat Provinsi Maluku maupun secara nasional juga pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi dimana tingkat pertumbuhan ekonomi juga berkontraksi cukup mendalam di tahun 2020.

Pertumbuhan Kabupaten Buru Selatan di tahun 2020 di lihat dari sisi produksi masih disuporting oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Sedangkan pertumbuhan dari sisi pengeluaran lebih digerakan oleh Konsumsi Rumah Tangga sebesar 86,86 persen dan Konsumsi Pemerintah sebesar 64,35 persen. Pengeluaran konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buru Selatan yaitu unsur makanan dan minum sebesar 57, 20 persen (BPS Buru Selatan, 2021).

2.2.1.2. Pertumbuhan PDRB dan Kontribusi Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan mengalami pertumbuhan setiap tahunnya 2015-2020. Pada tahun 2015 mencapai Rp. 705,279.31 meningkat menjadi Rp 892,002.5 pada tahun 2020 atau mengalami peningkatan 20,93 persen. Dari 17 sektor yang ada pada pembentuk PDRB atas dasar harga konstan dimana empat sektor dominan secara berturut-turut adalah:

(1) Pertanian, kehutanan dan perikanan; (2) Administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan social wajib; (3) Konstruksi dan (4) Perdagangan. Dilihat dari pertumbuhan PDRB dan kontribusi ekonomi di Kabupaten Buru Selatan masih memperlihatkan struktur ekonomi yang mengalami lompatan stuktur yang belum *linear*. Secara teori struktur ekonomi harusnya bersifat "*linear*" dimana sektor primer (pertanian) berkembang akan diikuti oleh sektor sekunder (industri) kemudian dilanjutkan dengan sektor tersier (perdagangan, administrasi pemerintahan), namun yang terjadi di Kabupaten Buru Selatan mengalami lompatan dari sektor primer ke sektor tersier yaitu sektor pertanian berkembang pesat dilihat dari kontribusinya terhadap pembentukan PDRB 36,00 persen tidak diikuti oleh pertumbuhan sektor industry yang proporsional untuk menyerap sumberdaya hasil pertanian, kehutanan dan perikanan sehingga akan memiliki *value added* yang tinggi. Perkembangan PDRB kabupaten Buru Selatan Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada Gambar 2.8.



Sumber : Buru Selatan Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 2.8. Perkembangan PDRB Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015-2020

Pertumbuhan industri selama tahun 2016-2020 rata-rata 3,25 persen sedangkan pertumbuhan perdagangan sebesar 7,57 persen, memiliki karakteristik yang sama dengan tahun 2016-2020 kondisi ini menunjukkan bahwa perdagangan yang ada di Kabupaten Buru Selatan masih merupakan hasil olahan dari luar

Kabupaten Buru Selatan. Dengan kata lain bahwa masih minimnya peningkatan hasil-hasil pertanian, kehutanan dan perikanan untuk menjadi kegiatan home industry. Kondisi ini harus menjadi perhatian bahwa perlu adanya peningkatan pemberdayaan masyarakat terhadap potensi unggulan Kabupaten Buru Selatan pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan melalui home industry agar lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani dan nelayan, karena jika anggaran pemerintah daerah kecil untuk sektor ini maka kemiskinan akan semakin tinggi.

**Tabel 2.9. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)**

Ket	Lapangan Usaha/Industry	2016	2017	2018	2019	2020
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	417,199.07	446,353.18	474,880.87	506,173.39	521,778.78
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	8,686.59	9,367.41	9,957.79	10,738.13	10,873.91
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	43,396.31	47,628.73	51,228.92	54,223.04	54,378.34
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	111.53	127.59	139.07	140.68	148.40
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	225.40	239.84	249.75	266.10	275.13
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	93,086.85	102,496.01	111,060.67	121,596.90	122,486.07
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	80,404.88	88,569.43	96,813.03	106,107.87	105,514.98
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	31,541.96	33,749.76	36,172.06	38,973.82	34,557.25
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and food Service Activities</i>	5,721.74	6,229.79	6,444.16	6,13.19	6,828.56
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	5,876.35	6,454.61	6,899.92	7,281.06	7,524.07

Sumber : Buru Selatan Dalam Angka 2020

Lanjutan Tabel 2.9

Ket	Lapanagn Usaha/ <i>industry</i>	2016	2017	2018	2019	2020
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi / <i>Financial and Insurance Activities</i>	8,364.34	8,997.36	9,844.46	10,395.70	10,787.38
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	6,811.38	7,124.08	7.391.62	7,538.20	7,591.34
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	294.26	308.94	325.12	337.80	336.27
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defance; Compulsoy Sosial Security</i>	282,911.06	312,876.85	347,731.85	379,395.99	374,409.19
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	60,402.48	64,189.79	68,012.91	72,059.41	73,364.03
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	53,354.22	56,739.21	61,742.38	67,032.10	70,570.08
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	14,213.52	15,163.34	15,815.78	16,805.51	17,136.71
	Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Produk</i>	1,112,603.93	1,206,615.92	1,304,710.36	1,405,878.87	1,418,560.52

**Tabel 2.10. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah)**

Ket	Lapangan Usaha/Industry	2016	2017	2018	2019	2020
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	293,554.64	308,521.20	324,063.27	340,761.51	348,124.04
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	6,001.21	6,339.08	6,651.93	7,024.86	7,022.21
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	28,893.51	30,797.33	32,481.40	33,852.12	33,531.73
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	96.05	98.45	106.08	106.34	111.39
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	188.47	192.44	199.30	204.92	208.51
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	58,223.05	62,174.23	66,591.98	71,668.88	70,927.69
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	60,193.04	64,765.53	70,157.09	75,459.57	73,918.54
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	23,226.63	24,418.44	25,718.19	27,156.10	23,885.83
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and food Service Activities</i>	3,875.27	4,103.67	4,215.83	4,345.74	4,325.68
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	4,794.63	5,136.49	5,426.56	5,618.05	5,727.66

Sumber : Buru Selatan Dalam Angka 2021

Lanjutan Tabel 2.10

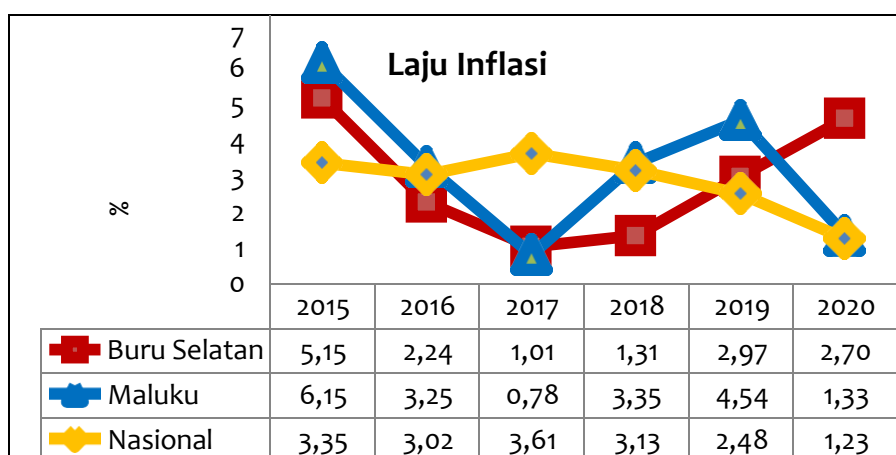
Ket	Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	2016	2017	2018	2019	2020
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	293,554.64	308,521.20	324,063.27	340,761.51	348,124.04
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	6,001.21	6,339.08	6,651.93	7,024.86	7,022.21
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	28,893.51	30,797.33	32,481.40	33,852.12	33,531.73
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	96.05	98.45	106.08	106.34	111.39
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	188.47	192.44	199.30	204.92	208.51
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	58,223.05	62,174.23	66,591.98	71,668.88	70,927.69
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and motorcycles</i>	60,193.04	64,765.53	70,157.09	75,459.57	73,918.54
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	23,226.63	24,418.44	25,718.19	27,156.10	23,885.83
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and food Service Activities</i>	3,875.27	4,103.67	4,215.83	4,345.74	4,325.68
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	4,794.63	5,136.49	5,426.56	5,618.05	5,727.66

Sumber : Buru Selatan Dalam Angka 2021

2.2.1.3. Laju Inflasi

Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa.

Laju inflasi Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi, namun masih lebih rendah selama empat tahun berturut-turut dari Inflasi secara general di Provinsi Maluku, dan pada tahun 2020 lonjakan inflasi sebesar 2,70 atau turun 0,27 point dari tahun 2020. Sepanjang empat tahun inflasi masih dibawah tiga persen namun tahun 2020 mengalami inflasi yang tinggi, ini menunjukkan kegiatan perekonomian di Kabupaten Buru Selatan sudah Kembali membaik. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok bahan makanan



Sumber: TPID, BAPELITBANG Kab. Buru Selatan Tahun 2021

Gambar 2.9. Laju Inflasi Kabupaten Buru Selatan Terhadap Provinsi Maluku, Nasional dan Target RPJMD Tahun 2016-2020

Laju inflasi kumulatif umum bulan Desember 2015 menggambarkan kenaikan rata-rata harga barang dan jasa konsumsi rumahtangga secara keseluruhan dari bulan Desember 2014 ke bulan Desember 2015. Laju Inflasi Kumulatif Umum bulan Desember 2015 adalah sebesar 5,15 persen. Apabila dilihat dari sisi kelompok pengeluaran rumahtangga, IHK tertinggi selama tahun 2015 terjadi pada bulan

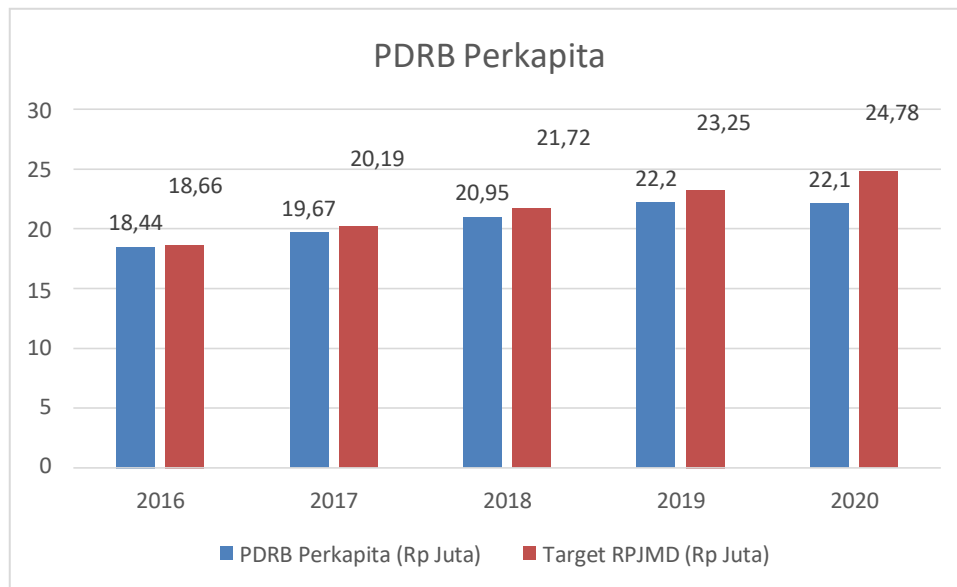
Desember 2015 pada kelompok bahan makanan sebesar 117,27, sementara IHK paling rendah pada kelompok yang sama yakni bahan makanan yaitu sebesar 97,02.

Laju inflasi kumulatif atau kenaikan rata-rata harga barang dan jasa konsumsi rumah tangga secara keseluruhan dari bulan Desember 2016 hingga Desember 2017 sebesar 1.01 persen, sehingga dapat dikatakan selama tahun 2017 terjadi inflasi sebesar 1.01 persen, Indeks Harga Konsumen (IHK) Umum pada Desember 2017 adalah sebesar 116,44 artinya secara umum kondisi harga barang dan jasa konsumsi rumah tangga secara keseluruhan pada bulan Desember 2017 telah mengalami kenaikan sebesar 14,89 persen dibandingkan rata-rata harga perbulan. Dari sisi kelompok pengeluaran rumah tangga, kenaikan harga tertinggi pada bulan Desember terjadi di kelompok Sandang dengan indeks 129,99 sedangkan kenaikan terendah pada kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan dengan indeks 104,91.

Mendasarkan pada informasi di atas menggambarkan bahwa inflasi di Kabupaten Buru Selatan dapat terjaga, hal ini karena peran dari OPD terkhusus Tim Pengendali Inflasi Daerah.

2.2.1.4. Pendapatan Perkapita

PDRB perkapita merupakan hasil dari perhitungan pendapatan regional suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang mendiami daerah tersebut. Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Buru Selatan dari tahun 2016 - 2020 terus mengalami peningkatan meskipun belum mencapai target namun capaian ini sudah mendekati yang direncanakan di dalam dokumen RPJMD. Untuk tahun 2020 realisasi PDRB Perkapita mengalami penurunan akibat dampak covid-19 selisih penurunan di tahun 2020 dibandingkan dengan 2019 sebesar 0,1 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.10 di bawah ini.



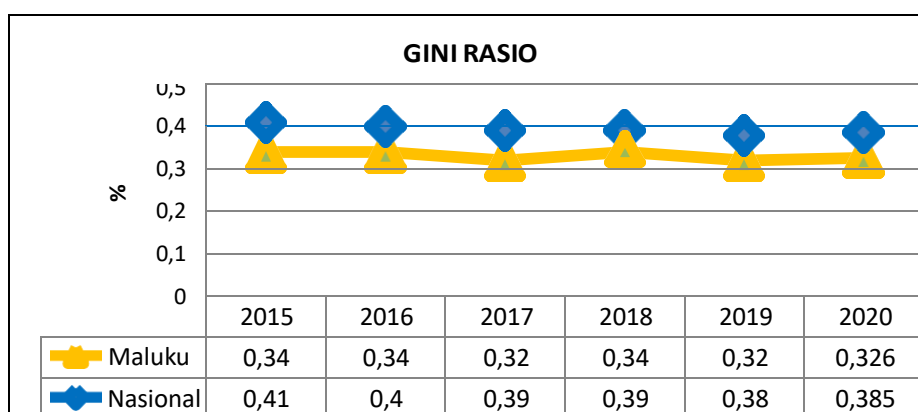
Sumber: TPID, BAPELITBANG Kab. Buru Selatan Tahun 2020

Gambar 2.10. Perkembangan Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020

2.2.1.5. Indeks Gini dan Kesenjangan

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 - 1. Secara general dapat dilihat perkembangan gini Ratio di Provinsi Maluku sebagai akumulasi dari 11 kabupaten kota

Nilai perolehan Gini Ratio di Provinsi Maluku tahun 2020 sebesar 0,326 di bulan September 2020 triwulan ke-III, lebih tinggi dibandingkan triwulan pertama di bulan Maret (0,318), peningkatan sebesar 0,008 poin.



Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2021

Gambar 2.11. Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015-2020

Gini Ratio pada Bulan September 2020 di daerah Perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,003 poin, sedangkan di perdesaan justru mengalami peningkatan sebesar 0,001 poin bila dibandingkan dengan Maret 2020. Dan distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah sebesar 20,63 persen, ini menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi di Maluku masuk kategori ketimpangan rendah. Jika dirinci untuk perkotaan sebesar 22,05 persen dan daerah pedesaan sebesar 23,51 persen.

Beberapa faktor yang turut mempengaruhi perbaikan tingkat ketimpangan pengeluaran di Maluku selama periode September 2019-September 2020 adalah kenaikan pengeluaran perkapita per bulan penduduk kelompok 40 persen terbawah meningkat lebih cepat dibanding penduduk kelompok 20 persen teratas, dan Menguatnya perekonomian penduduk kelas menengah.

Tabel 2.11. Rata-Rata Pengeluaran Perkapita, Konsumsi Kalori dan Protein Berdasarkan Kelompok Pengeluaran Kabupaten Buru Selatan tahun 2020

No	Uraian	Kelompok Pengeluaran		
		40% terbawah	40% tengah	20 % teratas
1	Pengeluaran Bahan Makanan (Rp / Bulan)	268.363	423.601	714.537
2	Pengeluaran Bukan Bahan Makanan (Rp / Bulan)	160.926	286.689	579.266
3	Konsumsi Kalori (Kcal / Hari)	1.294,51	1.751,42	2.252,01
4	Konsumsi Protein (Gram / Hari)	29,10	44,47	64,57

Sumber: BPS kabupaten Buru selatan, tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas pengeluaran perkapita untuk bahan makanan maupun bahan bukan makanan berdasarkan kelompok pengeluaran pada tahun 2020 terjadi ketimpangan yang cukup besar, dimana pengeluaran untuk bahan makanan pada kelompok 40 persen terbawah di Kabupaten Buru Selatan mencapai Rp. 268.363 per bulan, sementara pengeluaran bukan bahan makanan mencapai Rp. 160.926 per bulan. Dari kondisi pengeluaran tersebut di atas, maka hal tersebut berimplikasi terhadap konsumsi kalori dan konsumsi protein, dimana pada tahun 2020 jumlah konsumsi kalori untuk pengeluaran kelompok 40 persen terbawah mencapai 1.294,51 Kcal per hari, sementara konsumsi protein mencapai 29,10 gram per hari, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel diatas.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perbaikan tingkat ketimpangan pengeluaran sampai dengan tahun 2020 diantaranya adalah:

- a) Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), tercatat bahwa kenaikan pengeluaran perkapita per bulan penduduk kelompok 40 persen terbawah meningkat lebih cepat dibanding penduduk kelompok 20 persen teratas.
- b) Menguatnya perekonomian penduduk kelas menengah.
- c) Kenaikan pengeluaran kelompok bawah yang merefleksikan peningkatan pendapatan kelompok penduduk bawah tidak lepas dari upaya pembangunan infrastruktur padat karya, dan beragam skema perlindungan dan bantuan sosial di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lainnya yang dijalankan oleh pemerintah.

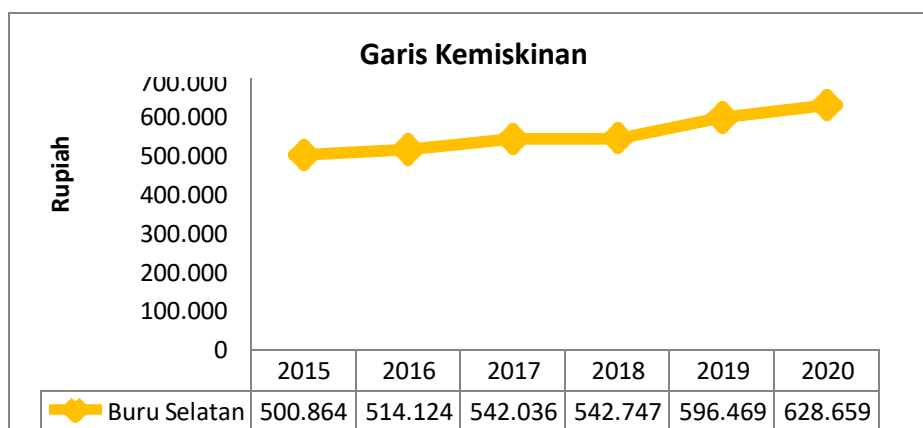
2.2.1.6. Tingkat Kemiskinan

a) Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Penghitungan GK dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita perhari.

Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Perkembangan Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Buru Selatan dari tahun 2015 sampai dengan 2020 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 perkembangan Garis Kemiskinan mencapai Rp. 514.124,- meningkat menjadi Rp. 628.659- pada tahun 2020, hal tersebut dapat diartikan pada tahun 2020 pengeluaran perkapita/bulan penduduk miskin Kabupaten Buru Selatan yang berada pada Garis Kemiskinan mencapai Rp. 628.659,- dengan asumsi 65 persen di peruntukan buat kebutuhan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan 35 persen diperuntukan buat kebutuhan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), untuk lebih jelasnya dapat dilihat Gambar 2.11.



Sumber : TKPKD Kab. Buru Selatan Tahun 2021

Gambar 2.11. Perkembangan Garis Kemiskinan Kab. Buru Selatan

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Buru selatan pada tahun 2020 yang merujuk pada data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sesuai Kepmensos Nomor 8/HUK/2019, jumlah penduduk miskin yang menjadi skala prioritas untuk diintervensi dengan program dan kegiatan di kabupaten Buru selatan mencapai 20.771 jiwa (kondisi kesejahteraan 10 persen terendah), dimana jumlah penduduk miskin paling banyak terdapat pada kecamatan Kepala Madan yaitu sebesar 4.541 jiwa, diikuti dengan Kecamatan Leksula yaitu sebesar 4.256 jiwa, sementara sebaran penduduk miskin yang terkecil terdapat pada Kecamatan Fenafafan yaitu sebanyak 2.099 jiwa, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel dan Gambar dibawah ini.

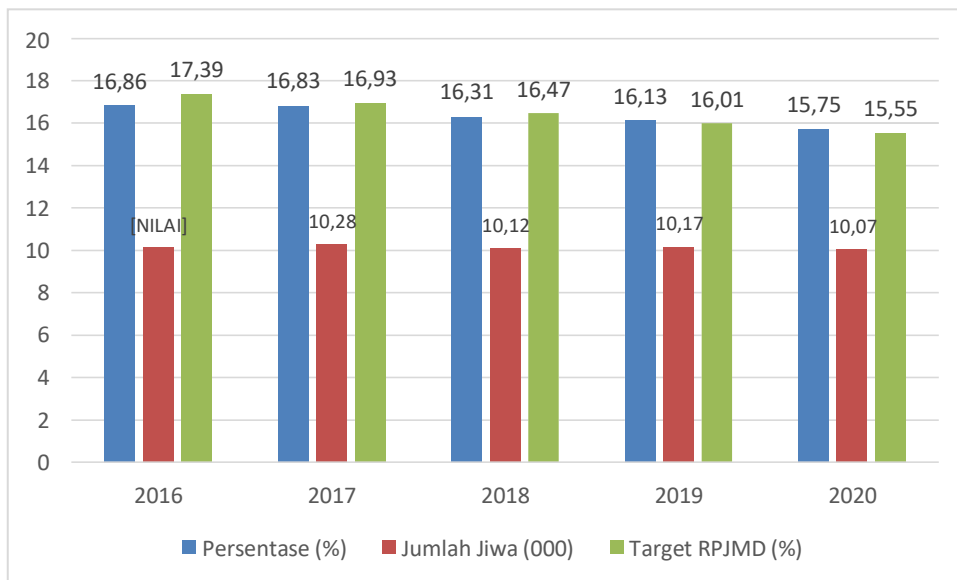
Tabel 2.12. Analisis Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Penduduk Miskin (Jiwa)				Jumlah Total Penduduk Miskin (Jiwa)	Prosentase Penduduk Miskin (%)
		Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4		
Kepala Madan	12.311	4.541	664	256	146	5.607	45,54
Leksula	14.636	4.256	1.274	754	593	6.877	46,99
Fenafafan	4.090	2.099	281	135	88	2.603	63,64
Namrole	20.614	2.928	1.201	636	851	5.616	27,24
Waesama	15.618	3.069	549	387	292	4.297	27,51
Ambalau	9.631	3.878	628	206	140	4.852	50,38
Jumlah	76.900	20.771	4.597	2.374	2.110	29.852	38,82

Sumber : Kepmensos Nomor 8/HUK/2019

b) Efektivitas

Kondisi tingkat kemiskinan Kabupaten Buru Selatan kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terjadi persentase penurunan dari tahun 2016-2020. Rata-rata persentase penurunan selama tahun 2016-2020 sebesar 16,38 persen. Walaupun persentase penurunan kemiskinan tidak sesuai dengan target RPJPD, namun mendekati. Kondisi ini dikatakan sangat baik, program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Buru Selatan dengan dana yang bersumber dari APBN maupun APBD, dan dalam lima tahun kedepan 2021- 2026 efektifitas penanggulangan kemiskinan harus ditingkatkan mengingat persentase kemiskinan menurun namun jumlah jiwa masih mengalami fluktuasi dan akan menjadi rentan jika penguatan program penanggulangan kemiskinan menjadi kendor.



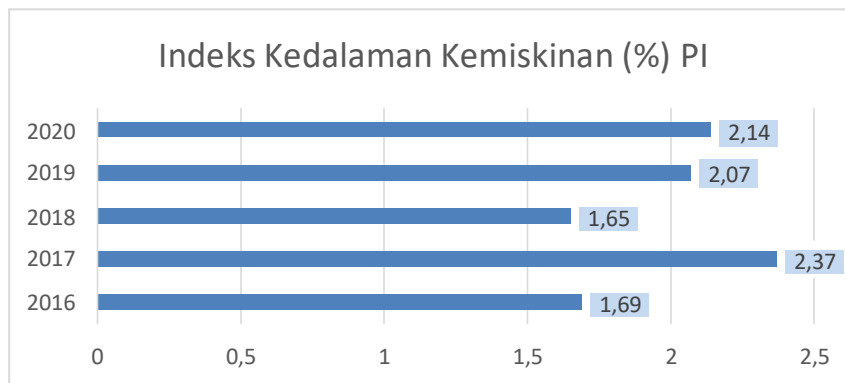
Sumber: diolah tahun 2021

Gambar. 2.12. Analisis Efektivitas Persentase Penduduk Miskin (%) Kab. Buru Selatan, Tahun 2016-2020

Pada Gambar 2.12 dapat kita dilihat bahwa, kinerja program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Buru Selatan dari tahun 2016 – 2020 cukup efektif, dengan semakin menurunnya tingkat Kemiskinan Kabupaten Buru Selatan, dan merupakan posisi kemiskinan yang paling terendah ke dua di Provinsi Maluku setelah Kota Ambon, hal ini tidak terlepas dari intervensi Pemerintah Daerah yang serius dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan.

c) Index Kedalaman Kemiskinan (P1)

Index Kedalaman Kemiskinan (P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (Indeks) Kabupaten Buru Selatan, Tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.13.



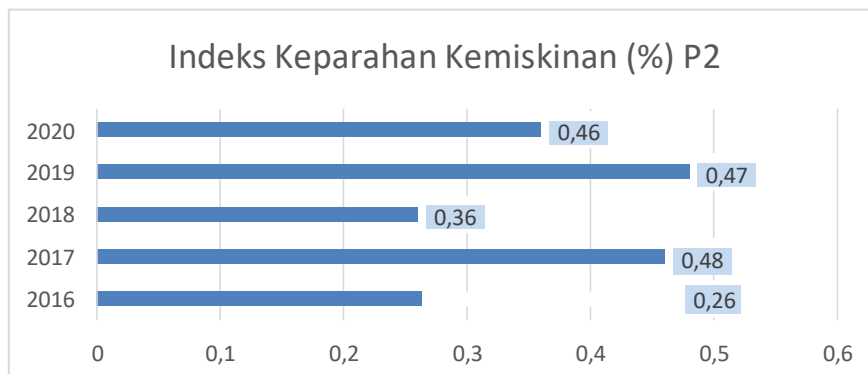
Sumber: TKPKD Kab. Buru Selatan Tahun 2021

Gambar 2.13. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (Indeks) Kabupaten Buru Selatan, Tahun 2016 – 2020

Pada Gambar diatas menunjukan bahwa indeks kedalaman kemiskinan mengalami fluktuasi di tahun 2017 ke tahun 2018, yang menunjukan bahwa pengeluaran perkapita/bulan penduduk miskin semakin dekat dengan garis kemiskinan, namun secara berturut-turut di tahun 2019 dan 2020 pengeluaran perkapita penduduk miskin semakin menjauh dari garis kemiskinan.

d) Index Keparahan Kemiskinan (P₂)

Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.



Sumber: TKPKD Kab. Buru Selatan Tahun 2021

Gambar 2.14. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (Indeks) Kab. Buru Selatan, Tahun 2016 – 2020

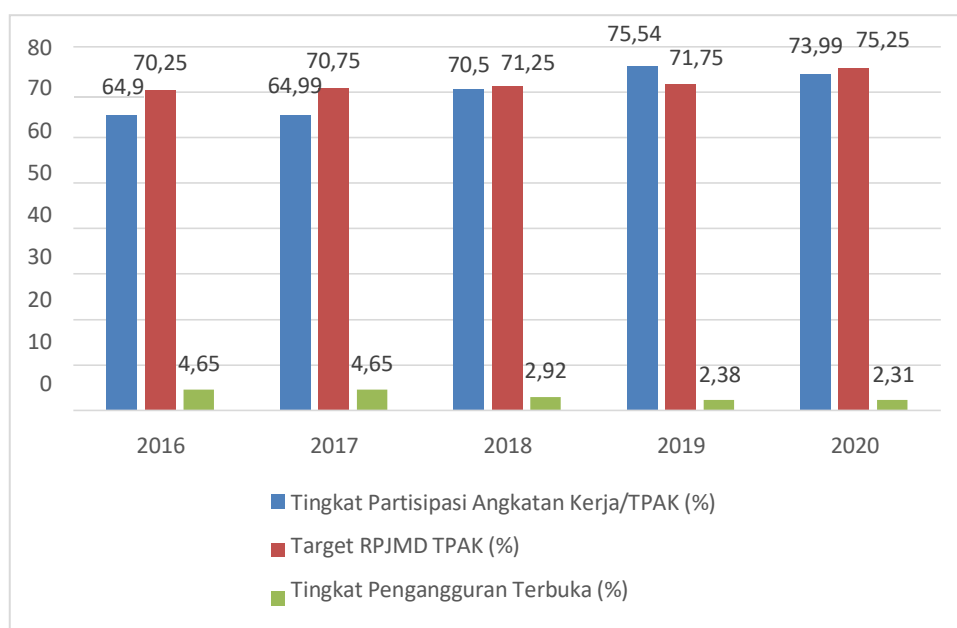
Indeks keparahan kemiskinan periode 2016-2020 mengalami fluktuasi, namun tidak pernah nilai di atas 1 (satu), hal ini mengindikasikan bahwa sebaran

pengeluaran diantara penduduk miskin tidak jauh atau hampir tidak terjadi ketimpangan. Dan indeks keparahan kemiskinan mencapai terendah pada tahun 2016 sebesar 0,26.

2.2.1.7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan trend yang positif walaupun belum memenuhi target RPJMD, namun di tahun 2019 melebihi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020 terjadi penurunan TPAK selisih penurunan dengan tahun 2019 sebesar 1,55 poin.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) masih masuk dalam kategori hasil yang baik, mengalami penurunan dalam lima tahun (2016-2020) dengan rata-rata penurunan 3,38 persen. Tahun 2016 TPT sebesar 4,65 persen, turun di tahun 2020 menjadi 2,31. capaian ini sudah berada di bawah capaian Provinsi Maluku yakni sebesar 7,27 persen dan Nasional sebesar 5,34 persen, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



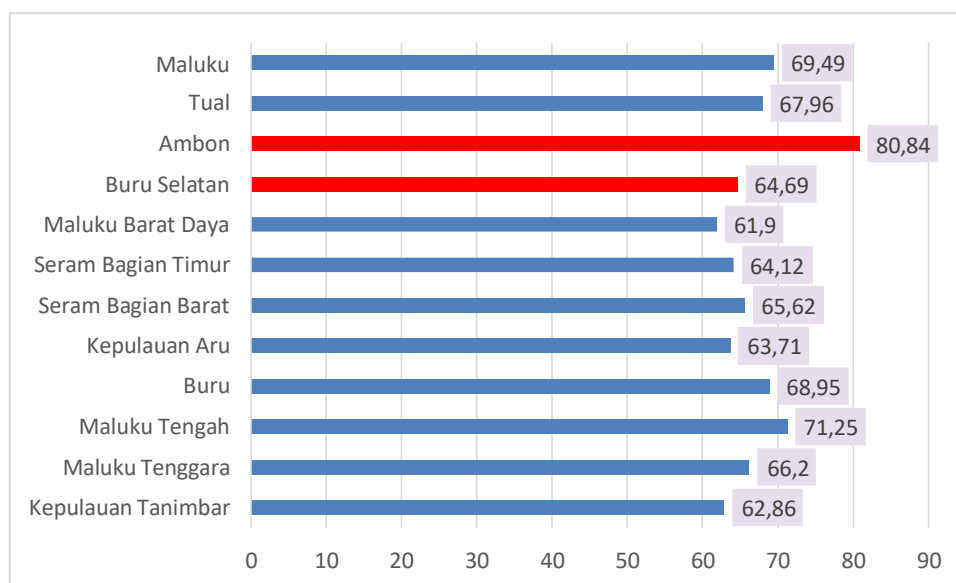
Sumber: Dihimpun dari Beberapa Sumber, 2021

Gambar 2.15. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Target RPJMD TPA dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020

2.2.2. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Sosial

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Nilai IPM tahun 2020 di masing-masing kabupaten/kota hanya Kota Ambon dan Maluku Tengah yang memiliki nilai IPM di atas nilai Provinsi sedangkan Kabupaten Buru Selatan dan, 8 Kabupaten lainnya di bawah nilai Provinsi. Kabupaten Buru Selatan mengalami peningkatan IPM setiap tahunnya (2016-2020) dengan rata-rata IPM sebesar 63,53, merupakan urutan ke 7 (tujuh) tertinggi dari 11 (sebelas) Kabupaten Kota di Provinsi Maluku, secara jelas terlihat pada gambar di bawah ini.

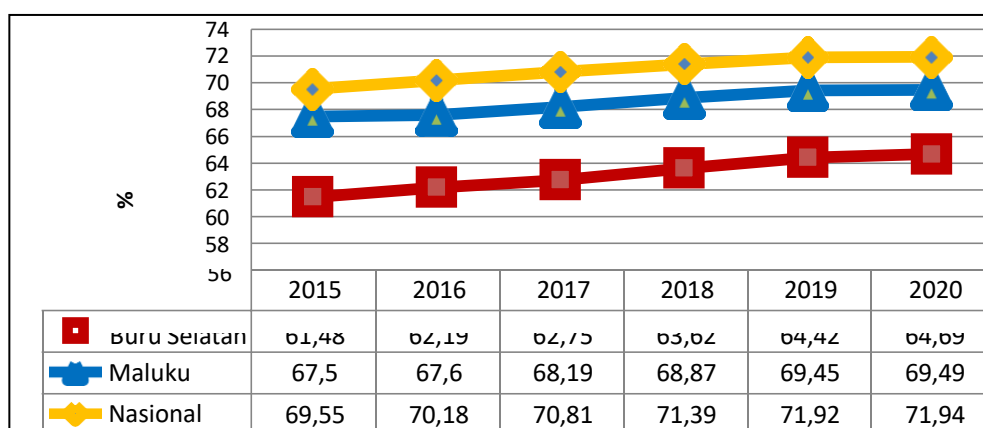


Sumber: BPS Provinsi Maluku 2021.

Gambar 2.16a. Rata-Rata IPM Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2020

Pada gambar 2.16a. Kota Ambon memiliki IPM tertinggi sedangkan Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki IPM paling rendah, 61,90, kondisi ini berkorelasi positif dengan angka kemiskinan yang juga Maluku Barat Daya sebagai kantong kemiskinan tertinggi.

Sedangkan posisi IPM Kabupaten Buru Selatan, secara regional dan nasional dapat dilihat pada gambar 2.16b.



Sumber : BPS Maluku, 2021 / BAPELITBANG Kab. Buru Selatan Tahun 2021

Gambar 2.16b. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2016-2020

Pertumbuhan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Buru Selatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dipengaruhi oleh meningkatnya Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita. Walaupun di tahun 2020 Pengeluaran perkapita mengalami penurunan sebesar -61 poin, akibat pandemic covid-19 yang melanda, sama dengan dua kabupaten Seram Bagian Timur dan Maluku Barat Daya. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.13. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buru Selatan Berdasarkan Komponen IPM Tahun 2016-2020

No	Komponen IPM	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Harapan Hidup (Tahun)	65,6	65,74	65,92	66,13	66,27
2	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,22	12,28	12,48	12,68	12,69
3	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6,96	7,13	7,42	7,70	7,94
4	Pengeluaran Perkapita (Rp.Juta)	7.170	7,330	7.500	7.627	7.566

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Buru Selatan, BPS Provinsi Maluku, 2021

2.2.2.2. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah

akan tercermin apabila nilai IPG sama dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang juga menunjukkan adanya pemerataan pembangunan antar wilayah dan kesetaraan gender.

Terdapat 5 kabupaten/kota (Seram Bagian Barat, Ambon, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Buru) yang memiliki nilai IPG di atas nilai provinsi, dengan perolehan IPG tertinggi adalah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk tahun 2019-2020 (98,63 dan 98,44) di susu Kota Ambon (97,84, dan 97,78) sedangkan 6 kabupaten/kota lainnya memiliki nilai IPG di bawah nilai Provinsi. Kabupaten Buru Selatan pencapaian IPG masih di bawah 10 kabupaten/kota lainnya (86,18 dan 86,39). Ini menunjukkan bahwa masih tingginya kesenjangan pembangunan gender, antara laki-laki dan perempuan. Untuk itu dalam pembangunan 2021-2026 perlu dipacu keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan di Kabupaten Buru Selatan.

Tabel 2.14. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2016 - 2020

Indeks Pembangunan Gender	Capaian (Tahun)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Buru Selatan	Blm ada data	Blm ada data	Blm ada data	86,18	86,39
Maluku	92,38	92,75	93,03	93,04	92,97
Nasional	90,82	90,96	90,99	91,07	91,06

Sumber : BPS Nasional, 2021. <https://www.bps.go.id>

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.2.3.1. Jumlah Grup Kesenian dan Prasarana Penyelenggaraan

Kegiatan seni budaya dan olahraga secara fisik berkembang dengan adanya berbagai aktivitas seni budaya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun secara langsung oleh komunitas masyarakat, namun demikian belum terdokumentasi dengan dukungan data sebaran aktivitas yang ada.

Aktivitas sanggar seni, sarana pendukung kesenian di tahun 2020 berjumlah 2 gedung yaitu Gedung Serbaguna dan Gedung Wamsoba Resort di kota Namrole, sementara untuk penyelenggaraan seni pertunjukan pada tingkat Kecamatan dan Desa lebih menggunakan gedung Balai Desa masing-masing.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah Kabupaten dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

Urusan wajib dasar diarahkan pada urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan sosial.

2.3.1.1. Bidang Urusan Pendidikan

Secara umum, pencapaian Kabupaten Buru Selatan pada semua indikator bidang pendidikan dari tahun 2016 sampai 2020 menunjukkan nilai sangat baik karena pencapaiannya sebagian besar diatas target RPJMD, walaupun sebagian indikator pencapaiannya masih dibawah target RPJMD Kabupaten Buru Selatan namun selisihnya sangat kecil. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.15. Perbandingan capaian Kinerja Indikator Bidang Pendidikan Kabupaten Buru Selatan, Tingkat Provinsi Maluku dan Tingkat Nasional Tahun 2016-2020

INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Melek Huruf Usia 15 Tahun Ke Atas (Persen)					
Buru Selatan	94,68	97,90	96,43	96,18	96,68
Target RPJMD	94,50	95,00	95,00	96,00	96,50
Provinsi Maluku	99,81	-	-	-	-
Nasional	95,38	-	-	-	-
Harapan Lama Sekolah (RLS) (Tahun)					
Buru Selatan	12,22	12,28	12,48	12,68	12,69
Target RPJMD	11,86	11,91	11,96	12,91	13,14
Provinsi Maluku	13,73	13,91	13,92	13,94	13,96
Nasional	-	-	-	-	-
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)					
Buru Selatan	7,13	7,13	7,42	7,70	7,94
Target RPJMD	7,51	7,51	7,79	8,07	8,35
Provinsi Maluku	9,27	9,38	9,58	9,81	9,93
Nasional	8,36	-	-	-	-
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 Tahun (Persen)					
Buru Selatan	99,60	98,80	98,42	98,00	98,25
Target RPJMD	99,84	99,85	99,86	99,87	99,98
Provinsi Maluku	98,67	-	-	-	-
Nasional	99,09	-	-	-	-
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 13-15 Tahun (Persen)					
Buru Selatan	95,10	96,21	95,70	95,50	95,21
Target RPJMD	93,03	93,08	93,13	93,18	93,23
Provinsi Maluku	95,57	-	-	-	-
Nasional	94,88	-	-	-	-
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16-18 Tahun (Persen)					
Buru Selatan	81,00	71,19	77,90	76,93	76,93
Target RPJMD	69,61	70,76	71,91	73,06	74,21
Provinsi Maluku	97,55	-	-	-	-
Nasional	70,83	-	-	-	-
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 19-24 Tahun (Persen)					
Buru Selatan	15,90	22,56	22,17	-	-
Target RPJMD	-	-	-	-	-
Provinsi Maluku	37,51	-	-	-	-

INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020
Nasional	23,93	-	-	-	-
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sederajat (Persen)					
Buru Selatan	93,62	96,86	98,37	98,37	97,86
Target RPJMD	94.86	95,36	95.86	96,36	96,86
Provinsi Maluku	-	-	-	96,21	96,85
Nasional	-	-	-	-	-
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Sederajat (Persen)					
Buru Selatan	74,46	76,06	77,56	77,56	82,93
Target RPJMD	73.08	73.58	74.08	74,58	75,08
Provinsi Maluku	-	-	-	74,54	75,15
Nasional	-	-	-	-	-
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/Sederajat (Persen)					
Buru Selatan	73,74	67,38	67,17	67,17	86,48
Target RPJMD	53.28	53.78	54.28	54,78	55,28
Provinsi Maluku	-	-	-	64,23	64,81
Nasional	-	-	-	-	-
Angka Partisipasi Murni (APM) Perguruan Tinggi (Persen)					
Buru Selatan	11,55	11,65	12,03	12,35	12,78
Target RPJMD	53,28	53,78	54,28	54,78	55,28
Provinsi Maluku	-	-	-	-	-
Nasional	-	-	-	-	-
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Sederajat (Persen)					
Buru Selatan	109,05	109,32	115,26	115,26	114,64
Target RPJMD	109.13	109.63	110.13	110,63	113,13
Provinsi Maluku	115,19	-	-	112,19	110,08
Nasional	10,31	-	-	-	-
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Sederajat (Persen)					
Buru Selatan	98,96	85,51	86,27	86,27	88,48
Target RPJMD	94.69	95.19	95.69	96,19	96,69
Provinsi Maluku	105,57	-	-	90,40	91,08
Nasional	90.12	-	-	-	-
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/Sederajat (Persen)					
Buru Selatan	86,80	89,62	99,09	99,09	98,26
Target RPJMD	80.41	80.91	81.41	81,91	82,41
Provinsi Maluku	98.24	-	-	95,29	95,95
Nasional	80.89	-	-	-	-
Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (Persen)					

INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020
Buru Selatan	15,46				
Target RPJMD	-				
Provinsi Maluku	38.94	-	-	-	-
Nasional	23.44	-	-	-	-
Angka Putus Sekolah Usia 7-12 Tahun (Persen)					
Buru Selatan	0,00	0,00	0,00	0,78	0,75
Target RPJMD	0.12	0.07	0.02	0.01	0.00
Provinsi Maluku	0.62	0.60	-	-	-
Nasional	0.91	0.91	-	-	-
Angka Putus Sekolah Usia 13-15 Tahun (Persen)					
Buru Selatan	3,74	4,00	2,12	5,00	4,80
Target RPJMD	2.19	1.99	1.79	1,59	1,39
Provinsi Maluku	3.55	3.41	-	-	-
Nasional	5.28	5.12	-	-	-
Angka Putus Sekolah Usia 16-18 Tahun (Persen)					
Buru Selatan	28,17	19,00	24,58	23,76	22,18
Target RPJMD	25.44	24.39	23.34	22,29	21,24
Provinsi Maluku	22.13	21.81	-	-	-
Nasional	29.39	29.17	-	-	-
Angka Putus Sekolah Usia 19-23 Tahun (Persen)					
Buru Selatan	79,89	84,40	72,45	-	-
Target RPJMD	-	-	-	-	-
Provinsi Maluku	57.17	58.04	-	-	-
Nasional	74.08	73.17	-	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan dan BPS Kab. Buru Selatan , 2021

Secara detail, pencapaian kinerja indikator bidang pendidikan di Kabupaten Buru Selatan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 ditampilkan pada Tabel dibawah ini. Dimana secara umum terdapat peningkatan capaian dari tahun ke tahun.

**Tabel 2.16. Capaian Kinerja Indikator Bidang Pendidikan
Di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020**

INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
Rasio Pendidik dan Peserta Didik PAUD					
Angka Partisipasi Kasar (APK)					
APK PAUD (%)					
APK SD/SDLB (%)	109,05	109,32	115,26	115,26	114,64
APK SMP/SMPLB (%)	98,96	85,51	86,27	86,27	88,48
APK SMA/SMK/SMALB (%)	86,80	89,62	99,09	99,09	98,26
Angka Partisipasi Murni (APM)					
APM SD/SDLB (%)	93,62	96,86	98,37	98,37	97,86
APM SMP/SMPLB (%)	74,46	76,06	77,56	77,56	82,93
APM SMA/SMK/SMALB (%)	73,74	67,38	67,17	67,17	68,48
Angka Partisipasi Sekolah (APS)					
APS usia 7 -12 (%)	99,60	98,80	98,42	98,25	98,00
APS usia 13-15 (%)	95,10	96,21	95,70	95,50	95,21
APS usia 16-18 (%)	81,00	71,19	77,90	76,93	76,93
Angka Putus Sekolah					
Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0,00	0,00	0,00	0,78	0,75
Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	3,74	4,00	2,12	5,00	4,80
Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA (%)	28,17	19,00	24,58	23,76	22,18
Angka Kelulusan					
Angka Kelulusan SD/MI (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Angka Kelulusan SMA/MA/SMK (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fasilitas Pendidikan					
Sekolah SD/SDLB Kondisi Bangunan Baik (%)	70,00	80,00	90,00	74,77	83,18
Sekolah SMP/SMPLB Kondisi Bangunan Baik (%)	70,00	80,00	90,00	86,96	85,11
Sekolah SMA/SMK/SMALB Kondisi Bangunan Baik (%)	70,00	80,00	90,00	95,05	100,00
Rasio Ketersediaan Sekolah					
Rasio Ketersediaan Sekolah SD sederajat terhadap penduduk usia sekolah	83,55	84,82	84,82	97,63	97,77
Rasio Ketersediaan Sekolah SMP sederajat terhadap penduduk usia	99,98	105,65	105,91	89,29	94,47

INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020
Sekolah					
Rasio Ketersediaan Sekolah SMA sederajat terhadap penduduk usia sekolah	1:137	-	-	-	-
Rasio Pendidik dan Peserta Didik					
Rasio Pendidik dan Peserta Didik SD sederajat	1:20	1:19	1:19	1:19	1:19
Rasio Pendidik dan Peserta Didik SMP sederajat	1:23	1:23	1:22	1:22	1:22
Rasio Pendidik dan Peserta Didik SMA sederajat	1:19	-	-	-	-
Rasio Pendidik dan Peserta Didik per Kelas Rata-Rata					
Rasio Pendidik dan Peserta Didik SD/SDLB per kelas rata-rata	49,14	52,55	52,55	53,76	54,50
Rasio Pendidik dan Peserta Didik SMP/SMPLB per kelas rata-rata	433,95	439,84	455,81	45,50	45,60
Rasio Pendidik dan Peserta Didik SMA/SMALB per kelas rata-rata	531,34	531,34	531,34	96,18	97,68
Rasio Pendidik dan Peserta Didik SMK per kelas rata-rata					
Pendidik Berkualifikasi S1/D4					
Pendidik PAUD Berkualifikasi S1/D4					
Pendidik SD/SDLB Berkualifikasi S1/D4					
Pendidik SMP/SMPLB Berkualifikasi S1/D4					
Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah					
Angka Melek Huruf Usia 15 Tahun Ke Atas (Persen)	94,68	97,90	96,43	96,18	97,68
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Usia 15 Tahun Ke Atas (Tahun)	6,96	7,13	7,42	7,70	7,94
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,22	12,28	12,48	12,68	12,69

Sumber : Dinas Pendidikan, BPS Kab. Buru Selatan

2.3.1.2. Bidang Urusan Kesehatan

Capaian kinerja sektor kesehatan umumnya mengalami perbaikan hal ini terlihat dari angka yang menunjukkan perbaikan sejak tahun 2016-2020, walaupun pada beberapa indikator kesehatan mengalami peningkatan pada tahun 2018 misalnya Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup ada selisih peningkatan tahun 2017-2018 sebesar 59 jiwa namun jika dilihat data tahun 2020 justru angka kematian ibu mengalami penurunan sebesar 273 jiwa, data ini menunjukkan

bahwa program pemerintah sangat baik dilakukan. Adapun sejumlah indikator urusan kesehatan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 2.17. Capaian Indikator Kesehatan Kabupaten Buru Selatan
Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	386,00	154,00	213,00	638,00	365,80
2	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	11,00	2,00	2,10	7,20	8,70
3	Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	12,00	0,00	2,10	7,20	8,70
4	Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan (%)	92,18	81,53	73,60	91,70	91,00
5	Kunjungan Ibu Hamil (K4) (%)	93,52	70,25	70,20	73,60	89,30
6	Pelayanan Ibu Nifas (%)	90,37	69,89	64,30	83,20	73,60
7	Pelayanan kesehatan bayi (%)	70,65	70,65	72,30	75,70	82,20
8	Cakupan Imunisasi Campak/MR pada Bayi (%)	66,20	75,76	76,30	77,20	70,30
9	Imunisasi dasar lengkap pada bayi (%)	51,93	58,18	72,00	80,20	70,30
10	Bayi Mendapat Vitamin A (%)	100,00	99,56	96,10	73,70	84,80
11	Pelayanan kesehatan balita (%)	39,35	83,66	84,10	92,60	77,90
12	Menurunnya Prevalensi Balita Gizi Kurang (%)	7,63	1,35	14,00	5,50	8,70
13	Menurunnya Prevalensi Balita Gizi Buruk/kurus (%)	-	-	10,10	4,60	3,20
14	Menurunnya Prevalensi Balita stunting (%)	-	-	7,40	2,60	3,80
15	Angka Kesakitan Malaria per 1.000 penduduk	0,00	0,00	1,60	1,10	1,10
16	Angka keberhasilan pengobatan (Success Rate) semua kasus TBC (%)	91,67	95,00	75,30	149,30	108,30
17	Jumlah kematian selama pengobatan tuberkulosis per 100.000 penduduk	4,97	1,37	1,20	4,20	0,00
18	Desa/Kelurahan UCI (%)	44,44	54,32	60,50	51,90	43,00
19	Jumlah Kasus HIV/AIDS (Kasus)	0,00	8,00	4,00	6,00	6,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan, 2021.

Pelayanan kesehatan kepada masyarakat sangat dipengaruhi juga dengan ketersediaan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang mampu menjangkau setiap elemen masyarakat hingga ke seluruh penjuru desa di Kabupaten Buru Selatan. Realitanya fasilitas kesehatan di Kabupaten Buru Selatan masih perlu ditingkatkan. Tabel berikut ini menampilkan data rasio tenaga kesehatan dan rasio fasilitas kesehatan per 100.000 penduduk di Kabupaten Buru Selatan.

Tabel 2.18. Rasio Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan Per 100.000 Penduduk di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio dokter per 100.000 penduduk	19.89	16,49	4,00	7,00	-
2	Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk	3.32	2.75	0,00	0,00	0,00
3	Rasio dokter spesialis per 100.00 penduduk	0	0	0	0	0
4	Rasio bidan per 100.000 penduduk	322.82	255.46	277.00	249.00	249.00
5	Rasio perawat per 100.000 penduduk	354.72	294.06	608.00	581.00	351.00
6	Jumlah perawat Gigi (orang)	1	1	1	0	0
7	Jumlah Tenaga Kefarmasian (orang)	8	8	19	20	18
8	Jumlah Tenaga Kesehatan (orang)	24	24	35	22	47
9	Jumlah Tenaga Sanitasi (orang)	25	25	27	28	26
10	Jumlah Tenaga Gizi (orang)	37	37	54	22	59

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan, 2021.

**Tabel 2.19. Rasio Jumlah Fasilitas Kesehatan Per 100.000 Penduduk
di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016 – 2020**

NO	FASILITAS KESEHATAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Polindes (unit)	8	8	8	8	8
2	Posbindu (Unit)	2	2	12	12	12
3	Posyandu Aktif (unit)	90	98	119	123	123
4	Poskesdes (unit)	4	4	4	4	4
5	Puskesmas Pembantu/PUSTU (unit)	36	36	38	38	38
6	Puskesmas Rawat Inap (unit)	4	4	4	4	4
7	Puskesmas Non Rawat Inap (unit)	8	8	8	8	8
8	Puskesmas Keliling /PUSLING (unit)	16	16	16	16	16
9	RSU (unit)	1	1	1	1	1
10	RS dengan kemampuan pelayanan gadar level 1 (%)	0	0	100,00	100,00	100,00
11	Apotek (Unit)	5	5	7	6	6

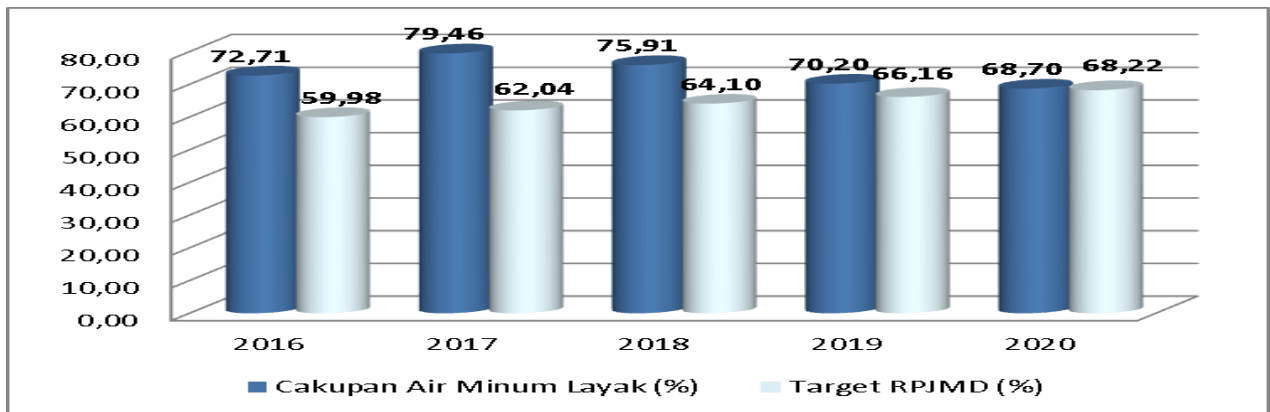
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan, 2021.

2.3.1.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

➤ Akses Air Bersih

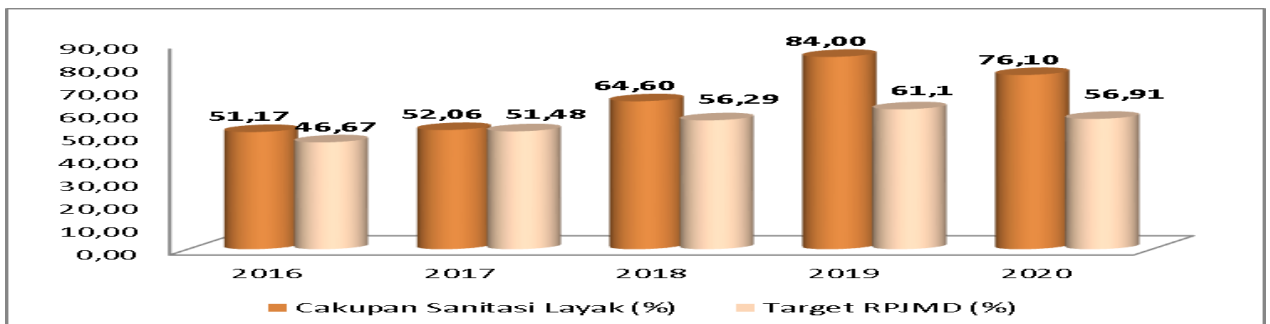
Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum di Kabupten Buru Selatan dari tahun 2016 sampai 2020 terus mengalami fluktuasi dilihat dari pencapaian dengan target yang telah di tetapkan dalam RPJMD. Kinerja bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sangat baik, karena melampaui rata-rata target RPJMD tahun 2016-2021.

Dengan berpatokan pada kinerja dalam memenuhi kebutuhan air bersih di Kabupaten Buru Selatan maka secara langsung dapat menjamin pemenuhan target SDGs tahun 2030 untuk persentase jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan Sanitasi yang layak menjadi 100 persen akan lebih cepat terealisasi, hal tersebut dapat kita lihat pada tahun 2016 Persentase jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak mencapai 72,71 persen meningkat menjadi 68,22 persen pada tahun 2020 artinya kemampuan pelayanan ini sudah cukup baik sejak tahun 2016- 2020, dan jika target SDGs tahun 2030 itu berarti harapannya 10 (sepuluh) tahun kedepan pemerintah Kabupaten Buru dapat tercapai 100 persen air minum layak dan sanitasi, terlihat pada Gambar 2.17 dan 2.18.



Sumber: Dinas Kesehatan, PUPR Kab. Buru Selatan, 2019

Gambar 2.17. Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum layak di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020



Gambar 2.18. Perkembangan Capaian Akses Sanitasi Layak di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020

➤ Kemantapan Jalan

Kondisi Kemantapan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibanding pada tahun 2014, hal ini karena Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan terus berupaya dalam meningkatkan cakupan aksesibilitas masyarakat, barang dan jasa baik antar kecamatan dan Kota Kabupaten maupun antar desa dan kota kecamatan.

Ruas jalan Nasional dan Kabupaten pada tahun 2018 mengalami peningkatan, sedangkan ruas Jalan Provinsi yang merupakan ruas/jalur penghubung antar 3 (Tiga) Kecamatan yakni Kecamatan Leksula, Fenafafan dan Kepala Madan dengan Kota Namrole mengalami penurunan kondisi, dengan total panjang 55 Km pada tahun 2014 ruas terbangun (kondisi mantap) sepanjang 25 Km, mengalami penurunan kondisi menjadi 15 Km pada tahun 2018, hal tersebut diakibatkan sampai dengan tahun 2018 belum ada lanjutan pembangunan terhadap ruas tersebut serta

dibarengi dengan kondisi cuaca ekstrim, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada dibawah ini.

Tabel 2.20. Kondisi Kemantapan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2014 – 2019

URAIAN	PAJANG (Km)	2014				2018				2019	
		Mantap		Tidak Mantap		Mantap		Tidak Mantap		Mantap	
		(Km)	(%)	(Km)	(%)	(Km)	(%)	(Km)	(%)	(Km)	(%)
Jalan Nasional	87,00	87,00	100,00	0,00	9,00	87,00	100,00	0,00	0,00		
Jalan Provinsi	55,00	25,00	45,45	30,00	54,55	15,00	27,27	40,00	72,73		
Jalan Kabupaten	465,95	238,30	51,14	227,65	48,86	312,45	67,06	153,50	32,94	385,76	
Jembatan (Meter)	2.764,00					751,63	27,19	2012,37	72,81		

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Selatan, 2019

2.3.1.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Capaian Indikator Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan, dalam periode tersebut intervensi pemerintah daerah Kabupaten Buru Selatan dalam pencapaian presentase rumah layak huni diperuntukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat miskin, di mana capaian dalam 5 tahun terakhir persentase rumah layak huni pada tahun 2016 masih 0 persen meningkat menjadi 91,55 persen pada tahun 2020, untuk persentase lingkungan permukiman kumuh mengalami pertumbuhan yang positif dimana pada tahun 2017 mencapai 11 persen turun menjadi 0,0066 persen pada tahun 2020. Sementara rumah tangga/penduduk penggunaan air bersih mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2016 mencapai 72,71 persen meningkat menjadi 84,00 persen pada tahun 2019 dan turun menjadi 76,10 persen pada tahun 2020, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.21. Capaian Indikator Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020

No	Uraian		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Rumah Layak Huni (%)		0	0	49,78	86,53	91,55
2	Persentase Lingkungan Pemukiman (%)	Kumuh	0	11	0,0071	0,0085	0,0066
3	Persentase Rumah Tangga/Penduduk Penggunaan Air Bersih (%)		72,71	79,46	66,30	84,00	76,10

Sumber : Dinas PPKP, Profil Kesehatan 2020

2.3.1.5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pembangunan Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan kewenangan daerah melalui penataan, pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati serta keputusan lainnya yang dianggap dapat mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat di Kabupaten Buru Selatan. Hal tersebut tercermin pada jumlah Perda yang ditetapkan pada tahun 2016 mencapai 8 Perda meningkat menjadi 65 Perda pada akhir tahun 2020, sementara rasio Satpol PP terhadap jumlah penduduk pada tahun 2018 mencapai 1,10 per 10.000 penduduk meningkat menjadi 1,19 per 10.000 penduduk pada tahun 2018, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.22. Capaian Indikator Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun					Total
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan (Perda)	8	4	5	3	1	21
2	Jumlah Peraturan Bupati yang ditindak lanjuti (Perbub)	24	32	52	14	30	152
3	Jumlah Keputusan Bupati yang ditindak lanjuti (SK)	300	195	258	380	353	1.486
4	Keputusan DPRD yang ditindak lanjuti (SK)	16	16	10	18	4	64
5	Rasio Satpol PP terhadap jumlah penduduk (per 10.000 penduduk)	1,10	1,10	1,19			

Sumber : Dok. LPPD Kab. Buru Selatan tahun 2015-2019

2.3.1.6. Bidang Urusan Sosial

a) Sarana Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi

Sarana Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi sampai dengan tahun 2019 di Kabupaten Buru Selatan belum tersedia, dimana sampai dengan saat ini bila terdapat masyarakat di Kabupaten Buru Selatan yang memerlukan sarana Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi, Pemerintah Daerah selalu memfasilitasi untuk membuat rujukan ke Ambon.

b) PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat dikategorikan menjadi 7 (tujuh) bagian/jenis, yaitu: Kemiskinan, Keterlantaran, Kecacatan (Disabilitas), Keterpencilan, Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, Korban bencana, Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Tabel 2.22 di bawah ini menyajikan data PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2018.

**Tabel 2.23. PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
di Buru Selatan Tahun 2020**

No	Uraian	Satuan	Tahun 2020
1	Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra)	KPM	3.925
2	Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH)	KK	3.968
3	PBI (BPJS BDT dan Non BDT)	orang	28.519
4	Asistensi Tuna Lansia (Aslut)	KK	1.780

Sumber: Dinas Sosial, BPJS Kesehatan Kab. Buru Selatan, 2021

c) Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Sampai dengan tahun 2020 jumlah penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial secara umum mengalami peningkatan. persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Buru Selatan sampai dengan tahun 2020 mencapai 62,41 persen dari total populasi PMKS yaitu 6.353 Kepala Keluarga (KK).

**Tabel 2.24 Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020**

No	Uraian	Satuan	Tahun 2020
1	Jumlah PMKS yang di beri bantuan	KK	3.968
2	Jumlah PMKS yang belum di beri bantuan	KK	2.390
3	Jumlah PMKS yang ada	KK	6.358
4	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	62,41

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.3.2.1. Bidang Urusan Tenaga Kerja

Penyediaan lapangan kerja di Kabupaten Buru Selatan pada periode 2016-2020 mengalami peningkatan dari 22.445 di tahun 2016 orang menjadi 29,462 orang di tahun 2020. Sementara persentase tenaga kerja formal mengalami penurunan, dimana pada tahun 2016 mencapai 12,11 persen menurun menjadi 8,19 persen pada tahun 2020, kondisi ini juga dikarenakan kebutuhan tenaga kerja formal yang dibutuhkan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat terbatas, rekrutmen dapat dilakukan apabila OPD mengalami kekuarangan Sumberdaya Manusia.

Untuk kegiatan pelatihan kerja mengenai banyaknya orang yang dilatih kerja, sampai dengan belum ada data yang tersedia, seperti yang terlihat pada Tabel 2.25.

Tabel 2.25. Capaian Indikator Ketenagakerjaan Di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyediaan Lapangan Kerja (Orang)	22.445	22.867	25.721	27, 085	29,462
2	Presentase Tenaga kerja Formal (%)	12,11	10,46	9,00	8,58	8,19
3	Pelatihan Kerja (Orang)	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dan BPS Kab, Buru Selatan , 2021

2.3.2.2. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan/Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2018 mencapai 1.087 orang atau sebesar 46,97 persen (lebih rendah dari laki-laki), meningkat menjadi 1.270 orang pada tahun 2019 atau sebesar 51,63 persen (lebih tinggi dari laki-laki), hal tersebut dapat di lihat pada komposisi golongan PNS. Pada tahun 2018 golongan ruang I, II dan III PNS perempuan mencapai 1.042 orang, sementara PNS Laki-laki mencapai 1.101 orang, dan pada tahun 2019 PNS Perempuan dengan golongan ruang I, II dan III mengalami peningkatan mencapai 1.229 orang dan Laki-laki mencapai 1.064 orang, sementara pada di golongan ruang IV pada tahun 2018 dan 2019 masih didominasi oleh Laki-laki. Hal menarik yang dapat dicermati dari data ini adalah dalam 2 (dua) tahun terakhir adanya peningkatan yang sangat signifikan partisipasi Perempuan pada Pemerintahan, dan hal ini menunjukkan besarnya peluang dan partisipasi perempuan dalam jabatan struktural yang berkorelasi positif dengan golongan ruang.

**Tabel 2.26. Jumlah Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan
Di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018-2019**

NO	PANGKAT/JABATAN	2018			TOTAL	2019			TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN			LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)
1	I/A (Juru Muda)	2	0		2	1	0		1
2	I/B (Juru Muda Tingkat. I)	1	0		1	0	0		0
3	I/C (Juru)	11	1		12	9	1		10
4	I/D (Juru Tingkat. I)	12	1		13	10	1		11
5	II/A (Pengatur Muda)	62	38		100	50	19		69
6	II/B (Pengatur Muda Tingkat. I)	204	187		391	144	129		273
7	II/C (Pengatur)	140	156		296	130	151		281
8	II/D (Pengatur Tingkat. I)	133	169		302	80	149		229
9	III/A (Penata Muda)	209	113		322	209	309		518
10	III/B (Penata Muda Tingkat. I)	152	193		345	171	212		383
11	III/C (Penata)	107	141		248	129	175		304
12	III/D (Penata Tingkat. I)	68	43		111	131	83		214
13	IV/A (Pembian)	79	27		106	79	27		106
14	IV/B (Pembina Tingkat. I)	32	18		50	32	14		46
15	IV/C (Pembina Utama Muda)	15	0		15	15	0		15
16	IV/D (Pembina Utama Madya)	0	0		0	0	0		0
17	IV/E (Pembina Utama)	0	0		0	0	0		0
JUMLAH/TOTAL		1.227	1.087		2.314	1.190	1.270		2.460

Sumber: BKPSDM Kab. Buru Selatan, 2019

Perkembangan capaian kinerja pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Buru Selatan dari tahun 2016-2020 cenderung meningkat, hal tersebut dapat dilihat pada persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan pada tahun 2016 sampai tahun 2020 mencapai 42,50 persen, sementara persentase angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas, dimana pada tahun 2016 mencapai 55,87 persen meningkat menjadi 56,43 persen dan persentase partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 mencapai 15,50 persen meningkat menjadi 63,29 persen pada tahun 2020.

Tabel 2.27. Capaian Indikator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Buru Selatan 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan (%)	37,31	37,31	37,31	42,50	42,50
2	Persentase Angka Melek Huruf Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas (%)	55,87	55,87	55,87	56,15	56,43
3	Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	15,50	15,33	15,33	59,58	63,29

Sumber : Dok. LPPD Kab. Buru Selatan, 2016-2021

2.3.2.3. Bidang Urusan Ketahanan Pangan

Capaian pembangunan bidang ketahanan pangan Kabupaten Buru Selatan dapat kita lihat dimana jumlah regulasi ketahanan pangan pada tahun 2016 terdapat 3 regulasi yang ditetapkan, sedangkan pada tahun 2020 hanya 1 regulasi.

Untuk ketersediaan pangan utama mengalami fluktuasi walaupun pada kondisi fluktuasi yang ada, tidak memberikan dampak yang berarti atas pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, karena sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani, sehingga secara organisasi keluarga akan sangat memungkinkan memenuhi kebutuhan pangan utama. Sedangkan secara kelembagaan pemerintah daerah mengalami fluktuatif sejak tahun 2016-2020.

Tabel 2.28. Capaian Indikator Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Regulasi Ketahanan pangan (Regulasi)	3	4	4	2	1
2	Persentase Ketersediaan Pangan utama (%)	1,65	0,54	0,54	1,62	1,65

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan 2021

2.3.2.4. Bidang Urusan Pertanian

a) Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Luas lahan bersertifikat terdiri atas lahan Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pengelolaan (HP). Sertifikasi kepemilikan lahan merupakan urusan yang didekonsentrasikan di kabupaten/kota, dimana pada tahun 2016 sertifikasi hak atas tanah di Kabupaten Buru Selatan tidak ada, dan meningkat menjadi 0,95 Ha pada 2018 sampai tahun 2020, hal tersebut berkorelasi dengan persentase luas lahan bersertifikat pada tahun 2016 juga tidak ada meningkat menjadi 2,89 persen pada tahun 2018 sampai tahun 2020, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.29. Sertifikasi Hak Atas Tanah di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sertifikasi Hak Atas Tanah (Ha)	0	0	0,95	0,95	0,95
2	Perentase Luas Lahan Bersertifikat (%)	0	0	2,89	2,89	2,89

Sumber : Dok. LPPD Kab. Buru Selatan, 2016-2021

b) Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Jumlah kasus tanah negara di Kabupaten Buru Selatan tidak mengalami perkembangan dimana pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 masih mencapai 0 persen, sementara prentase penyelesaian ijin lokasi pada 5 tahun terakhir mencapai 100 persen, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.30. Capaian Indikator Bidang Pertanian di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%)	0	0	0	0	0
2	Persentase Penyelesaian Ijin Lokasi (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dok. LPPD Kab. Buru Selatan, 2016-2021

2.3.2.5. Bidang Urusan Lingkungan Hidup

Capaian pembangunan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Buru Selatan dari tahun 2016-2020 mencapai hasil yang cukup baik, dimana pada tahun 2016 persentase penanganan sampah mencapai 66,67 persen meningkat menjadi 84,50 persen pada tahun 2020.

Fasilitas tempat pembuangan sampah (TPS) pada tahun 2016 mencapai 0,21 per 1.000 penduduk menurun menjadi 0,0053 per 1.000 penduduk pada tahun 2020, disebabkan terdapat beberapa tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang tidak dapat difungsikan karena perluasan pembangunan pemukiman masyarakat.

Tabel 2.31. Capaian Indikator Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Penanganan Sampah (%)	66,67	83,66	83,66	84,04	84,50
2	Persentase Kebersihan (%)	100	42,86	42,86	43,09	43,29
3	Persentase Tempat Pembuangan Sampah / TPS (Per 1000 Penduduk)	0,21	0,01	0,0053	0,0053	0,0053
4	Persentase Penegakan Hukum Lingkungan (%)	0	0	0	0	0

Sumber : Dok. LPPD Kab. Buru Selatan, 2016-2020

2.3.2.6. Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian pembangunan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Buru Selatan terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 penduduk Buru Selatan yang memiliki KTP-EL sebanyak 21.888 jiwa meningkat menjadi 45.109 jiwa pada tahun 2020, hal tersebut diakibatkan meningkatnya jumlah penduduk dimana pada tahun 2016 mencapai 72.774 jiwa meningkat menjadi 76.900 jiwa pada tahun 2020, sementara rasio pasangan berakate nikah mengalami penurunan. Pada tahun 2016-2020 berkisar 86,06 - 76,74 persen, rasio bayi berakate kelahiran mengalami peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2016 mencapai 40,81 persen meningkat menjadi 45,64 persen pada tahun 2020.

**Tabel 2.32. Capaian Pembangunan Bidang Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk
Di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Penduduk Memiliki KTP-EL	Jiwa	21,888	25,446	34,429	43.483	45.109
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	72,774	74,408	76,179	76.575	76.900
3	Rasio Penduduk Ber-KTP	Persen	30.08	34.20	45.19	56,78	58,66
4	Rasio Anak Berakte Kelahiran	Persen	40,81	40,71	43,99	53,41	76,63
5	Jumlah Pasangan Berakte Nikah	Pasangan	13,970	14,026	14,161	14.268	14.470
6	Rasio Pasangan Berakte Nikah	Persen	86,06	85,21	84,64	79,33	76,74
7	Jumlah Penduduk Ber-KK	KK	16,852	17,524	17,220	17.985	18.856
8	Jumlah Penduduk Telah Menikah	Pasangan	26,949	27,745	27,498	27.951	28.425
9	Jumlah Bayi yang Berakte Kelahiran	Jiwa	29,680	30,354	33,588	34.476	35.098
10	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	Persen	40,81	40,71	43,99	45.02	45.64

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Buru Selatan Tahun 2021

2.3.2.7. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jumlah desa di Kabupaten Buru selatan sebanyak 81 desa, dengan status desa sesuai Indeks Desa Membangun, pada tahun 2020 rata-rata masih dalam kategori desa tertinggal sebanyak 44 desa, dengan membandingkan capaian di tahun 2018 perubahan pergeseran secara kuantitas dan kualitas sangat baik, karena ada perbaikan. Pada tahun 2018, rata-rata desa dalam kategori Sangat tertinggal sebanyak 55 desa, dan pada tahun 2020 hanya tersisa 15 desa, karena peningkatan status ke desa tertinggal, sedangkan tahun 2020 terdapat satu desa maju, di tahun 2018 belum ada status desa maju.

**Tabel 2.33. Angka Indeks Desa Membangun di Kabupaten Buru Selatan
Tahun 2018 dan 2020**

Uraian	Jumlah Desa	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	Tanpa Status
Indeks Desa Membangun (2018)	81	0	5	19	55	2
Indeks Desa Membangun (2020)	81	1	22	41	15	2

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, PP dan PA Kab. Buru Selatan Tahun 2020

Mendasarkan tabel IDM, pergeseran status menunjukkan, tidak semua desa memiliki kemampuan yang sama dalam meningkatkan statusnya ke desa yang lebih baik, olehnya itu, kebijakan Stimulus dana desa diharapkan terjadi peningkatan status desa lebih meningkat, khususnya pergeseran dari desa berkembang menjadi desa

maju di tahun selanjutnya, melalui tata Kelola yang lebih baik agar seluruh desa di Kabupaten Buru Selatan lebih berdaya.

Tabel 2.34. Capaian Indikator Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase PKK aktif (%)	64,47	67,36	100	100	100
2	Persentase Posyandu (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, PP dan PA Kab. Buru Selatan Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, baik presentase PKK aktif maupun presentase posyandu dari tahun 2016-2020 mencapai 100 persen, hal tersebut menunjukan tingkat pemberdayaan masyarakat desa dalam mengelolah PKK dan posyandu selama 5 tahun terakhir berjalan dengan baik.

2.3.2.8. Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB)

Presentase peserta KB Aktif dari tahun 2016-2020 di Kabupaten Buru Selatan mengalami fluktuasi namun cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dimana pada tahun 2016 presentase peserta KB aktif mencapai 22,74 persen, meningkat menjadi 54,47 persen di tahun 2020, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada dibawah ini.

Tabel 2.35. Presentase Peserta KB Aktif Di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	Psg	12.035	13.168	13.724	12.552	15.018
2	Jumlah Peserta Program KB Aktif	Psg	2.737	3.857	6.250	7.583	8.180
3	Presentase Peserta Program KB Aktif	%	22,74	29,29	45,54	60,41	54,47

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan, 2021

2.3.2.9. Bidang Urusan Perhubungan

a) Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Aktivitas perhubungan di Kabupaten Buru Selatan pada umumnya berfungsi sebagai peningkatan keterjangkauan/akses terhadap suatu wilayah baik itu antar Provinsi, antar Kabupaten, antar Kecamatan/ Desa, yang nantinya akan berimplikasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Adapun jenis moda transportasi yang ada di Kabupaten Buru Selatan, terdiri atas transportasi darat seperti mobil penumpang, bus, truk, sepeda motor, sedangkan untuk angkutan laut seperti Kapal Pelni, kapal Perintis, kapal feri dan kapal motor lainnya, untuk angkutan udara berupa pesawat terbang (Trigana ATR 40) yang beroperasi seminggu dua kali. Demikian juga untuk infrastruktur transportasi angkutan darat seperti terminal belum ada, namun untuk sejumlah moda transportasi (Mini Bus dan Damri) Rute Namrole-Namlea, Namrole-Waesama berkumpul pada terminal dadakan (sementara).

Sementara sarana pelabuhan sampai sekarang ini terdapat 8 pelabuhan yang tersebar pada Kecamatan Ambalau, Waesama, Namrole, Leksula dan Kepala Madan, untuk angkutan udara telah tersedia lapangan terbang yang terletak pada Kota Namrole, dengan ukuran panjang lintasan terbangnya (Run Way) sebesar 950 X 30 meter, berikut ini terdapat beberapa jenis angkutan darat antara lain, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada di bawah ini.

Tabel 2.36. Jenis Kendaraan Bermotor Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah	Jenis Bahan Bakar		
			Bensin	Solar	Gas
1	Penumpang Pribadi	14	14	-	-
2	Penumpang Umum	103	103	-	-
3	Truk Besar	23	-	23	-
4	Truk Kecil	63	35	28	-
5	Roda Tiga	15	15	-	-
6	Roda Dua	2600	2600	-	-

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Buru Selatan Tahun 2021

Jumlah arus penumpang angkutan umum dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, untuk itu sarana transportasi tentunya harus menjadi perhatian khususnya peningkatan kualitas pelayanan dan infrastruktur. Total jumlah arus penumpang di

Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2016 berjumlah 77.542 orang meningkat menjadi 109.608 orang pada tahun 2018, tetapi menurun menjadi 35.712 pada tahun 2020, hal ini dipengaruhi oleh pandemic global Covid-19. Jumlah penumpang pada angkutan darat, laut maupun udara, secara jelas dapat dilihat pada tabel 2.37.

Tabel 2.37. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penumpang mobil penumpang	21.900	23.725	25.550	19.370	15.548
2	Jumlah Penumpang Kapal Laut	43.706	53.225	62.744	20.583	12.995
3	Jumlah Penumpang Pesawat Udara	11.936	17.051	21.314	10.763	7.169
Total Jumlah Penumpang		77.542	94.001	109.608	50.716	35.712

Sumber: BPS, Dok. LKPJ Kab. Buru Selatan, 2020

Sebagai Kabupaten yang berkarakteristik wilayah kepulauan, pembangunan infrastruktur transportasi yang terintegrasi antara transportasi darat, laut dan udara sangat dibutuhkan. Tabel 2.38 dan 2.39 berikut menunjukkan infrastruktur transportasi udara dan Laut yang terbangun di Kabupaten Buru Selatan sampai dengan tahun 2020.

Tabel 2.38. Lapangan Terbang Menurut Frekuensi Penerbangan, Kapasitas, Ukuran Serta Konstruksinya Tahun 2020

Kecamatan	Sarana	Frekuensi Penerbangan (dalam seminggu)	Kapasitas	Ukuran (m2)	Konstruksi
Kecamatan	Lapangan	2	48	950 X 30 m ²	Aspal

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Buru Selatan , 2020

Tabel 2.39. Jumlah Infrastruktur Transportasi di Kab Buru Selatan Tahun 2020

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah			
		Pelabuhan Laut	Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pelabuhan Udara	Terminal Bus
1	Kab. Buru Selatan	3	5	1	-

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Buru Selatan , 2020

Jumlah pelabuhan laut di Kabupaten Buru Selatan sebanyak 3 (tiga) unit Pelabuhan Laut yang terdiri dari Pelabuhan Ulima pada Kecamatan Ambalau, Pelabuhan Laut Namrole pada Kecamatan Namrole, Pelabuhan Laut Leksula pada Kecamatan Leksula, sementara pelabuhan pengumpan lokal terdapat pada

Kecamatan Waesama pada Dusun Wasalai Desa Wamsisi, Desa Tifu, Dusun Wasasi Desa waemulang pada Kecamatan Leksula, Desa Nanali dan Desa Biloro Kecamatan Kepala Madan sedangkan Bandar Udara terletak pada Kecamatan Namrole yang merupakan ibu kota kabupaten.

2.3.2.10. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

Pada umumnya pengelolaan telekomunikasi di Indonesia dikelola oleh PT Telkom, termasuk di Kabupaten Buru Selatan. Adapun infrastruktur telekomunikasi yang berfungsi untuk memancarkan signal telepon seperti tower yang berjumlah 24 unit yang tersebar di 6 kecamatan.

Tabel 2.40. Jumlah Tower Telkomsel Menurut Kecamatan Serta Jenis Tower Tahun 2020

No	Nama Kecamatan	Menara Telkomsel	Jenis Tower		
			BTS Combat	BTS Mini	BTS Merah Putih
1	Kepala Madan	-	-	4	2
2	Leksula	-	-	2	1
3	Fena Fafan	-	-	2	-
4	Namrole	5	1	1	-
5	Waesama	-	1	1	2
6	Ambalau	-	-	1	1
Jumlah		5	2	11	6

Sumber : Dinas Kominfo 2021

2.3.2.11. Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pengembangan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan yang penting dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan. Hal tersebut ditunjukkan oleh besarnya potensi koperasi dan UMKM di Kabupaten Buru Selatan baik dari peningkatan jumlah usaha kecil dan menengah, serta berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dan jumlah unit usahanya. Jumlah koperasi di Kabupaten Buru Selatan tahun 2020 sebanyak 201 unit dan yang masih aktif sebanyak 201 unit koperasi.

Jumlah UMKM sejak tahun 2016 - 2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 jumlah UMKM sebanyak 480 unit, meningkat pada tahun 2020 menjadi 480. Pengembangan Koperasi dan UKM terus didorong melalui pengalokasian bantuan pada tahun 2011 – 2015, namun tahun 2016-2020 tidak ada

bantuan, bukan berarti pemerintah tidak memiliki kepedulian namun ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian para pelaku UKM yaitu (1) Kualitas dan kuantitas kinerja UKM perlu terukur, (2) pelaku UKM harus memiliki inovasi yang kuat untuk bersinergi dengan agent pembangunan yang concern bagi peningkatan usaha, (3) Pelaku UKM harus memiliki manajemen yang baik dalam pengelolaan UKM-Nya sehingga menjadi sumber informasi bagi pemerintah daerah maupun agent pembangunan lainnya dalam melakukan pemberdayaan, (4) pelaku UKM harus mampu melakukan daya saing produk dan dapat melakukan penjualan secara on- line atau dapat masuk pada jejaring pemasaran secara on-line misalnya toko pedia, Maluku Dagang ataupun membentuk Buru Selatan Dagang.

**Tabel 2.41. Capaian Indikator bidang Koperasi dan UKM
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Koperasi	Unit	199	199	199	199	201
2	Jumlah koperasi aktif	Unit	199	199	199	199	201
3	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	Unit	-	-	-	-	-
4	Jumlah BPR/LKM	Unit	-	-	-	-	-
5	Jumlah Usaha Mikro dan kecil	Unit	480	480	480	449	480

Sumber : Dinas Koperasi UKM, BPS Buru Selatan 2021.

2.3.2.12. Bidang Urusan Penanaman Modal

Jumlah realisasi investasi di Kabupaten Buru Selatan tahun 2014 - 2017 belum ada data yang tersedia, namun pada tahun 2018 jumlah realisasi investasi mencapai 13.53 milyar atau sebesar 2.64 persen. Sementara jumlah ijin investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Buru Selatan selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Ijin yang dikeluarkan tahun 2014 sebanyak 502 ijin meningkat menjadi 575 ijin pada tahun 2018. Untuk lama proses perijinan tahun 2014-2018 tidak mengalami perubahan, dimana lama proses pembuatan perijinan tersebut membutuhkan waktu 7 hari.

**Tabel 2.42. Capaian Kinerja Bidang Penanaman Modal dan PTSP
di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2014-2018**

No.	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Realisasi Investasi (%)					
	➤ PMDN	0	0	0	0	2.64
	➤ PMA	-	-	-	-	-
2	Realisasi Investasi (dalam Rp)					
	➤ PMDN	-	-	-	-	13,533,295,500
	➤ PMA	-	-	-	-	-
3	Jumlah Ijin Investasi (Ijin)	502	502	127	127	575
4	Lama Proses Perijinan (Hari)	7	7	7	7	7

Sumber: DPM dan PTSP Kab. Buru Selatan, Dok LPPD 2015-2019

2.3.2.13. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

a) Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga

Untuk mendukung perkembangan olahraga di Buru Selatan, maka ketersediaan sarana dan prasarana olahraga menjadi hal yang penting. perkembangan sarana prasarana olah raga selama kurun waktu 2016 – 2020 belum mengalami peningkatan sejak tahun 2016-2020, dimana sarana lapangan sepak bola, Lapangan Basket, Lapangan Bola Volly dan Bulu Tangkis masing – masing terdapat satu unit lapangan.

**Tabel 2.43. Jumlah sarana dan prasaran olahraga di Kabupaten Buru Selatan
Tahun 2016-2020**

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Stadion Sepak Bola (unit)	1	1	1	1	1
2	Lapangan Bulu Tangkis (unit)	1	1	1	1	1
3	Lapangan Bola Basket (unit)	1	1	1	1	1
4	Kolam Renang (unit)	0	0	0	0	0
5	Bola Voli (unit)	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Buru Selatan, 2020

Meskipun perkembangan sarana prasarana olahraga cenderung stagnan, namun partisipasi serta minat masyarakat dalam dunia olahraga selalu mengalami peningkatan.

b) Jumlah organisasi kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Buru Selatan

Pemuda merupakan salah satu pemangku kepentingan yang berperan penting dalam keberhasilan pembangunan, jumlah organisasi kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Buru Selatan hingga tahun 2020 telah mencapai 21 lembaga/

organisasi, sehingga masih memiliki potensi yang besar untuk berperan aktif dalam pembangunan.

**Tabel 2.44. Jumlah Organisasi Kepemudaan dan Olahraga
Kab. Buru Selatan Tahun 2020**

NO.	INDIKATOR	JUMLAH
1	KNPI Kabupaten	2 Lembaga
2	Organisasi Olahraga binaan Dispora Kab	3 lembaga
2	OKP Binaan Dispora Provinsi	16 Lembaga
Jumlah		21 Lembaga

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Buru Selatan, 2020

2.3.2.14. Bidang Urusan Statistik

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, indikator yang digunakan untuk menggambarkan capaian pembangunan Urusan Statistik adalah ketersediaan dokumen perencanaan seperti Provinsi Dalam Angka dan Buku PDRB Kabupaten Buru Selatan. Di Kabupaten Buru Selatan, kedua dokumen ini disusun oleh Badan Pusat Statistik. Penyusunan kedua dokumen tersebut sangat penting berkaitan dengan ketersediaan data dalam merancang kebijakan pembangunan dan penentuan program pembangunan.

**Tabel 2.45. Ketersediaan Dokumen Pendukung Perencanaan
Di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016 – 2020**

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kabupaten Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	ada	Ada
2.	Buku PDRB Kabupaten	Ada	Ada	Ada	ada	Ada

Sumber : BAPPEDA Buru Selatan, 2020

2.3.2.15. Bidang Urusan Persandian

Presentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah dari tahun 2016-2020 tidak mengalami perkembangan

Tabel 2.46. Persentase OPD yang telah menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Sumber : Dinas Kominfo Kab. Buru Selatan, 2020

2.3.2.16. Bidang Urusan Kebudayaan

Budaya Buru Selatan adalah aspek kehidupan yang mencakup adat istiadat, kepercayaan, seni dan kebiasaan lainnya yang dijalani dan diberlakukan oleh masyarakat Buru Selatan. Buru Selatan memiliki beragam budaya dan adat istiadat. Warisan Budaya di Buru Selatan terbagi menjadi dua yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya bukan benda. Kegiatan festival masih sangat terbatas, karena kebutuhan sarana juga masih sangat terbatas.

Tabel 2.47. Capaian Indikator Bidang Kebudayaan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (kali)	3	3	3	0	0
2	Sarana penyelenggaraan senidan budaya (Unit)	1	1	1	1	1
3	Benda, Situs dan kawasancagar budaya yang dilestarikan (%)	82,76	10,34	10,34	63,41	63,41

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2021

2.3.2.17. Bidang Urusan Perpustakaan

Perkembangan perpustakaan di Kabupaten Buru Selatan tahun 2016-2020 juga mengalami fluktuasi, dimana Prensentase Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah pada tahun 2016 mencapai 45,18 persen menurun menjadi

24,57 persen pada tahun 2020, hal yang sama juga berkorelasi dengan persentase pengunjung juga mengalami penurunan. Menurunnya tingkat pengunjung dikarenakan dengan pesatnya dunia IT, orang sangat mudah untuk mengakses informasi, bahkan ketersediaan buku di perpustakaan juga tidak ter “up date” selain itu juga tidak lengkap. Kondisi ini bukan saja di Kabupaten Buru Selatan namun juga di Kota Ambon sebagai ibu Kota Provinsi Maluku. Kedepan dapat direncanakan basis data dengan menyediakan sumber buku-buku yang dapat diinformasikan kepada masyarakat tetapi harus berbasis internet, sehingga masyarakat akan mudah mengaksesnya.

**Tabel 4.48. Capaian Indikator Bidang Perpustakaan
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Presentase Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (%)	45,18	20,79	22,99	23,40	24,57
2	Presentase Pengunjung Perpustakaan (%)	17,25	4,38	2,49	2,37	2,25

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (data diolah Bappeda),2021

2.3.2.18. Bidang Urusan Kearsipan

Pengelolaan arsip dinamis maupun statis kewenangan daerah merupakan salah satu urusan kearsipan di daerah. Tabel berikut merupakan rincian data arsip Kabupaten Buru Selatan sampai dengan tahun 2020.

**Tabel 2.49. Capaian Indikator Bidang Kearsipan
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Presentase penerapan pengelolaan arsip secara baku (%)	90,91	97,73	100	100	100
2	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan (kali)	1	0	1	1	1

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, (data diolah Bappeda),2021

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

2.3.3.1. Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan

a) Produksi Perikanan.

Produksi perikanan di Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2018 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2018 mencapai 15,022 ton, capaian ini dipengaruhi oleh produksi perikanan pada Kecamatan Kepala Madan yang merupakan kawasan minapolitan Buru Selatan mencapai 4.423,25 ton, diikuti oleh Kecamatan Namrole sebesar 4.127,95 ton dan yang terkecil pada Kecamatan Ambalau sebesar 1.042 ton, sementara Kecamatan Fena Fafan tidak ada produksi dikarenakan kecamatan tersebut merupakan kecamatan di wilayah pegunungan. Total produksi mengalami peningkatan di tahun 2019 sebesar 19,71 persen.

Tabel 2.50. Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Buru Selatan tahun 2018-2019

No	Nama Kecamatan	Produksi (Ton) Tahun 2018, 2019		Total
		Ikan Laut	Ikan Darat	
1	Kepala Madan	4423	0.25	4423.25
2	Leksula	3115	1.35	3116.35
3	Fena Fafan	-	-	0
4	Namrole	4127	0.95	4127.95
5	Waesama	2313	-	2313
6	Amabalau	1042	-	1042
Jumlah (2018)		15020	2.55	15.022,55
1.	Kepala Madan	5.223,87	-	5.223,87
2.	Leksula	2.983,30	1.853	4.8926,10
3.	Fena Fafan	-	-	-
4.	Namrole	3729,10	1.197	4.926,10
5.	Waesama	1.789,98	-	1.789,98
6.	Amabalau	1.2	-	1.206,84
Jumlah (2019)		14.933,01	3.050	17.983,01

Sumber: Dinas Perikanan, BPS Kab. Buru Selatan tahun 2021

Selama kurun waktu 2016-2020, produksi perikanan di Kabupaten Buru Selatan terus mengalami peningkatan. Tahun 2016 jumlah produksi ikan sebesar 10.201 ton atau senilai Rp.30.604.000.000,- meningkat menjadi 17.983 ton atau senilai Rp. 53.950.763.000,- pada tahun 2020. Produksi perikanan didukung dari produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap fokus pada pengelolaan dan pemanfaatan perikanan tangkap sedangkan perikanan budidaya fokus pada peningkatan produksi.

Tabel 2.51. Produksi Perikanan Di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	10,201	11,885	15,023	17.983	17.983
	a. Laut	Ton	10,201	11,757	15,021	14.933	14.933
	b. Darat/Tambak	Ton	-	128.00	2.55	3.050	3.050
2	Nilai Produksi	(Rp.000.000)	30,604	35,655	45,068	53,950	53,950

Sumber: Dinas Perikanan, BPS Kab. Buru Selatan tahun, 2021

b) Potensi Unggulan

Dari tahun 2014-2018 Potensi unggulan perikanan yakni ikan Cakalang/Tongkol, Ikan Tuna, Ikan Layang, Ikan Teri, Ikan Julung, Ikan Selar, Ikan Ekor Kuning dan Ikan Kowe merupakan potensi perikanan yang dominan di Kabupaten Buru Selatan. Total capaian produksi sebesar 4.793 ton tahun 2014, meningkat menjadi 12.184 Ton pada tahun 2018.

Tabel 2.52. Komoditi Unggulan di Kab. Buru Selatan Tahun 2014-2018

No	Jenis Ikan	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Tongkol/cakalang	Ton	1,169	1,190	2,850	3,720	4,879
2	Tuna	Ton	617	617	1,830	3,050	3,050
3	Layang	Ton	977	1,077	1,730	1,780	1,890
4	Teri	Ton	645	645	605	908	910
5	Julung	Ton	164	164	765	534	550
6	Selar	Ton	882	982	413	516	523
7	Ekor Kuning	Ton	210	210	215	280	280
8	Kuwe	Ton	129	129	91	99	102
Jumlah		Ton	4,793	5,014	8,499	10,887	12,184

Sumber: Dinas Perikanan, BPS Kab. Buru Selatan tahun, 2019

Secara persentase untuk produksi perikanan dan konsumsi ikan di Kabupaten Buru Selatan tahun 2016-2020 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. produksi perikanan mencapai 97,96 persen pada tahun 2016 meningkat menjadi 163,51 persen pada tahun 2020 dan capaian ini telah melampaui target yang di tetapkan, sementara konsumsi ikan pada tahun 2016-2020 mengalami peningkatan sejak tahun 2017-2020.

Tabel 2.53. Capaian Indikator Bidang Perikanan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase produksi perikanan (%)	97,96	112,04	127,78	163,51	163,51
2	Persentase konsumsi ikan (%)	91,83	111,31	162,85	173,92	184,07

Sumber : Dinas Perikanan, Dok. LPPD Kab. Buru Selatan Tahun 2016-2020

2.3.3.2. Bidang Urusan Pariwisata

Dengan karakteristik wilayah kepulauan, Kabupaten Buru Selatan memiliki potensi pariwisata potensial dan sangat beranekaragam jenisnya, sehingga pariwisata Buru Selatan bisa dijadikan andalan di masa mendatang memberi kontribusi terhadap ekonomi daerah termasuk juga pariwisata nasional. Jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Buru Selatan menurut kewarganegaraan selama periode 2015-2020, mengalami peningkatan. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara tahun 2015 sebanyak 109 orang, meningkat menjadi 166 orang pada tahun 2018, namun di tahun 2020 tidak ada kunjungan wisatawan Mancanegara maupun Nusantara, akibat dampak covid-19.

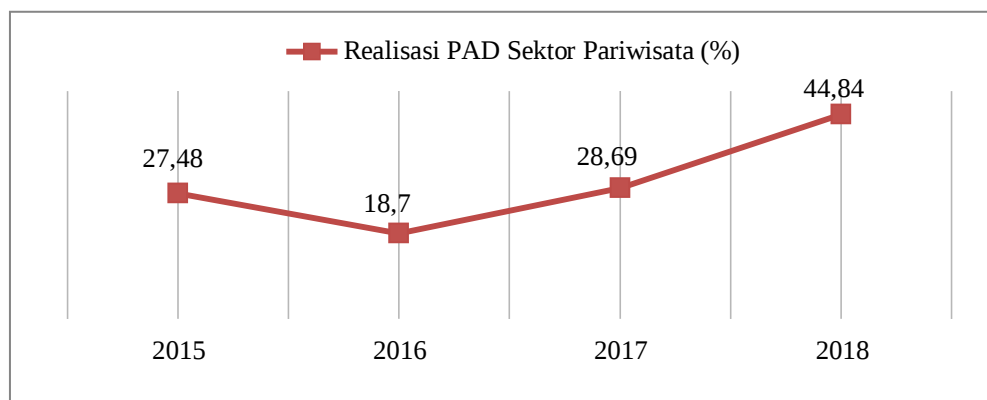
Kunjungan Wisatawan Lokal tetap ada sejak tahun 2015-2020, ini menunjukkan bahwa pergerakan masyarakat lokal atau masyarakat dari kabupaten Kota di provinsi Maluku yang melakukan kunjungan, pada saat Pembatasan sosial telah dilonggarkan. Walaupun jumlah kunjungan lokal mengalami penurunan tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2018, namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2016, kondisi ini menunjukkan bahwa, kunjungan wisatawan lokal sebenarnya tidak terpengaruh dengan adanya kondisi covid-19 kecuali untuk Wisatawan Mancanegara dan Nusantara.

Tabel 2.54. Kunjungan Wisatawan Mancanegara, Nusantara dan Lokal di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015-2020

Tahun	Wisatawan (orang)			Total
	Mancanegara	Nusantara	Lokal	
2015	109	521	1,978	2,608
2016	116	867	2,077	3,060
2017	124	1,669	2,615	4,408
2018	166	1,710	3,866	5,742
2020			2702	2702
Jumlah	515	4,767	10,536	15,818

Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Buru Selatan, 2018 dan BPS Provinsi Maluku, 2021

Kalau dilihat pada capaian kunjungan wisata selama periode tersebut tidak terlalu signifikan, hal tersebut diakibatkan potensi kawasan wisata sampai dengan saat ini masih terfokus pada Kawasan Wisata Pantai pada Kecamatan Namrole, seperti pantai Wamsoba, Masnana dan Wali, sementara potensi wisata lainnya seperti, Kawasan Wisata Air Babunyi, Air Jin, Pulau Tomahu dan kawasan wisata desa Tifu, serta kawasan wisata lainnya belum bisa untuk dikembangkan diakibatkan aksesibilitas, dimana akses jalan belum terbangun menuju kawasan tersebut.



Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Buru Selatan tahun, 2019

Gambar 2.19. Realisasi PAD sektor Pariwisata di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2014-2018

Tabel 2.55. Realisasi Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Kabupaten Buru Selatan Tahun 2014-2018

No.	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB (%)	0	26,67	26,67	13,00	13,00

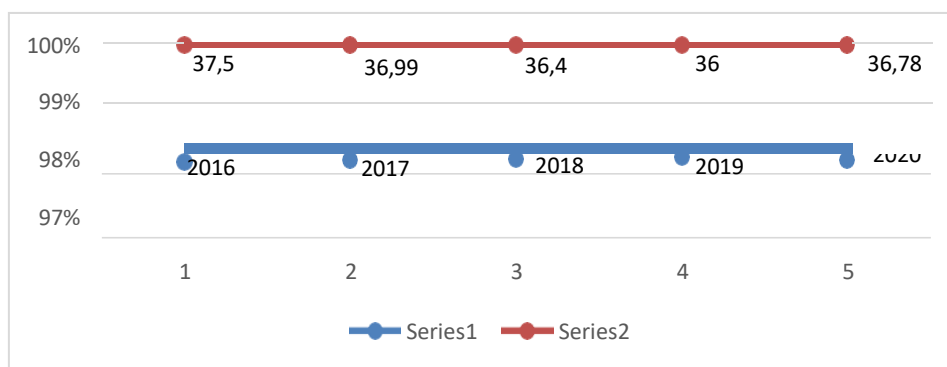
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dok. LPPD Kab. Buru Selatan Tahun 2014-2019

2.3.3.3. Bidang Urusan Pertanian

a) Kontribusi Sektor Pertanian , Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB

Sektor pertanian (termasuk perikanan dan kehutanan) menempati posisi pertama kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Buru Selatan, namun capaian terlihat mengalami fluktuasi naik dan turun. Rata-rata kontribus dalam lima

tahun 2016-2020 sebesar 36,73, secara terinci dapat dilihat pada Gambar berikut :



Sumber : Buru Selatan Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 2.20. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB ADHB di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016 – 2020

Penurunan ini diduga dipengaruhi oleh produksi, produktivitas komoditi baik tanaman tahunan, peternakan, perikanan dan harga pasar. Pala, kelapa dan cengkeh merupakan komoditas perkebunan merupakan tanaman tahunan yang mengalami periode panen raya dan tergantung musim produksi.

b) Produksi Komoditas Pertanian

1) Tanaman Pangan

Produksi tanaman pangan diklasifikasikan dalam dua bagian besar yaitu pangan strategis nasional dan pangan strategis lokal. Komoditas strategis nasional terdiri dari padi, jagung dan kedelai, dimana produksi padi bersumber dari padi sawah dan padi ladang.

Tabel 2.56. Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2014 – 2018

No	Komoditas	Luas Tanam (Ha)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Padi Sawah	-	-	-	-	-
2.	Padi Ladang	310,08	90,00	424,00	521,00	521,00
3.	Jagung	1.050,60	1.006,00	507,00	1.120,00	222,00
4.	Kedelai	-	-	141,00	32,00	-
5.	Kacang Tanah	30,60	117,00	22,00	5,00	35,00
6.	Kacang Hijau	5,10	48,00	4,00	8,00	10,00
7.	Ubi Kayu	37,34	363,00	392,00	406,00	944,00
8.	Ubi Jalar	27,24	135,00	72,00	32,00	34,00
TOTAL		1.461	1.759	1.562	2.124	1.766

Sumber: Dinas Pertanian, BPS Kab. Buru Selatan, 2019.

Rata-rata pertumbuhan luas tanam padi ladang mengalami peningkatan dari tahun 2014-2018. Pada tahun 2014 mencapai 310,08 Ha meningkat menjadi 521 Ha pada tahun 2018. Pertumbuhan komoditas jagung dan kacang tanah dari tahun 2014 – 2018 selalu mengalami fluktuasi.

2) Perkebunan

Produksi tanaman perkebunan pala, kelapa dan cengkeh yang merupakan komoditas unggulan daerah, dimana pada tahun 2018 mengalami peningkatan. Produksi pala mencapai 4.753 ton ; cengkeh 8.510 ton ; dan kelapa mencapai 3.724 ton. Terdata juga produksi komoditas perkebunan lainnya seperti kakao mencapai 5.837 Ton dan kopi mencapai 40 Ton. Namun di tahun 2019-2020, tiga komoditas perkebunan mengalami penurunan produksi secara jelas dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.57. Produksi Tanaman Perkebunan Di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020

No	Jenis Komoditi	Produksi/ton				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kelapa	9.496,00	5.711,00	3.724,00	2.715,00	2.842,00
2	Cengkeh	2.197,62	2.818,50	8.510,00	1.879,00	1.929,00
3	Pala	4.625,00	1.299,00	4.753,00		
4	Kakao	4.098,00	720,00	5.837,00	680,00	877,00
5	Kopi	40,00	10,57	40,00	-	-
TOTAL		13.635	20.457	10.559	5.274,00	5.648,00

Sumber: BPS Kab. Buru Selatan, 2021

3) Peternakan

Jenis peternakan yang dikembangkan di Kabupten Buru Selatan terdiri dari ternak besar yaitu: sapi, kerbau, kuda dan ternak kecil yaitu: kambing, domba, babi dan jenis unggas yaitu ayam kampung dan itik. Populasi ternak besar dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 selalu mengalami fluktuasi. Dan penurunan tertinggi terjadi di tahun 2020 sejak adanya pandemic covid-19, terjadi penurunan sebesar 1.816 ekor komoditi dengan jumlah penurunan tertinggi ada pada ternak babi

sebanyak 2.117 ekor babi selisih penurunan di tahun 2020 terhadap tahun 2018.

Populasi ternak kecil juga mengalami perkembangan yang fluktuatif sejak tahun 2016-2020. Namun demikian dibandingkan dengan tahun 2018, jumlah populasi ternak kecil mengalami peningkatan di tahun 2020 sebanyak 37.198 ekor, dengan peningkatan tertinggi ada pada ternak itik Manila dengan persebaran tertinggi ada di Kecamatan Waesama dan terendah ada di Kecamatan Fena Fafen (BPS Buru Selatan 2021).

Tabel 2.58. Populasi Ternak Di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020

No	Jenis Komoditi	Populasi (Ekor)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sapi	2.171,00	1.923,00	2.171,00	1.692,00	1.810,00
2	Kerbau	33,00	-	-	136,00	142,00
3	Kuda	24,00	25,00	-	-	-
4	Kambing	3.800,00	4.021,00	3.800,00	3.378,00	3.555,00
5	Domba	-	-	-	-	-
6	Babi	2.536,00	3.787,00	2.910,00	3.787,00	1.670,00
TOTAL		8.564	9.756	8.881	8.993	7.177,00
7	Ayam Kampung	252.856,00	252.856,00	252.856,00	266.096,00	301.212
8	Ayam Petelur	-	-	-	-	-
9	Ayam Buras	-	-	-	-	-
10	Itik Pedaging	1.564,00	-	-	-	-
11	Itik manila	7.824,00	8.682,00	1.564,00	1.731,00	3.813,00
TOTAL		262.244	261.538	254.420	267.827	305.025

Sumber: Dinas Pertanian, BPS Kab. Buru Selatan, 2021

2.3.3.4. Bidang Urusan Kehutanan

Untuk urusan Kehutanan pada tahun 2017 sudah dilimpahkan kewenangannya ke Provinsi Maluku, sehingga data capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir tahun 2014 - 2018 tidak tersedia secara teknis di Kabupaten Buru Selatan, hal tersebut akan dikonsultasikan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku.

Berdasarkan Surat Keputusan Permenhut Nomor. 871 Tahun 2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 360.158 (Tiga Ratus enam Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Delapan) Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 20.668 (Dua Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan) Hektar Dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 3.313 (Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Belas) Hektar di Provinsi Maluku.

Di dalam Surat Keputusan Permenhut Nomor. 871 Tahun 2013 tersebut menjelaskan bahwa:

1. Perubahan akan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 360.158 (tiga ratus enam puluh ribu seratus lima puluh delapan) hektar, yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut:

No	Perubahan Peruntukan	Luas (Ha)
1	HPT menjadi APL	± 11.482
2	HP menjadi APL	± 26.863
3	HPL menjadi APL	± 321.813
Jumlah		± 360.158

Sumber : RTRW Kabupaten Buru Selatan

2. Perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 20.668 (dua puluh ribu enam ratus enam puluh delapan) hektar, yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut:

No	Perubahan Peruntukan	Luas (Ha)
1	HPT menjadi HPK	± 4.785
2	HP menjadi KSA/KPA	± 5.824
3	HP menjadi HL	± 2.332
4	HP menjadi HPK	± 4.108
5	HPT menjadi HL	± 1.216
6	HPK menjadi HL	± 2.403
Jumlah		± 20.668

Sumber : RTRW Kabupaten Buru Selatan

3. Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 3.313 (tiga ribu tiga ratus tiga belas) hektar, yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut:

No	Perubahan Peruntukan	Luas (Ha)
1	APL menjadi HL	± 2.326
2	APL menjadi HPT	± 987
Jumlah		± 3.313

Sumber : RTRW Kabupaten Buru Selatan

Surat Keputusan Permenhut Nomor 854 Tahun 2014 tentang Kawasan Hutan Dan Konservasi Perairan Provinsi Maluku. Dalam SK tersebut memutuskan bahwa kawasan hutan dan konservasi perairan Provinsi Maluku seluas $\pm 3.919.617$ hektar, yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut:

1. Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), seluas ± 429.538 hektar yang terdiri dari:

- a) Daratan seluas ± 420.330 hektar
- b) Perairan seluas ± 9.208 hektar
2. Kawasan hutan lindung (HL) seluas ± 627.256 hektar
3. Kawasan hutan produksi terbatas (HPT) seluas ± 894.258 hektar
4. Kawasan hutan produksi tetap (HP) seluas ± 643.699 hektar
5. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas ± 1.324.866 hektar.

Tabel 2.59. Rencana Pola Ruang Kehutanan Kabupaten Buru Selatan (Ha)

No	Pola Ruang	Luas Pola Ruang Per Kecamatan (Ha)						Total
		Kepala Madan	Leksula	Fena fafan	Namrole	Waesama	Ambalau	
1	LINDUNG							110,698.13
	a. Hutan Lindung	29,517.31	51,190.66	3,623.74	6,063.33	9,760.92	10,542.17	110,698.13
	b. Perlindungan Setempat							24,387.92
	* Sempadan Pantai	1,449.73	1,381.19	-	459.31	451.33	1,648.02	5,389.58
	*Sempadan Sungai	4,626.18	7,503.30	1,085.30	2,653.71	2,437.13	692.72	18,998.34
	c. Suaka Alam	2,352.63	1,020.70	-	-	-	-	3,373.33
2	BUDIDAYA							317,350.18
	a. Hutan Produksi							317,350.18
	*HPT	53,450.32	31.94	2,215.60	28,717.59	14,506.86	-	98,922.31
	*HP	8,934.68	47,307.40	3,075.38	20,771.98	22,487.76	-	102,577.20
	*HPK	25,245.49	61,097.24	3,181.91	10,121.54	1,506.58	14,697.91	115,850.67

Sumber : RTRW Kabupaten Buru Selatan

2.3.3.5. Bidang Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

Kebutuhan akan listrik di Kabupaten Buru Selatan sangatlah penting bagi masyarakat karena sebagai penunjang aktivitas kehidupan sehari-hari. Sampai dengan tahun 2020 pasokan listrik yang ada di wilayah Kabupaten Buru Selatan, pada umumnya dipasok oleh cabang PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Ulp Namrole, Kp Wamsisi, Kp. Leksula, Kp Ambalau, dengan jumlah pelanggan sebanyak 11.454, dan daya tersambung 10.779 KVA.

Tabel 2.60. Jumlah Pelanggan, Daya Tersambung, Kwh Terjual Serta Listrik Terjual pada PT. PLN (Persero) Cabang/Ranting PLN Tahun 2020

No	Unit	Jumlah Pelanggan	Daya Tersambun g (KVA)	Kwh Terjual	Listrik Terjual (Rp)
1	PLN Ulp Namrole	4.493	5.532	424.744	462.995.443
2	PLN Kp Wamsisi	3.162	2.703	189.939	207.044.971
3	PLN Kp Leksula	2.788	1.941	100.380	109.420.303
4	PL Kp Ambalau	1.011	603	42.403	46.225.757
	Jumlah	11.454	10.779	757.470	825.686.474

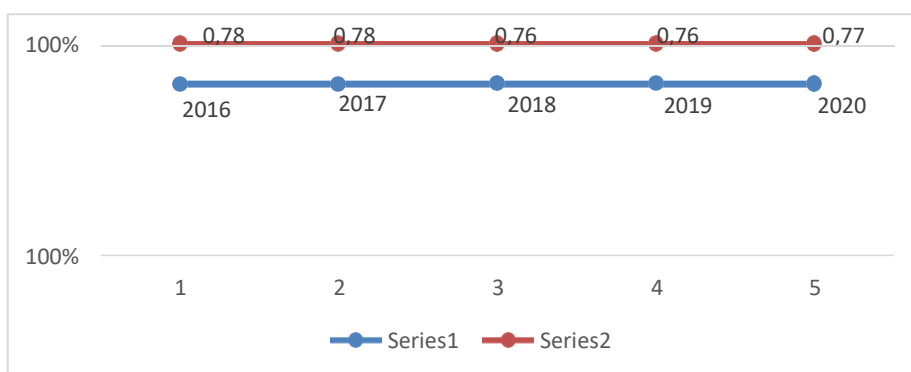
Sumber : PLN Ranting Namrole Tahun 2021

Rasio elektrifikasi pada akhir tahun 2020 secara Nasional mencapai 99,20%, Provinsi Maluku mencapai 89,45 % dan Kabupaten Buru Selatan mencapai 58,19 %, artinya dari total Rumah Tangga di Kabupaten Buru Selatan sebanyak 18.856 RT, yang menikmati listrik hanya sebesar 11.454 RT (Pelanggan).

Adanya sumberdaya air tersebut pada umumnya terdapat di daerah pedesaan, antara lain di daerah Kecamatan Namrole (sungai Waetina), Kecamatan Waesama (Sungai Waepoli), Kecamatan Leksula dan Fenaafan (Sungai Waemala). Berdasarkan hasil penelitian dari hasil survey menyebutkan potensi PLTA dan PLTMH di Kabupaten Buru Selatan bila dikembangkan secara baik dapat membantu pemerintah dalam penyediaan energi listrik bagi masyarakat khususnya di daerah-daerah terpencil di wilayah Kabupaten Buru Selatan.

a) Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertambangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Buru Selatan lima tahun terakhir mengalami fluktuasi sebagaimana pada grafik di bawah ini.

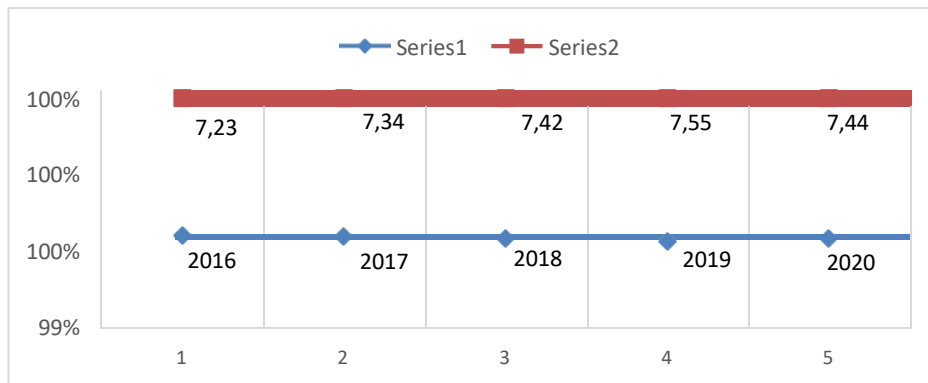


Sumber : BPS Kab. Buru Selatan Tahun 2021.

Gambar 2.21. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020

2.3.3.6. Bidang Urusan Perdagangan

Aktivitas perdagangan pada umumnya terfokus pada sejumlah pasar yang ada, dimana sampai tahun 2021 di Kabupaten Buru Selatan terdapat 1 pasar Daerah dan beberapa pasar Kecamatan yang tersebar pada 6 Kecamatan dengan berbagai tipe pasar. Untuk meningkatkan daya jual beli maka dilakukan berbagai upaya terutama pembangunan pasar yang baru dan perbaikan infrastruktur pasar yang telah ada. Kondisi sekarang ini Pasar Namrole merupakan pusat perdagangan Kabupaten Buru Selatan. Barang yang masuk pada pasar Namrole lebih didominasi oleh bahan makanan dan non makanan berasal dari perkebunan dan pertanian masyarakat setempat, dan Kabupaten tetangga (Buru), Kota Ambon dan Surabaya melalui Kapal Tol Laut.

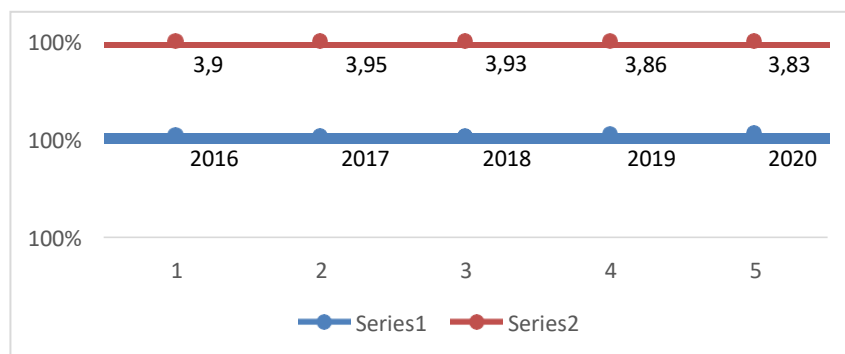


Sumber : BPS Kab. Buru Selatan Tahun 2021.

Gambar 2.23. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020

2.3.3.7. Bidang Urusan Perindustrian

Sama halnya dengan sektor lainnya, perkembangan perindustrian di Kabupaten Buru Selatan tahun 2016-2020 juga mengalami fluktuasi, hal tersebut dapat dilihat dimana kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB pada tahun 2016 mencapai 3,90 persen, naik menjadi 3,95 persen, dan turun di tahun 2019 maupun di tahun 2020. Secara rata-rata pertumbuhan sektor industry di tahun 2016-2020 sebesar 3,90 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Kab. Buru Selatan Tahun 2021

Gambar 2.24. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020

Pengelompokan industri berdasarkan jumlah tenaga kerja dibagi menjadi tiga kelompok yakni industri besar, industri sedang, industri kecil dan industri rumah tangga. Industri besar adalah industri yang menyerap 100 atau lebih pekerja, industri sedang/menengah adalah industri dengan jumlah tenaga kerja antara

20-99 orang, sedangkan industri kecil dan rumah tangga jumlah tenaga kerjanya kurang dari 19 orang yang umumnya berasal dari anggota keluarga.

Sektor industri di Kabupaten Buru Selatan memegang peranan cukup penting sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Jumlah perusahaan yang tercatat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru Selatan tahun 2018 sebesar 160 perusahaan dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 312 tenaga kerja.

Tabel 2.61. Jumlah Perusahaan Menurut Jenis Kegiatan dan Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018

Jenis Kegiatan	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja
(1)	(2)	(3)
Makanan dan Minuman	35	153
Tembakau	-	-
Tekstil	-	-
Pakaian Jadi	5	12
Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	3	7
Kayu, Barang dari Kayu (tidak termasuk mebeller), dan Barang-barang Anyaman dari Rotan	4	17
Kertas dan Barang dari Kertas	-	-
Penerbitan, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	1	5
Barang-barang dari Batu Bara, Pengilangan Minyak Bumi	-	-
Pengolahan Gas Bumi, Barang-barang dari Hasil Pengilangan Minyak Bumi, dan Bahan Bakar Nuklir	-	-
Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia	-	-
Karet, Barang dari Karet, dan Barang dari Plastik	1	2
Barang Galian Bukan Logam	-	-
Logam Dasar	-	-
Barang-barang dari Logam Kecuali Mesin dan Peralatannya	-	-
Mesin dan Perlengkapannya	2	8
Mesin dan Peralatan Kantor, Akuntansi, dan Pengolahan Data	-	-
Mesin Listrik lainnya dan Perlengkapannya	-	-
Radio, Televisi, dan Peralatan Komunikasi, serta Perlengkapannya	2	7
Peralatan Kedokteran, Alat-alat Ukur, Peralatan Navigasi, Peralatan Optik, Jam dan Lonceng	-	-

Kendaraan Bermotor	1	3
Alat Angkutan	-	-
Furnitur dan Industri Pengolahan Lainnya	106	98
Daur Ulang	-	-
JUMLAH	160	312

Sumber : Dinas Industri dan Perdagangan, BPS Kab. Buru Selatan tahun 2019

2.3.3.8. Bidang Urusan Transmigrasi

Bidang Urusan transmigrasi di Kabupaten Buru Selatan di tahun 2016 belum terlaksana dengan baik, dimana pada tahun 2016 kegiatan transmigrasi belum dapat dilaksanakan atau masih mencapai 0.00 persen sampai dengan tahun 2020. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.62. Capaian indikator Bidang Transmigrasi Kabupaten Buru Selatan tahun 2016-2020

INDIKATOR	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Transmigrasi Swakarsa (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: Dok. LPPD Kab. Buru Selatan Tahun 2016-2020

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Daya saing merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim investasi dan sumber daya manusia.

Tabel 2.63. Capaian indikator daya saing daerah Kabupaten Buru Selatan tahun 2014-2018

NO	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Ijin Investasi (Ijin)	522	30	216	312	312
2	Lama Proses Perijinan (Hari)	6	5	4	3	2

Sumber: Dok. LPPD Kab. Buru Selatan tahun 2015-2019

2.4.1. Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Per Bulan

Pengeluaran rumah tangga dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi rumah tangga maka semakin atraktif bagi kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran rumah tangga diketahui dengan menghitung angka konsumsi rumah tangga. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk.

Tabel 2.64. Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016 – 2020

Rata-rata pengeluaran perkapita per bulan berdasarkan jenis pengeluaran	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Makanan (Rp)	414.338	418.729	345.504	409.685	423.601
Non Makan (Rp)	265.028	242.844	262.763	346.948	290.452
Total Pengeluaran rata-rata perkapita (Rp)	679.366	661.573	608.267	756.633	714.053
Presentase Makanan (%)	60,99	63,29	56,80	54,15	59,32
Presentase Non Makanan (%)	39,01	36,71	43,20	45,85	40,68

Sumber : Buru Selatan Dalam Angka 2021, Data Diolah BAPELITBANG

Berdasarkan Tabel 2.64 di atas terlihat rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di Kabupaten Buru Selatan dari tahun 2016 – 2020 cenderung mengalami fluktuasi. Kondisi ini didasarkan pada daya beli masyarakat.

2.4.2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) > 100 menunjukkan petani mengalami surplus, dimana harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya, pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. Sebaliknya jika NTP < 100

menunjukkan petani mengalami defisit, dimana kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibanding kenaikan harga barang konsumsinya, pendapatan petani turun dan lebih kecil dari pengeluarannya. NTP = 100 menunjukkan petani mengalami impas, dimana kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan kenaikan/penurunan harga barang konsumsi, pendapatan petani sama besar dengan pengeluarannya.

Tabel 2.65. Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016 – 2020

INDIKATOR	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
NILAI TUKAR PETANI (NTP)	135,13	137,42	139,59	139,59	139,59
NILAI TUKAR NELAYAN	104,74	105,08	107,37	111,27	115,15

Sumber : Dinas Pertanian, Dinas Perikanan Kab. Buru Selatan, 2021

Pada tabel di atas ditampilkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN), dimana NTP dan NTN Kabupaten Buru Selatan dari tahun 2016 – 2020 selalu mencapai angka di atas 100, NTP semakin membaik di tahun 2020 yang mencapai 139,59. Hal ini menunjukkan bahwa petani dan nelayan di Buru Selatan mengalami surplus atau pengeluaran petani Maluku lebih kecil dibanding dengan pendapatan petani dan nelayan dari penjualan produk pertanian dan perikanan.

Pada tahun 2016 terjadi penurunan NTP dibanding tahun sebelumnya dan NTN tahun 2016 – 2020 juga mengalami peningkatan dibanding capaian pada tahun 2016. Fluktuatifnya capaian NTP menunjukkan harga-harga komoditas pertanian yang sangat tergantung dengan faktor musim. Harga meningkat apabila jumlah produksi sedang mengalami penurunan seperti pada musim kemarau. NTN dipengaruhi oleh musim (musim angin barat dan musim angin timur pada lokasi yang berbeda saat gelombang laut meningkat, produksi ikan menurun serta disebabkan dan kebijakan nasional (moratorium) tidak adanya kapal-akapal asing yang menjadi pembeli utama perikanan budidaya (contoh : ikan kerapu yang terjual dengan harga tinggi). Sebaliknya harga akan menurun apabila persediaan komoditas sentra-sentra pertanian dan perikanan melimpah karena musim panen.

2.4.3. Capaian Pembangunan Kabupaten Buru Selatan

Keseluruhan capaian pembangunan Kabupaten Buru Selatan yang telah digambarkan sebelumnya secara rinci pada capaian kinerja daerah, dapat dilihat pada Tabel 2.66 Terdapat beberapa indikator yang capaiannya masih di bawah target. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, belum optimalnya sinkronisasi perencanaan antar level pemerintah dan tentunya karena terbatasnya anggaran pembangunan daerah.

Tabel 2.66. Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016 – 2020

PNo.	Indikator Kinerja Daerah	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi										
1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6.00	6.18	6.05	6.13	6.10	6.02	6.15	5,88	6.20	-0,01
1.2.	Laju inflasi (%)	3,50	2,24	3,50	1,01	3,50	1,31	5,50	2,97	5,50	4,58
1.3.	PDRB per kapita (Rp.)	18.660.000	18.460.000	20.190.000	19.670.000	21.720.000	20.950.000	23.250.000	21.200.000	24,780,000	22.100.000
1.4.	Indeks Gini	0,35	0,29	0,35	0,30	0,35	0,30	0,35	0,31	0,35	0,32
1.5.	Rasio Penduduk miskin (%)	17.39	16,86	16.93	16.83	16.47	16.31	16.01	16,13	15.55	15,75
2.	Kesejahteraan Sosial										
2.1	Pendidikan										
2.1.1	Angka melek huruf (%)	94.50	94,68	95.00	97,90	95.50	96,43	96.00	96,18	96.50	97,68
2.1.1	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	11.86	12,22	11.91	12,28	11.96	12,48	12.91	12,68	13.14	12,69
2.1.2.	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	7.23	6,96	7.51	7,13	7.79	7,42	8.07	7,70	8.35	7,94
2.1.3.	Angka Partisipasi Kasar										
	- SD/MI	109.13	109,05	109.63	109,32	110.13	115,26	110.63	115,26	111.13	114,64
	- SLTP/MTs	94.69	98,96	95.19	85,51	95.69	86,27	96.19	86,27	96.69	88,48
	- SMA/SMK/MA	80.41	86,80	80.91	89,62	81.41	99,09	81.91	99,09	82.41	98,26
2.1.4.	Angka Partisipasi Murni										
	- SD/MI	94.86	93,62	95.36	96,86	95.86	98,37	96.36	98,37	96.86	97,86
	- SLTP/MTs	73.08	74,46	73.58	76,06	74.08	77,56	74.58	77,56	75.08	82,93
	- SMA/SMK/MA	53.28	73,74	53.78	67,38	54.28	67,17	54.78	67,17	55.28	86,48
2.1.5.	Rasio Angka Pendidikan yang ditamatkan :										
2.1.5.1	Tidak Tamat SD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	SD/MI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100.00	100,00	100.00	100,00

2.1.5.3	SMP/MTS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.5.4	SMA/SMK/MA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.5.5	D1/D2/D3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.5.6	D4/S1/S2/S3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.	Kesehatan										
2.3.1.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi per / 1000 kelahiran hidup	0.00	1,54	0.00	1,54	0.00	11,71	0.00	7,18	0.00	8,69
2.3.2.	Angka Usia Harapan Hidup (Th)	65.61	65.60	65.76	65.74	65.91	65.92	66.06	66,13	66.21	66,27
2.3.3.	Persentase Gizi buruk (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10	0.00	4.60	0.00	3.20
2.4.	Kesempatan Kerja										
2.4.1.	Rasio Penduduk Yang Bekerja (%)	99,00	63,00	100,00	62,00	100,00	68,00	100,00	86,00	100,00	97,69
2.4.2.	Angka Partisipasi Kerja (%)	70.25	64.90	70.75	64.99	71.25	70.40	71.75	73.54	72.25	73.99
2.5.	Angka Kriminalitas										
2.5.1	Rasio Kriminalitas (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Fokus Seni dan Budaya										
3.1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (Kali)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00
3.2	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya (Unit)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM										
	Pelayanan Urusan Wajib										
1.	Pendidikan										
1.1.	Pendidikan dasar:										
1.1.1	SD/MI										
	a. Angka Partisipasi Sekolah (%)	99.84	99.60	99.85	98,80	99.86	98,42	99.87	98,25	99.98	98,00
	b. Rasio Ketersediaan Sekolah	83.81	83.55	85.72	84.82	87.63	84.82	89.54	97,63	91.45	97,77
	c. Rasio guru/ murid	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.07	0.06	0.07	0.54
	d. Rasio guru/ murid per kelas rata-rata (per-1.000)	51.00	49.14	52.00	52.55	53.00	52.55	54,00	53,76	55,00	54,50

1.1.2	SMP/MTs										
	a. Angka Partisipasi Sekolah (%)	93.03	95,10	93.08	96,21	93.13	95,70	93.18	95,50	93.23	95,21
	b. Rasio Ketersediaan Sekolah (%)	95.70	99.98	97.61	105.65	99.52	105.91	100,00	89,29	100,00	94,47
	c. Rasio guru/ murid	0.05	0.04	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.10	0.05	0,12
	d. Rasio guru/ murid per kelas rata-rata (per- 10.000)	42.00	43.95	45.00	43.84	47.00	45.41	49.15	45,50	50.65	45,60
1.2.	Pendidikan Menengah										
	1. Angka Partisipasi Sekolah (%)	69.61	81,00	70.76	71,19	71.91	77,90	73.06	76,93	74.21	76,93
	2. Rasio ketersediaan sekolah (%)	61.63	73.01	63.86	73.01	66.09	73.01	68.32	51,55	70.55	41,41
	3. Rasio guru / murid	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0,05	0,60	0,05	0,60
	4. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata (per- 10.000)	50.00	53.34	52.00	53.34	55.00	53.34	57.28	53,19	59.78	53,19
	5. Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (%)	94.50	94,68	95.00	97,90	95.50	96,43	96.00	96,18	96.50	97,68
1.3.	Fasilitas Pendidikan										
	1. Sekolah kondisi bangunan baik SD/MI (%)	93.22	70,00	93.72	80,00	95.22	90,00	96.72	74,77	98.22	83,18
	2. Sekolah kondisi bangunan baik SMP/Mts (%)	92.00	70,00	94.00	80,00	96.00	90,00	97.00	86,96	98.00	85,11
	3. Sekolah kondisi bangunan baik SMA/SMK/MA (%)	71.68	70,00	75.18	80,00	78.68	90,00	82.18	95,05	85.68	100,00
1.4.	PAUD										
	Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA (siswa)	2.578	2.578	2.778	2.778	3.078	3.078	3.378	3.060	3.978	3.415
1.5.	Angka Putus Sekolah										
1.5.1.	SD/MI	0.12	0,00	0.07	0,00	0.02	0,00	0.01	0,78	0.00	0,75
1.5.2.	SMP/MTs	2.19	3,74	1.99	4,00	1.79	2,12	1.59	5,00	1.39	4,80
1.5.3.	SMA/SMK/MA	25.44	28,17	24.39	19,00	23.34	24,58	22.29	23,76	21.24	22,18
1.6.	Angka Kelulusan										
	1. Angka Kelulusan SD/MI (%)	100.00	100,00	100.00	100,00	100.00	100,00	100.00	100,00	100.00	97.00
	2. Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	100.00	100,00	100.00	100,00	100.00	100,00	100.00	100,00	100.00	96.00
	3. Angka Kelulusan SMA/SMK/MA (%)	100.00	100,00	100.00	100,00	100.00	100,00	100.00	100,00	100.00	100,00

	4. Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	100.00	100,00	100.00	100,00	100.00	100,00	100.00	96.00	100.00	96.00
	5. Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	100.00	100,00	100.00	100,00	100.00	100,00	100.00	96.00	100.00	97.00
	6. Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%)	78.00	55,60	80.50	55,60	83.00	55,60	85.50	97.35	88.00	95.15
2	Kesehatan										
2.1	Rasio Posyandu per satuan balita (/1.000)	12.38	20,41	12.76	11,95	13.14	14,96	13.52	19,29	13.90	16,14
2.2	Rasio Puskesmas, poliklinik,ustu per satuan penduduk (/1.000)	0.83	0,16	0.85	0,16	0.87	0,15	0.89	0,66	0.91	0,66
2.3	Rasio RS per satuan penduduk (/1.000)	0.02	0,01	0.02	0,01	0.02	0,01	0.02	0,03	0.02	0,03
2.4	Rasio dokter per satuan penduduk (/1000)	0.22	0,19	0.22	0,18	0.23	0,26	0.23	0,20	0.23	0,20
2.5	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (/1000)	6.03	4,45	6.85	4,36	7.67	9,11	8.49	7,39	9.31	7,39
2.6	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	100.00	7,42	100.00	9,13	100.00	9,13	100.00	2,40	100.00	2,40
2.7	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (%)	89.92	92,18	91.42	81,53	92.92	73,60	94.42	91.70	95.92	91.00
2.8	Cakupan kelurahan UCI (%)	45.94	44,44	47.44	54,32	48.94	60,50	50.44	51.90	51.94	43.00
2.9	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)	100.00	100,00	100.00	100,00	100.00	100,00	100.00	100.00	100.00	96,31
2.10	Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, DBD (%)	100,00	91,67	100,00	95,00	100,00	75,30	100,00	65,76	100,00	50,00
2.11	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	100,00	62,52	100,00	51,83	100,00	63,70	100,00	63,50	100,00	63,60
2.12	Cakupan kunjungan bayi (%)	73.16	94,94	75.67	94,94	78.18	60,70	80.69	72,92	83.20	70,29
2.13	Cakupan puskesmas (%)	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	216,67
2.14	Cakupan pembantu puskesmas (%)	44,44	44,44	44,44	44,44	44,44	44,44	57.24	46,91	60.44	46,91
3	Pekerjaan Umum										
3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (Km)	332.36	382.38	353.61	398.41	374.86	414.45	396.11	385.76	417.36	385.76
3.2	Rasio tempat ibadah per 1000 penduduk	1.62	1.57	1.65	1.58	1.68	1.58	1.71	1,80	1.74	1,95
3.2 .1	Rasio tempat ibadah mesjid per 1000 penduduk umat Islam	1.30	1.19	1.30	1.22	1.30	1.25	0.87	1,25	0.89	1,71

3.2.2	Rasio tempat ibadah gereja per 1000 penduduk umat kristen	2.50	2.47	2.50	2.40	2.50	2.37	0.80	2,25	0.82	2,59
3.3	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	46.70	51.17	51.51	51.48	56.32	64.60	61.10	84.00	65.91	76,10
3.4	Rasio TPU per satuan penduduk per 1000 penduduk	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Rasio pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	3.24	0,21	4.15	0,01	5.06	0,0053	5,97	0,01	6,88	0,01
3.6	Pemugaran rumah layak huni	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	46.03	23,03	53.63	60,01
3.7	Rasio permukiman layak huni	0,50	0.54	0,60	0.59	0,70	0,65	0,80	0,76	0,90	0,86
3.8	Panjang jalan dilalui roda 4 (Km)	502.56	362.38	523.81	380.91	545.06	399.45	566.31	385,76	587.56	385,76
3.9	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) (Km)	292.16	275.38	313.41	293.91	334.66	312.45	355.91	245,48	377.16	245,48
3.10	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00
3.11	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.12	Luas irigasi dalam kondisi baik (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.13	Luas Kawasan Kumuh (%)	0,01	0.0097	0,01	0,0086	0,01	0,0071	0,01	0.0085	0,01	0.0066
4.	Perumahan										
4.1	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih (%)	59.98	72,71	62.04	79,46	64.10	66,30	66.16	84.00	68.22	71.54
4.2	Jumlah rumah tangga ber sanitasi (%)	46.70	51.17	51.51	51.48	56.32	64.60	61.13	70.20	65.94	76,10
4.3	Jumlah rumah tangga pengguna listrik (%)	45,00	45.50	55,00	50.84	65,00	56.84	75,00	54.05	85,00	58.89
4.4	Luas lingkungan permukiman kumuh (%)	3.15	0.00	3.10	11.00	3.05	0,0071	3.00	0,0085	2.95	0,0066
4.5	Jumlah rumah layak huni (%)	60,65	59,76	65,65	65,01	70,65	79,78	75,65	86,53	80,65	91,11
5.	Penataan Ruang										
5.1	Luas ruang terbuka hijau / Luas wilayah ber HPL/HGB	15.05	13.55	16.55	13.55	18.05	13.55	19.55	13,55	21.05	13,55
5.2	Jumlah bangunan ber – IMB / Jumlah bangunan (%)	21,25	21,24	21,65	21,65	22,05	21,67	21.90	30,00	26.28	34,00
6.	Perencanaan Pembangunan Daerah										

6.1	Tersedianya dokumen perencanaan Pembangunan Tahunan (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
6.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Strategis (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
6.4	Jumlah program RKPD Tahun berkenaan (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7.	Perhubungan										
7.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum Darat (orang)	42.720	21.900	48.940	23.725	55.160	25.550	61,380	19.370	67,600	15.548
7.1 .1	Jumlah arus penumpang angkutan umum Kapal Laut dan Very (orang)	46.500	43.706	54.500	53.225	62,500	62.774	57,383	20.583	63,182	12.995
7.1 .2	Jumlah arus penumpang angkutan umum Pesawat Udara (Orang)	5.768	11.936	6.768	17.051	7.768	21.314	8.768	10.763	9.768	7.169
7.2	Rasio ijin trayek	0.42	0.00	0.43	0.00	0.43	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00
7.3	Jumlah uji kir angkutan umum (unit)	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
7.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	8.00	5.00	9.00	6.00	10.00	6.00	11.00	8.00	12.00	9.00
7.4 .1	Jumlah Pelabuhan Laut	6,00	4,00	7,00	5,00	8,00	5,00	9,00	7,00	10,00	8,00
7.4 .2	Jumlah Pelabuhan Udara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
7.4 .3	Jumlah Terminal Bis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
7.5 .4	Presentase layanan angkutan darat (%)	7,00	5,51	8,00	8,66	9,00	6,22	8.93	7,29	8.22	8,97
7.6	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (jam)	Sesuai SPM	0,00	Sesuai SPM	0,00	Sesuai SPM	0,00	Sesuai SPM	0.00	Sesuai SPM	0.00
7.7	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp)	Sesuai Perda	0,00	Sesuai Perda	0,00	Sesuai Perda	0,00	Sesuai Perda	0.00	Sesuai Perda	0.00
7.8	Pemasangan Rambu-rambu (%)	32.00	30.00	37.00	35.00	42.00	35.00	47.00	63.00	52.00	35,00
8.	Lingkungan Hidup										
8.1	Persentase penanganan sampah (%)	28.50	66,67	31.00	83,66	33.50	83,66	36.00	92.86	38.50	74,00
8.2	Persentase Penduduk berakses air minum (%)	59.98	72,71	62.04	79,46	64.10	66,30	66.21	70.20	68.28	68.70
8.3	Persentase Luas pemukiman yang tertata (%)	87.10	86,69	88.30	87,30	89.50	90,00	90.70	85.07	91.90	95,46
8.4	Pencemaran status mutu air (%)	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.5	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100.00	100.00	100.00	100.00

8.6	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.7	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)	3.24	0,21	4.15	0,01	5.06	0,0053	5.97	0,01	6.88	0,01
9.	Pertanahan										
9.1	Luas Lahan bersertifikat (%)	8,76	0,00	13.14	0,00	17.52	2,89	21.90	0,01	26.28	0.01
9.2	Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
10.	Kependudukan dan Catatan Sipil										
10.1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk (%)	80,00	30,08	90,00	34,20	100.00	45,19	100.00	56,78	100.00	96,16
10.2	Rasio bayi berakte kelahiran (%)	18,31	40,81	21.02	40,71	23.73	43,99	26.44	53,41	29.15	76,36
10.3	Rasio pasangan berakte nikah (%)	93.75	86,06	93.80	85,21	93.85	84,64	93.90	79,33	93.95	62,72
10.4	Kepemilikan KTP (%)	100.00	72.05	100.00	76.35	100.00	90.74	100.00	92,76	100.00	94,16
10.5	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	100.00	12.10	100.00	35.67	100.00	55.70	100.00	68,15	100.00	76,36
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
11.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	22.14	37,31	22.64	37,31	23.14	37,31	23.64	42,50	24.14	42,50
11.2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta / partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	20.00	15.50	25.00	25.33	30.00	35.33	45,00	45,90	50,00	57,50
11.3	Rasio KDRT (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.4	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
12.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera										
12.1	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.89	0.80	1.89	1.93	1.90	2.59	1.90	0,52	1.91	0,42
12.2	Rata-rata jumlah anak per keluarga (Orang)	3.00	2.00-3.00	3.00	2.00-3.00	3.00	2.00-3.00	3.00	2,00	3.00	2,00
12.3	Rasio akseptor KB (%)	36.44	48.53	37.44	52.59	38.44	51.08	35.04	35,09	34.89	16,87
12.4	Cakupan peserta KB aktif (%)	36.79	22,74	48.51	29,29	60.23	45,54	71.95	60.40	83.67	54.50
12.5	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	50.56	42,55	49.08	37,74	47.58	33,91	46.08	31.88	44.58	30.40
13.	Sosial										

13.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (unit)	1,00	1.00	1,00	1.00	1,00	1,00	1.00	1.00	1.00	1.00
13.2	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	25.00	6.49	30.37	46.06	30.74	21,58	34.11	45,92	44.48	58,98
13.3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)	100,00	36.61	100,00	46,42	100,00	54,42	100,00	65,03	100,00	70,12
14.	Ketenagakerjaan										
14.1	Angka partisipasi angkatan kerja (Orang)	25.052	22.445	25.402	22.867	25.752	25.721	26.102	27.401	26.452	29.462
14.2	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.3	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	71.67	64,90	73.59	64,99	75.51	70,50	77.43	54,77	79.35	73,99
14.4	Pencari kerja yang ditempatkan (%)	10,00	8,50	10,05	8,55	11,05	8,60	12,00	8,70	12,05	8,80
14.5	Tingkat pengangguran terbuka (%)	6.16	4,65	5.91	4,65	5.66	2,92	5.41	2.38	5.16	2,31
14.6	Keselamatan dan perlindungan (%)	90.25	92.55	90.40	62.18	90.55	55,96	90.70	100,00	90.85	100,00
14.7	Perselisihan buruh dan pengusaha thd kebijakan pemerintah daerah (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										
15.1	Persentase koperasi aktif (%)	70.50	67.33	71.00	72.14	71.50	72.86	72.00	72,00	72.50	67,90
15.2	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (Unit)	3.00	0.00	6.00	0.00	9.00	0.00	12.00	0,00	15.00	0,00
15.3	Jumlah BPR/LKM (Unit)	2.00	0.00	4.00	0.00	6.00	0.00	8.00	0,00	10.00	0,00
15.4	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (Unit)	437.00	480,00	467.00	480,00	497.00	480,00	527.00	449.00	557.00	381,00
16.	Penanaman Modal										
16.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	5.00	13,00	6.00	17,00	7.00	17,00	8.00	75.00	9.00	227.00
16.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp.Milyar)	16.00	14.21	16.50	13.53	17.00	13.53	625.18	13.82	626.33	31.01
16.3	Rasio daya serap tenaga kerja *)										
16.4	(PMA) =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(PMDN) =	55,00	169,00	110.00	195,00	165.00	195,00	220.00	229,00	275.00	239,00
16.5	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) (%)	(5.99)	0.00	(2.49)	0.00	1.01	2.64	4.51	15,75	8.01	20,43

17.	Kebudayaan										
17.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (Keg)	2.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	5.00	0.00	6.00	0.00
17.2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (unit)	14.00	1.00	15.00	1.00	16.00	1.00	17.00	1.00	18.00	2.00
17.3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	52.00	82.76	52.00	10.34	52.00	10.34	52.00	26.00	52.00	100.00
18.	Pemuda dan Olah Raga										
18.1	Jumlah organisasi pemuda (Orgs)	15.00	16.00	16.00	17.00	17.00	18.00	18.00	18.00	19.00	21.00
18.2	Jumlah organisasi olahraga (Orgs)	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	1.00	3.00	1.00	3.00
18.3	Jumlah kegiatan kepemudaan (Keg)	4.00	2.00	6.00	2.00	8.00	2.00	10.00	13.00	11.00	13.00
18.4	Jumlah kegiatan olahraga (Keg)	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	3.00	16.00	3.00	16.00
18.5	Gelanggang / balai remaja (Unit)	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00
18.6	Stadion Olah raga (Unit)	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
18.6	Lapangan olahraga (Unit)	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	4.00	2.00	4.00	3.00	4.00
19.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri										
19.1	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (Keg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
19.2	Kegiatan pembinaan politik daerah (Keg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
20.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian										
20.1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	1.40	1.10	1.60	1.10	1.80	1.19	1,85	1,20	1,90	1.21
20.2	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	3.20	3.42	3.30	3.28	3.40	1.38	3,74	2,40	3,92	1.40
20.3	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100,00
20.4	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah (Ada/tidak)	ada	ada	Ada	Ada	ada	ada	ada	Ada	Ada	Ada
20.5	Penegakan PERDA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100,00	100.00	100,00
20.6	Cakupan patroli petugas Satpol PP	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

20.6.1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100,00	100,00
20.7	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) (%)	3.20	3.42	3.30	3.28	3.40	1.38	3.50	1,65	3,60	1,78
20.8	Cakupan pelayanan bencana kebakaran (%)	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.28	0,23	0.28	0,23
20.9	Tingkat waktu tanggap (response time rate)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
20.10	Jumlah Sistim Informasi Manajemen / SIM (ada/tidak)	ada	ada	Ada	Ada	ada	ada	ada	Ada	Ada	Ada
20.10.1	Maturitas SPIP (Level)	1,00	1,00	2,00	2,00 (DC)	2,00	2,00	2,00	2,29	2,00	2,29
20.10.2	Kapabilitas APIP (Level)	1,00	0,00	2,00	0,26	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
21.	Ketahanan Pangan										
21.1	Ketersediaan pangan utama Beras / Non Beras										
21.1.1.	Ketersediaan pangan utama Beras (%)	0.60	1,65	0.99	0,54	1.38	0,54	1.77	0.62	2.16	0,74
21.1.2.	Ketersediaan pangan utama non Beras (%)	23,00	21,46	27,00	28,62	31,00	23,18	33.35	25,86	35.39	28,19
21.2	Regulasi ketahanan pangan (ada/tidak)	ada	ada	Ada	Ada	ada	ada	ada	Ada	Ada	Ada
22.	Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan										
22.1	Jumlah LSM (Jumlah LSM yang aktif) (Kelompok)	61.00	69,14	62.00	40,74	63.00	35,80	64.00	40.00	65.00	43.00
22.2	LPM Berprestasi (Kelompok)	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81.00	81.00	81.00	81,00
22.3	PKK aktif (%)	91.16	64.47	91.41	67.36	91.66	100.00	91.91	100.00	92.16	100.00
22.4	Posyandu aktif (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
22.5	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	99.76	100.00	99.77	100.00	99.79	100.00	99.80	100.00	99.82	100.00
22.8	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat (%)	80.17	100.00	80.32	100.00	80.47	100.00	80.62	100.00	80.77	100.00
23.	Statistik										
23.1	Buku "Kabupaten Buru Selatan dalam angka" (buku)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.00	1.00	1.00	1.00
23.2	Buku "PDRB Kabupaten" (Buku)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.00	1.00	1.00	1.00

24.	Kearsipan										
24.1	Pengelolaan arsip secara baku (%)	100.00	90.91	100.00	97.73	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
24.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (Keg)	2.00	1.00	2.00	0.00	2.00	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00
25.	Komunikasi dan Informatika										
25.1	Jumlah jaringan komunikasi (unit)	7.00	13,00	8.00	18,00	8.00	23,00	9.00	23,00	9.00	23,00
25.2	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	0,70	0,62	0,75	0,61	0,80	0,60	0.072	14,68	0.073	15,33
25.3	Cakupan layanan telekomunikasi	65,00	54,55	70,00	62,72	75,00	62,72	9.00	24,10	10.00	59,02
25.4	Presentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon (%)	40,00	30,84	45,00	30,81	50,00	33,76	1.00	62,15	1.00	65,26
25.5	Web site milik pemerintah daerah (ada/tidak)	ada	ada	Ada	Ada	ada	ada	ada	Ada	Ada	Ada
25.6	Pameran/expo (kali)	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1.00	0,00	1.00	0,00
26.	Perpustakaan										
26.1	Jumlah perpustakaan daerah (unit)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.00	1.00	1.00	1.00
26.2	Persentase Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (%)	1.88	17.25	2.15	4.38	2.42	2.49	2.69	2,37	2.96	2.25
26.3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (%)	30,00	45.18	35,00	20.79	40,00	22.99	45.00	23.40	50.00	50.00
	URUSAN PILIHAN										
1.	Pertanian										
1.1	Produktivitas										
1.1	Produktivitas padi (%)	60,00	78.78	65,00	65,87	70,00	65,85	5.66	0,00	6.24	0,00
1.1	Produktivitas Palawija (Ton/Ha)	1.300	1.138	1.350	1.603	1.400	1.245	1.450	1.265	1.500	1.326
1.2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	40.42	37,35	40.46	37,47	40.50	37,41	43.54	36,50	43.58	36,60
1.3	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)	4.42	3,55	4.46	3,65	4.50	3,60	4.31	3,56	4.81	3,34
1.4	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	2,30	2,11	2,40	2,13	2,50	2,12	2,60	1,90	2,70	1,21
1.5	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	1,90	1,95	1,95	1,95	2,00	1,95	2,08	1,94	2,09	1,94

1.6	Cakupan bina kelompok petani	55,04	55,04	55,05	63,38	55,06	71,72	55,07	38,50	55,08	38,54
1.7	Nilai Tukar Petani	112,00	135,13	113,00	137,42	114,00	139,59	115,00	139,59	116,00	139,59
2.	Kehutanan										
2.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%)	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,0087	0,01	0,0091	0,01
2.2.	Kerusakan Kawasan Hutan (%)	1,30	2,11	1,29	2,11	1,28	2,11	1,27	2,11	1,26	2,11
2.3.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	11,13	10,82	11,14	10,64	11,15	10,64	11,16	10,64	11,17	10,64
3.	Energi dan Sumber Daya Mineral										
3.1	Pertambangan tanpa ijin (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	9,02	7,34	9,03	5,63	9,04	5,63	9,83	5,64	9,85	5,65
4.	Pariwisata										
4.1	Kunjungan wisata (Orang)	3.200	3.060	4.600	4.408	5.800	5.742	6.800	5.912	7.800	5.340
4.2.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	25,20	26,67	25,30	13,00	25,40	13,00	25,50	13,00	25,60	13,00
5.	Kelautan dan Perikanan										
5.1	Produksi perikanan tangkap (ton)	10.413	10.201,20	10.608	11.885	11.757	15,020	10.998	14.933	11.193	14.933
5.2	Produksi perikanan budidaya (ton)	2.000	2.100	2.050	2.128	3.000	2.555	3.251	3.050	3.432	3.050
6.	Perdagangan										
6.1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	7,21	8,32	7,28	7,14	7,35	7,42	7,42	7,57	7,49	7,44
6.2.	Ekspor Bersih Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (Unit Usaha)	30,00	51,00	34,00	45,00	38,00	45,00	41,00	19,22	45,00	19,22
7.	Perindustrian										
7.1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	3,96	3,90	3,98	3,95	4,00	3,93	3,89	3,86	3,90	4,22
7.2	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri (%)	0,90	0,87	1,00	0,97	1,98	1,55	2,30	1,65	2,90	1,75
7.3	Pertumbuhan Industri (%)	10,20	9,76	10,30	6,29	10,40	8,89	13,80	8,90	14,50	8,95
7.4	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.	Transmigrasi										

8.1.	Transmigran swakarsa (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.	ASPEK DAYA SAING										
1.	Kemampuan Ekonomi Daerah										
1.1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp)	630.000	679.366	640.000	661.573	650.000	608.267	660.000	756.633	670.000	714.053
1.1.	Pengeluaran konsumsi pangan perkapita (Rp)	430.000	414.338	440.000	418.729	450.000	345.504	356.736	94.973	362.436	419,416
1.2.	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (Rp)	200.000	265.028	200.000	242.844	200.000	262.763	252.587	290.553	256.887	294.637
1.3.	Produktivitas total daerah (Juta/Kapita/Tahun)	1.115.000	1.112.600	1.215.000	1.206.610	1.315.000	1.304.700	1.415.000	1.365.650	1.515.000	1.438.432
1.4.	Nilai Tukar Petani	112,00	135,13	113,00	137,42	114,00	139,59	115,00	139,59	116,00	139,59
2.	Fasilitas Wilayah / Infrastruktur										
2.1	Aksesibilitas Daerah										
1.1.	Rasio panjang jalan per jumlah Kendaraan	0.93	0,42	1.14	0,40	1.35	0,38	1.56	0,22	1.77	0.28
1.2.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum										
1.2.1.	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum (Orang)	70.720	57.982	80.000	71.712	90.000	85.828	61,380	50.716	67,600	35.712
1.2.1.	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (Ton)	1.150	1.159	1.500	1.434	1.900	1.716	2,200	1.893	2,300	1.893
1.3.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per Tahun										
1.3.1	Jumlah orang melalui dermaga per tahun (Orang)	46.500	43.706	54.500	53.225	62,500	62.774	57,383	20.583	63,182	12.995
1.3.2	Jumlah barang melalui dermaga per tahun (Ton)	2.400	2.400	2,900	2.880	3.500	3.360	6,800	3,704	7,300	3.704
1.3.3	Jumlah orang melalui lapangan terbang per tahun (Orang)	5.768	11.936	6.768	17.051	7.768	21.314	8.768	10.763	9.768	7.169
1.3.4	Jumlah barang melalui lapangan terbang per tahun (ton)	213,14	119,36	213,14	170,51	213,14	213,00	213,14	235,00	213,14	235,00
1.3.5	Jumlah orang melalui terminal per tahun (Orang)	2.310	2.340	2.422	1.436	2.575	1.740	2,380	19.370	2,600	15.548
1.3.6	Jumlah barang melalui terminal per tahun (Kg)	22.300	11.700	22.450	7.180	22.600	8.700	26.400	8.850	26.500	8.950

2.2	Penataan Wilayah										
2.2.1.	Ketaatan terhadap RTRW (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.2.	Luas wilayah produktif (%)	97.55	100,00	97.56	100,00	97.57	100,00	97.58	100,00	97.59	100,00
2.2.3.	Luas wilayah industry (%)	97.55	100,00	97.56	100,00	97.57	100,00	97,58	100,00	97,59	100,00
2.2.4.	Luas wilayah banjir (%)	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.	Luas wilayah kekeringan (%)	5,00	6,00	4,50	6,00	4,00	6,00	0,24	0,00	0,24	0,00
2.2.6.	Luas wilayah perkotaan (%)	0,75	0,73	0,76	0,73	0,77	0,73	0.78	0,77	0.79	0,80
2.3	Fasilitas Perbankan dan lembaga keuangan non bank										
2.3.1.	Jenis dan jumlah bank dan cabang (Unit)	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00
2.3.2.	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang (Unit)	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	3.00	3.00	4.00	4.00
2.4	Hotel dan Restoran										
2.4.1.	Jenis, kelas, dan jumlah restoran (unit)	2.00	13.00	3.00	16.00	3.00	28.00	4.00	35.00	5.00	35.00
2.4.2.	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel (unit)	12.00	12.00	13.00	13.00	14.00	14.00	15.00	14.00	16.00	14.00
2.4.2.1	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel berbintang (unit)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2.2	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel melati (unit)	12.00	12.00	13.00	13.00	14.00	14.00	15.00	14.00	16.00	14.00
2.5	Air Bersih, Listrik, Komunikasi dan Informasi										
2.5.1	Persentase RT pengguna air bersih (%)	59.98	72.71	62.04	79.46	64.10	66.30	66.16	70.20	68.22	71,54
2.5.2.	Rasio ketersediaan daya listrik	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.5.3.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%)	80.00	75.50	84.50	86.84	89.00	86.84	93.50	86,84	98.00	86,84
2.5.4.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)	40,00	30,84	45,00	30,81	50,00	33,76	41.00	65.15	42.50	65.26
3.	Iklim Berinvestasi										
3.1	Angka kriminalitas (%)	2.70	0,00	2.35	0,00	2.00	0,00	1.65	0,00	1.30	0,00

3.2	Jumlah demo (kali)	0.00	1,00	0.00	1,00	0.00	1,00	0.00	0,00	0.00	0,00
3.3	Lama proses perijinan (Hari)	5.00	4.00	4.00	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2,00
3.4	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah (Jenis)	19.00	19,00	20.00	19,00	21.00	19,00	22.00	19,00	23.00	19,00
3.4.1	Jumlah dan macam pajak daerah (Jenis)	8.00	7,00	8.00	7,00	9.00	7,00	9.00	7,00	10.00	7,00
3.4.2	Jumlah dan macam retribusi daerah (Jenis)	11.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12,00	13.00	12,00	13.00	12,00
3.5	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha (Buah)	10.00	19,00	11.00	19,00	12.00	19,00	13.00	19,00	14.00	19,00
3.6	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa (%)	8,64	6,17	9,88	6,17	11,11	6,17	21.23	6,17	26.23	6,17
4.	Sumber Daya Manusia										
4.1.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)	4.52	3,87	4.62	3,81	4.72	4,67	4.82	4,73	4.92	4,81
4.2.	Rasio ketergantungan (%)	61.69	75,66	61.69	70,07	61.68	56,83	61.68	56,37	61.67	61,98

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Perencanaan pembangunan daerah harus terencana dengan baik dalam dokumen perencanaan yang mencerminkan kemampuan fiskal daerah untuk membiayai program pembangunan daerah dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan diurai dalam renstra OPD sebagai dokumen operasional. Dalam penyusunan RPJMD 2021-2026 perlu dilakukan langkah-langkah melalui evaluasi sistematis terhadap realisasi APBD lima tahun terakhir, serta proyeksi APBD 2021-2026. Data dan informasi dimaksud digunakan sebagai bahan analisis dan perspektif untuk mengetahui kemampuan pendanaan pembangunan dalam RPJMD tahun 2021-2026. Dalam kaitannya dengan sistem desentralisasi, pelaksanaan otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan dan mengembangkan potensi sumber daya di wilayahnya.

Ciri utama suatu daerah akan mampu melaksanakan otonominya secara efektif yaitu:

1. Besarnya kemampuan keuangan daerah.

Daerah memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola, dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.

2. Berkurangnya ketergantungan kepada bantuan pusat.

Pendapatan Asli Daerah harus menjadi sumber pendanaan utama yang didukung oleh pendanaan dari perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Dalam konteks pembangunan, penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dan pembangunan daerah akan berjalan secara optimal apabila didukung dengan kemampuan keuangan daerah yang mencukupi kebutuhan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, dalam rencana pembangunan daerah, analisis pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah sebagai upaya pendanaan atau dukungan terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah.

Analisis pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan melalui pemahaman

terhadap tingkat kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan pembangunan. Selain itu, perlu dicermati pula kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

Kemandirian keuangan daerah menjadi sangat penting, baik dari sisi pendapatan (*revenue*), maupun dari sisi pengeluaran (*expenditure*) agar Pemerintah Daerah memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat stimulan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai dengan aspirasi dan karakteristik masyarakatnya masing-masing.

Namun demikian, kinerja pembangunan ekonomi makro daerah dan nasional mempengaruhi perubahan struktur pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, perubahan tersebut juga akan berdampak pula terhadap perluasan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan, dapat pula menyebabkan pelaksanaan berbagai kebijakan dan program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Buru Selatan mengalami kendala dan hambatan. Untuk itu perlu dicari alternatif untuk mempertahankan pengeluaran PAD dan mendorong masalah dana transfer ke Kabupaten Buru Selatan.

3.1. Kondisi Perekonomian Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2020 sebesar 2,95% dan mengalami kontraksi sebesar 2,07% dari tahun sebelumnya (BPS, 2021). Kontraksi ini dipengaruhi oleh pelemahan diberbagai sektor ekonomi karena pandemi covid-19, yang sampai saat ini masih terus berlangsung dan mempengaruhi kegiatan ekonomi, menurunnya aktivitas masyarakat berdampak pada turunnya kegiatan ekspor dan impor. Pada kuartal IV terdapat sepuluh sektor yang masih mengalami kontraksi seperti sektor transportasi dan pergudangan, pada kuartal II mengalami kontraksi sebesar 30,80%. Namun pada kuartal IV menunjukkan arahpemulihan -13,42%.

3.2. Kondisi Perekonomian Daerah

3.2.1. Provinsi Maluku

Kondisi perkenomian Provinsi Maluku cenderung fluktuatif dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Secara umum, pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2016-2020, pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku sedikit mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,7 persen. Menurunnya

pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019-2020 dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, faktor eksternal disebabkan oleh tekanan ekonomi global dan Pandemi Covid-19 di dunia serta kebijakan perekonomian Amerika yang juga berdampak pada kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, faktor internal disebabkan oleh rendahnya produktivitas sektor pertanian dan perikanan serta rendahnya investasi pemerintah dan konsumsi rumah tangga serta pandemic Covid-19 sebagai penyumbang dalam penurunan pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku. Penurunan yang terjadi di tahun 2019 juga disebabkan oleh menurunnya produksi di sub sektor pertambangan serta moratorium di bidang perikanan.

3.2.2. Kabupaten Buru Selatan

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru Selatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami tren positif, artinya selama 4 (empat) tahun terakhir capaian pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buru Selatan rata-rata diatas 6 persen, namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi terkoreksi seiring dengan adanya pandemic Covid-19. Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku maupun Nasional. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru Selatan sedikit mengalami penurunan sebesar 6,25 persen dibanding capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku sebesar 6,7 persen, namun sampai tahun 2018 capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru Selatan selalu mengalami tren positif yakni sebesar 6,02 persen. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif, diantaranya meningkatnya lapangan usaha Sektor Pengadaan Listrik dan Gas, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Konstruksi dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib serta sektor lapangan usaha lainnya, seperti pertanian/kehutanan/perikanan, industri pengolahan, transportasi/peredagang.

Kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 - 2026 diatas rata-rata nasional. Kebijakan ekonomi makro dalam tahun 2021 - 2026 diarahkan untuk memantapkan laju pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kesenjangan antar Kecamatan di Kabupaten Buru Selatan. Selain itu kebijakan makro juga diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan mengurangi pengangguran. Pengembangan dan

peningkatan khususnya pada sektor-sektor produktif antara lain pertanian, perikanan, pariwisata, pertambangan dan energi.

3.3. Kinerja Keuangan Kabupaten Buru Selatan

Kondisi kinerja keuangan daerah tahun 2016-2020, diwarnai oleh dinamika perubahan sistem pemerintahan daerah. PP Nomor 18 Tahun 2016 yang menjadi dasar pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 dilaksanakan secara efektif pada tahun 2017 melalui perubahan struktur organisasi pemerintah daerah Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Pengalihan urusan kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dikoordinasikan dengan provinsi, sangat mempengaruhi pendapatan dan belanja daerah.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan harus termuat dalam penentuan kerangka kebijakan jangka menengah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kinerja keuangan Pemerintah Daerah terkait erat dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Penyusunan APBD bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan Pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Dalam penyusunan APBD, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran yaitu penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*), dengan penganggaran (*budgeting*) antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

Dalam melihat kinerja keuangan pada periode pembangunan sebelumnya, terlihat pada kemampuan keuangan daerah yang ditunjukkan oleh Derajat Desentralisasi Fiskal melalui perbandingan kontribusi realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total

Pendapatan Daerah APBD. Tujuan dari Derajat Desentralisasi Fiskal adalah untuk melihat persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah sehingga mengetahui kemampuan daerah dalam kemandirian keuangan. Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Buru Selatan periode tahun 2016-2020, dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 3.1. Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020

Tahun	Total Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (%)
2016	737,338,844,047.37	26,985,938,551.27	3.66
2017	667,910,943,148.23	12,999,589,246.90	1.94
2018	761,334,889,582.03	15,506,213,190.79	2.04
2019	711,002,421,983.12	16,092,629,886.12	2.26
2020	649,936,435,171.07	20,127,402,571.65	3.10
Rata – Rata			2.60

Sumber: BPKAD Kab. Buru Selatan, Tahun 2021

Dari tabel di atas, terlihat bahwa kontribusi pendapatan asli daerah dalam mendukung total pendapatan daerah, secara rata-rata pada periode pembangunan 2016-2020 hanya sebesar 2,60 persen. Meskipun PAD mengalami penurunan di beberapa tahun namun ada peningkatan di tahun 2020 tetapi peningkatan tersebut tidak terlalu signifikan, kenaikan paling signifikan terjadi pada tahun 2020, dimana peningkatan PAD mencapai Rp.20,127,402,571.65 atau sebesar 3,10 persen dibanding tahun-tahun lainnya, peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Selain itu pada sisi dana transfer, terdapat kenaikan signifikan karena pelimpahan beberapa kewenangan pemerintah pusat ke daerah, terutama pada Dana Perimbangan yakni DAU dan DAK serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yakni Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

3.3.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi belanja (belanja langsung dan belanja tidak langsung) maupun pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah.

Sementara itu neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah Kabupaten Buru Selatan, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Buru Selatan meliputi pencapaian kinerja pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah dan pembiayaan daerah yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2. Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun								Rata-rata Pertumbuha n (%)
		2016	2017		2018		2019		2020	
1	PENDAPATAN DAERAH	737,338,844,047.37	667,910,943,148.23	-9.42	761,334,889,582.03	13.99	711,012,421,983.12	-6.61	649,936,435,171.07	1.10
1:01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	26,985,938,551.27	12,999,589,246.90	-51.83	15,506,213,190.79	19.28	16,092,629,886.12	3.78	20,127,402,571.65	1.25
1:01:01	Hasil Pajak Daerah	3,110,203,971.72	2,729,178,718.00	-12.25	4,117,936,152.82	50.89	3,489,875,558.00	-15.25	2,820,336,994.91	1.08
1:01:02	Hasil Retribusi Daerah	940,037,273.10	1,088,687,428.00	15.81	997,464,005.00	-8.38	3,064,014,463.00	207.18	3,325,647,657.00	0.39
1:01:03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1,387,262,936.00	-	-	-	-	-	-	4,242,313,250.00	0.43
1:01:04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	21,548,434,370.45	9,181,723,100.90	-57.39	10,390,813,032.97	13.17	9,538,739,865.12	-8.20	9,739,104,669.74	1.81
1:02	DANA PERIMBANGAN	646,788,601,081.00	570,903,063,518.00	-11.73	656,884,193,102.00	15.06	587,933,503,843.00	-10.50	516,534,980,436.00	1.18
1:02:01	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	22,262,653,778.00	24,982,408,575.00	12.22	13,614,466,838.00	45.50	7,128,488,640.00	-47.64	14,644,286,073.00	1.37
1:02:02	Dana Alokasi Umum	415,945,544,000.00	413,834,980,000.00	-0.51	420,639,459,000.00	1.64	440,886,206,000.00	4.81	403,896,483,000.00	1.02
1:02:03	Dana Alokasi Khusus	208,580,403,303.00	132,085,674,943.00	36.67	222,630,267,264.00	68.55	139,918,809,203.00	-37.15	97,994,211,363.00	1.76
1:03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	63,564,304,415.10	84,008,290,383.33	32.16	88,944,483,289.24	5.88	106,986,288,254.00	20.28	113,274,052,163.42	0.65
1:03:01	Pendapatan Hibah	3,750,000,000.00	-	-	-	-	9,244,228,000.00	-	14,645,147,812.42	0.36
1:03:02	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1:03:03	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemda Lainnya	7,686,966,062.10	8,136,354,516.33	5.85	7,736,655,972.24	-4.91	10,548,307,254.00	36.34	10,279,523,930.00	0.80
1:03:04	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	52,127,338,353.00	75,871,935,867.00	45.55	81,207,827,317.00	7.03	87,193,753,000.00	7.37	88,349,380,421.00	0.67
1:03:05	Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	BELANJA	731,605,249,972.60	711,168,593,637.00	-2.79	962,307,518,645.76	35.31	711,094,890,032.00	-26.11	652,171,170,736.23	1.09
2:01	BELANJA OPERASI	233,806,238,706.00	499,997,485,834.00	113.85	494,677,466,500.38	-1.06	538,187,475,964.00	8.80	536,214,857,192.23	0.54
2:01:01	Belanja Pegawai	149,532,846,114.00	159,371,139,355.00	6.58	178,447,680,217.00	11.97	178,202,169,549.00	-0.14	179,534,489,262.00	0.87
2:01:02	Belanja Barang	-	167,669,769,662.00	-	180,948,442,567.38	-	196,536,151,565.00	-	177,700,436,407.23	-
2:01:04	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	50,000,000.00	-	-	-

2:01:05	Belanja Subsidi	1,697,520,000.00	3,432,480,000.00	102.21	2,792,000,000.00	-18.66	2,500,400,000.00	-10.44	1,328,800,000.00	1.20
2:01:06	Belanja Hibah	9,961,885,000.00	48,890,791,800.00	390.78	10,901,000,000.00	-77.70	7,960,000,000.00	-26.98	37,870,511,000.00	0.37
2:01:06	Belanja Bantuan Sosial	3,685,350,000.00	10,102,133,000.00	174.12	10,743,900,971.00	6.35	13,383,776,400.00	24.57	10,151,846,132.00	0.47
2:01:07	Belanja Bantuan Keuangan	63,095,773,842.00	105,606,447,017.00	67.37	106,368,652,400.00	0.72	135,715,058,900.00	27.59	118,324,751,391.00	0.62
2:01:08	Belanja Tidak Terduga	5,832,863,750.00	4,924,725,000.00	-15.57	4,475,790,345.00	-9.12	3,839,919,550.00	-14.21	11,304,023,000.00	0.61
2:02	BELANJA MODAL	497,799,011,266.60	211,171,107,803.00	-57.58	467,630,052,145.38	121.45	172,907,414,068.00	-63.02	115,956,313,544.00	2.98
	Belanja Pegawai	17,578,190,758.00			21,026,217,992.00	100.00				
	Belanja Barang dan Jasa	193,280,415,756.00			180,948,442,567.38	100.00				
	Belanja Modal	286,940,404,752.60			265,655,391,586.00	100				
2:02:01	Belanja Tanah		1,457,819,000.00	-91.71		-100.00	2,352,045,000.00	#DIV/o!	6,134,277,600.00	2.20
2:02:02	Belanja Peralatan dan Mesin		29,652,512,412.00	-84.66		-100.00	34,288,561,701.00	#DIV/o!	19,677,728,203.00	5.55
2:02:03	Belanja Bangunan dan Gedung		56,273,688,040.00	-80.39		-100.00	57,777,128,136.00	#DIV/o!	45,302,729,832.00	3.99
2:02:04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		123,624,088,351.00	#DIV/o!		-100.00	77,252,051,231.00	#DIV/o!	37,663,477,709.00	
2:02:05	Belanja Aset Tetap Lainnya		163,000,000.00	#DIV/o!		-100.00	1,237,628,000.00	#DIV/o!	7,178,100,200.00	

Sumber : BPKAD Kab. Buru Selatan, Tahun 2021

3.3.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Sumber penerimaan Provinsi Maluku berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Daerah meliputi :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; serta
- 3) Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil dari Pemda Lainnya, dan Dana Insentif Daerah.

Pelaksanaan APBD Kabuapten Buru Selatan Tahun Anggaran 2016-2020 dari aspek Pendapatan Daerah menunjukkan peningkatan pendapatan pada kurun waktu 2016-2020. Tahun 2016 total pendapatan daerah 737,338 milyar Rupiah menurun menjadi 667,910 Miliar Rupiah pada tahun 2017. Peningkatan signifikan terjadi di tahun 2018, dengan tingkat pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 13.99 persen. Peningkatan yang signifikan terjadi didorong oleh meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang diterima oleh Kabupaten Buru Selatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3 Perkembangan Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020

N o	Uraian	Pertumbuhan/Tahun (Rp.000.000)									
		2016	(%)	2017	(%)	2018	(%)	2019	(%)	2020	(%)
1	PENDAPATAN DAERAH	737,338	23.55	667,910	(9.42)	761,334	13.99	711,012	(6.61)	649,936	(8.59)
1: 01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	26,985	109.55	12,999	-51.83	15,506	19.29	16,092	4	20,127	25
1: 02	DANA PERIMBANGAN	646,788	20.64	570,903	-11.73	656,884	15.06	587,933	-10	516,534	-12
1: 03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	63,564.	33.02	84,008	32.16	88,944	5.88	106,986	20	113,274	5.88

Sumber: BPKAD Kab. Buru Selatan Tahun 2021

a) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 (empat) yaitu :

1. Pajak daerah

Sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 03 tahun 2011 tentang BPHTB, Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan, Nomor 05 tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Nomor 06 tahun 2011 tentang pajak reklame, Nomor 07 tahun 2011 tentang pajak Restoran, Nomor 08 tahun 2011 tentang pajak Parkir, Nomor 09 tahun 2011 tentang pajak Penerangan Jalan.

2. Retribusi Daerah

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Nomor 10 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Trayek, Nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, Nomor 14 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Nomor 15 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Nomor 14 tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Usaha Perikanan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan ini berasal dari deviden Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Maluku yaitu: PT Bank Maluku Maluku Utara

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

diantaranya : Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Rugi Daerah , Pendapatan Dana Kapitasi JKN dan Setoran lain-lain.

Sumber utama PAD berasal dari Pajak Daerah dengan pertumbuhan di tahun 2018 sebesar 1,14 persen dari tahun 2017 atau mencapai 15,506 miliar rupiah, sementara Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar - 8,38 persen, atau hanya mencapai 997,46 juta rupiah, demikian juga dengan pertumbuhan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang sah dan Lain-lain PAD yang sah sebagai sumber PAD dalam kurun waktu tersebut, cenderung mengalami penurunan, dimana tahun 2018, kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang sah terhadap PAD menurun sebesar -100 persen dan ;

Lain-lain PAD yang Sah menurun sebesar -9,75 persen. Perkembangan data realisasi PAD Kabupaten Buru Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Pertumbuhan/Tahun (Rp.000.000)									
		2016	(%)	2017	(%)	2018	(%)	2019	(%)	2020	(%)
01:01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	26,985	109.55	15,331	-43.19	15,506	1.14	15,044	-2.98	20,130	33.81
01:01:01	Hasil Pajak Daerah	3,110	138.88	2,729	-12.25	4,117	50.89	2,511	-39.01	2,796	11.35
01:01:01:01	Pajak Bahan Galian Gol. C	2,375		1,641	-30.9	2,762	68.31	1,725	-37.55	1,354	-21.51
01:01:01:02	Pajak Hotel	24		23	-3.51	29	23.14	10	-65.52	3	-70.00
01:01:01:03	Pajak Restoran	266		476	78.53	443	-6.87	15	-96.61	16	6.67
01:01:01:04	Pajak Reklame	72		53	-26.01	113	111	107	-5.31	39	-63.55
01:01:01:05	Pajak Penerangan Jalan	351		459	30.84	621	35.11	724	16.59	73	-89.92
01:01:01:06	Pajak Hiburan	9		17	89.64	15	-12.66	20	33.33	20	0.00
01:01:01:07	Pajak Bumi dan Bangunan	9		53	441.88	104	95.84	96	-7.69	92	-4.17
01:01:01:08	BPHTB			3		28	767.82	5	-82.14	5	0.00
01:01:02	Hasil Retribusi Daerah	940	199.21	1,088	15.81	997	-8.38	2,994	200.30	3,325	11.06
01:01:02:01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	196	18.26	293	49.52	307	4.54	66	-78.50	34	-48.48
01:01:02:02	Retribusi IMB dan Izin Usaha Jasa Konstruksi	384	813.79	209	-45.44	272	30.1	69	-74.63	195	182.61
01:01:02:03	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	5	-33.74	10	91.5	35	248.39	20	-42.86	10	-50.00
01:01:02:04	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte										
01:01:02:05	Retribusi Penimbunan Kayu										
01:01:02:06	Retribusi Izin Usaha Perikanan	35	20.21	48	38.03	111	130.07	50	-54.95	17	-66.00
01:01:02:07	Retribusi Pelayanan Pasar	92	202.91	212	130.57	186	-12.3	12	-93.55	229	1808.33
01:01:02:08	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	91	564.59	177	93.7		-100	2		2	0.00
01:01:02:09	Retribusi Izin Usaha Pariwisata	16	-20.66	21	26.98	25	19.53	23	-8.00	2	-91.30
01:01:02:010	Retribusi Izin Prinsip		-100								
01:01:02:011	Retribusi Sewa Alat Berat	111		115	3.7	58	-49.3	75	29.31		

01:01:02:012	Retribusi Pelayanan Umum	6			-100						
01:01:03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1,387		-	-100	-				4,242	100,00
01.01.03.01	Dividen atas Penyertaan Modal pada PT. BPDM	1,387			-100						
01:01:04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	21,548	91.34	11,513	-46.57	10,390	-9.75	9,538	67,37	9,766	2.39
01:01:04:01	Jasa Giro Kas Daerah	1,219	12.57	648	-46.78	580	-10.58	522	-10.00	449	-13.98
01:01:04:02	Bunga Deposito	4,916	-27.95	3,936	-19.93	3,797	-3.55	2,859	-24.70		
01:01:04:03	Setoran Lain-lain	15,064	1,368.28	4,595	-69.49	3,893	-15.29	1,937	-50.24		
01:01:04:04	Tuntutan Ganti Rugi Daerah	347	346.08	820	135.83	10	-98.78	181	1710.00		
01:01:04:05	Pendapatan Dana Kapitasi JKN		-100	1,511		2,109	39.6	2,830	34.19	3,190	12.72

Sumber: BPKAD Kab. Buru Selatan Tahun 2021

a) Dana Perimbangan

Dalam rangka menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang proporsional, demokratis, adil dan transparan berdasarkan atas pembagian kewenangan pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah. Dana perimbangan terdiri dari :

1) Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil pajak/ Bukan pajak merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam.

2) Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan dan pengeluaran dalam pelaksanaan desentralisasi.

3) Dana Alokasi khusus

Dana alokasi khusus merupakan dana berasal dari anggaran (APBN) dan dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang khusus.

Dana perimbangan merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk pendanaan penyelenggaraan desentralisasi. pemberian dana perimbangan kepada pemerintah daerah disamping ditujukan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar daerah, juga merupakan dukungan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. Prinsip perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah :

- (1) perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah Daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) pembagian sumber keuangan negara kepada pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.

(3) perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah Daerah merupakan sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan.

Dilihat dari aspek Dana perimbangan, menunjukkan adanya pertumbuhan dana perimbangan di tahun 2018 mencapai 15,06 persen dari tahun 2017, meningkatnya pertumbuhan dana perimbangan di tahun 2018 disebabkan karena meningkatnya pertumbuhan Dana Alokasi Umum sebesar 1,64 persen dan Dana Alokasi khusus sebesar 68,55 persen, sementara Dana Bagi hasil pajak/Bukan pajak mengalami penurunan sebesar -45,50 persen, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.5. Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Pertumbuhan/ Tahun									
		2016	(%)	2017	(%)	2018	(%)	2019	(%)	2020	(%)
1:02	DANA PERIMBANGAN	646,788,601,081	11.73	570,903,063,518	-11.73	656,884,193,102	15.06	587,933,503,843	-10.50	516,534,980,436	-12.14
1.2.1.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	22,262,653,778	12.22	24,982,408,575	12.22	13,614,466,838	-45.50	7,128,488,640	-47.64	14,644,286,073	105.43
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	415,945,544,000	0.51	413,834,980,000	-0.51	420,639,459,000	1.64	440,886,206,000	4.81	403,896,483,000	-8.39
1.2.1.3	Dana Alokasi khusus	208,580,403,303	36.67	132,085,674,943	-36.67	222,630,267,264	68.55	139,918,809,203	-37.15	97,994,211,363	-29.96

Sumber: BPKAD Kab. Buru Selatan Tahun 2021

b) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sumber pendapatan lainnya di kabupaten Buru Selatan adalah bersumber dari Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan jenis penerimaan daerah yang terdiri dari pendapatan hibah diataranya pendapatan hibah, Dana Bagi Hasil pajak dari propinsi dan pemda Lainnya, Dana penyesuaian dan Otonomi khusus, Bantuan keuangan dari provinsi dan pemda Lainnya.

proporsi terbesar sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam kurun waktu tahun 2016-2020 didominasi oleh, dana penyesuaian, dan otonomi khusus yang didalamnya terdapat belanja Dana Desa. perkembangan realisasi lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 3.6. Perkembangan Lain-lain Pendapatan yang sah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Pertumbuhan/Tahun (Rp)								
		2016	2017	(%)	2018	(%)	2019	(%)	2020	(%)
1:03	LAIN-LAIN PENDAPATANYANG SAH	63,564,304,415	84,008,290,383	32.16	88,944,483,289	5.88	106,986,288,254	20.28	113,274,052,163	5.88
	pendapatan Hibah	3,750,000,000	-	-	-	-	9,244,228,000	100	14,645,147,812	58.42
	Dana bagi hasil pajak	7,686,966,062	8,136,354,516	5.85	7,736,655,972	-4.91	10,548,307,254	36	10,279,523,930	-2.55
	Dana penyesuaian	52,127,338,353	75,871,935,867	45.55	81,207,827,317	7.03	87,193,753,000	7	88,349,380,421	1.33

Sumber: BPKAD Kab. Buru Selatan Tahun 2021

c) Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

perkembangan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2020 menurut kelompok disajikan pada tabel dibawah ini. Dari tabel tersebut diketahui bahwa tahun anggaran 2020 realisasi pendapatan Daerah sebesar Rp. 561.589.874.578,07 atau sebesar 85,54 persen dari target yang ditetapkan, yakni sebesar Rp. 656.500.414.000. Sementara itu, realisasi PAD di tahun 2020 mencapai 82,12%, pendapatan transfer/Dana perimbangan mencapai 85,77 persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai 82,35 persen dari yang ditergetkan, untuk lebih dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020

NO	URAIAN	TAHUN 2020		%
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	2	2	3	4
1	PENDAPATAN DAERAH	656.500.414.000,00	561.589.874.578,07	85,54
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	24.513.685.000,00	20.130.222.399,65	82,12
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	2.603.700.000,00	2.796.240.622,91	107,39
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.171.800.000,00	3.325.647.657,00	104,85
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	100
1.1.4	Lain-lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah	14.495.871.000,00	9.766.020.869,74	67,37
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	614.202.329.000,00	526.814.504.366,00	85,77
1.2.1	Transfer pemerintah pusat	516.945.799.000,00	516.814.504.366,00	99,92
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	7.339.599.000,00	6.292.789.366,00	85,74
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan pajak (Sumber Daya Alam)	6.112.783.000,00	8.351.496.707,00	136,62

1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	405.165.999.000,00	403.896.483.000,00	99,69
1.2.1.4	Dana Alokasi khusus	98.327.418.000,00	97.994.211.363,00	99,66
1.2.2	Transfer pemerintah pusat – Lainnya	88.351.815.000,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Dana penyesuaian	88.351.815.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Transfer pemerintah provinsi	8.904.715.000,00	10.279.523.930,00	115,44
1.2.3.1	pendapatan Bagi Hasil Pajak	8.904.715.000,00	10.279.523.930,00	115,44
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.784.400.000,00	14.645.147.812,42	82,35
1.3.1	Pendapatan Hibah	17.784.400.000,00	14.645.147.812,42	82,35

Sumber: BPKAD Kab. Buru Selatan Tahun 2021

3.3.1.2. Belanja Daerah

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah menyebutkan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. kebijakan belanja diarahkan untuk mendukung percepatan peningkatan daya saing daerah, tingkat kesejahteraan masyarakat serta aspek pelayanan umum. pengaturan pola pembelanjaan dilakukan secara proporsional, efisien dan efektif, dengan turut memperhatikan kewenangan pemerintah daerah provinsi.

Belanja Daerah dikelompokkan dalam dua jenis yaitu, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Selama tahun 2018, total Belanja Daerah yang ditargetkan sebesar 672,82 miliar rupiah, namun realisasinya mencapai 652,17 miliar rupiah atau sebesar 96,93 persen, hal tersebut dipengaruhi oleh realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung yang tidak mencapai target yakni Belanja Operasi mencapai 99,06 persen dan Belanja Modal mencapai 88,87 persen serta belanja tak terduga mencapai 90,55 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.8. Perkembangan Realisasi Belanja Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020

NO	URAIAN	TAHUN 2020		%
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	2	2	3	4
	BELANJA DAERAH	672,829,514,000	652,171,170,737	96.93
2:01	BELANJA OPERASI	529,872,723,550	524,910,834,193	99.06
2:02	BELANJA MODAL	130,472,912,450	115,956,313,544	88.87
2:03	BELANJA TAK TERDUGA	12,483,878,000	11,304,023,000	90.55

Sumber : BPKAD Kab. Buru Selatan Tahun 2021

a) Belanja Operasional

Belanja Operasional merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari :

1. Belanja pegawai dialokasikan untuk penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Belanja Hibah, dialokasikan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah Daerah Lainnya, BUMN, BUMD, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Belanja Bantuan Sosial, dialokasikan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
5. Belanja Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundangundangan yang terkait.
6. Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.

Realisasi Belanja Operasi di tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017, dimana Belanja Operasi di tahun 2018 mencapai 494,677 miliar rupiah atau sebesar -71,06 persen, hal tersebut di pengaruhi oleh menurunnya realisasi belanja Subsidi yakni sebesar -18,66 persen, belanja hibah turun sebesar -77,70 dan belanja tak terduga turun sebesar 9,12 persen, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9. Perkembangan Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015-2020

No	Uraian	Pertumbuhan/Tahun (Rp)										
		2015	2016	(%)	2017	(%)	2018	(%)	2019	(%)	2020	(%)
2.1	Belanja Operasi	204,405,927,221	233,806,238,706	14.38	499,997,485,834	113.85	494,677,466,500	-1.06	509,476,940,259	2.99	536,214,857,192	5.25
2.1.1	Belanja Pegawai	137,073,422,848	149,532,846,114	9.09	159,371,139,355	6.58	178,447,680,217	11.97	178,202,169,549	-0.14	179,534,489,262	0.75
2.1.2	Belanja Barang		0		0		180,948,442,567.38		196,536,151,565		177,700,436,407.23	
2.1.3	Belanja Bunga		-		167,669,769,662		-		50,000,000.00		0.00	
2.1.4	Belanja Subsidi	742,000,000	1,697,520,000	128.78	3,432,480,000	102.21	2,792,000,000	-18.66	2,500,400,000	-10.44	1,328,800,000	-46.86
2.1.5	Belanja Hibah	25,545,625,000	9,961,885,000	-61.00	48,890,791,800	390.78	10,901,000,000	-77.70	7,960,000,000	-26.98	37,870,511,000	375.76
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4,167,457,612	3,685,350,000	-11.57	10,102,133,000	174.12	10,743,900,971	6.35	13,383,776,400	24.57	10,151,846,132	-24.15
2.1.7	Belanja Bagi Hasil kpd Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes									100		
2.1.8	Belanja Bantuan Keuangan	30,329,085,507	63,095,773,842	108.04	105,606,447,017	67.37	106,368,652,400	0.72	106,368,652,400	0.00	118,324,751,391	11.24
2.1.9	Belanja Tidak Terduga	6,548,336,254	5,832,863,750	-10.93	4,924,725,000	-15.57	4,475,790,345	-9.12	4,475,790,345	0.00	11,304,023,000	152.56

Sumber : BPKAD Kab. Buru Selatan Tahun 2021

c) Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja :

1. Belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
2. Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
3. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Pertumbuhan Proporsi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif yang semula 143,53 persen pada tahun 2016 menurun menjadi -57,58 persen pada tahun 2017. namun pada tahun 2018 Belanja langsung mengalami kenaikan yakni sebesar 121,45 persen, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10. Perkembangan Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015-2020.

No	Uraian	Pertumbuhan/Tahun (Rp)										
		2015	2016	(%)	2017	(%)	2018	(%)	2019	(%)	2020	(%)
2.2	Belanja Modal	204,405,927,221	497,799,011,266.60	143.53	211,171,107,803	-57.58	467,630,052,145.38	121.45	172,907,414,068	-63.02	115,956,313,544	-32.94
2.2.1	Belanja Pegawai		17,578,190,758.00				21,026,217,992.00	100				
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa		193,280,415,756.00				180,948,442,567.38	100				
2.2.3	Belanja Modal		286,940,404,752.60				265,655,391,586.00	100				
2.2.4	Belanja Tanah	31,697,503,000		-44.54	1,457,819,000	-91.71		-100	2,352,045,000	100	6,134,277,600	160.81
2.2.5	Belanja Peralatan dan Mesin	130,358,426,311		48.27	29,652,512,412	-84.66		-100	34,288,561,701	100	19,677,728,203	-42.61
2.2.6	Belanja Bangunan dan Gedung	240,425,101,024		19.35	56,273,688,040	-80.39		-100	57,777,128,136	100	45,302,729,832	-21.59
2.2.7	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	123,624,088,351	100		-100	77,252,051,231	100	37,663,477,709	-51.25
2.2.8	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	163,000,000	100		-100	1,237,628,000	100	7,178,100,200	479.99

Sumber : BPKAD Kab. Buru Selatan Tahun 2019.

c) Target dan Realisasi Belanja Daerah

Perkembangan realisasi belanja daerah tahun anggaran 2020 menurut kelompok dan jenis belanja disajikan pada tabel 3.11. Dari tabel tersebut diketahui bahwa sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 realisasi belanja operasi sebesar 536,214 miliar rupiah atau mencapai 98,87 persen dari target yang ditetapkan sebesar 542,356 miliar rupiah. Sementara itu, untuk belanja modal sampai akhir tahun anggaran 2020 realisasinya mencapai 88,87 persen atau sebesar 115,956 miliar rupiah dari yang ditergetkan sebesar 130,472 miliar rupiah.

Tabel 3.11. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020 Menurut Kelompok dan Jenis Belanja (dalam rupiah)

NO	URAIAN	Tahun 2020		%
		Target(Rp)	Realisasi (Rp)	
1	2	3	4	5
2:01	BELANJA OPERASI	542,356,601,550.00	536,214,857,192	98.87
2:01:01	Belanja Pegawai	182,456,906,000.00	179,534,489,262.00	98.40
2:01:02	Belanja Barang	179,429,646,550.00	177,700,436,407.23	99.04
2:01:03	Belanja Bunga			
2:01:04	Belanja Subsidi	1,395,200,000.00	1,328,800,000.00	95.24
2:01:05	Belanja Hibah	37,980,512,000.00	37,870,511,000.00	99.71
2:01:06	Belanja Bantuan Sosial	10,191,360,000.00	10,151,846,132.00	99.61
	Belanja Bagi Hasil kpd Propinsi/Kab/Kota dan Pemdes			
2:01:07	Belanja Bantuan Keuangan	118,419,099,000.00	118,324,751,391.00	99.92
2:01:08	Belanja Tidak Terduga	12,483,878,000.00	11,304,023,000.00	90.55
2:02	BELANJA MODAL	130,472,912,450.00	115,956,313,544.00	88.87
2:02:01	Belanja Pegawai	-	-	-
2:02:02	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-
2:02:03	Belanja Modal	-	-	-
2:02:04	Belanja Tanah	6,143,624,000.00	6,134,277,600.00	100.00
2:02:05	Belanja Peralatan dan Mesin	20,144,231,300.00	19,677,728,203.00	100.00
2:02:06	Belanja Bangunan dan Gedung	54,154,395,612.00	45,302,729,832.00	100.00
2:02:07	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	42,842,923,438.00	37,663,477,709.00	100.00
2:02:08	Belanja Aset Tetap Lainnya	7,187,738,100.00	7,178,100,200.00	100.00
JUMLAH BELANJA DAERAH		672,829,514,000	652,171,170,736	96.93

Sumber : BPKAD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021

3.3.2. Kinerja Neraca Daerah

Analisis Neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan asset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Unsur yang dicakup oleh sebuah neraca terdiri dari asset, kewajiban dan ekuitas. Perkembangan neraca daerah Provinsi Maluku tahun 2016-2020 dan rata-rata pertumbuhannya. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan memiliki asset total sebesar Rp. 1,223,835,531,282.51,- atau dengan rata-rata pertumbuhan selama 5 (Lima) tahun terakhir sebesar 4,46 persen, Peningkatan terbesar adalah pada asset tetap (bruto) yang meningkat sangat signifikan hingga mencapai Rp. 1,557,935,335,752.83,- pada tahun 2020. Kewajiban menggambarkan tentang kondisi utang Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga. Kewajiban daerah sendiri dapat dibagi menjadi 2, yakni kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan memiliki jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan sebesar Rp 10.654.996.228,18 atau dengan rata-rata pertumbuhan selama Lima tahun terakhir sebesar 12,89 persen. Ekuitas dana adalah selisih antara asset dengan kewajiban Pemerintah Daerah. Nilai Ekuitas Kabupaten Buru Selatan dari tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,78 persen. Tahun 2020, nilai ekuitas Kabupaten Buru Selatan mencapai Rp 1,689,219,739,512.44.

Gambaran kondisi neraca daerah dapat digunakan sebagai bahan analisis kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio, dimana terdapat 2 jenis Rasio yang digunakan, yakni rasio likuiditas dan solvabilitas sebagaimana terjabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.12. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016 – 2020

NO .	URAIAN	Pertumbuhan/Tahun					RATA - RATA (%)
		2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	
1	ASET						
2							
3	ASET LANCAR						
4	Kas di Kas Daerah	73,472,028,233.00	15,932,521,354.08	13,896,465,662.15	4,730,306,667.34	1,383,574,093.45	19.67
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	1,096,969,543.02	1,064,609,366.14	894,344,652.95	810,240,005.91	1,369,680,983.25	0.85
6	Kas di Bendahara penerimaan	52,076,300.00	149,205,100.00	87,832,550.00	11,633,924.25	11,633,924.25	3.08
	Kas JKN	12,689,038.84					
	Setara Kas						
	Kas di Badan Layanan Umum Daerah						
	Kas Dana Bos						
06a	Kas di Bendahara Dana BOS		418,704,567.89	1,454,510,657.89	3,438,168,657.89	3,640,598,644.83	0.20
	Kas Lainnya			1,971,268,675.68	1,358,884,675.68	86,634,438.19	10.42
7	Investasi jangka Pendek						
8	Piutang pajak	486,267,101.00	486,267,101.92	486,267,101.92	3,090,498,097.32	3,227,947,321.32	0.24
	Penyisihan piutang Pajak	-163,231,114.31	-163,231,115.09	-163,231,115.09	(875,909,741.55)	(875,909,741.55)	0.28
	Piutang Pajak Netto						
10	Piutang Retribusi	297,988,319.40	216,050,654.40	216,050,654.40			1.27
	Penyisihan Piutang Retribusi	-60,386,877.87	-60,386,878.00	-60,386,878.00			1.00
	Piutang Retribusi Netto						
10a	Penyisihan Piutang Dana Bergilir						
	Piutang Bagian Laba pada BMD						
	Penyisihan Piutang Bagian Laba pada BMD						

	Piutang Bagian Laba pada BMD Netto						
11	Piutang PAD yang Sah						
	Penyisihan Piutang PAD yang Sah						
	Piutang PAD yang Sah Netto						
12	Bagian Lancar Pinjaman Kepada perusahaan Negara						
13	Bagian lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah						
14	Bagian lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat						
15	Bagian Lancar Pinjaman Kepada pemerintah daerah Lainnya						
16	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran						
17	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi						
18	Piutang Lain-lain	1,816,225,509.56	1,510,519,351.00	3,550,766,714.00	1,206,796,073.00		1.36
	Penyisihan Piutang Lain-lain						
	Piutang Lain-lain Netto						
	Beban Dibayar Dimuka	52,083,333.33	27,166,667.00		577,221,667.00	158,888,888.88	0.43
19	Persediaan	3,292,715,730.34	3,378,233,803.00	2,198,403,322.23	3,015,418,086.00	1,938,320,198.00	1.49
19a	RK Dinas						
20	JUMLAH ASET LANCAR	80,355,425,116.32	22,959,659,972.34	24,532,291,998.13	17,391,695,043.55	10,951,849,081.33	4.46
21							
22	INVESTASI JANGKA PANJANG						
23	Investasi Non Permanen						
	Dana Bergulir	778,207,274.67	778,207,274.67	3,600,249,000.00	650,986,500.00		1.14
	Penyisihan Dana Bergulir			-2,582,441,000.00			
	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	778,207,274.67	778,207,274.67	1,017,808,000.00	650,986,500.00		
24	Pinjaman jangka Panjang						
25	Investasi dalam Surat Utang Negara						

26	Investasi dalam Proyek pembangunan						
27	Investasi Non Permanen Lainnya						
27a	Cadangan Kerugian Investasi Non Permanen						
28	Jumlah Investasi Non Permanen (24 s/d 27)						
29	Investasi Permanen						
	Investasi Jangka Panjang Permanen						
30	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	12,914,631,329.44	17,314,631,329.44	20,064,631,329.44	20,537,166,284.44	21,037,166,284.44	0.69
	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	13,692,838,604	18,092,838,604	21,082,439,329	20,537,166,284.44	21,037,166,284.44	0.72
31	Investasi Permanen Lainnya						
32	Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31)						
33	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	13,692,838,604	18,092,838,604	21,082,439,329	21,188,152,784.44	21,037,166,284.44	0.72
34							
35	ASET TETAP						
36	Tanah	40,128,312,483.00	43,137,310,483.00	60,748,122,091.00	63,661,266,628.50	340,303,227,216.38	0.20
37	Peralatan dan Mesin	234,937,239,002.60	262,230,562,570.63	341,133,688,642.03	359,379,927,911.68	360,674,330,784.58	0.73
38	Gedung dan Bangunan	309,440,278,539.45	367,036,259,212.45	432,999,504,262.00	484,257,157,974.00	512,174,028,818.00	0.69
39	Jalan, Jaringan, dan Instalasi	626,437,354,052.00	750,052,564,139.00	798,325,509,009.00	871,594,961,019.00	926,555,056,585.33	0.75
40	Asset Tetap Lainnya	31,613,919,825.00	35,202,950,292.00	43,538,278,652.00	32,032,853,018.00	37,810,619,858.00	0.87
41	Konstruksi dalam pengerjaan	105,030,788,617.00	120,882,450,641.00	78,423,784,710.00	107,465,116,428.00	127,715,424,950.00	0.86
42	Akumulasi Penyusutan	-233,425,044,899.00	-309,096,812,556.20	-409,217,339,907.00	(519,854,352,050.72)	(747,297,352,459.46)	0.42
42a	RK Dinas Aset						
43	JUMLAH ASET TETAP	1,114,162,847,620.05	1,269,445,284,781.88	1,345,951,547,459.03	1,398,536,930,928.46	1,557,935,335,752.83	0.78
44							
45	DANA CADANGAN						
46	Dana Cadangan						

47	JUMLAH DANA CADANGAN	-	-	-			
48							
49	ASET LAINNYA						
50	Tagihan Jangka Panjang	4,828,694,162.32	4,828,694,162.32	11510346570	11,409,641,114.75	11,401,821,789.75	0.52
	Tagihan penjualan Angsuran						
51	Tuntutan Ganti Rugi						
52	Kemitraan dengan Pihak Ketiga						
53	Aset Tak Berwujud						
54	Aset Lain-Lain	10,795,725,779.71	10,491,909,215.07	13,557,616,200.25	88,085,508,014.66	88,085,508,014.66	0.21
	Penyusutan						
	Aset P3D						
	Aset Dana BOS						
	Piutang Hapus Buku						
55	JUMLAH ASET LAINNYA	15,624,419,942	15,320,603,377	25,067,962,770	99,495,149,129.41	99,487,329,804.41	0.25
56	JUMLAH ASSET	1,223,835,531,282.51	1,325,818,386,735.72	1,416,634,241,557.03	1,536,611,927,885.86	1,689,411,680,923.01	0.79
57	KEWAJIBAN						
58	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
59	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5,084,806,912.10	5,632,032,179.10	5,250,157,066.18	64,242,737.57	191,941,410.57	11.68
60	Pendapatan Diterima Dimuka	715,171,894.00					
61	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang						
62	Utang Beban		2,160,668,895.00	4,256,068,972.00			
63	Utang Belanja						
64	Utang Jangka Pendek Lainnya		980,032,150.00	1,148,770,190.00			
65	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5,799,978,806	8,772,733,224	10,654,996,228	64,242,737.57	191,941,410.57	12.89
70							
71	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						

72	Utang Dalam Negeri						
73	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-			
75	JUMLAH KEWJIBAN	5,799,978,806	8,772,733,224	10,654,996,228	64,242,737.57	191,941,410.57	12.89
76							
77	EKUITAS DANA						
78	EKUITAS	1,218,035,552,476	1,317,045,653,511.62	1,405,979,245,334.56	1,536,611,927,885.86	1,689,219,739,512.44	0.78
79	JUMLAH EKUITAS	1,218,035,552,476	1,317,045,653,512	1,405,979,245,335	1,536,611,927,885.86	1,689,219,739,512.44	0.78
80	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,223,835,531,282.51	1,325,818,386,735.72	1,416,634,241,562.74	1,536,611,927,885.86	1,689,411,680,923.01	0.79

Sumber : BPKAD Kab. Buru Selatan, Tahun 2021

a) Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan asset lancar lainnya dari sebuah entitas dengan kewajiban lancarnya untuk melihat kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Data rasio likuiditas tahun terakhir 2020 Kabupaten Buru Selatan dapat dilihat pada tabel 3.13.

Tabel 3.13. Analisis Rasio Likuiditas Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018-2020

Ratio	Rumus	2018	%	2019	%	2020	%
Ratio Lancar (Current Ratio)	$\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$	$\frac{24,5)2,2\$2,00). \&4}{10,354, \$\$3,22\&.1\&}$	2,30	$\frac{13,3*\&,242,\&11.)\&}{22,54*,\&14,)*\$5*}$	0,74	$\frac{10, \$51, \&4\$0\&1.))}{1\$1, \$41,410,5*}$	57,06
Rasio Quick (Quick Ratio)	$\frac{\text{Aset Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}}$	$\frac{24,5)2,2\$2,00). \&4 - 2,1\$ \&,40),)22.2)}{10,354, \$\$3,22\&.1\&}$	2,1	$\frac{13,3*\&,242,\&11,)** - 2,3\$5,*01,2\&)}{22,54*,\&14,)*\$5*}$	0,62	$\frac{10, \$51, \&4\$0\&1.)) - 1, \$)\&,)20,1\$ \&.00}{1\$1, \$41,410,5*}$	46,96
Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset	$\frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$	$\frac{10,354, \$\$3,22\&.1\&}{1,413,3)4,241,532.*4}$	0,0075	$\frac{22,54*,\&14,)*\$5*}{1,433,3)3,*5*,2\$1.53}$	0,02	$\frac{191,941,410,57}{1,3\& \$,411,3\&0, \$2).01}$	0,00011

Sumber : BPKAD Kabupaten Buru Selatan, diolah 2021

Hasil analisis pada tabel 3.13. menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Buru Selatan memiliki kondisi pendanaan yang cukup kuat (likuid) dilihat dari hasil analisis ratio lancar, *quick ratio* dan rasio total hutang terhadap total asset juga bernilai sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan cukup kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajiban daerahnya.

b) Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas atau disebut juga Ratio *Leverage* yaitu mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh suatu entitas dengan dana yang dipinjam dari kreditur entitas tersebut. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas Kabupaten Buru Selatan tahun 2018- 2020 dapat dilihat di Tabel 3.14.

Tabel 3.14. Rasio Solvabilitas Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018-2020

Rasio	Rumus	2018	%	2019	%	2020	%
Rasio Kewajiban Terhadap Aset	$\frac{Ke}{A}$	$\frac{1\%, (\&\$, ee(, **). 1)}{1, \$1(, (+ \$, * \$1, \&(*. 7\$}$	0,0075	$\frac{1\%, (\&\$, ee(, **). 1)}{1, \$1(, (+ \$, * \$1, \&(*. 7\$}$	0,015	$\frac{1\%, (\&\$, ee(, **). 1)}{1, \$1(, (+ \$, * \$1, \&(*. 7\$}$	0,000113614
Rasio Kewajiban Terhadap Ekuitas	$\frac{Ke}{E}$	$\frac{1\%, (\&\$, ee(, **). 1)}{1, \$1(, (+ \$, * \$1, \&(*. 7\$}$	0,0076	$\frac{1\%, (\&\$, ee(, **). 1)}{1, \$1(, (+ \$, * \$1, \&(*. 7\$}$	0,016	$\frac{1\%, (\&\$, ee(, **). 1)}{1, \$1(, (+ \$, * \$1, \&(*. 7\$}$	0,00011363

Sumber : BPKAD Kab. Buru Selatan, diolah 2021

Rasio kewajiban terhadap asset di Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2020 sangat rendah hanya 0,000113 persen. Kecilnya nilai rasio ini menunjukkan bahwa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terkait anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan masih cukup jauh di bawah nilai total aset yang dimiliki. Sedangkan pada rasio kewajiban terhadap ekuitas (modal) juga sangat rendah, 0,00011 persen. Rasio kewajiban terhadap modal yang tertera di atas menunjukkan bahwa nilai total hutang masih jauh dibawah nilai modal yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.

3.4. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Buru Selatan 2016-2020

Pemahaman terhadap kinerja belanja daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa mendatang. Beberapa hal yang perlu dipahami dari analisis ini mencakup proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran, analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

3.4.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Belanja daerah Kabupaten Buru Selatan dibagi menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung memiliki delapan komponen belanja yaitu belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan untuk belanja langsung daerah Kabupaten Buru Selatan terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Tabel 3.15. Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Proporsi/Tahun (%)					Proporsi rata-rata (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
	BELANJA DAERAH	100	100	100	100	100	100
2:01	BELANJA TIDAK LANGSUNG	31.96	43.77	38.5	24.35	77.42	35.96
2:01:01	Belanja Pegawai	20.44	19.81	20.7	24.97	31.85	21.62
2:01:03	Belanja Subsidi	0.23	0.48	0.37	0.35	0.24	0.25
2:01:04	Belanja Hibah	1.36	6.77	1.43	1.12	6.72	3.09
2:01:05	Belanja Bantuan Sosial	0.5	1.4	1.41	1.89	5.32	1.17
2:01:07	Belanja Bantuan Keuangan	8.62	14.63	13.99	19.12	5.32	8.99
2:01:08	Belanja Tidak Terduga	0.8	0.68	0.59	0.51	2.01	0.85
2:02	BELANJA LANGSUNG	68.04	56.23	61.5	16.27	20.48	64.04
2:02:01	Belanja Pegawai	2.4	2.27	2.77	25.29	31.85	3.82
2:02:02	Belanja Barang dan Jasa	26.42	23.23	23.8	26.53	33.41	23.6
2:02:03	Belanja Modal	39.22	30.73	34.94	16.33	20.57	36.62

Sumber: BPKAD Kabupaten Buru Selatan, 2021 (diolah)

Proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja Kabupaten Buru Selatan tahun 2016-2020, menunjukkan bahwa semakin lama proporsi belanja langsung terhadap anggaran belanja memiliki proporsi lebih kecil dibanding belanja tidak langsung. Hingga pada tahun 2020 proporsi belanja tidak langsung meningkat hingga mencapai 77,42 persen dan belanja langsung terus menurun hingga mencapai 20,48 persen. Sedangkan jika dilihat dari rata-ratanya, proporsi penggunaan belanja tidak langsung rata-rata sebesar 35,96 persen sedangkan belanja langsung hanya 64,04 persen. Peningkatan proporsi belanja tidak langsung sejak tahun 2016 disebabkan oleh meningkatnya belanja bantuan keuangan yang mencapai 5,32 persen dan dan belanja hibah mencapai 6,72 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum dalam lima tahun terakhir belanja langsung yang berhubungan dengan program-program pembangunan daerah, pencapaian kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik belum maksimal namun menuju ke optimalisasi yang ditunjukkan dengan kenaikan proporsi. Sementara itu, pada komponen belanja tidak langsung proporsi terbesar digunakan untuk belanja pegawai. Sedangkan untuk belanja langsung proporsi terbesar untuk belanja modal.

a) Analisis Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur.

Selain gambaran mengenai belanja daerah baik belanja langsung maupun tidak langsung, perlu diketahui juga gambaran proporsi anggaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Provinsi Maluku. Kebutuhan belanja aparatur Pemerintah Provinsi Maluku selama periode tahun 2014-2018 antara lain meliputi Belanja Pegawai untuk Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Langsung untuk kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan.

Proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran memiliki kondisi fluktuatif, namun cenderung meningkat, dimana pada tahun 2016 sebesar 99,73 persen, turun menjadi 99,39 persen pada tahun 2017 hingga tahun 2018 menjadi 99,56 persen dan kembali turun di tahun 2019 sebesar 99,41 persen dan sampai tahun 2020 naik menjadi 99,92 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.16. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020

Tahun Anggaran	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan Daerah)	%
2016	731,605,249,972.60	733,605,249,972.60	99.73
2017	711,168,593,637.00	715,568,593,637.00	99.39
2018	962,307,518,645.76	966,557,518,645.76	99.56
2019	711,094,890,032.00	715,344,890,032.00	99.41
2020	652,171,170,736.23	652,671,170,736.23	99.92

Sumber : BPKAD Kab, Buru Selatan, Tahun 2021

b) Analisis Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Selain belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, perlu diketahui juga bagaimana gambaran pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Pemerintah Provinsi Maluku. Belanja untuk pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama adalah menyangkut pelayanan dasar wajib yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan menyangkut kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan.

Pengeluaran wajib dan mengikat mencakup pengeluaran untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada tabel diatas menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan. Tabel berikut adalah rincian pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2020:

Tabel 3.17. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016 – 2020

Urusan	2016	2017	2018	2019	2020
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Belanja Operasi					
Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Tambahan Penghasilan, dan Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/ WKDH	149,532,846,114	143,003,515,855	157,421,462,225	532.837.742.214,00	436.442.626.171,23
Belanja Bantuan Keuangan	63,095,773,842	105,606,447,017	106,368,652,400	135.715.058.900,00	29.975.370.970,00
Belanja Bunga	-	-	-		
Belanja Tidak Terduga	5,832,863,750	4,924,725,000	4,475,790,345	3.639.919.550,00	11.304.023.000,00
Belanja Modal					
Belanja Langsung untuk kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan.	193,280,415,756	167,669,769,662	180,948,442,567	173.389.214.068,00	115.956.313.544,00

Sumber : BPKAD Provinsi Maluku, Tahun 2021

Tabel 3.18. Realisasi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
A. Belanja Operasi		212,628,619,956	248,609,962,872	263,790,114,625	668,552,801,114.00	466,417,997,141.23	21.52
1	Belanja Gaji, Tunjangan dan termasuk (Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH)	149,532,846,114	143,003,515,855	157,421,462,225	532,837,742,214.00	436,442,626,171.23	9.6
2	Belanja Bantuan Keuangan	63,095,773,842	105,606,447,017	106,368,652,400	135,715,058,900.00	29,975,370,970.00	81.56
3	Belanja Bunga	-	-	-			-
B. Belanja Modal		193,280,415,756	167,669,769,662	180,948,442,567	173,389,214,068.00	115,956,313,544.00	17.03
1	Belanja Langsung untuk kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan	193,280,415,756	167,669,769,662	180,948,442,567	173,389,214,068.00	115,956,313,544.00	17.03
C. Pengeluaran Pembiayaan		2,000,000,000	4,400,000,000	2,750,000,000	4,250,000,000.00	500,000,000.00	16.14

1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintahan Daerah	2,000,000,000	4,400,000,000	2,750,000,000	4,250,000,000.00	500,000,000.00	24.79
2	Pemberian Pinjaman Daerah		-	-			-
Total (A+B+C)		407,909,035,712	420,679,732,534	447,488,557,192	846,192,015,182	582,874,310,685	19.01

Sumber : BPKAD Kabupaten Buru Selatan, Tahun 2021

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai pada pertanggungjawaban pelaksanaan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan yaitu, objektif, efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta manfaat bagi masyarakat. APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) semestinya menjadi andalan utama bagi pendapatan daerah, sedangkan pendapatan dari Pemerintah Pusat yang diperoleh dari bagian daerah atas Dana Perimbangan menjadi faktor penunjang. Namun sebaliknya untuk Kabupaten Buru Selatan selama Periode 2021 – 2026 pendapatan daerah terbesar didominasi oleh sumber penerimaan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat.
- b. Komposisi belanja daerah didasarkan pada kebutuhan obyektif, efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan kebutuhan atau sasaran kegiatan untuk memperoleh hasil optimal sesuai prinsip anggaran yang berbasis kinerja.
- c. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang berkenaan harus dimasukkan dalam APBD, sedangkan surplus penerimaan daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dan defisit anggaran dapat ditutup dari pembiayaan.
- d. Disiplin anggaran yang diperhatikan dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain, bahwa :
 - (1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
 - (2) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD.
- e. Asas umum dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu :
 - (1) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi

yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

- (2) Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai dari APBD.
- (4) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah.
- (5) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.

3.4.2. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah terutama sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta penerimaan lain-lain PAD yang sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan dana perimbangan termasuk dana alokasi khusus dan dana bagi hasil.

Adapun secara rinci, langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah antara lain meliputi:

- a. Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui :
 - Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
 - Mengimplementasikan perda-perda yang baru tentang pajak dan retribusi daerah;
 - Mengupayakan pengelolaan BUMD yang lebih efektif dan efisien dengan melakukan restrukturisasi dan revitalisasi organisasi serta pengembangan kapasitas dan jenis usaha;
 - Mengevaluasi tentang perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset dan kekayaan daerah;

- b. Mengusahakan secara optimal perolehan Dana Transfer yang lebih proposional melalui;
- Peningkatan koordinasi dalam rangka peningkatan bagi hasil PBB dan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri;
 - Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil SDA;
 - Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama tentang anggaran percepatan pembangunan Provinsi berciri kepulauan serta peningkatan alokasi DAK.

Struktur pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menunjukkan bahwa sumbangan Dana Perimbangan terhadap total pendapatan selalu bergerak positif sehingga struktur pendapatan tersebut menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana perimbangan sebagai sumber utama pendapatan daerah. Dengan demikian, tantangan dalam lima tahun mendatang adalah perlunya optimalisasi PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah dengan memperhatikan keberlanjutan fiskal dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Sedangkan perkembangan pendapatan asli daerah yang masih mengalami fluktuasi pertumbuhan yang menunjukkan bahwa pajak daerah tidak dapat menjadi sumber utama. Hal ini disebabkan oleh masih belum optimalnya transaksi ekonomi yang dapat menumbuhkan potensi pajak, terbatasnya wajib pajak dan belum berkembangnya sistem pengelolaan pajak daerah. Oleh sebab itu, dalam lima tahun mendatang tantangan yang harus diatasi antara lain adalah perlunya percepatan pembangunan ekonomi untuk menumbuhkan potensi pajak, intensifikasi pendataan dan penataan pajak daerah, pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan pelayanan perpajakan, sosialisasi dan penyuluhan pajak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak.

Pengelolaan belanja daerah merupakan bagian dari pelaksanaan program pembangunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Kebijakan pengelolaan belanja daerah secara bertahap didasarkan pada anggaran berbasis kinerja dengan orientasi pada pencapaian hasil, dan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta revisinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah tahun dibedakan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan belanja pegawai, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada desa, serta belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2025 nantinya.

Komponen belanja terbagi atas belanja aparatur dan belanja modal dan komponen belanja yang digunakan dalam struktur APBD meliputi :

(1) Kebijakan belanja tidak langsung diarahkan untuk: belum dikoreksi

- a. Meningkatkan efisiensi, efektivitas mutu dan nilai tambah dalam pelayanan umum dan administrasi pemerintahan;
- b. Melaksanakan kegiatan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria kesesuaian antara masukan dan daya dukung setiap unit kerja, antara keluaran dan manfaat yang dirasakan masyarakat, serta antara dampak dan nilai tambah bagi kemajuan daerah;
- c. Meningkatkan efektivitas organisasi dengan kriteria kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja, tidak terjadi tumpang tindih, dan dapat mendorong keterpaduan tindakan antarunit.

(2) Kebijakan Belanja Langsung diarahkan untuk:

- a. Mempercepat terwujudnya visi, misi dan tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD 2021-2025 yang disusun terutama peningkatan mutu sumberdaya manusia melalui penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan, serta mendorong peningkatan perekonomian masyarakat, pengembangan konektivitas, pengurangan kemiskinan dan peningkatan nilai tambah sector unggulan;
- b. Mendorong pengembangan ekonomi lokal melalui percepatan pembangunan ekonomi berbasis kepulauan, dan memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana daerah untuk meningkatkan daya saing daerah dan mendorong pemerataan pembangunan.

Namun demikian, pengelolaan belanja daerah dapat menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan belanja daerah antara lain adalah :

- (1) Belum adanya konsistensi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang struktur keuangan daerah. Selain itu, peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah terus mengalami perubahan yang menyebabkan keterlambatan dalam proses penyusunan anggaran, mengganggu kelancaran dalam pelaksanaan anggaran dan menghambat kecepatan dalam pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- (2) Adanya perubahan peraturan perundangan yang sangat cepat tanpa diikuti oleh sosialisasi juga telah menyebabkan keterlambatan penyesuaian terhadap peraturan yang baru dan berdampak terhadap kurang optimalnya penyerapan belanja daerah;
- (3) Terbatasnya pemahaman aparatur terhadap teknis penyusunan anggaran dan teknis pengalokasian dana terutama dalam penentuan prioritas belanja dengan mengacu pada prinsip anggaran berbasis kinerja;
- (4) Belum adanya standar pelayanan minimal sebagai acuan dalam mengalokasikan anggaran belanja daerah;
- (5) Belum adanya standar analisis belanja sebagai acuan yang digunakan untuk mengukur tingkat kewajaran belanja dan beban kerja;
- (6) Belum semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik Dinas, Kantor, Badan maupun Bagian menggunakan anggaran berbasis kinerja sebagai dasar penyusunan anggaran. Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam menetapkan indikator kinerja program dan kegiatan setiap OPD dan ketidaktepatan dalam mengalokasikan belanja daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan.

3.4.3. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang bertujuan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, penerimaan, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

a) Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah yang dilakukan. Tabel berikut menyajikan gambaran realisasi defisit riil anggaran Kabupaten Buru Selatan tahun

2014- 2018. Berdasarkan pada tabel dibawah, defisit riil anggaran menunjukkan bahwa pada tahun 2016 dan tahun 2020 terjadi surplus dimana realisasi pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah dan pengeluaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.19. Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	Realisasi Pendapatan Daerah	737,338,844,047.37	667,910,943,148.23	761,334,889,582.03	711,012,421,983.12	649,936,435,171.07
Dikuangi Realisasi Belanja :						
1	Realisasi Belanja Daerah	731,605,249,972.60	711,168,593,637.00	962,307,518,645.76	711,094,890,032.00	652,171,170,736.23
2	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2,000,000,000.00	4,400,000,000.00	2,750,000,000.00	4,250,000,000.00	500,000,000.00
B	Surplus/Defisit Riil	5,733,594,074.77	53,879,771,444.80	1,002,031,495.65	82,468,048.88	2,234,735,565.16

Sumber : BPKAD Kabupaten Buru Selatan, Tahun 2021

Tabel 3.20. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	77,915,522,089	81,658,334,000	22,909,536,655	21,161,568,000	16,829,100,000
2	Pencairan Dana Cadangan					
3	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	75,924,740,814	77,258,334,000	20,159,536,655	16,911,568,000	16,329,100,000
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan		81,658,334,889	23,376,562,555	21,161,568,151	16,829,100,102	14,094,364,435

Sumber: BPKAD Kabupaten Buru Selatan, Tahun 2021

3.5. Kerangka Pendanaan

Kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan untuk membiayai pembangunan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara optimal, dirumuskan dengan mempertimbangkan data realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun sebelumnya, serta data-data yang mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah, antara lain :

- 1) Indikator ekonomi makro, mencakup :
 - Rata-Rata Inflasi Kabupaten Buru Selatan tahun 2014-2018 sebesar 3,06 persen per tahun.

- Rata-Rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buru Selatan tahun 2014-2018 sebesar 6,27 persen per tahun.

2) Kebijakan di bidang keuangan Negara

Proyeksi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Buru Selatan tahun 2021-2025 dirumuskan dengan berdasarkan pada evaluasi penerimaan pendapatan daerah tahun 2014-2018, serta mempertimbangan komponen pos penerimaan pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat.

3.5.1. Proyeksi Pendapatan Dan Belanja Daerah

a) Proyeksi Pendapatan Daerah

Penerimaan Pendapatan daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021 sampai dengan 2026 mengalami pertumbuhan per tahun sebesar 1,10 persen, dengan Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,25 persen, Pos Dana Perimbangan rata-rata sebesar 1,81 persen dan Pos Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang sah rata-rata sebesar 0,65 persen (Tabel 3.21)

Berdasarkan pada pertumbuhan rata-rata penerimaan pendapatan daerah 2021 sampai dengan 2026 dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pendapatan Kabupaten Buru Selatan, Tahun 2021 sampai dengan 2026 mengalami pertumbuhan per tahun sebesar 5,82 persen, dengan Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,14 persen, Pos Dana Perimbangan rata-rata sebesar 5,92 persen dan Pos Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang sah rata-rata sebesar 5,27persen. Begitupun yang terjadi pada masing-masing komponen untuk jenis komponen jenis Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah (Tabel3.22).

Tabel 3.21. Rekap Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2016 - 2020

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	PENDAPATAN DAERAH	737,338,844,047.37	667,910,943,148.23	761,334,889,582.03	711,012,421,983.12	649,936,435,171.07	-2.66
1:01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	26,985,938,551.27	12,999,589,246.90	15,506,213,190.79	16,092,629,886.12	20,127,402,571.65	-0.92
1:01:01	Hasil Pajak Daerah	3,110,203,971.72	2,729,178,718.00	4,117,936,152.82	3,489,875,558.00	2,820,336,994.91	1.05
1:01:02	Hasil Retribusi Daerah	940,037,273.10	1,088,687,428.00	997,464,005.00	3,064,014,463.00	3,325,647,657.00	55.79
1:01:03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1,387,262,936.00	-	-	-	4,242,313,250.00	-25.00
1:01:04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	21,548,434,370.45	9,181,723,100.90	10,390,813,032.97	9,538,739,865.12	9,739,104,669.74	-12.58
1:02	DANA PERIMBANGAN	646,788,601,081.00	570,903,063,518.00	656,884,193,102.00	587,933,503,843.00	516,534,980,436.00	-4.83
1:02:01	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	22,262,653,778.00	24,982,408,575.00	13,614,466,838.00	7,128,488,640.00	14,644,286,073.00	6.13
1:02:02	Dana Alokasi Umum	415,945,544,000.00	413,834,980,000.00	420,639,459,000.00	440,886,206,000.00	403,896,483,000.00	-0.61
1:02:03	Dana Alokasi Khusus	208,580,403,303.00	132,085,674,943.00	222,630,267,264.00	139,918,809,203.00	97,994,211,363.00	-8.81
1:03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	63,564,304,415.10	84,008,290,383.33	88,944,483,289.24	106,986,288,254.00	113,274,052,163.42	16.05
1:03:01	Pendapatan Hibah	3,750,000,000.00	-	-	9,244,228,000.00	14,645,147,812.42	-10.39
1:03:02	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
1:03:03	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemda Lainnya	7,686,966,062.10	8,136,354,516.33	7,736,655,972.24	10,548,307,254.00	10,279,523,930.00	8.68
1:03:04	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	52,127,338,353.00	75,871,935,867.00	81,207,827,317.00	87,193,753,000.00	88,349,380,421.00	15.32
1:03:05	Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	-
Presentase PAD Terhadap Pendapatan (%) (PAD : Pendapatan x 100%)		3.66	1.95	2.04	2.26	3.10	1.13
Presentase Pajak Retribusi Terhadap Pendapatan (%) (Pajak Retribusi : Pendapatan x 100%)		0.13	0.16	0.13	0.43	0.51	0.35

Sumber : BPKAD Kabupaten Buru Selatan, Tahun 2021

Tabel 3.22. Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2021 s/d Tahun 2026 Kabupaten Buru Selatan

No	Uraian	Rata-rata Pertumbu han (%)	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	PENDAPATAN DAERAH	4.74	718,087,927,000	759,715,890,248	780,987,935,175	822,380,295,739	862,676,930,230	904,948,099,812
1.1	<u>PENDAPATAN ASLI DAERAH</u>	4.72	<u>27,916,583,000</u>	<u>29,514,608,296</u>	<u>30,341,017,328</u>	<u>31,949,091,247</u>	<u>33,514,596,718</u>	<u>35,156,811,957</u>
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	4.74	3,489,872,000	3,692,284,576	3,795,668,544	3,996,838,977	4,192,684,087	4,398,125,607
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4.62	3,522,753,000	3,705,936,156	3,809,702,368	4,011,616,594	4,208,185,807	4,414,386,912
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.74	3,438,219,000	3,637,635,702	3,739,489,502	3,937,682,445	4,130,628,885	4,333,029,700
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	4.74	17,465,739,000	18,478,751,862	18,996,156,914	20,002,953,231	20,983,097,939	22,011,269,738
1.2	<u>PENDAPATAN TRANSFER</u>	4.74	<u>675,171,344,000</u>	<u>714,331,281,952</u>	<u>734,332,557,847</u>	<u>773,252,183,413</u>	<u>811,141,540,400</u>	<u>850,887,475,879</u>
1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.74	666,171,344,000	704,809,281,952	724,543,941,847	762,944,770,765	800,329,064,532	839,545,188,694
1.2.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	4.74	9,000,000,000	9,522,000,000	9,788,616,000	10,307,412,648	10,812,475,868	11,342,287,185
1.3	<u>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</u>	4.74	<u>15,000,000,000</u>	<u>15,870,000,000</u>	<u>16,314,360,000</u>	<u>17,179,021,080</u>	<u>18,020,793,113</u>	<u>18,903,811,975</u>
1.3.1	Pendapatan Hibah	4.74	2,000,000,000	2,116,000,000	2,175,248,000	2,290,536,144	2,402,772,415	2,520,508,263
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.74	13,000,000,000	13,754,000,000	14,139,112,000	14,888,484,936	15,618,020,698	16,383,303,712

Sumber : BPKAD Kabupaten Buru Selatan, Tahun 2021

b) Proyeksi Belanja Daerah

Analisis proyeksi belanja daerah perlu dilakukan guna mendapatkan gambaran mengenai kondisi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan guna membiayai belanja langsung atau belanja program untuk RPJMD. Proyeksi Belanja dirumuskan berdasarkan tren pertumbuhan historis realisasi belanja tahun 2016-2020, prioritas pembangunan serta proporsi belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Berikut kebijakan terkait dengan Belanja daerah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan:

- 1) Proyeksi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026 rata-rata akan meningkat sebesar 3,66 persen per tahun, sementara Belanja tidak langsung diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 4,66 persen dan Belanja Langsung sebesar 2,77 persen.
- 2) Dana BOS tercatat dalam kerangka belanja langsung, walaupun berupa anggaran *in & out*.
- 3) Belanja Langsung menjadi prioritas utama pembangunan yang meliputi program/kegiatan monumental dan inovatif.

Analisis proyeksi belanja dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja tidak langsung daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat.

Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus, dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup, untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Sedangkan Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan, pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Analisis dilakukan dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Hasil proyeksi belanja dan pengeluaran wajib mengikat Pemerintah Kabupaten Buru Selatan tahun 2021-2026 dapat terlihat pada tabel 3.23.

Pertumbuhan komponen belanja tidak langsung dan belanja langsung rata-rata diproyeksikan mengalami peningkatan. Dari perkembangan proyeksi pendapatan dan belanja daerah maka dapat diperoleh gambaran tentang sisa lebih perhitungan anggaran. Hasil analisis ini juga dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan. Analisis dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat mempengaruhi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran dimasa yang akan datang, yakni:

- 1) Angka rata-rata pertumbuhan saldo kas neraca daerah dan rata-rata pertumbuhan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan serta kegiatan lanjutan;
- 2) Asumsi indikator makro ekonomi daerah.
- 3) Kebijakan penyelesaian kewajiban daerah.

Kebijakan efisiensi belanja daerah dan peningkatan potensi penerimaan pendapatan.

Tabel 3.23. Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2021 s/d 2026 Kabupaten Buru Selatan

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	BELANJA DAERAH	4.10	743,084,625,119	764,635,525,822	783,751,413,967	825,435,001,350	866,706,751,418	908,139,548,598
2.1	BELANJA OPERASI	4.38	412,802,871,761	424,745,319,863	435,339,567,464	463,870,799,452	487,321,477,911	511,103,660,158
2.1.1	Belanja Pegawai	4.04	186,585,955,850	192,183,534,526	197,949,040,561	206,658,798,346	216,785,079,465	227,407,548,359
2.1.3	Belanja Barang/Jasa	4.79	199,497,415,096	205,040,699,498	209,143,808,488	228,117,881,139	240,016,666,601	251,778,722,479
2.1.4	Belanja Bunga	0.00	0	0	0	0	0	0
2.1.5	Belanja Subsidi	3.76	1,473,200,000	1,517,396,000	1,562,917,880	1,609,805,416	1,688,685,882	1,771,431,490
2.1.7	Belanja Hibah	3.52	8,180,629,965	8,426,048,864	8,578,830,330	8,836,195,240	9,269,168,807	9,723,358,078
2.1.8	Belanja Bantuan Sosial	3.66	17,065,670,850	17,577,640,976	18,104,970,205	18,648,119,311	19,561,877,157	20,422,599,752
2.2	BELANJA MODAL	3.77	177,000,160,358	182,310,165,169	187,779,470,124	193,412,854,228	202,994,509,800	212,940,875,076
2.2.1	Belanja Modal Tanah	3.76	10,711,720,000	11,033,071,600	11,364,063,748	11,704,985,660	12,278,529,958	12,880,177,926
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.76	51,252,491,351	52,790,066,092	54,373,768,074	56,004,981,117	58,749,225,191	61,627,937,226
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.79	58,430,756,478	60,183,679,172	61,989,189,548	63,848,865,234	67,081,885,345	70,368,897,727
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.76	56,286,154,179	57,974,738,804	59,713,980,969	61,505,400,398	64,519,165,017	67,680,604,103
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.74	319,038,350	328,609,501	338,467,786	348,621,819	365,704,288	383,258,094
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.54	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	13,000,000,000	13,637,000,000	14,017,330,291
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	7.54	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	13,000,000,000	13,637,000,000	14,017,330,291
2.4	BELANJA TRANSFER	3.49	143,281,593,000	147,580,040,790	150,632,376,380	155,151,347,671	162,753,763,707	170,077,683,074
2.4.1	Belanja Bantuan Keuangan	3.49	143,281,593,000	147,580,040,790	150,632,376,380	155,151,347,671	162,753,763,707	170,077,683,074
SURPLUS/DEFISIT		-20.50	-24,996,698,119	-4,919,635,574	-2,763,478,792	-3,054,705,611	-4,029,821,187	-3,191,448,786

Sumber: BPKAD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021

c) Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pada pembiayaan daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026, diproyeksikan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026 untuk Penyertaan modal pemerintah daerah meliputi penyertaan modal Bank Maluku – Maluku Utara, PT. Bupolo Gidin serta perusahaan lain yang akan dibentuk untuk mengelola potensi sumber daya alam.

Sementara, pertumbuhan rata-rata penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dari tahun 2021-2026 juga mengalami peningkatan, dimana pada pos penerimaan pembiayaan diproyeksikan meningkat per tahun sebesar 5,94 persen, dan pengeluaran pembiayaan sebesar 6,2 persen yang berkontribusi dari pos penyertaan modal Pemerintah Daerah (Tabel 3.24).

Tabel 3.24. Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2021 - 2026 Kabupaten Buru Selatan

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
3	PEMBIAYAAN							
3.1	<u>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</u>	-10.88	<u>26,496,698,119</u>	<u>6,919,635,573</u>	<u>5,263,478,792</u>	<u>6,054,705,611</u>	<u>8,029,821,188</u>	<u>7,691,448,786</u>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-10.88	26,496,698,119	6,919,635,573	5,263,478,792	6,054,705,611	8,029,821,188	7,691,448,786
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan							
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan							
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah							
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman							
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah							
3.2	<u>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</u>	24.83	<u>1,500,000,000</u>	<u>2,000,000,000</u>	<u>2,500,000,000</u>	<u>3,000,000,000</u>	<u>4,000,000,000</u>	<u>4,500,000,000</u>
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan							
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintahan Daerah	24.83	1,500,000,000	2,000,000,000	2,500,000,000	3,000,000,000	4,000,000,000	4,500,000,000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang							
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah							
	PEMBIAYAAN NETTO	-20.50	24,996,698,119	4,919,635,573	2,763,478,792	3,054,705,611	4,029,821,188	3,191,448,786
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)		0	0	0	0	0	0

Sumber : BPKAD Kabupaten Buru Selatan, Tahun 2021 (diolah)

3.5.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Analisis Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah, kemudian menentukan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan.

Dari total pendapatan dan penerimaan yang dikurangi total belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan diperoleh kapasitas riil kemampuan keuangan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan. Untuk menentukan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan (2021-2025) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buru Selatan sebagaimana Tabel 3.25. Berdasarkan proyeksi, kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Buru Selatan menunjukkan angka yang fluktuatif, dan angka tahun 2021 sampai dengan 2025 yang semakin meningkat menandakan adanya peningkatan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pembangunan daerah.

Tabel 3.25. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026

No	Uraian	Realisasi 2019	Proyeksi						
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Penerimaan Pendapatan	711,012,421,983	649,936,435,171	718,087,927,000	759,715,890,248	780,987,935,175	822,380,295,739	862,676,930,230	904,948,099,812
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SILPA)	21,161,568,151	16,829,100,000	26,496,698,119	6,919,635,573	5,263,478,792	6,054,705,611	8,029,821,188	7,691,448,786
	Total Penerimaan	732,173,990,134	666,765,535,171	744,584,625,119	766,635,525,821	786,251,413,967	828,435,001,350	870,706,751,418	912,639,548,598
Dikurangi									
4	Belanja Operasi/ Belanja Tidak Langsung	538,187,475,964	536,214,857,192	412,802,871,761	424,745,319,863	435,339,567,464	463,870,799,452	487,321,477,911	511,103,660,158
5	Pengeluaran Pembiayaan	4,250,000,000	500,000,000	1,500,000,000	2,000,000,000	2,500,000,000	3,000,000,000	4,000,000,000	4,500,000,000
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan		189,736,514,170	130,050,677,979	330,281,753,358	339,890,205,958	348,411,846,504	361,564,201,898	379,385,273,507	397,035,888,440

Sumber : BPKAD Kabupaten Buru Selatan 2021.

Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program/kegiatan sesuai urutan prioritas. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, di mana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II, dan Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% dan bidang kesehatan 10%. Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi dan misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat OPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan OPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi OPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan.

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan dengan mendahulukan pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

Belanja daerah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menunjukkan Prioritas I dan II rata-rata di atas 50% dari total belanja daerah, hal ini menunjukkan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan yang lebih mengutamakan penggunaan anggaran untuk program pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat Buru Selatan (Tabel 3.26).

Tabel 3.26. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020-2026

Rencana Alokasi	Baseline tahun 2020	Tahun																	
		2021			2022			2023			2024			2025			2026		
		Rp	Proporsi (%)	Pertumbuhan (%)	Rp	Proporsi (%)	Pertumbuhan (%)	Rp	Proporsi (%)	Pertumbuhan (%)	Rp	Proporsi (%)	Pertumbuhan (%)	Rp	Proporsi (%)	Pertumbuhan (%)	Rp	Proporsi (%)	Pertumbuhan (%)
BELANJA DAERAH PRIORITAS I	108,778,213,344	177,000,160,358	23.82	62.72	182,310,165,169	23.84	3.00	187,779,470,124	23.96	3.00	193,412,854,228	23.43	3.00	202,994,509,800	23.42	4.95	212,940,875,076	23.45	4.90
Belanja daerah Untuk Membiayai Program Pembangunan	108,778,213,344	177,000,160,358	23.82	62.72	182,310,165,169	23.84	3.00	187,779,470,124	23.96	3.00	193,412,854,228	23.43	3.00	202,994,509,800	23.42	4.95	212,940,875,076	23.45	4.90
BELANJA DAERAH PRIORITAS II	193,280,415,756	199,497,415,096	26.847	3.22	205,040,699,498	26.82	2.78	209,143,808,488	26.68	2.00	228,117,881,139	27.64	9.07	240,016,666,601	27.69	5.22	251,778,722,479	27.72	4.90
Belanja Barang/ Jasa OPD	193,280,415,756	199,497,415,096	26.847	3.22	205,040,699,498	26.82	2.78	209,143,808,488	26.68	2.00	228,117,881,139	27.64	9.07	240,016,666,601	27.69	5.22	251,778,722,479	27.72	4.90
BELANJA DAERAH PRIORITAS III	358,514,420,785	366,587,049,665	49.333	2.25	377,284,661,155	49.34	2.92	386,828,135,356	49.36	2.53	403,904,265,984	48.93	4.41	423,695,575,017	48.89	4.90	443,419,951,044	48.83	4.66
Belanja Pegawai	179,534,489,262	186,585,955,850	25.11	3.93	192,183,534,526	25.13	3.00	197,949,040,561	25.26	3.00	206,658,798,346	25.04	4.40	216,785,079,465	25.01	4.90	227,407,548,359	25.04	4.90
Belanja Subsidi	1,328,800,000	1,473,200,000	0.20	10.87	1,517,396,000	0.20	3.00	1,562,917,880	0.20	3.00	1,609,805,416	0.20	3.00	1,688,685,882	0.19	4.90	1,771,431,490	0.20	4.90
Belanja Hibah	37,870,511,000	8,180,629,965	1.10	(78.40)	8,426,048,864	1.10	3.00	8,578,830,330	1.09	1.81	8,836,195,240	1.07	3.00	9,269,168,807	1.07	4.90	9,723,358,078	1.07	4.90
Belanja Bantuan Sosial	10,151,846,132	17,065,670,850	2.30	68.10	17,577,640,976	2.30	3.00	18,104,970,205	2.31	3.00	18,648,119,311	2.26	3.00	19,561,877,157	2.26	4.90	20,422,599,752	2.25	4.40
Belanja Bantuan Keuangan	118,324,751,391	143,281,593,000	19.28	21.09	147,580,040,790	19.30	3.00	150,632,376,380	19.22	2.07	155,151,347,671	18.80	3.00	162,753,763,707	18.78	4.90	170,077,683,074	18.73	4.50
Belanja Tidak Terduga	11,304,023,000	10,000,000,000	1.35	(11.54)	10,000,000,000	1.31	-	10,000,000,000	1.28	-	13,000,000,000	1.57	30.00	13,637,000,000	1.57	4.90	14,017,330,291	1.54	2.79
	660,573,049,885	743,084,625,119	100	12.49	764,635,525,822	100.00	2.90	783,751,413,967	100.00	2.50	825,435,001,350	100.00	5.32	866,706,751,418	100.00	5.00	908,139,548,598	100.00	4.78

Sumber: BPKAD Kabupaten Buru Selatan, 2021 (diolah)

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Pada periode pemerintahan sebelumnya telah membawa perubahan positif yang sangat signifikan bagi pembangunan di daerah ini, baik dari sisi pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi maupun dari aspek sosial dan kemasyarakatan, namun demikian masih banyak permasalahan dan tantangan yang harus diselesaikan dan dihadapi kedepan dan merupakan permasalahan prioritas pembangunan daerah.

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan berdasarkan analisis pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah sebagai perbedaan pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi pada saat ini. Umumnya permasalahan tersebut timbul dari potensi daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal (aspek kekuatan), permasalahan yang belum dapat diatasi (aspek kelemahan), yang belum dapat dimanfaatkan (aspek peluang) dan ancaman dari luar daerah yang belum dapat diantisipasi (aspek ancaman).

Perlu diidentifikasi awal permasalahan pembangunan daerah agar rencana pembangunan yang disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat. Jika teridentifikasi maka permasalahan pembangunan daerah ini, diharapkan dapat memberikan penguatan pada penyusunan RPJMD Kabupaten Buru Selatan tahun 2021–2026. Permasalahan pembangunan dapat diidentifikasi dan dianalisis berdasarkan pada pendekatan urusan pemerintahan, yakni urusan wajib dan urusan pilihan yaitu:

4.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

4.1.1.1. Terkait Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Permasalahan Pendidikan di Kabupaten Buru Selatan antara lain :

- 1) Standar pelayanan minimal pendidikan belum tercapai;
- 2) Belum optimalnya aksesibilitas, sarana, prasarana dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
- 3) Terbatasnya Kuantitas dan Rendahnya Kualitas Guru;
- 4) Belum meratanya distribusi guru baik kuantitas maupun kualitas;
- 5) Terbatasnya pendidikan berbasis IT dan kompetensi, potensi wilayah dan budayalokal;
- 6) Dampak informasi dan teknologi terhadap peserta didik menurunkan minat belajar;
- 7) Belum optimalnya implementasi pendidikan karakter.

2. Urusan Kesehatan

Permasalahan kesehatan yang masih ditemui di Kabupaten Buru Selatan meliputi:

- 1) Sebaran puskesmas dan Puskesmas pembantu belum merata.
- 2) Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata dan terbatasnya jumlah tenaga kesehatan tertentu;
- 3) Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan;
- 4) Masih ada ancaman penyakit menular maupun tidak menular, serta meningkatnya penyakit degeneratif;
- 5) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
- 6) Rendahnya Gerakan SUN (*Scaling Up Nutrition*) untuk perbaikan gizi masyarakat karena dukungan lintas sektor terkait yang belum memadai.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan pekerjaan umum dan penataan ruang yang masih terjadi di Kabupaten Buru Selatan, antara lain:

- 1) Rendahnya kemantapan jalan;
- 2) Terbatasnya Aksesibilitas dan konektivitas inter Kecamatan dan Desa;
- 3) Rendahnya rasio jaringan irigasi;
- 4) Rendahnya akses air minum layak;
- 5) Rendahnya akses masyarakat kepulauan terhadap air bersih;
- 6) Terbatas infrastruktur perumahan;
- 7) Kurangnya kesadaran produk tata ruang yang telah disusun sebagai produk yang berkekuatan hukum;
- 8) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib penataan ruang.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Buru Selatan, antara lain:

- 1) Rendahnya rasio rumah layak huni;
- 2) Rendahnya rasio permukiman layak huni;
- 3) Masih tingginya backlog.

5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang masih terjadi di Kabupaten Buru Selatan, antara lain:

- 1) Masih terbatasnya kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP;
- 2) Masih terbatasnya kegiatan pembinaan politik daerah kepada masyarakat oleh parpol;
- 3) Masih rendahnya rasio jumlah Linmas, rasio jumlah Pos Siskamling dan rasio jumlah Polisi Pamong Praja;
- 4) Masih terbatasnya cakupan patroli petugas Satpol PP; dan
- 5) Buru Selatan rentan terhadap Bencana Alam.

6. Urusan Sosial

Permasalahan urusan sosial yang masih terjadi di Kabupaten Buru Selatan, antara lain:

- 1) Masih tingginya penyandang masalah social yang terkait dengan rehabilitasi sosial dasar, penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna

sosial serta rendahnya pemberian perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana;

- 2) Masih tingginya penyandang masalah fakir miskin dan orang tidak mampu;
- 3) Masih rendahnya kualitas pelayanan sosial termasuk pemberian pelayanan bagi orang dengan HIV/Aids (ODA) dan korban Napza (narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya);
- 4) Belum optimal penanganan Komunitas Adat Terpencil;
- 5) Kualitas data kemiskinan masih rendah dan terbatasnya penjangkauan masyarakat miskin dan orang tidak mampu;
- 6) Belum optimalnya pelaksanaan pemutakhiran data kemiskinan (PFM dan OTM);
- 7) Belum adanya pelayanan satu pintu dalam perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- 8) Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan antara pusat dan daerah.

4.1.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib bukan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan ketenagakerjaan yang masih terjadi di Kabupaten Buru Selatan, antara lain:

- 1) Terbatasnya lapangan kerja;
- 2) Kualitas dan daya saing pencari kerja belum sesuai kebutuhan pasar;
- 3) Kurangnya inovasi dan kreatifitas dalam menciptakan lapangan kerja baru sesuai potensi dan karakteristik wilayah;
- 4) Kurangnya informasi peluang kerja dalam dan luar negeri;
- 5) Belum terbangunnya kerjasama dengan Lembaga Pendidikan (Terutama Pendidikan Tinggi dan Vokasi)

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain :

- 1) Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak;

- 2) Belum optimal perencanaan penganggaran berbasis gender;
- 3) Masih Tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 4) Kurangnya pengembangan usaha ekonomi produktif perempuan;
- 5) Belum optimalnya peran media massa dan elektronik dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 6) Kurangnya pemahaman komprehensif terhadap isu gender.

3. Urusan Pangan

Permasalahan terkait urusan ketahanan pangan yang masih terjadi di Kabupaten Buru Selatan, antara lain:

- 1) Kurangnya pemahaman tentang prinsip dan nilai ketahanan pangan;
- 2) Belum adanya/terupdatenya pemetaan potensi daerah rawan pangan;
- 3) Belum adanya sistem dan mekanisme distribusi pangan sesuai peta rawan pangan;
- 4) Masih rendahnya akses masyarakat terhadap sumber-sumber pangan;
- 5) Rendahnya inovasi dan kreatifitas pengolahan dan pemanfaatan keragaman pangan;
- 6) Belum adanya penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

4. Urusan Pertanahan

Permasalahan terkait urusan pertanahan yang masih terjadi di Kabupaten Buru Selatan, antara lain:

- 1) Adanya ketimpangan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T);
- 2) Belum optimalnya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pembangunan.
- 3) Belum tertatanya penetapan batas hak ulayat;

5. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan terkait urusan lingkungan hidup yang masih terjadi di Kabupaten Buru Selatan, antara lain:

- 1) Belum adanya pemetaan potensi kerusakan lingkungan;
- 2) Terbatasnya SDM Lingkungan;

- 3) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kualitas lingkungan hidup berkelanjutan;
- 4) Kurangnya pengawasan lingkungan hidup;
- 5) Belum adanya program Pendidikan Masyarakat tentang lingkungan hidup;
- 6) Belum optimalnya gerakan dan budaya masyarakat bersih lingkungan;
- 7) Belum optimalnya kerjasama antara institusi dalam pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, yakni :

- 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan aparat dalam tertib administrasi kependudukan;
- 2) Tingginya tingkat pertumbuhan kependudukan.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yakni:

- 1) Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa dan tata kelola pemerintahan desa dan/atau negeri.
- 2) Rendahnya kapasitas SDM masyarakat desa dan/atau negeri.
- 3) Belum sinerginya program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan antar pemerintah. (perencanaan dan penganggaran)
- 4) Terbatasnya data indikator dan potensi serta informasi pembangunan desa dan/atau negeri
- 5) Belum adanya pembangunan desa berbasis kearifan lokal. (model)
- 6) Belum optimalnya pendekatan untuk percepatan pembangunan desa menjadi desa berkembang dan mandiri di setiap kecamatan.

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, antara lain :

- 1) Masih tingginya rata-rata jumlah anak per keluarga;

- 2) Masih rendahnya persentase akseptor KB yang aktif;
- 3) Masih adanya Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I.

9. Urusan Perhubungan

Permasalahan terkait urusan perhubungan yang masih terjadi di Kabupaten Buru Selatan, antara lain:

- 1) Belum optimalnya integrasi sistem transportasi yang berbasis kepulauan
- 2) Masih terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan yang berbasis kepulauan
- 3) Kurangnya SDM Perhubungan.
- 4) Kurangnya pemahaman pentingnya keselamatan dan keamanan transportasi

10. Urusan Komunikasi dan Informasi

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Komunikasi dan Informatika, yakni :

- 1) Terbatasnya infrastruktur telekomunikasi antar Kecamatan dan Desa;
- 2) Terbatasnya kualitas dan kapasitas telekomunikasi;
- 3) Terbatasnya penyebaran media informasi pada masyarakat;
- 4) Rendahnya kualitas SDM komunikasi dan informasi;
- 5) Kurangnya pengawasan dalam penyalahgunaan media informasi;
- 6) Rendahnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam mengelola informasi (peran masyarakat sebagai jurnalis lokal).

11. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, antara lain :

- 1) Belum optimalnya manajemen koperasi dan UKM;
- 2) Terbatasnya akses pelaku usaha terhadap permodalan;
- 3) Rendahnya Inovasi, adopsi teknologi dan pengembangan desain produk;
- 4) Terbatasnya jaringan pasar industri kecil dan kemitraan usaha;
- 5) Belum berkembangnya jiwa kewirausahaan;
- 6) Terbatasnya kualitas SDM pelaku usaha ;
- 7) Kurang partisipasinya masyarakat dalam mengembangkan koperasi.

12. Urusan Penanaman Modal

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Penanaman Modal, yakni:

- 1) Iklim investasi belum kondusif (keamanan, infrastruktur, dukungan masyarakat, promosi, regulasi)
- 2) Belum optimalnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- 3) Terbatasnya SDM pengelola urusan penanaman modal
- 4) Belum optimalnya sinergitas antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten.

13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kepemudaan dan Olahraga, antara lain :

- 1) Terbatasnya sarana, prasarana pengembangan pemuda dan olahraga;
- 2) Belum Optimalnya pembinaan kepemudaan;
- 3) Belum Optimalnya pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;
- 4) Terbatasnya tenaga pelatih profesional;
- 5) Belum optimalnya manajemen organisasi pemuda dan olahraga;
- 6) Belum berkembangnya organisasi keolahragaan di tingkat desa dan/atau negeri.

14. Urusan Statistik

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Statistik, yakni :

- 1) Belum optimalnya kualitas SDM dan komitmen dalam pengolahan data statistik.
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan data statistik.

15. Urusan Persandian

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Persandian, antara lain:

- 1) Terbatasnya sumber daya aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi dalam urusan persandian;
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana persandian.

16. Urusan Kebudayaan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kebudayaan, antara lain:

- 1) Masih rendahnya penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari;

- 2) Belum optimalnya pengelolaan kekayaan budaya;
- 3) Terbatasnya kualitas sumberdaya manusia pelaku budaya;
- 4) Rendahnya minat masyarakat dalam mempelajari budaya daerah dan penyelamatan aset budaya.

17. Urusan Perpustakaan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Perpustakaan, antara lain:

- 1) Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia pengelola perpustakaan;
- 2) Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perpustakaan bagi pengembangan kualitas bangsa;
- 3) Pengelolaan perpustakaan yang belum profesional;
- 4) Terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan;
- 5) Terbatasnya koleksi bahan bacaan yang tersedia di perpustakaan;
- 6) Menurunnya tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan.

18. Urusan Kearsipan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kearsipan, antara lain:

- 1) Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia pengelola kearsipan;
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana kearsipan;
- 3) Belum optimalnya penataan tertib arsip;
- 4) Belum sinergi pengelolaan kearsipan di tingkat Kabupaten dan Provinsi.

4.1.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Perikanan, yakni :

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan wilayah pesisir untuk budidaya perikanan;
- 2) Terbatasnya sarana prasarana perikanan budidaya, tangkap, pengelolaan hasil kelautan dan perikanan;
- 3) Rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan pasca panen;

- 4) Rendahnya pengawasan sumber daya kelautan (*illegal unreported unregulated fishing*);
- 5) Kurangnya pembinaan terhadap kelompok nelayan;
- 6) Tingginya kerusakan kawasan pesisir dan ekosistemnya;
- 7) Belum adanya kolaborasi dalam pengolahan dan pemasaran hasil perikanan antara nelayan, pemerintah dan pengusaha;
- 8) Rendahnya pemahaman budaya maritim;
- 9) Lunturnya implementasi kearifan lokal pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 10) Belum adanya pengelolaan sumber daya perikanan yang berbasis ekosistem dan konektivitas antar sumber daya, sosial dan ekonomi;
- 11) Belum optimalnya inisiasi, pencadangan dan penetapan serta pengelolaan dan pencadangan Kawasan-kawasan lindung/konservasi pesisir dan laut;
- 12) Belum adanya transformasi bisnis dan praktek perikanan berkelanjutan.

2. Urusan Pariwisata

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pariwisata, antara lain :

- 1) Masih kurangnya kolaborasi masyarakat, pemerintah dan pengusaha dalam pengembangan pariwisata;
- 2) Rendahnya kualitas SDM pengelola dan pelaku usaha pariwisata;
- 3) Terbatasnya infrastruktur pendukung pariwisata berskala nasional dan internasional;
- 4) Rendahnya promosi dan daya saing pariwisata;
- 5) Belum dikembangkannya kearifan lokal dalam pengembangan pariwisata;
- 6) Kurangnya inovasi dan kreatifitas dalam mengembangkan daya tarik wisata tahunan;
- 7) Belum adanya transformasi bisnis dan praktek-praktek pariwisata bertanggung jawab dan berkelanjutan.

3. Urusan Pertanian

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pertanian, yakni :

- 1) Rendahnya produktivitas pangan strategis dan pangan lokal
- 2) Terbatasnya infrastruktur pertanian (gudang, irigasi, dll).

- 3) Rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi dan informasi, pasar dan permodalan.
- 4) Alih fungsi lahan pertanian masih cukup tinggi;
- 5) Pemberdayaan terhadap kelompok petani terbatas dan belum tepat sasaran
- 6) Terbatasnya SDM penyuluh pertanian
- 7) Belum optimalnya manajemen sumber daya pertanian
- 8) Belum adanya kolaborasi dalam pengolahan dan pemasaran hasil pertanian antara petani, pemerintah dan pengusaha
- 9) Terbatasnya bantuan kepada petani (bibit, pupuk, peralatan)
- 10) Rendahnya pengembangan komoditas perkebunan unggulan daerah (pala, cengkih, kelapa coklat dan kopi).

4. Urusan Kehutanan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kehutanan, yakni :

- 1) Masih tingginya klaim masyarakat adat atas hak ulayat pada kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan non procedural karena belum adanya regulasi di kabupaten;
- 2) Belum optimalnya penggunaan hutan dan hasil hutan;
- 3) Rendahnya pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan;
- 4) Tingginya kerusakan ekosistem mangrove dan lahan kritis yang luas tersebar di kab/kota;
- 5) Masih tingginya penebangan liar dan peredaran kayu illegal;
- 6) Belum ditetapkannya tata batas antar Kawasan hutan;
- 7) Adanya potensi usaha pertambangan pada kawasan hutan lindung.

5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, yakni:

- 1) Belum tercapainya cakupan rasio elektrifikasi 100%;
- 2) Tingginya penambangan sumber daya mineral secara ilegal;
- 3) Belum optimalnya diversifikasi dan pemanfaatan energi baru terbarukan;
- 4) Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang dampak penambangan ilegal;

- 5) Terbatasnya SDM pengelolaan sumberdaya mineral;
- 6) Lemahnya sistem monitoring pengelolaan tambang hulu ke hilir.

6. Urusan Perdagangan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Perdagangan, yakni :

- 1) Rendahnya daya saing produk di pasar nasional maupun global;
- 2) Belum lancarnya distribusi bahan pokok/barang strategis;
- 3) Belum adanya sistim resi gudang yang mendukung stabilitas harga;
- 4) Belum adanya pusat promosi daerah;
- 5) Belum adanya pasar induk terpadu provinsi kabupaten.

7. Urusan perindustrian

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Perindustrian, yakni :

- 1) Masih kurangnya dukungan terhadap pengembangan Industri Kecil Menengah;
- 2) Terbatasnya Industri berbasis sumberdaya lokal;
- 3) Belum ditetapkan kawasan industri berbasis potensi;
- 4) Terbatasnya SDM terkait industri;
- 5) Belum adanya kerjasama dalam dan luar negeri dalam rangka pengembangan industri di Buru Selatan.

8. Urusan Transmigrasi

- 1) Kurangnya minat masyarakat untuk bertransmigrasi.
- 2) Kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam mempersiapkan transmigran baik di daerah asal maupun daerah tujuan transmigrasi.
- 3) Kurangnya pemberdayaan masyarakat lokal disekitar kawasan transmigrasi.

4.2. Isu Strategis

Isu Strategis pembangunan daerah Kabupaten Buru Selatan dalam 5 (lima) tahun ke depan dapat dirumuskan melalui analisis terhadap fakta-fakta pembangunan yang dicapai, permasalahan pembangunan yang dialami untuk semua sektor pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai gambaran pada bab sebelumnya dengan isu-isu eksternal secara global.

4.2.1. Isu Strategis Internasional (Global)

Penyelenggaraan pembangunan daerah dipengaruhi oleh faktor yang bersifat eksternal atau kondisi dari luar yang tidak dapat dikontrol sepenuhnya maupun faktor internal yang berasal dari dalam. Kondisi eksternal umumnya berlaku secara nasional maupun internasional berdampak langsung dan berdimensi waktu yang panjang. Beberapa kondisi eksternal atau isu global yang dipandang dapat mempengaruhi penyelenggaraan pembangunan daerah diantaranya adalah:

1. *Sustainable Development Goal (SDGs)*

Isu strategis internasional yang harus menjadi perhatian bagi seluruh daerah di Indonesia adalah *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2030. SDGs berisi 17 tujuan pembangunan yang merupakan kelanjutan dari *Millenium Development Goals (MDGs)* yang telah selesai pada tahun 2015 (BPS, 2014; Hoelman dkk, 2016). Berikut adalah 17 tujuan pembangunan tersebut:

1. Menghapus kemiskinan dalam segala bentuk di manapun
2. Menghapus kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, serta mencanangkan pertanian berkelanjutan
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk di segala usia
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan dan modern untuk semua
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, membangun industri yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi

10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar-negara
11. Membuat kota dan permukiman menjadi inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumberdaya laut dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan secara lestasi, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati
16. Mendorong kehidupan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan untuk semua, serta membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

2. Revolusi Industri 4.0

Selain SDGs, isu strategis internasional lain yang harus diperhatikan adalah Revolusi Industri 4.0, Revolusi industri gelombang ke empat, yang juga disebut industry 4.0, adalah tren terbaru teknologi yang sedemikian rupa canggihnya, yang berpengaruh besar terhadap proses produksi pada sektor manufaktur. Teknologi canggih tersebut termasuk *artificial intelligence* (AI), *e-commerce*, *big data*, *fintech*, *shared economies*, hingga penggunaan robot.

Hal menarik lain yang perlu disimak adalah, ternyata gejala de-industrialisasi (menurunnya persentase kontribusi sektor manufaktur terhadap pembentukan PDB) yang belakangan ini terjadi di Indonesia, juga dialami di negara-negara maju. Penyebabnya adalah, peran sektor jasa (*services*) yang terus meningkat. Inilah fenomena yang disebut *the post-industrial economy* (Jean-Luc Biacabe, Institute

Friedland, 2016).

Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Indonesia telah menyusun peta jalan dan strategi dalam memasuki era digital yang disebut Making Indonesia 4.0. Peta jalan tersebut diluncurkan oleh Presiden Jokowi pada 4 April (4/4) dan menyatakan bahwa Indonesia akan fokus pada lima sektor manufaktur unggulan, yaitu: (1) industri makanan dan minuman; (2) tekstil dan pakaian; (3) otomotif; (4) kimia; serta (5) elektronik. Lima sektor manufaktur tersebut berkontribusi besar terhadap PDB serta memiliki daya saing internasional

3. Perubahan Iklim dan Bencana Alam

Paradigma masa lalu menyebutkan bahwa masalah lingkungan global lebih banyak dipengaruhi faktor alam seperti iklim yang mencakup temperatur, curah hujan, kelembaban, tekanan udara dan lain lain. Belakangan mulai disadari bahwa aktifitas manusia pun mempengaruhi iklim dan lingkungan secara signifikan. Misalnya eksploitasi sumber daya perikanan secara berlebihan dapat mempengaruhi ekosistem perairan yang berdampak bagi kerusakan lingkungan.

Pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak diimbangi oleh upaya penanggulangan akan berdampak negatif terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Hal ini tidak hanya mengancam keberlangsungan lingkungan alam, tetapi juga keberlangsungan hidup manusia sendiri. Isu pemanasan global dan perubahan iklim hanyalah sebagian dari sekian banyak isu lingkungan untuk diperhatikan yang tidak hanya bersifat lokal tetapi global, demikian halnya dengan Indonesia. Di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dimana model pembangunan ekonomi yang dikembangkan telah menggerakkan pembangunan ekonomi yang cenderung bersifat ekstraktif atau mengandalkan eksploitasi sumberdaya alam secara langsung. Bahkan ada kecenderungan besar di mana upaya mempertahankan fungsi lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari masih jauh dari yang diharapkan.

4. Terorisme global

Aksi-aksi kekerasan terorisme internasional di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia akan menjadi ancaman dan tantangan terbesar bagi pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Indonesia di masa mendatang. Di tingkat bilateral Indonesia terus dituntut untuk meningkatkan kerjasama dengan berbagai negara seperti Australia, AS, Jepang dan negara-negara tetangga Asia Tenggara lainnya untuk meningkatkan kemampuan aparaturnya dalam memerangi terorisme internasional.

Masalah kejahatan yang berbentuk kejahatan trans nasional seperti penyelundupan, perdagangan narkoba, penyelundupan manusia merupakan ancaman serius bagi negara seperti Indonesia yang memiliki posisi geografis yang strategis bagi jenis-jenis kejahatan lintas batas tersebut. Karena itu, sebagai negara asal maupun transit bagi operasi tindak kejahatan trans nasional, Indonesia dituntut untuk terus meningkatkan upaya-upaya dalam menekan kejahatan lintas batas tersebut melalui suatu format kerjasama dengan negara-negara tetangga secara komprehensif.

Hal yang sama juga berlaku di tingkat regional, misalnya ASEAN di mana Indonesia perlu mendorong berlanjutnya kerjasama kongkrit antar negara dalam pemberantasan terorisme internasional. Masalah terorisme tidak dapat dipisahkan dari isu radikalisme dan kemiskinan. Karena itu, penanganan isu terorisme mesti menyentuh isu-isu kesejahteraan, penciptaan kehidupan yang lebih baik dan penyelenggaraan dialog antar agama yang konstruktif. Dalam masalah kecenderungan penggunaan kekerasan dan ancaman terorisme internasional, masyarakat internasional memang memerlukan solidaritas sikap dalam memerangi tindakan yang tidak manusiawi tersebut. Namun demikian, pada saat bersamaan masyarakat dunia juga dituntut untuk menekuni kemungkinan akar permasalahan sesungguhnya yang menjadi pemicu utama menguatnya aksi-aksi kekerasan internasional dewasa ini.

5. Perdagangan Bebas

Globalisasi telah merambah hampir disemua ranah kehidupan masyarakat, baik itu bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), budaya, pendidikan dan lain-lain. Walaupun istilah globalisasi telah menjadi suatu kosakata yang umum, tetapi suka atau tidak suka, masyarakat diseluruh pelosok dunia sekarang ini telah hidup dalam suatu habitat global, transparan, tanpa batas, saling mengait (*linkage*) dan saling ketergantungan (*interdependence*). Skenario liberalisasi melalui perjanjian perdagangan bebas memberikan dampak keseluruh pelosok negeri. Contoh globalisasi yang nyata dirasakan saat ini seperti masuknya barang-barang impor dari China dan negara-negara ASEAN lainnya akan menyerbu sampai ke desa-desa. Indonesia sekarang ini berada didalam kondisi yang sangat terbuka dan sangat bersaing.

Pemberlakuan Perdagangan Bebas memberi banyak dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dunia yang tanpa batas, keluar masuk barang yang intens serta interaksi dengan dunia luar disatu sisi memberikan dampak positif bagi perkembangan masyarakat melalui upaya peningkatan kualitas dan inovasi produk lokal. Namun disisi yang lain, pemberlakuan ini dapat menambah penderitaan sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih berada dibawah garis kemiskinan. Hilangnya subsidi dan peranan dari negara dalam bidang ekonomi berdampak *multiplier effect* pada kemiskinan yang meningkat dan akan mengarah pada tingginya angka kriminal. Hal ini mengakibatkan pemerintah harus bekerja keras melakukan perbaikan ekonomi dan sekaligus melakukan reformasi terhadap masalah-masalah sosial.

6. Demokrasi dan HAM

Kesadaran akan pentingnya eksistensi manusia semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pendidikan dan informasi. Peningkatan peran di masyarakat seperti demokratisasi akan terus berlangsung dan tidak akan mungkin dapat dicegah kemajuannya. Pemerintahan otoriter di dunia diperkirakan akan runtuh, digantikan oleh gelombang demokrasi yang sedang melanda negara-negara dan efek domino yang ditimbulkannya menjadi permasalahan yang bermuara pada persoalan kemanusiaan. Negara-negara demokrasi maju juga sedang mengalami

dinamika-dinamika demokrasi yang berkaitan dengan peran negara dan masyarakat sipil.

7. *Trafficking*

Kasus tindak pidana perdagangan orang saat ini terus terjadi. Tindak kejahatan terhadap kemanusiaan ini terjadi sejak di daerah atau negara asal, daerah transit hingga ke daerah atau negara tujuan. Keterbatasan ekonomi, minimnya tingkat pendidikan sering kali menjadi dasar alasan kelompok ini terjerat dalam *human trafficking*. Beragam cara dipakai pelaku untuk menarik dan mengontrol korban diantaranya janji pekerjaan bergaji tinggi hingga ancaman kekerasan. Hal tersebut banyak terjadi karena adanya masalah ketidakseimbangan hubungan negara-negara maju dengan negara-negara berkembang khususnya dalam konteks hubungan perdagangan dan ekonomi.

4.2.2. Isu Strategis Nasional

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 telah diamanatkan, bahwa kebijakan pemerintah pusat dalam pelaksanaan pembangunan nasional menjadi isu nasional yang memiliki potensi sebagai acuan dan dijadikan landasan dalam perumusan pembangunan daerah, termasuk pembangunan di Kabupaten Buru Selatan. Dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2025 yang mengacu pada RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 dan RPJMN tahun 2020-2024, dan mengingat perencanaan pembangunan jangka menengah periode saat ini akan berkaitan dengan perencanaan periode berikutnya berdasarkan aspek keberlanjutan perencanaan, maka isu strategis nasional yang diangkat masih sejalan dengan isu nasional yang tertuang pada RPJMN yang berlaku saat ini. Dengan langkah ini, diharapkan rencana pembangunan jangka menengah antar tingkatan pemerintahan akan konsisten, selaras dan bersinergitas.

4.2.2.1. Isu-isu Strategis RPJM Nasional Tahun 2020-2024.

Sebagai implementasi dari janji-janji politik Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode masa jabatan tahun 2020-2024 dan berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima (5) tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran pokok dalam dokumen RPJPN tahun 2005-2025, telah ditetapkan dokumen RPJMN tahun 2020-2024 sebagai pedoman kerja bagi seluruh penyelenggara pemerintahan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dimana Pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan fokus pada meningkatnya kesejahteraan rakyat dan kualitas manusia yang ditunjukkan dengan IPM yang meningkat menjadi 75,54, menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 6-7 persen dan pengangguran menjadi 3,6-4,3 persen, berkurangnya kesenjangan pendapatan dan wilayah yang ditunjukkan dengan gini ratio 0,360-0,374, serta terjaganya keberlanjutan lingkungan dan stabilitas ekonomi yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi 6 persen dan penurunan emisi gas rumah kaca menjadi 27,3 persen menuju target 29 persen di 2030. SDM menjadi fokus pembangunan lima tahun ke depan, yang dilakukan dengan peningkatan kualitas manusia sebagai *human capital*. Dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan bersifat utama, diantaranya kesehatan dan pendidikan, serta kegiatan bersifat pendukung diantaranya infrastruktur permukiman dan sanitasi, transportasi, energi, dan air bersih.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Tujuan RPJMN IV tahun

2020 – 2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b. Akselerasi peningkatan nilai tambah agro-fishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah,
- b. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
- c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
- d. Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
- e. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;

- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. Pengentasan kemiskinan; dan
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- a. Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c. Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah,
- b. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan,
- c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK,
- d. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien,
- e. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
- c. Pembangunan Rendah Karbon

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
- b. Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil,
- c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber,
- d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
- e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Substansi dokumen RPJMN Tahun 2020-2025 telah dirumuskan dan ditetapkan berbagai strategi dan arah kebijakan yang berkorelasi kuat terhadap pencapaian target sasaran prioritas nasional. Salah satu sasaran dimaksud adalah sasaran prioritas pembangunan bagi pemerintah daerah yang secara geografi merupakan wilayah kepulauan dengan sasaran prioritas pengembangan wilayah pulau-pulau besar yang diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan di wilayah kepulauan. Percepatan pembangunan wilayah kepulauan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengurangi kesenjangan.

4.2.3. Isu Strategis Provinsi Maluku.

Isu strategis dalam Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 merupakan kondisi aktual hasil sintesa fakta-fakta permasalahan pembangunan yang perlu diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah dan berdampak bagi keberlanjutan pembangunan sesuai tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis daerah Provinsi Maluku tahun 2019 – 2024 dirumuskan sebagai berikut:

1. Kemiskinan dan Pengangguran

Tingkat Kemiskinan merupakan salah satu isu pembangunan daerah dengan realita saat ini Provinsi Maluku masih berada pada urutan keempat provinsi dengan

persentase penduduk miskin terbanyak di Indonesia setelah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan Papua. Jumlah penduduk miskin di Maluku pada Bulan Maret 2019 sebanyak 317,69 ribu jiwa (17,69 persen). Dibandingkan dengan Bulan September 2018 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 0,15 ribu jiwa, sedangkan dari sisi persentase tingkat kemiskinan di Maluku pada Maret 2019 juga mengalami penurunan sebesar 0,16 poin dibandingkan September 2018 dimana persentase penduduk miskin Provinsi Maluku sebesar 17,85%. Sedangkan pada tahun 2020 bulan September 2020 jumlah penduduk miskin sebanyak 322,40 ribu jiwa (17,99 persen), terjadi peningkatan dibandingkan bulan Maret 2020 sebanyak 4,2 ribu jiwa atau terjadi peningkatan sebesar 0,55 poin. Peningkatan jumlah kemiskinan yang cukup tinggi sebagai akibat dari dampak covid-19 yang ditunjukan dengan rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin besar.

Kondisi faktual yang dihadapi penduduk miskin Provinsi Maluku adalah masih rendahnya akses pelayanan dasar meliputi akses rumah layak, pemenuhan kebutuhan pangan terjangkau, layanan pendidikan dan kesehatan serta lemahnya pengembangan kehidupan ekonomi berkelanjutan, yang ditunjukan dengan ketidakmampuan rumah tangga untuk menghasilkan pendapatan yang cukup disebabkan oleh rendahnya kesempatan berusaha dan bekerja, terbatasnya akses permodalan, pasar dan produksi serta kurangnya ketrampilan.

Di lain pihak, pengangguran masih merupakan salah satu masalah penting yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dan harus segera dituntaskan, mengingat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Maluku merupakan yang tertinggi ketiga di Indonesia pada Agustus 2018 setelah Provinsi Banten dan Jawa Barat, yaitu sebesar 7,27%.

2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Manajemen birokrasi yang baik dan dinamis serta yang melayani, diantaranya sangat ditentukan oleh kompetensi birokratnya dan atmosfir budaya kerja yang baik. Sejalan dengan pengelolaan pemerintahan dalam semangat otonomi daerah, dimana kabupaten/kota memiliki kewenangannya sendiri yang secara garis besar terpisah dari kewenangan pemerintah provinsi, sehingga pada implementasinya tak

jarang ditemukan adanya ketidakselarasan penyelenggaraan pemerintahan/pelaksanaan pembangunan antar level pemerintahan yang secara tidak langsung berdampak pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini terlihat diantaranya: tidak terintegrasinya konsep pengembangan wilayah provinsi dengan kabupaten/kota dan tidak selarasnya skenario/strategi penanggulangan kemiskinan provinsi dengan kabupaten/kota.

Dalam hal pelayanan publik, masyarakat (publik) selalu menuntut kualitas pelayanan publik dari birokrat, meskipun tuntutan ini tidak sesuai dengan harapan karena pelayanan publik secara empiris masih ditandai dengan hal-hal antara lain adanya ketidakpastian, berbelit-belit, lambat dan berbiaya tinggi. Diantaranya keadaan ini terjadi karena aparatur pemerintah masih memposisikan diri sebagai pihak yang "dilayani" bukan melayani. Permasalahan utama pelayanan publik terkait dengan peningkatan kualitas layanan itu sendiri. Kualitas pelayanan tergantung pada pola pelaksanaannya, dukungan sumber daya manusia, dan manajemen kelembagaan. Untuk itu diharapkan adanya perspektif baru untuk layanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) ke depannya.

3. Sumber Daya Manusia

Isu pendidikan dan kesehatan merupakan hal penting kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia. Akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dinilai masih rendah. Terbatasnya sarana dan prasarana juga minimnya sumber daya manusia pendidikan dan kesehatan yang berkompeten masih merupakan permasalahan di Provinsi Maluku.

Secara umum keberhasilan pembangunan sumber daya manusia salah satunya diukur dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2018 IPM Provinsi Maluku mencapai angka 68,87 dan berada pada urutan ke 26 dari 34 Provinsi di Indonesia. Capaian IPM tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta pada angka 80,47 dan yang terendah adalah Provinsi Papua dengan angka 60,06, sedangkan IPM Indonesia pada tahun sama berada pada angka 71,39. Pada tahun 2020, IPM Maluku sebesar 69,49 meningkat 0,06 poin dari tahun 2019 yang nilainya sebesar 69,45 persen.

IPM merupakan indikator komposit yang dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi

dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan indikator Angka Harapan Hidup, pengetahuan yang diukur dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, serta standar hidup layak yang diukur dengan indikator Pengeluaran Perkapita. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

4. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan dan Berdaya Saing

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam diharapkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan ekonomi (*economic resource*) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*). Atas dasar fungsi ganda itu, sumber daya alam harus dikelola secara seimbang, antara aspek pemanfaatan dan aspek pelestariannya guna menjamin keberlanjutan pembangunan.

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana menjamin keberlanjutan/kelestarian lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Berbicara daya saing, banyak aspek yang seyogianya menjadi perhatian. Perlu penataan dalam peningkatan daya saing daerah, seperti produktivitas, nilai tambah dan logistik. Terkait produktivitas, hal utama yang perlu ditata adalah kualitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas dan keterampilan masih sangat dibutuhkan. Nilai tambah produk pun masih rendah, demikian juga logistik dalam kabupaten/kota di Provinsi Maluku yang masih berbiaya tinggi/mahal harganya. Ketiga faktor ini (produktivitas, nilai tambah dan logistik) saling berkaitan satu dengan lainnya. Persoalan produktivitas erat kaitannya dengan masalah rendahnya nilai tambah. Rantai produk atau jalur distribusi yang terlalu panjang disertai dengan minimnya pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam proses bisnis usaha juga menjadi salah satu penyebabnya.

5. Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

Sistem perencanaan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah dan perencanaan tata ruang sama-sama menekankan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan (prioritas) secara berhirarki dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Namun, perencanaan tata ruang memiliki fokus kepada aspek fisik spasial yang mencakup perencanaan struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang.

Pengendalian dan pemanfaatan ruang yang merupakan bagian integral Rencana Tata Ruang merupakan bentuk intervensi agar terwujud alokasi ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keseimbangan tingkat perkembangan wilayah. Maka dengan berbasis penataan ruang, kebijakan pembangunan akan mewujudkan tercapainya pembangunan berkelanjutan yang memadukan pilar ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.

Provinsi Maluku didominasi oleh pulau-pulau kecil yang rentan terhadap perubahan iklim dan beresiko bencana, sampai saat ini masih terdapat praktik-praktik pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan arahan tata ruang. Pengendalian pemanfaatan ruangnya juga belum optimal disebabkan semua kabupaten/kota di Provinsi Maluku belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai instrumen pengendali pemanfaatan ruang.

6. Investasi dan Pengembangan Pariwisata dan Budaya Daerah

Keragaman sumber daya alam terutama pariwisata, kekayaan budaya dan adat istiadat, agama maupun sumber daya sosial lainnya merupakan kekayaan dan keunggulan Provinsi Maluku. Namun keragaman ini belum dikelola dan dikembangkan secara baik. Pengelolaan keragaman multi dimensi ini sudah seharusnya mendapat perhatian serius dan porsi strategis dalam kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayah Provinsi Maluku ke depannya, yang diarahkan pada pengembangan berbasis kearifal lokal dan konservasi kultural (yang tidak hanya bersifat seremonial).

Investasi pun perlu terus ditingkat, karena suatu wilayah atau usaha bisa berdaya saing didukung juga oleh investasi. Tidak hanya investasi asing yang terus

ditingkatkan, investasi dari dalam negeri juga perlu terus didorong. Karena dari investor dalam negeri pada akhirnya nilai tambah yang tercipta akan dinikmati oleh penduduk Indonesia sendiri.

7. Konektivitas dan Infrastruktur Wilayah

Provinsi Maluku secara fisik terdiri atas 1,340 pulau dan didominasi oleh pulau kecil serta tata letaknya yang tersebar dalam wilayahnya seluas 712.479,65 Km² dan mempunyai luas laut mencapai 658.294,69 Km² atau 92,4% dibandingkan dengan luas daratan (*terrestrial*) yang luasnya hanya 54.184,96 Km² atau sekitar 7,6%. Karakteristik geografis tersebut menunjukkan bahwa potensi Provinsi Maluku didominasi akan karakteristik wilayah yang bercirikan kepulauan sebagai keunggulan komparatif terhadap wilayah provinsi lain. Potensi wilayah yang bercirikan kepulauan tidak hanya mencakup daratan tetapi juga laut beserta ekosistemnya. Selain itu, terdapat 5 kabupaten/kota di Provinsi Maluku yang berada pada Kawasan perbatasan. Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual merupakan kabupaten/kota yang berbatasan laut dengan negara tetangga Australia dan Timor Leste.

Pemerataan pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, menjadi isu strategis sebagai mainstream pembangunan ekonomi ke depan. Strategi kebijakan pembangunan yang berpihak kepada pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan akan terus dipacu, guna lebih meningkatkan daya saing menuju kemakmuran yang berkeadilan. Kemakmuran yang berkeadilan sejatinya merupakan jawaban terhadap berbagai masalah ketimpangan yang masih menjadi tantangan besar pembangunan.

Ketimpangan yang terjadi antara lain dapat dicermati dari angka kemiskinan, tingkat pengangguran dan pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya konektivitas antar wilayah. Konektivitas antar wilayah menjadi penting mengingat sampai dengan akhir tahun 2020 masih terdapat 17,99 % penduduk Maluku yang merupakan masyarakat miskin dan terdapat 7,57% penduduk yang menganggur. Ketimpangan pembangunan antar wilayah, khususnya daerah tertinggal dan daerah

perbatasan juga menjadi problem. Ketimpangan pembangunan di Maluku yang diukur dengan menggunakan Gini Ratio September 2020 sebesar 0,326 naik 0,008 poin dari Bulan Maret tahun 2020.

Dengan karakteristik wilayah kepulauan salah satu tantangan terbesar pembangunan di Provinsi Maluku adalah aksesibilitas dan konektivitas wilayah. Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, diperlukan adanya infrastruktur yang mampu menjalin konektivitas di setiap wilayah Provinsi Maluku. Infrastruktur transportasi yang memudahkan mobilitas orang, barang dan jasa dalam rangka menurunkan biaya logistik dan produk hingga sampai ke tangan konsumen, yang juga mendukung pelayanan dasar.

Konsep konektivitas kepulauan di Provinsi Maluku diharapkan menjadikan Provinsi Maluku yang terakses secara lokal, terintegrasi secara nasional dan terhubung secara global. Untuk itu selain memperkuat aksesibilitas lokal, konektivitas dengan jaringan nasional dan global pun perlu diperhatikan, salah satunya dengan mempersiapkan pintu keluar di kawasan perbatasan sebagai salah satu pintu gerbang bagian selatan Indonesia. Selanjutnya secara makro, pembangunan konektivitas dimaksud bukan semata membangun infrastruktur transportasi, tapi juga infrastruktur lainnya yakni komunikasi dan informasi serta ketenagalistrikan.

4.2.4. Isu Strategis Kabupaten Buru Selatan.

Isu strategis Kabupaten Buru Selatan tahun 2021 – 2026 masih mengacu pada RPJMD Kabupaten Buru Selatan periode 2016-2021 , yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah.

Perekonomian daerah Kabupaten Buru Selatan terus berkembang dengan laju pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi selama lima tahun terakhir, dimana pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 capaiannya diatas 6,00 persen dan capaian ini sudah berada diatas capaian Provinsi Maluku dan Nasional, capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buru Selatan ini akan terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk 5 (Lima) tahun kedepan.

Pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan sangat terkait dengan

meningkatnya daya saing perekonomian daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah akan terus memacu peningkatan daya saing daerah dengan mendorong pengembangan industri berbasis komoditas unggulan daerah dengan menumbuhkan klaster-klaster industri, baik untuk meningkatkan keterkaitan antara industri hulu dan hilir, maupun antara pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah penyangganya.

Pengembangan industri unggulan di Kabupaten Buru Selatan sejalan dengan implementasi Master Plan Percepatan Pengembangan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk memperkuat struktur perekonomian nasional dan daerah. Pengembangan industri unggulan di Kabupaten Buru Selatan untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi akan difokuskan pada sektor pertanian terutama perkebunan, kelautan dan perikanan, pariwisata, serta energi dan sumberdaya mineral. Untuk mendukung percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, Pemerintah Daerah juga akan terus memacu peningkatan investasi, peningkatan daya saing Industri, serta UKM dan Koperasi.

2. Kemiskinan dan Pengangguran.

Tingkat Kemiskinan merupakan salah satu isu pembangunan daerah dengan realita saat ini di Kabupaten Buru Selatan meskipun berada pada urutan pertama terendah se-Provinsi Maluku, namun tetap merupakan proiritas utama Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam mengintervensi program kegiatan untuk 5 (Lima) Tahun kedepan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2018 sebanyak 10,120 jiwa (16,31 persen). Menurun menjadi 16,13 persen tahun 2019 dengan jumlah penduduk miskin mencapai 10.170 jiwa, secara presentase penduduk miskin dari tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan , namun secara jumlah jiwa mengalami kenaikan, hal tersebut dipengaruhi meningkatnya angka kelahiran dan arus migrasi. Sedangkan di tahun 2020 angka kemiskinan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar 0,38 poin atau persentase kemiskinan sebesar . 15,75 persen.

Kondisi faktual yang dihadapi penduduk miskin Kabupaten Buru Selatan adalah masih rendahnya akses pelayanan dasar meliputi akses rumah layak, pemenuhan kebutuhan pangan terjangkau, layanan pendidikan dan kesehatan serta

lemahnya pengembangan kehidupan ekonomi berkelanjutan, yang ditunjukkan dengan ketidakmampuan rumah tangga untuk menghasilkan pendapatan yang cukup disebabkan oleh rendahnya kesempatan berusaha dan bekerja, terbatasnya akses permodalan, pasar dan produksi serta kurangnya keterampilan.

Di lain pihak, pengangguran masih merupakan salah satu masalah penting yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan dan harus segera dituntaskan, mengingat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Buru Selatan sampai dengan tahun 2020 merupakan yang terendah pertama se-Provinsi Maluku, adalah capaian yang sangat tinggi, dimana pada tahun 2018 menduduki urutan ke tiga setelah Kabupaten Kepulauan Aru dan Maluku Tenggara, yakni sebesar 2,92 persen. Memang secara kuantitas tahun 2018 Pengangguran Terbuka lebih rendah dibandingkan tahun 2020 sebesar 2,31 persen, namun secara posisi Kabupaten/Kota lainnya tingkat pengangguran meningkat lebih tinggi akibat dampak covid-19.

3. Kualitas SDM dan Iptek.

Isu pendidikan dan kesehatan merupakan hal penting kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia. Akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dinilai masih rendah. Terbatasnya sarana dan prasarana juga minimnya sumber daya manusia pendidikan dan kesehatan yang berkompeten masih merupakan permasalahan di Kabupaten Buru Selatan.

Secara umum keberhasilan pembangunan sumber daya manusia salah satunya diukur dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2018 IPM Kabupaten Buru Selatan mencapai angka 63,62 poin dan berada pada urutan ke 7 dari 11 Kabupaten s-Provinsi Maluku, dimana capaian ini masih dibawah capaian Provinsi Maluku yakni sebesar 68,87 poin, capain IPM tertinggi adalah Kota Ambon pada angka 80,24 dan yang terendah adalah Kabupaten dengan angka 60,64. Pada tahun 2020, IPM Kabupaten Buru Selatan sebesar 64,69 mengalami peningkatan 0,42 poin dibandingkan tahun 2019 (64,42).

IPM merupakan indikator komposit yang dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan indikator Angka Harapan Hidup, pengetahuan yang diukur dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah

dan Harapan Lama Sekolah, serta standar hidup layak yang diukur dengan indikator Pengeluaran Perkapita. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Kabupaten Buru Selatan memiliki potensi geografi yang strategis dan ditopang oleh sumber daya alam yang memadai, warisan luhur budaya yang kuat, dan sumber daya manusia yang besar dan mendapat pendidikan makin baik dari waktu ke waktu. Jumlah penduduk Kabupaten Buru Selatan yang besar masih diwarnai dengan rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan, kurangnya etos kerja produktif, keterampilan, kreatif dan inovatif, serta rendahnya penguasaan dan penerapan Iptek. Sejumlah permasalahan ini telah membatasi kapasitas masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan dan menjadi hambatan untuk mewujudkan Daya Saing Kabupaten Buru Selatan dalam menghadapi persaingan antar daerah dan tantangan globalisasi maupun dalam memanfaatkan peluang yang ada.

Pemerintah Kabupaten Buru Selatan akan mengedepankan pembangunan sumberdaya manusia, melalui perluasan akses pelayanan dan peningkatan mutu pendidikan, peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, serta peningkatan etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, profesional dan mampu memanfaatkan, mengembangkan serta menguasai ilmu dan teknologi dalam rangka memacu peningkatan produktivitas dan peningkatan kesempatan kerja di sektor formal.

4. Reformasi Birokrasi.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat diyakini sangat berkorelasi dengan reformasi birokrasi dalam membangun kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Sejalan dengan dilaksanakannya desentralisasi dan otonomi daerah, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan hasilnya pun telah dirasakan. Namun, masih banyak hal yang harus diselesaikan lebih lanjut.

Beberapa hal yang dapat diselesaikan dari segi tata Kelola seperti (1) pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, penetapan fakta integritas dan penguatan kapasitas dalam proses pengadaan barang dan jasa dengan menerapkan *e-procurement*; (2) Dari Sisi pelayanan public, perlu memperhatikan manajemen pelayanan dari segi: pengurusan perizinan yang berbasis TIK; OPD perlu memperhatikan standar pelayanan yang cepat, murah, transparan, dan akuntabel; Penataan sistem kepegawaian sehingga lebih optimal efisien dan efektif dalam kewenangan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan akan terus memperkuat reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, melalui peningkatan pengawasan internal, pembenahan manajemen pelayanan publik, dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

5. Sarana dan Prasarana Wilayah

Sarana dan prasarana memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah terutama dalam penyediaan jaringan distribusi, sumber energi, dan input produksi lainnya. Jaringan transportasi serta jaringan komunikasi dan informatika merupakan fasilitas yang menghubungkan sumber-sumber produksi, pasar dan para konsumen, yang secara sosial juga merupakan bagian dari ruang publik yang dapat digunakan untuk melakukan sosialisasi antar kelompok masyarakat guna mengartikulasikan diri dan membangun ikatan sosial-budaya.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai berfungsi sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi, ditunjukkan pada peran transportasi yang dapat memungkinkan orang, barang, dan jasa diangkut dari satu tempat ke tempat lain, serta peran jaringan komunikasi dan informatika yang memungkinkan pertukaran informasi secara cepat. Peranannya sangat penting, baik dalam proses produksi maupun dalam menunjang distribusi komoditi ekonomi dan ekspor. Telekomunikasi, listrik, dan air merupakan elemen sangat penting dalam proses produksi dari sektor-sektor ekonomi, seperti perdagangan, industri, dan pertanian.

Kualitas sarana dan prasarana di Kabupaten Buru Selatan masih belum memadai dan relatif terbatas pada beberapa wilayah sehingga belum optimal menopang aktivitas masyarakat, khususnya kegiatan ekonomi, serta belum menjadi faktor pendorong yang efektif dan efisien sebagai roda penggerak perekonomian daerah. Berkenaan dengan pembangunan sarana dan prasarana (infrastruktur) wilayah akan terus ditingkatkan dalam pembangunan daerah Kabupaten Buru Selatan periode 2021-2025. Selanjutnya, Isu ini yang akan dijabarkan ke dalam agenda kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Buru Selatan dalam lima tahun ke depan.

4.2.5. Isu Strategis Jangka Pendek Dampak Covid-19.

Sejak akhir Desember 2019 corona virus yang berawal dari kota Wuhan China telah menyebar ke belahan dunia sejak bulan April 2020 sebanyak 203 negara telah terdampak covid-19 dari total 204 negara, itu berarti hanya satu negara yang belum tertular. Kondisi ini membuat kepanikan karena penularan yang begitu cepat. Dan membuat Sebagian negara melakukan *lock down* lebih awal atau kebijakan membatasi gerak keluar masuk orang seperti: China, Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara di Eropa. Lock Down ini menyebabkan ekonomi produktif di semua negara terhenti dan menyebabkan kelesuan ekonomi melebihi krisis dan resesi pada periode depresi awal abad 20. Dalam jangka pendek wabah covid-19 telah berdampak terhadap pencapaian seluruh sektor secara global, nasional maupun regional, secara langsung dampak covid-19 mempengaruhi seluruh sendi-sendi kehidupan bukan saja Kesehatan dan ekonomi namun mempengaruhi sosial, agama, budaya dan kesejahteraan masyarakat.

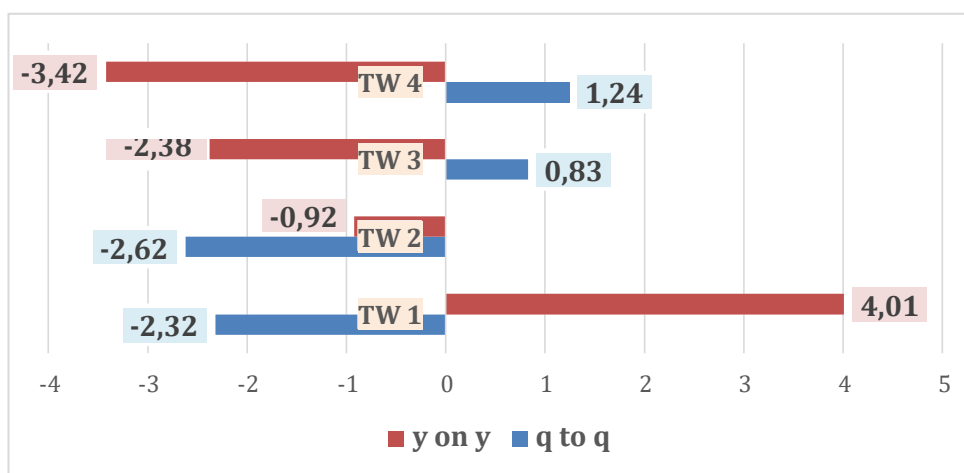
Mencermati Covid-19 yang hingga tahun 2021 belum menunjukkan tanda-tanda kapan berakhir walaupun pada Bulan Maret masyarakat Maluku juga telah divaksin, tentunya dampak keberlanjutannya terhadap siklus pertumbuhan sektor akan masih terpengaruh. Dengan kata lain covid-19 merupakan isu strategis yang dapat berdampak ke depan dalam perencanaan pembangunan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dimasa yang akan datang.

4.2.5.1. Kontraksi Pertumbuhan Ekonomi

Covid-19 mempengaruhi seluruh indikator ekonomi makro (inflasi, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan dan lain-lain, namun akan di lihat beberapa indikator ekonomi makro saja sebagai acuan bahwa dampak covid 19 mempengaruhi tatanan ekonomi indikator makro.

Pertumbuhan ekonomi secara global (internasional, nasional, regional) mengalami pertumbuhan secara positif dalam lima tahun, dan mengalami kontraksi yang cukup mendalam di tahun 2020 akibat covid-19 termasuk kabupaten kota di Maluku.

Secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kota di provinsi Maluku masih baik tidak terjadi koreksi yang tajam di triulan pertama, namun akan terlihat lebih tajam koreksinya pada triwulan ke-dua, ketiga dan ke empat seiring mewabahnya covid-19 yang terlihat dengan meningkatnya jumlah orang positif covid-19, sehingga adanya Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB) dan anjuran pembatasan kerja bersifat “work from home”.



Sumber: Disadur dari Berita Resmi Statistik Provinsi Maluku TW I-IV, 2020

Gambar 4.1. Pertumbuhan Ekonomi Di Maluku Tahun 2020

Secara Q to Q pertumbuhan ekonomi Maluku menunjukkan pertumbuhan yang telah positif di TW- III dan TW-IV, karena pergerakan konsumsi pemerintah yang tinggi dan juga konsumsi pemerintah telah mendorong berfungsinya konsumsi Rumah Tangga, serta intervensi program Pemulihan Ekonomi Nasional. Namun jika

dibandingkan dengan Y on Y baik di TW-II sampai TW-IV justru pertumbuhan menunjukkan kontraksi yang masih sangat tinggi. di tahun 2020 yang selumnya justru pertumbuhannya 5,88 persen di tahun 2019.

Dengan mempertimbangkan jangka pendek pandemic covid-19 dan kebijakan penanganan dampak covid-19, berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai pada tahun-tahun mendatang, bagi seluruh kabupaten/kota di Maluku termasuk Kabupaten Buru Selatan, maka dapat dilihat kembali struktur PDRB dan sektor-sektor potensial mana saja yang terkena dampak terbesar sehingga dapat direncanakan penguatan program penanganan atau percepatan pemulihan ekonomi.

4.2.5.2. Defisit Anggaran Pembangunan

Defisit alokasi anggaran untuk pelaksanaan pembangunan dimasa pandemic covid-19 karena terkait dengan skala prioritas memutus rantai penyebaran, dan pemulihan seluruh sendi-sendi kehidupan ekonomi, social, budaya dan kesejahteraan masyarakat. Defisit akan berdampak pada perencanaan alokasi anggaran pembangunan karena mengalami penurunan akibat pengalihan untuk penanganan wabah covid-19.

Defisit anggaran menjadi isu yang harus diperhitungkan dalam perencanaan RPJMD Daerah Kabupaten Buru Selatan agar tidak terjadi bias dalam perencanaan pembangunan daerah.

1. Pengangguran dan Kemiskinan

Kondisi ketenagakerjaan Indonesia pra-Covid-19 memperlihatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 133,56 Juta atau 67,49% dengan perincian, laki laki 83,13 persen dan perempuan 51,89 persen. Penduduk yang bekerja sebanyak 94, 72 persen atau sejumlah 126,51 juta sedangkan tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,05 Juta atau 5,28 persen. Dari data yang ada terlihat ketenagakerjaan Indonesia menghadapi tantangan yang besar karena (1). Jumlah pengangguran 5,26 persen; (2) Masih tingginya pekerja yang lulusan pendidikannya tingkat SD dan SMP ke bawah sebesar 57,54 persen, kondisi ini akan berdampak juga pada daya saing yang rendah; (3) Sebagian besar atau 55,72 persen adalah pekerja internal;

(4) sebanyak 23 juta pekerjaan terdampak otomatisasi dan : (5) sebanyak 248 ribu pekerja di PHK setiap tahun. Dari kondisi data tenaga kerja di Indonesia, memperlihatkan Dampak Pandemi Covid-19 terhadap tenaga kerja Indonesia sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1. Dampak Covid-19 Terhadap Tenaga Kerja Di Indonesia, 2020

No	Jumlah	Keterangan Dampak
1	1,7 juta	Pekerja Formal di rumahkan
2	749,4 ribu	Pekerja Formal di PHK
3	282 ribu	Pekerja Formal usahanya terganggu
4	100 ribu	Pekerja Migran di pulangkan

Sumber: Bahan Presentasi Hariyadi. ISSEI Webinar, 2020.

Pengangguran di Maluku yang telah menggambarkan dampak covid-19 terlihat di Bulan Agustus sebesar 63.489 jiwa meningkat sebanyak 10.779 jiwa dari bulan Februari yang sebesar 52710 jiwa. Dengan tingkat Pengangguran Terbuka TPT sebesar 7,57 atau naik 0,55 poin. Dari 11 (sebelas) Kabupaten kota, Kabupaten Buru Selatan merupakan Kabupaten dengan jumlah pengangguran yang paling terendah sebesar 698 jiwa, atau Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Yang paling terendah pertama sebesar 2,31 persen (BRS Provinsi Maluku, 2020), walaupun merupakan TPT terendah pertama di Maluku, namun TPT tetap merupakan masalah bagi pembangunan olehnya itu dalam perencanaan RPJMD 2021-2026, menjadi isu strategis untuk dapat diatasi selama lima tahun kedepan.

Tabel 4.2. Dampak Covid-19 Terhadap Penduduk Usia Kerja < Agustus , 2020 di Provinsi Maluku

Persentase terhadap PUK	16,95	13,50	20,36	11,36	15,24
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Maluku, November 2020.

Dampak covid-19 mengakibatkan pengangguran secara langsung akan meningkatkan jumlah kemiskinan. Kondisi Pengangguran dan Kemiskinan akibat dampak Covid-19 menjadi gambaran dalam perumusan RPJMD Kabupaten Buru Selatan.

2. Produksi UMKM Menurun

Hasil identifikasi oleh Kementerian Koperasi, masalah yang dihadapi oleh UMKM selama pandemik Covid-19 ini meliputi penurunan penjualan, kesulitan bahan baku, distribusi terhambat, permodalan dan produksi menurun, sehingga berbagai program penanganan penguatan UMKM dilakukan oleh Kementerian, salah satunya adalah kartu pra-kerja.

Hingga Bulan Oktober tahun 2020 penerima Kartu Prakerja yang telah diterima oleh masyarakat Maluku sebanyak 56.053, dan penerima manfaat di Kabupaten Buru Selatan sebanyak 1.363 orang. Di tahun 2021 program Kartu Prakerja juga masih berlanjut sebagai salah satu Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Tatanan program yang terhubung secara nasional akan memberikan arah bagi perencanaan kabupaten Buru Selatan.

**Tabel 4.3. Jumlah Penerima Kartu Prakerja Gelombang 1-9 Kabupaten/Kota.
Oktober, 2020**

Kabupaten	BATCH									Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
MTB	44	65	30	146	144	72	176	220	223	1.120
Buru	183	177	103	588	982	565	1.058	989	850	5.495
Buru Selatan	44	33	21	144	174	115	233	267	332	1.363
Kepulauan Aru	23	21	16	72	68	45	114	146	129	634
MBD	13	24	14	67	78	59	80	118	85	538
Maluku Tengah	317	478	303	1.592	1.313	745	1.593	2.152	2.084	10.577
Maluku Tenggara	61	81	47	206	215	136	227	302	277	1.552
Seram Bagian Barat	129	131	148	793	682	356	782	1.144	1.345	5.510
Seram Bagian Timur	31	128	36	792	513	281	464	492	516	3.253
Ambon	1.199	1.345	986	5.047	3.679	1.773	3.141	4.035	3.512	24.171
Tual	41	38	44	151	160	81	177	321	281	1.294
Total	2.085	2.521	1.748	9.598	8.008	4.228	8.043	10.186	9.634	56.053

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Maluku, Oktober 2020

4.2.6. Permasalahan dan Isu Strategis Kajian TPB Berdasarkan KLHS

Analisis Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan secara umum bermaksud untuk menganalisis ketercapaian Tujuan, Target, dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 dan Perpres 59/2017. Implementasi TPB di Indonesia untuk pencapaian 17 goals dengan mengembangkan indikator TPB sebanyak 169 target dan 319 indikator yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Penilaian dan analisis capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Buru Selatan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 dan Perpres 59/2017 dibagi berdasarkan 4 kategori, yaitu : (1) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target/SS; (2) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target/SB; (3) Belum dilaksanakan dan belum mencapai target/BB; (4) indikator TPB yang belum ada datanya (Tidak ada Data/NA).

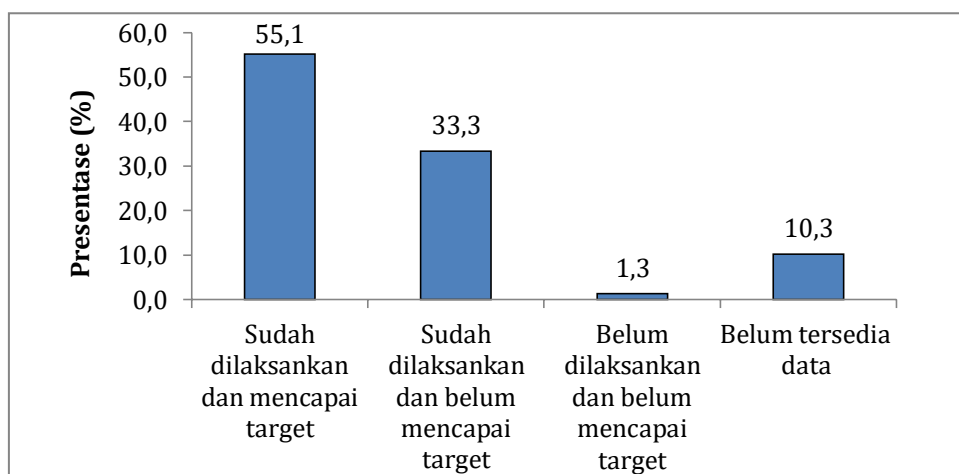
Tabel 4.4. Kategori capaian indikator TPB di Kabupaten Buru Selatan

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Jumlah Indikator	Kategori			NA
		SS	SB	BB	
TUJUAN 1 : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	10	4	6	0	0
TUJUAN 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	7	5	1	0	1
TUJUAN 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	17	13	4	0	1
TUJUAN 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua	7	4	3	0	0
TUJUAN 5 : Mencapai Kestaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	6	4	1	0	1
TUJUAN 6 : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak yang Berkelanjutan untuk semua	4	1	3	0	0

TUJUAN 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua	11	3	3	0	5
TUJUAN 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi	2	2	0	0	0
TUJUAN 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar negara	5	1	2	1	1
TUJUAN 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	1	0	1	0	0
TUJUAN 15 : Melindungi, Merestorasi Dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	1	0	1	0	0
TUJUAN 16 : Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	3	2	1	0	0
TUJUAN 17 : Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan	4	4	0	0	0
TOTAL	78	43	26	1	8

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Buru Selatan 2021-2026

Jumlah total capaian target indikator TPB yang menjadi kewenangan Kabupaten Buru Selatan sebanyak 78 indikator terdiri dari: 1) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target/SS 43 indikator (55,1%); 2) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target/SB adalah 26 indikator (33,3%); 3) jumlah indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target/BB adalah 1 indikator (1,3%), dan 4) jumlah indikator yang tidak ada data/NA adalah 8 indikator (10,3%).



Gambar 4.2. Persentase capaian indikator TPB terhadap target nasional

Identifikasi penanggungjawab dan pelaksanaan TPB tersebar di 17 OPD dan urusan di Kabupaten Buru Selatan. Dinas Kesehatan memiliki peran dan tanggungjawab terbesar dengan jumlah 28 indikator (35,9%) selanjutnya berturut-turut adalah Dinas Tenaga kerja dan Dinas Pendidikan masing-masing sebesar 11,5%, dinas pekerjaan umum sebesar 6,4% (Tabel 4.5).

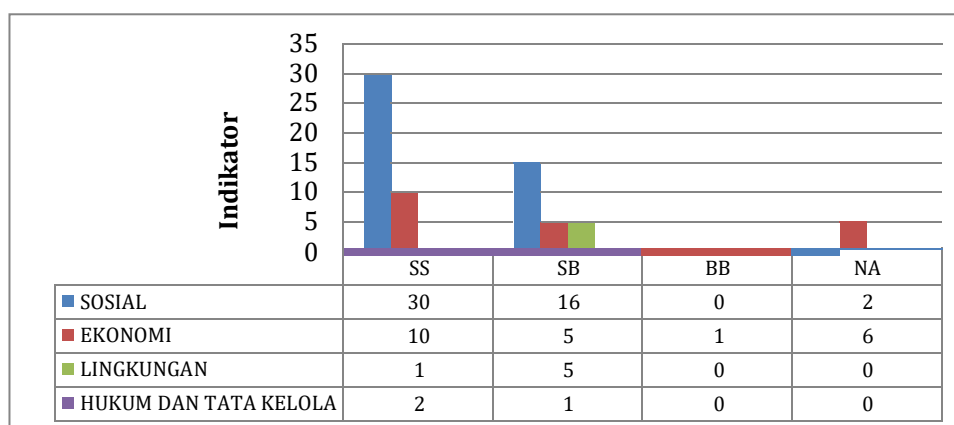
Tabel 4.5. Kategori capaian indikator TPB berdasarkan jenis urusan (OPD) di Kabupaten Buru Selatan

No	Jenis Urusan	Sudah dilaksanakan dan mencapai target/SS	Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target/SB	belum dilaksanakan dan belum mencapai target/BB	Belum ada data/NA
1	Dinas Sosial	1	2	0	0
2	Dinas Kesehatan	20	7	0	1
3	Pekerjaan Umum	0	5	0	0
4	Dinas Pendidikan	6	3	0	0
5	Administasi kependudukan dan catatan sipil	0	1	0	0
6	Energi dan Sumberdaya Mineral	0	1	0	0
7	Ketahanan Pangan	0	1	0	0
8	Tenaga Kerja	1	2	0	6
9	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	3	0	0
10	Informasi dan komunikasi	4	0	0	0
11	Kehutanan dan tata ruang	1	1	0	0
12	Statistik	3	1	0	0
13	Pariwisata	1	0	0	0
14	Pemberdayaan masyarakat Desa	1	1	1	0
15	Kesbangpol	0	0	0	1

16	Perumahan Rakyat dan Pemukiman	0	1	0	0
17	Ketentraman, ketertiban Umum dan Linmas	1	0	0	0
Jumlah		40	29	1	8

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Buru Selatan 2021-2026

Dominasi berdasarkan kategori pencapaian berdasarkan pilar maka dari 47 (60,3%) indikator pada pilar sosial tergambar indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target tercapai sebanyak 28 indikator, dan sudah dilaksanakan dan belum mencapai target tercapai sebanyak 17 indikator, pilar ekonomi sebanyak 22 indikator (28,2%) indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target tercapai sebanyak 10 indikator, dan sudah dilaksanakan dan belum mencapai target tercapai sebanyak 5 indikator, pilar lingkungan 6 indikator (7,7%) dan pilar hukum dan tata kelola 3 indikator (3,8%) seperti terlihat pada gambar 4.3.



Gambar 4.3. Persentase capaian indikator TPB berdasarkan pilar di Kabupaten Buru Selatan

Secara lebih detail, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Buru Selatan pada masing-masing Pilar dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pilar Sosial

Pilar Sosial budaya merupakan salah satu pilar tujuan pembangunan berkelanjutan di dalam Perpres 59 tahun 2017 yang bertujuan menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat. Pilar sosial berdasarkan hasil

pencermatan yang terdiri dari 5 tujuan dan 47 indikator. Hasil pengkajian pada pilar sosial terlampir pada tabel berikut ini.

Tabel. 4.6. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial Kabupaten Buru Selatan

PILAR SOSIAL	Pencapaian tpb				JUMLAH
	SS	SB	BB	NA	
TUJUAN 1 :					
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	4	6	0	0	10
TUJUAN 2 :					
Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	5	1	0	1	7
TUJUAN 3 :					
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	13	4	0	0	17
TUJUAN 4 :					
Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua	4	3	0	0	7
TUJUAN 5 :					
Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	4	1	0	1	6
Total	30	15	0	2	47

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Buru Selatan 2021-2026

2. Pilar Ekonomi

Pilar Ekonomi yang merupakan salah satu pilar tujuan pembangunan berkelanjutan di dalam Perpres 59 tahun 2017 yang bertujuan menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Pilar ekonomi yang dilakukan Kabupaten Buru Selatan, terdiri dari 4 tujuan dan 22 indikator. Hasil pengkajian pada pilar ekonomi terlampir pada tabel berikut ini.

Tabel 4.7. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Ekonomi Kabupaten Buru Selatan

PILAR EKONOMI	Pencapaian TPB				JUMLAH
	SS	SB	BB	NA	
TUJUAN 8 :					
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua	3	3	0	5	11
TUJUAN 9 :					
Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi	2	0	0	0	2
TUJUAN 10 :					
Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarneegara	1	2	1	1	5
TUJUAN 17 :					
Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan	4	0	0	0	4
Total	10	5	1	6	22

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Buru Selatan 2021-2026

3. Pilar Lingkungan

Pilar Lingkungan yang merupakan salah satu pilar tujuan pembangunan berkelanjutan di dalam Perpres 59 tahun 2017 yang bertujuan menjaga kualitas lingkungan hidup serta menjaga pembangunan yang inklusif. Pilar lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, terdiri dari 3 tujuan dan 6 indikator. Hasil pengkajian pada pilar sosial terlampir pada tabel berikut ini.

Tabel 4.8. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan Kabupaten Buru Selatan

PILAR LINGKUNGAN	Pencapaian TPB				JUMLAH
	SS	SB	BB	NA	
TUJUAN 6 :					
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak yang Berkelanjutan untuk semua	1	3	0	0	4
TUJUAN 11 :					

Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	0	1	0	0	1
TUJUAN 15 :					
Melindungi, Merestorasi Dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	0	1	0	0	1
Total	1	5	0	0	6

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Buru Selatan 2021-2026

4. Pilar Hukum dan Tata Kelola

Pilar hukum dan tata kelola merupakan salah satu pilar tujuan pembangunan berkelanjutan di dalam Perpres 59 tahun 2017 yang bertujuan memastikan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pilar hukum dan tata kelola yang dilakukan di Kabupaten Buru Selatan, terdiri dari 1 tujuan dan 3 indikator.

Tabel 4.9. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Hukum dan Tata Kelola Kabupaten Buru Selatan

PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA	Pencapaian TPB				JUMLAH
	SS	SB	BB	NA	
TUJUAN 16 :					
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	2	1	0	0	3
Total	2	1	0	0	3

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Buru Selatan 2021-2026

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi, misi, tujuan dan sasaran merupakan kerangka perencanaan dan arah pembangunan daerah Kabupaten Buru Selatan di tahun 2021-2026. Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagai sebuah dokumen desain pembangunan yang disusun untuk mengejawantahkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang ke dalam jangka waktu yang lebih terukur, perlu untuk dikembangkan sesuai dengan arahan visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Dalam penyusunannya, dokumen rencana pembangunan jangka menengah ini perlu juga memperhatikan dokumen dan kebijakan penting dalam kerangka pembangunan daerah sebagai pedoman dan pertimbangan analisis konteks yang berkembang.

Pembangunan Kabupaten Buru Selatan yang bersemboyan **Lolik Lalen Fedak Fena** terus dikembangkan dengan dinamika dan proses pembangunan secara berkelanjutan “*Sustainable Development*” yang dilandasi Jiwa dan Roh Negeri Fuka Bupolo serta dijiwai semangat orang basudara “Kai-Wait, Ina-Ama, Wali Dawen”. Secara Geoekonomis; Buru Selatan memiliki potensi Sumber Daya Alam maupun Lautan yang berlimpah ruah. Secara Geostrategis; Buru Selatan berada pada jalur AKLI III dan Jalur Tol Laut Indonesia Timur sehingga memposisikan Buru Selatan pada sistem transportasi dan perdagangan yang sangat strategis. Secara Geopolitik; Buru Selatan terkenal dengan masyarakat yang hidup rukun dan damai dalam keberbedaan yang heterogen dan majemuk dengan menghargai kebinekaan. Potensi-potensi tersebut memberikan arti bahwa potensi Buru Selatan sungguh luar biasa untuk dibangun demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya.

Pembangunan dalam dua periode pemerintahan terus berbenah membangun diberbagai sistem dengan capaian; terbukanya sistem aksesibilitas jalan dan transportasi keseluruhan penjuru Buru Selatan, tersedianya sistem sarana dan prasarana serta fasilitas Pendidikan dan Kesehatan yang memadai, sistem pengembangan dan pengelolaan sumberdaya alam melalui program pemberdayaan

Nelayan dan Petani sehingga makin sejahteranya masyarakat Buru Selatan. Sekalipun dengan keterbatasan anggaran daerah yang minim namun sudah dimenejemeni secara baik sehingga memacu percepatan pembangunan di Buru Selatan secara baik.

Upaya mendorong penurunan angka kemiskinan, dilakukan dengan memberikan peluang investasi melalui kemudahan urusan administrasi dengan pemberlakuan perijinan satu pintu, hal ini dilakukan untuk dapat mendorong lajunya pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat sehingga dapat tumbuh peluang kerja dan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk sektor riil dapat tumbuh dan berkembang. Potensi pertanian terutama perkebunan pala dan cengkeh, potensi perikanan laut Banda, potensi wisata, potensi tambang, tersedia di Buru Selatan. Optimalisasi berbagai potensi ekonomi ini harus didukung dengan pembangunan sumberdaya manusia yang sesuai, sehingga pemanfaatannya memperhatikan kaidah keberlanjutan. Arah perencanaan pembangunan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan, sehingga dapat memberikan ruang yang aman, nyaman, produktif, terkendali dan berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buru Selatan tahun 2021-2026 dengan mengakomodir Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan lima tahun kedepan.

5.1. VISI PEMBANGUNAN DAERAH

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada pemilihan kepala daerah sebagai suatu komitmen atau janji kepada masyarakat. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Visi harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan arah

pembangunan jangka panjang daerah di Kabupaten Buru Selatan, maka Visi RPJMD Kabupaten Buru Selatan Periode Pemerintahan 2021 - 2026 sebagai berikut:

“Meningkatkan Kemandirian Buru Selatan secara Berkelanjutan sebagai Kabupaten Yang Rukun, Adil, Dan Sejahtera Berbasis Agro-marine”

Rumusan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Buru Selatan ini mengandung penguatan pada empat pokok Visi sebagai berikut: ***Kemandirian, Keberlanjutan, Rukun, Adil dan Sejahtera Berbasis Agro-Marine***. Penjelasan masing-masing Visi adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1. Visi, Pokok-Pokok Visi dan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
<i>Meningkatkan Kemandirian Buru Selatan secara Berkelanjutan sebagai Kabupaten Yang Rukun, Adil, dan Sejahtera Berbasis Agro-marine</i>	1. Kemandirian	Memiliki makna bahwa pemerintah Kabupaten Buru Selatan berupaya mendayagunakan segenap aset, potensi dan kemampuan yang dimiliki secara optimal untuk mandiri dalam meningkatkan derajat dan kualitas hidup masyarakat.
	2. Berkelanjutan	Memiliki makna bahwa pengembangan sektor unggulan potensial dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Buru Selatan yang merata dan berkesinambungan.
	3. Rukun, Adil, dan Sejahtera	Memiliki makna bahwa peningkatan hubungan dan toleransi antar umat beragama dalam perspektif “Kai Wait Ina Ama”.
	4. Berbasis Agro-Marine	Memiliki makna bahwa suatu upaya mengoptimalkan potensi sumberdaya di darat maupun di laut yang dimiliki serta perluasan kesempatan kerja.

5.2. MISI PEMBANGUNAN DAERAH

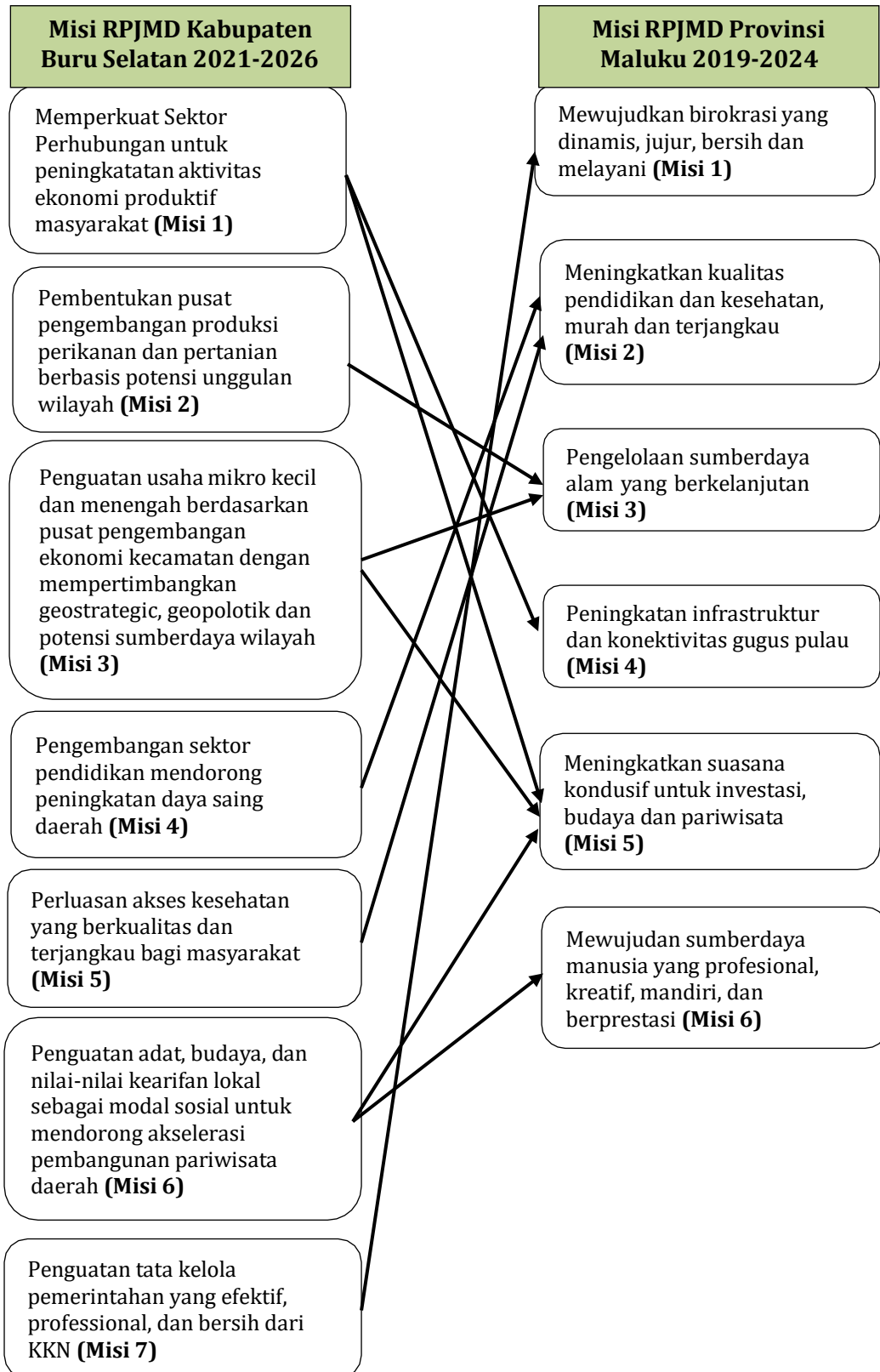
Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Buru Selatan tahun 2021-2026, yaitu ***Meningkatkan Kemandirian Buru Selatan secara Berkelanjutan sebagai Kabupaten Yang Rukun, Adil, dan Sejahtera Berbasis Agro-marine*** tersebut, ditempuh melalui 7 misi yang merupakan kesinambungan sekaligus upaya

pemantapan kualitas pembangunan. Dari 7 misi itu menunjukkan sikap keberpihakan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan sejalan dengan Visi, Misi dan Program Bupati, Wakil Bupati Buru Selatan terpilih kepada semua elemen masyarakat, sekaligus menegaskan bahwa upaya mewujudkan Buru Selatan lebih Mandiri, berkelanjutan, Rukun, Adil, Sejahtera berbasis agro-marine yang bersinergi dengan Dijiwai Semangat Lolik Lalen Fedak Fena, Siwalima dan semangat Nawa Cita.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Mendasari itu, Misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini sebagai upaya untuk menjabarkan setiap visi yang akan dicapai oleh pemerintah Kabupaten Buru Selatan. Rumusan Misi yang menjadi arah dalam pembangunan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- 5.2.1. Memperkuat Sektor Perhubungan untuk peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat.
- 5.2.2. Pembentukan pusat pengembangan produksi perikanan dan pertanian berbasis potensi unggulan wilayah
- 5.2.3. Penguatan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan pusat pengembangan ekonomi kecamatan dengan mempertimbangkan geostrategic, geopolitik dan potensi sumberdaya wilayah.
- 5.2.4. Pengembangan sektor pendidikan berbasis potensi/komoditas unggulan daerah
- 5.2.5. Perluasan akses kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat
- 5.2.6. Penguatan adat, budaya, dan nilai-nilai kearifan lokal sebagai modal sosial untuk mendorong akselerasi pembangunan pariwisata daerah
- 5.2.7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, professional, dan bersih dari KKN

Keterkaitan dan dukungan misi pembangunan Kabupaten Buru Selatan terhadap misi pembangunan Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:



Gambar 5.1. Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026 dengan Misi RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan pembangunan pada dasarnya merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran sebagai target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Keselarasan antara misi, tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran RPJMD Kabupaten Buru Selatan dengan rincian sebagaimana ditampilkan di dalam Tabel berikut:

Tabel 5.2. Keterkaitan Antara Pokok-Pokok Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD

Meningkatkan Kemandirian Buru Selatan secara Berkelanjutan sebagai Kabupaten Yang Rukun, Adil, Sejahtera Berbasis Agro-marine				
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Memperkuat sektor perhubungan untuk peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat (MISI 1)	Terkoneksinya sistim perhubungan sampai pada pusat aktifitas ekonomi masyarakat	Terkoneksinya sistim perhubungan	1. Membangun dan memaksimalkan sarana dan prasarana transportasi laut maupun darat yang memadai dan terkoneksi di seluruh wilayah Buru Selatan	Terbangunnya Jumlah pelabuhan laut (unit)
				Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (km)
			2. Membangun infrastruktur perekonomian di pedesaan untuk mendorong kelancaran proses produksi, konsumsi dan distribusi secara integrative	Peningkatan usaha mikro
			3. Peningkatan produktivitas usaha perikanan rakyat serta pemberdayaan masyarakat pesisir/pulau kecil.	Peningkatan Produksi Perikanan
			4. Peningkatan kualitas dan keterampilan petani dan nelayan, baik pada aspek pengetahuan teknis, penguasaan teknologi maupun manajemen usaha.	Peningkatan Kegiatan pelatihan Perikanan
			5. Pengembangan wisata bahari, wisata budaya dan wisata sejarah yang berbasis di pedesaan	Meningkatnya Jumlah Kunjungan wisatawan
	Tumbuhnya pusat usaha kecil mikro dan menengah sesuai potensi wilayah	Terbentuknya kelompok usaha mikro kecil dan menengah	1. Membentuk kluster-kluster pengembangan ekonomi berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah yang berbasis pada pengembangan bisnis agro-marine.	Terbentuknya klaster usaha berbasis potensi wilayah
			2. Membangun mental dan kemampuan wirausaha di kalangan masyarakat, terutama generasi muda.	Terwujudnya jiwa kewirausahaan generasi muda

Penguatan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan pusat pengembangan ekonomi kecamatan dengan mempertimbangkan geostrategic, geopolitik, dan potensi sumberdaya wilayah (MISI 3)			3. Memfasilitasi tersedianya akses modal yang memadai bagi berkembangnya UMKM terutama di sektor produktif.	Terbentuknya sistim dan standarisasi akses permodalan
			4. Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi berkembangnya UMKM, meliputi penyediaan infrastruktur, informasi pasar, kemudahan birokrasi serta keringanan fiskal.	
			5. Mengkonsolidasi perencanaan tata ruang wilayah secara terpadu, sinergis dan komprehensif dalam menjamin keseimbangan ekosistem dan ekologis lingkungan hidup untuk menjamin penyelenggaraan pembangunan secara berkelanjutan, melalui pengusulan dokumen-dokumen perencanaan tata ruang meliputi: RTRW, RDTR, RTBL dan Master Plan sektor lainnya.	Tersedianya dokumen perencanaan spasial
			6. Pengadaan tanah untuk sarana prasarana pembangunan, Peningkatan pembangunan perumahan layak huni bagi masyarakat, melalui program perumahan swadaya dan perumahan khusus	Tersedianya lahan untuk perumahan
Pengembangan sektor pendidikan mendorong peningkatan daya saing daerah (MISI 4)	Terciptanya SDM berbasis potensi unggulan daerah	Terkelolanya potensi unggulan daerah	1. Pendidikan gratis dengan pola yang adil, profesional berorientasi output	Tingginya angka partisipasi sekolah
			2. Mengembangkan pendidikan anak usia dini (PAUD) untuk mencetak landasan yang kokoh bagi penguatan SDM Buru Selatan di masa depan.	Tersedianya lembaga PAUD
			3. Penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai, termasuk peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan pengembangan teknologi informasi di bidang pendidikan	Tersedianya infrastruktur, SDM, dan pemanfaatan IT bidang pendidikan
			4. Membangun sekolah-sekolah kejuruan dari level sekolah lanjutan pertama sampai sekolah lanjutan atas, yang berbasis pada potensi wilayah Buru Selatan	Terbangunnya sekolah kejuruan berbasis potensi wilayah

			5. Membangun sistem pendidikan tinggi secara fokus dan professional yang berorientasi pada potensi unggulan daerah melalui pengembangan konsep kemitraan segitiga antara pemerintah, pengusaha dan perguruan tinggi	Terselenggaranya sistim pendidikan tinggi di Buru Selatan
Perluasan akses kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat (MISI 5)	Tersedianya akses kesehatan bagi masyarakat	Terlayannya kebutuhan kesehatan masyarakat	1. Pelayanan kesehatan gratis, disertai upaya penyediaan infrastruktur dan SDM kesehatan yang memadai hingga ke tingkat desa untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.	Tersedianya infrastruktur, SDM dan pelayanan kesehatan memadai sampai ketingkat desa
			2. Optimalisasi riset dan development di bidang kesehatan untuk mengantisipasi isu-isu kesehatan dan perkembangan penyakit menular yang dihadapi masyarakat	Terciptanya mekanisme riset dan development di bidang kesehatan
			3. Meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan di seluruh wilayah Buru Selatan	Terciptanya Lingkungan bersih
Penguatan adat, budaya dan nilai-nilai kearifan lokal sebagai modal sosial untuk mendorong akselerasi pembangunan pariwisata daerah (MISI 6)	Majunya pariwisata daerah berbasis kearifan lokal	Terciptanya destinasi wisata berbasis kearifan lokal	1. Pengembangan potensi pariwisata daerah secara profesional yang bersinergi dengan adat, budaya dan kearifan lokal masyarakat Buru Selatan	Terkelolanya potensi wisata lokal secara profesional
			2. Mengupayakan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pengembangan budaya lokal guna terjaminnya eksistensi budaya Buru Selatan yang kaya dan beragam	Adanya peraturan daerah tentang kearifan lokal dan aktifitas keagamaan
			3. Mendorong aktivitas keagamaan yang bersinergi dengan budaya lokal guna terbentuknya jatidiri dan kearifan masyarakat	
			4. Memperkuat sistem kelembagaan adat	
			5. Menggerakkan aktivitas kepemudaan di tingkat desa sesuai bakat dan kebutuhannya, baik pada bidang keagamaan, olahraga, sosial, maupun seni dan budaya.	Meningkatnya minat pemuda di bidang olahrag, sosial seni, dan budaya

			6. Peningkatan harkat dan martabat serta kualitas hidup bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Terpenuhinya sarana prasarana PMKS
			7. Mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam membangun kesejahteraan sosial sebagai investasi modal sosial	Terciptanya kepedulian masyarakat dalam investasi modal sosial
			8. Memperkuat ketahanan sosial dalam upaya memperkecil kesenjangan sosial, dengan memberikan perhatian kepada warga masyarakat dalam pembinaan semangat kesetiakawanan sosial dan kemitraan semangat kepahlawanan serta wawasan kebangsaan	
Reformasi birokrasi dan penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional dan bersih dari KKN (MISI 7)	Terwujudnya tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, bebas KKN	Adanya ASN Kabupaten Buru Selatan yang profesional	1. Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah dalam menjalankan fungsinya secara efektif dan profesional	Tersedianya SDM ASN yang profesional
			2. Mengoptimalkan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur serta kualitas layanan yang prima bagi masyarakat	Terciptanya sistim akuntabilitas pemerintah yang berkualitas
			3. Menyederhanakan alur birokrasi dengan sistem satu atap guna meningkatkan pelayanan publik yang efisien dan efektif	Terciptanya sistim pelayanan satu atap
			4. Optimalisasi peran putra daerah yang berkualitas secara adil dan berimbang, untuk mengisi posisi-posisi strategis di birokrasi, khususnya posisi yang berhubungan langsung dengan masyarakat	Tersedianya SDM ASN berbasis kearifan lokal
			5. Melakukan praktek pengelolaan keuangan daerah yang adil, transparan dan berpihak pada masyarakat	Terciptanya sistim pengelolaan keuangan yang akuntabel
	Terciptanya kluster produk unggulan daerah berbasis agro marine	Adanya pusat unggulan pertanian dan perikanan	1. Perancangan master plan cluster pengembangan produk perikanan dan pertanian	Tersedianya master plan pengembangan produk perikanan dan pertanian
			2. Membentuk sentra produk perikanan dan pertanian pada kluster-kluster pengembangan	Terbentuknya sentra produksi berbasis potensi sumberdaya

Pembentukan Pusat Pengembangan Produk Perikanan dan Pertanian Berbasis Potensi Unggulan Wilayah (MISI 2)			ekonomi kerakyatan berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah	alam wilayah
			3. Membangun sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran aktivitas pada kluster-kluster pengembangan sesuai dengan skala prioritas produk unggulan di setiap wilayah	Terbangunnya sarana prasarana penunjang potensi unggulan daerah
			4. Penciptaan lapangan kerja dengan jalan meningkatkan ketrampilan masyarakat dengan mendorong usaha-usaha kreatif sesuai dengan potensi yang dimiliki di setiap desa	Terciptanya SDM berbasis potensi unggulan daerah
			5. Menjamin sistem pemasaran dan quality control bagi produk yang dikembangkan demi terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat dan tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Buru Selatan secara professional dan berkeadilan	Terciptanya sistem dan quality control dalam pengembangan produk unggulan daerah

Visi dan misi pembangunan Kabupaten Buru Selatan tahun 2021-2026 juga didukung dengan program prioritas desa unggul Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan tahun 2021-2026 yaitu:

1. 5.000 lapangan Kerja Baru.
 - Penciptaan Wirausaha baru Desa;
 - Bantuan Modal Usaha;
 - Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Desa;
 - Pembentukan Kelompok Usaha Desa.
2. Desa Pintar, Desa Sehat.
 - 1 desa 1 PUSTU;
 - Pelayanan Kesehatan Reproduksi Gratis;
 - Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Uang Sekolah, Buku dan Seragam Gratis SD dan SMP;
 - 1.000 Beasiswa Prestasi Pelajar dan Mahasiswa;
 - Pendidikan Orang Basudara Pertukaran Pelajar;
 - Sarana Olahraga Desa.
3. 1.000 Perempuan Desa Mandiri.
 - Bantuan Modal Usaha Perempuan Mandiri;
 - Pelatihan Usaha Perempuan Mandiri
4. Desa Produktif.
 - Satu Desa Satu Produk Unggulan;
 - Satu Desa Satu Badan Usaha;
 - Smart Desa.
5. Nelayan dan Petani Unggul.
 - Bantuan Kapal dan Alat Tangkap;
 - Bantuan Pupuk, Bibit dan Alat Pertanian;
 - Bantuan Modal Kerja Tani dan Nelayan;
 - Membangun Coldstorage Pada Zona tangkap;
 - Menyediakan Akses pasar hasil tangkap.

Pembangunan Kabupaten Buru Selatan jangka menengah yang dilaksanakan guna menuju pada sasaran utama pembangunan di tahun 2021-2026, yang meliputi antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,00-6,00%;
2. Tingkat inflasi sebesar 3,00-3,50%;
3. Indeks Gini sebesar 0,314;
4. Tingkat kemiskinan sebesar 13,43-13,00%;
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 69,91;
6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 2,00-2,97%.

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Buru Selatan didasarkan pada analisis SWOT, yaitu analisis yang mencermati kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan atau ancaman (*threats*) secara bersama-sama. SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di Kabupaten Buru Selatan. Lingkungan mencakup lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Faktor lingkungan internal adalah semua faktor yang dalam waktu singkat bisa diadakan perubahan atau dikelola (*manageable, controllable*) di Kabupaten Buru Selatan, yang termasuk di dalam lingkungan internal mencakup kekuatan dan kelemahan. Sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor-faktor yang dalam waktu singkat tidak dapat dikelola dan dikendalikan, yang meliputi peluang dan ancaman. Melalui analisis demikian, strategi pembangunan Kabupaten Buru Selatan dengan memperhatikan visi, misi serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah ke depan, maka strategi dan arah kebijakan adalah sebagai berikut :

1.1. Penjabaran Starategi, Arah Kebijakan dan program berdasarkan Misi

1.1.1. Strategi, Arah Kebijakan dan program untuk Mewujudkan Misi Pertama.

Dalam upaya mewujudkan Misi Pertama: **Memperkuat sektor perhubungan untuk peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat**, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka stategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Strategi meningkatkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai di seluruh wilayah Buru selatan dengan kebijakan:
 - 1) Peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara.

b. Strategi meningkatkan infrastruktur perekonomian di pedesaan untuk mendorong kelancaran proses produksi, konsumsi dan distribusi secara integrative dengan Kebijakan :

- 1) Peningkatan kuantitas dan kualitas berbagai sarana dan prasarana penunjang transportasi, seperti jalan dan jembatan.
- 2) Peningkatan jangkauan dan kualitas sarana dan prasarana irigasi, air bersih, dan permukiman
- 3) Peningkatan jangkauan dan kualitas sarana dan prasarana energi listrik.
- 4) Peningkatan jangkauan dan kualitas sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi
- 5) Pengembangan kawasan strategis, kawasan rawan bencana dan kawasan tertinggal

Program kerja yang diagendakan pada Misi 1 ini sebagai berikut:

- 1) Membangun dan memaksimalkan sarana dan prasarana transportasi laut maupun darat yang memadai di seluruh wilayah;
- 2) Membangun infrastruktur perekonomian di pedesaan untuk mendorong kelancaran produksi, konsumsi dan distribusi secara integratif;
- 3) Peningkatan produktivitas usaha perikanan rakyat serta pemberdayaan masyarakat pesisir/pulau;
- 4) Peningkatan kualitas dan keterampilan petani dan nelayan, baik pada aspek pengetahuan teknis, penguasaan teknologi maupun manajemen usaha;
- 5) Peningkatan kualitas dan keterampilan petani dan nelayan, baik pada aspek pengetahuan teknis, penguasaan teknologi maupun manajemen usaha
- 6) Pengembangan wisata bahari, wisata budaya dan wisata sejarah yang berbasis di pedesaan

1.1.2. Strategi, Arah Kebijakan dan program untuk Mewujudkan Misi Kedua.

Dalam upaya mewujudkan Misi kedua: **Pembentukan pusat pengembangan produk perikanan dan pertanian berbasis potensi unggulan wilayah**, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Strategi Membentuk sentral produk perikanan dan pertanian pada kluster-kluster pengembangan ekonomi kerakyatan berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah dengan kebijakan:
 - 1) Peningkatan nilai tambah dan pemasaran hasil perikanan
 - 2) Peningkatan kesejahteraan nelayan
 - 3) Peningkatan produksi dan produktivitas Perikanan
 - 4) Peningkatan nilai tambah dan pemasaran hasil pertanian
 - 5) Peningkatan kesejahteraan petani
 - 6) Peningkatan produksi dan produktivitas pangan dan pertanian
 - 7) Peningkatan nilai tambah dan pemasaran hasil Kehutanan
 - 8) Peningkatan ketahanan, aksesibilitas dan konsumsi pangan
- b. Strategi Membangun sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran aktivitas pada kluster-kluster pengembangan sesuai dengan skala prioritas produk unggulan di setiap wilayah dengan kebijakan:
 1. Peningkatan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak
 2. Penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan
 3. Peningkatan penyesuaian pemanfaatan tanah sesuai dengan Tata Ruang
 4. Penataan batas wilayah pemerintahan
 5. Peningkatan rehabilitasi, konservasi, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya
 6. Penataan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi
- c. Strategi Penciptaan lapangan kerja dengan jalan meningkatkan ketrampilan masyarakat, mendorong usaha-usaha kreatif sesuai dengan potensi yang dimiliki di setiap desa kebijakannya:

- 1) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja
 - 2) Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja
 - 3) peningkatan kebijakan pembangunan yang responsif gender
 - 4) Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak
 - 5) Peningkatan inovasi daerah, penelitian, pengembangan dan penerapan iptek
- d. Strategi meningkatkan sistem pemasaran dan quality control bagi produk yang dikembangkan demi terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat dan tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Bursel secara professional dan berkeadilan dengan kebijakan:
- 1) Peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor
- Peogram kerja yang diagendakan pada Misi 2 ini sebagai berikut:
- 1) Perancangan master plan cluster pengembangan produk perikanan dan pertanian;
 - 2) Membentuk sentral produk perikanan dan pertanian pada kluster-kluster pengembangan ekonomi kerakyatan berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah;
 - 3) Membangun sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran aktivitas pada kluster-kluster pengembangan sesuai dengan skala prioritas produk unggulan disetiap wilayah;
 - 4) Penciptaan lapangan kerja dengan jalan meningkatkan ketrampilan masyarakat dengan mendorong usaha-usaha kreatif sesuai dengan potensi yang dimiliki di setiap desa;
 - 5) Menjamin sistem pemasaran dan quality control bagi produk yang dikembangkan demi terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat dan tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Bursel secara professional dan berkeadilan.

1.1.3. Strategi, Arah Kebijakan dan program untuk Mewujudkan Misi Ketiga.

Dalam upaya mewujudkan Misi ketiga: **Penguatan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan pusat pengembangan ekonomi kecamatan dengan mempertimbangkan geostrategic, geopolitik, dan potensi sumberdaya wilayah,**

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Strategi Peningkatan daya saing dan menjaga stabilitas ekonomi dengan kebijakan:
 - 1) Peningkatan akses dan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM
 - 2) Penguatan kelembagaan dan peningkatan daya saing SDM koperasi dan UMKM
 - 3) Pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM
 - 4) Pengembangan dan penguatan lembaga keuangan non bank terutama lembaga keuangan mikro
 - 5) Peningkatan industri kecil dan menengah (IKM)
- b. Strategi Peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan dan anak dengan kebijakan: Peningkatan kebijakan pembangunan yang responsif gender
- c. Strategi Peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin, usaha mikro kecil menengah dan koperasi, dengan kebijakan: Meningkatnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang berpihak bagi masyarakat miskin.

Program kerja yang diagendakan pada Misi 3 ini sebagai berikut:

- 1) Membentuk cluster-cluster pengembangan ekonomi berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah yang berbasis pada pengembangan bisnis agro-marine;
- 2) Membangun mental dan kemampuan wirausaha di kalangan masyarakat, terutama generasi muda;
- 3) Memfasilitasi tersedianya akses modal yang memadai bagi berkembangnya UMKM terutama di sektor produktif;
- 4) Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi berkembangnya UMKM, meliputi penyediaan infrastruktur, informasi pasar, kemudahan birokrasi serta keringanan fiskal.

1.1.4. Strategi, Arah Kebijakan dan program untuk Mewujudkan Misi Keempat.

Dalam upaya mewujudkan Misi keempat: **Pengembangan sektor pendidikan mendorong peningkatan daya saing daerah**, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Strategi Peningkatan pelayanan pendidikan yang lebih merata dan bermutu, dengan kebijakan :
 - 1) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
 - 2) Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan dasar dan menengah
 - 3) Beasiswa untuk siswa berprestasi terutama dari keluarga miskin
 - 4) Penguatan dan Pengembangan SMP, SMU dan SMK unggulan
 - 5) Peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan
 - 6) Peningkatan pendidikan non-formal dan pendidikan informal
 - 7) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD)
 - 8) Penataan sistem pendidikan, peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan pendidikan, dan penguatan tata kelola pendidikan
 - 9) Peningkatan budaya gemar membaca dan layanan perpustakaan
- b. Strategi Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga serta partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah, dengan kebijakan :
 - 1) Peningkatan budaya dan prestasi olahraga
 - 2) Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang Pembangunan.

Program kerja yang diagendakan pada Misi 4 ini sebagai berikut:

- 1) Pendidikan gratis dengan pola yang adil, profesional berorientasi output;
- 2) Mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk mencetak landasan yang kokoh bagi penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Buru Selatan di masa depan;

- 3) Penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai, termasuk peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan pengembangan teknologi informasi di bidang pendidikan;
- 4) Membangun sekolah-sekolah kejuruan dari level sekolah lanjutan pertama sampai sekolah lanjutan atas, yang berbasis pada potensi wilayah Bursel;
- 5) Membangun sistem pendidikan tinggi secara fokus dan professional yang berorientasi pada potensi unggulan daerah melalui pengembangan konsep kemitraan segitiga antara pemerintah, pengusaha dan perguruan tinggi.

1.1.5. Strategi, Arah Kebijakan dan Program untuk Mewujudkan Misi Kelima.

Dalam upaya mewujudkan Misi Kelima: **Perluasan akses kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat**, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Strategi Meningkatkan layanan kesehatan yang merata dan lebih bermutu, dengan kebijakan:
 - 1) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita dengan penekanan pada Revitalisasi Posyandu;
 - 2) Perbaikan status gizi masyarakat
 - 3) Pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan;
 - 4) Pengembangan dan Peningkatan ketersediaan tenaga kesehatan, medis dan dokter
 - 5) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan
 - 6) Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang murah dan terjangkau
 - 7) Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat.
 - 8) Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat

- 9) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pangan yang aman, sehat dan bermutu
- b. Strategi Meningkatkan Kesenjangan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, dengan kebijakan :
 - 1) Peningkatan kapasitas kelembagaan Pengarus Utama Gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan
 - 2) Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak
- c. Strategi Meningkatkan pengendalian jumlah penduduk dan pemberdayaan keluarga
 - 1) Peningkatan kesehatan keluarga dan reproduksi
 - 2) Memperkuat kelembagaan dan Jejaring Keluarga Berencana

Program kerja yang diagendakan pada Misi 5 ini sebagai berikut:

- 1) Memaksimalkan Pelayanan kesehatan, disertai upaya penyediaan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia kesehatan yang memadai hingga ke tingkat desa untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas;
- 2) Optimalisasi riset dan development di bidang kesehatan untuk mengantisipasi isu-isu kesehatan dan perkembangan penyakit menular yang dihadapi masyarakat;
- 3) Meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan di seluruh wilayah Buru Selatan.

1.1.6. Strategi, Arah Kebijakan dan Program untuk Mewujudkan Misi Keenam.

Dalam upaya mewujudkan Misi keenam: **Penguatan adat, budaya, dan nilai-nilai kearifan lokal sebagai modal sosial untuk mendorong akselerasi pembangunan pariwisata daerah**, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Strategi peningkatan hubungan dan toleransi antarumat beragama, penghargaan dan penghormatan terhadap kearifan budaya lokal, dengan kebijakan :

- 1) Teraktualisasinya nilai-nilai budaya lokal sebagai modal sosial pembangunan daerah dan terpeliharanya warisan budaya
- 2) Peningkatan daya tarik dan kunjungan wisata, yang didukung sumberdaya pariwisata yang lebih berkualitas
- b. Strategi Peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, dengan kebijakan :
 - 1) Peningkatan akses bagi anak dan balita telantar, anak jalanan, anak cacat, dan lanjut usia telantar, serta penyandang cacat terhadap pelayanan, perlindungan, dan rehabilitasi social
 - 2) Menekan kerentanan masyarakat miskin sebagai akibat dari perubahan iklim dan bencana alam.
- c. Strategi Memantapkan Kondisi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat., dengan kebijakan :
 - 1) peningkatan layanan kehidupan beragama
 - 2) Peningkatan stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
 - 3) Menekan penyalahgunaan narkoba serta tertanganinya korban penyalahgunaan narkoba
 - 4) Peningkatan pelayanan penanggulangan bencana
- d. Strategi Peningkatan penegakkan dan Penghormatan Hukum dan HAM., dengan kebijakan : peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat
- e. Strategi Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas lembaga demokrasi dan meningkatkan kapasitas dan partisipasi politik masyarakat untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada secara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dengan kebijakan :
 - 1) Terwujudnya lembaga legislatif, partai politik, dan organisasi masyarakat yang profesional, maju, dan modern
 - 2) Terlaksananya Pemilu dan Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Program kerja yang diagendakan pada Misi 6 ini sebagai berikut:

- 1) Mendorong dan memaksimalkan peran dan potensi perempuan dalam tata kelola pemerintahan, aktifitas sosial dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
- 2) Pengembangan potensi pariwisata daerah secara professional yang bersinergi dengan adat, budaya dan kearifan lokal masyarakat Bursel;
- 3) Menerbitkan Perda yang berkaitan dengan pengembangan budaya lokal guna terjaminnya eksistensi budaya Bursel yang kaya dan beragam;
- 4) Mendorong aktivitas keagamaan yang bersinergi dengan budaya lokal guna terbentuknya jati diri dan kearifan masyarakat;
- 5) Memperkuat sistem kelembagaan adat;
- 6) Menggerakkan aktivitas kepemudaan di tingkat desa sesuai bakat dan kebutuhannya, baik pada bidang keagamaan, olahraga, sosial, maupun seni dan budaya.

1.1.7. Strategi, Arah Kebijakan dan Program untuk Mewujudkan Misi Ketujuh

Dalam upaya mewujudkan Misi Keenam : **Penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, professional, dan bersih dari KKN**, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Strategi Meningkatkan pengawasan dan integritas aparatur, dengan kebijakan;
 - 1) Peningkatan Pengawasan Internal
 - 2) Penegakkan disiplin dan penerapan pakta integritas
 - 3) Pengembangan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik
- b. Strategi Memperbaiki kualitas pelayanan publik yang cepat dan murah, dengan kebijakan :
 - 1) Penerapan Standar Minimal Pelayanan Publik
 - 2) Mengembangkan dan menerapkan pelayanan satu pintu untuk pelayanan utama dan investasi
 - 3) Peningkatan layanan registrasi penduduk dan pencatatan sipil

- c. Strategi Menata kelembagaan daerah dan mengembangkan system ketatalaksanaan, dengan kebijakan :
 - 1) Restruktur organisasi dan penataan kelembagaan melalui konsolidasi struktural dan analisis efisiensi serta efektifitas kelembagaan
 - 2) Mengembangkan electronic government dan Standar Prosedur Kerja untuk mendukung efisiensi dan proses akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
 - 3) Penguatan kelembagaan dan kapasitas pemerintahan Negeri
- d. Strategi Meningkatnya penerimaan daerah dan efisiensi belanja daerah, dengan kebijakan:
 - 1) Peningkatan pemanfaatan pengelolaan kekayaan daerah, pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan
 - 2) Pengelolaan BUMD yang semakin sehat dan kompetitif
 - 3) Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengeluaran pemerintah daerah.
- e. Strategi Revitalisasi musrenbang dan penguatan perencanaan berbasis kinerja, dengan kebijakan:
 - 1) Mengkoordinasikan para pelaku pembangunan dalam perencanaan pembangunan daerah
 - 2) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
 - 3) Monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan, dan evaluasi atau kajian kebijakan
- f. Strategi Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan, dengan kebijakan: Mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja SKPD dan kinerja aparatur
- g. Strategi Menerapkan manajemen SDM yang berkualitas (transparan dan berbasis merit system/kompetensi), dengan kebijakan :
 - 1) Penentuan formasi, rekrutmen, Promosi dan mutasi pegawai secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi
 - 2) Penyusunan standar kompetensi jabatan untuk mendukung sistem promosi dan mutasi berbasis kompetensi

- 3) Sistem diklat berbasis kompetensi yang serasi dengan sistem promosi dan mutasi
- 4) Penyempurnaan sistem pembayaran gaji yang layak, adil, dan berbasis kinerja untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan mendorong motivasi, semangat berprestasi, dan integritas pegawai.
- 5) Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan desa.

Program kerja yang diagendakan pada Misi 7 ini sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas dan kapabilitas aparatur pemerintah dalam menjalankan fungsinya secara efektif dan profesional;
- 2) Mengoptimalkan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur serta kualitas layanan yang prima bagi masyarakat;
- 3) Menyederhanakan alur birokrasi dengan sistem satu atap guna meningkatkan pelayanan publik yang efisien dan efektif;
- 4) Optimalisasi peran putra daerah yang berkualitas secara adil dan berimbang, untuk mengisi posisi-posisi strategis di birokrasi, khususnya posisi yang berhubungan langsung dengan masyarakat;
- 5) Melakukan praktik pengelolaan keuangan daerah yang adil, transparan dan berpihak pada masyarakat.

1.2. Rancangan Agenda Kebijakan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah Kabupaten Buru Selatan lima tahun kedepan mulai dipersiapkan sejak saat ini. Dengan memperhatikan isu strategis dan lingkungan Strategis Global, Nasional dan Provinsi, maka dirumuskan rancangan agenda kebijakan pembangunan Kabupaten Buru Selatan tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1.2.1. Agenda Kebijakan Pembangunan tahun 2021

Arah kebijakan tahun 2021 merupakan periode transisi RPJMD 2016-2021 dengan tahun pertama RPJMD 2021-2026, pelaksanaan tahun pertama RPJMD periode 2021-2026 merupakan momentum penting untuk memberi ruang dan landasan yang kuat bagi rencana 5 tahun kedepan, sehingga pembangunan daerah pada tahun 2021 dengan arah kebijakan yang meliputi :

1. penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia,
2. penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang,
3. peningkatan penguatan wawasan kebangsaan dan jati diri masyarakat serta pemantapan tata kehidupan masyarakat yang aman, damai, tertib, taat hukum dan harmonis,
4. peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik,
5. peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

1.2.2. Agenda Kebijakan Pembangunan tahun 2022

Agenda Kebijakan pembangunan tahun 2022 meliputi :

1. Agenda Kebijakan pembangunan sarana dan prasarana wilayah.
2. Agenda kebijakan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah,
3. Agenda kebijakan penanggulangan kemiskinan,
4. Agenda kebijakan reformasi birokrasi,
5. Agenda kebijakan peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM,

1.2.3. Agenda Kebijakan Pembangunan tahun 2023

Agenda Kebijakan pembangunan tahun 2023 meliputi :

1. Agenda kebijakan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah,
2. Agenda kebijakan penanggulangan kemiskinan,
3. Agenda Kebijakan pembangunan sarana dan prasarana wilayah.
4. Agenda kebijakan peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM,
5. Agenda kebijakan reformasi birokrasi,

1.2.4. Agenda Kebijakan Pembangunan tahun 2024

Agenda Kebijakan pembangunan tahun 2024 meliputi :

1. Agenda kebijakan reformasi birokrasi,
2. Agenda kebijakan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah,
3. Agenda kebijakan penanggulangan kemiskinan,
4. Agenda kebijakan peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM,
5. Agenda Kebijakan pembangunan sarana dan prasarana wilayah.

1.2.5. Agenda Kebijakan Pembangunan tahun 2025

Agenda Kebijakan pembangunan tahun 2025 meliputi :

1. Agenda kebijakan reformasi birokrasi,
2. Agenda kebijakan penanggulangan kemiskinan,
3. Agenda kebijakan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah,
4. Agenda kebijakan peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM,
5. Agenda Kebijakan pembangunan sarana dan prasarana wilayah.

1.2.6. Agenda Kebijakan Pembangunan tahun 2026

Agenda Kebijakan pembangunan tahun 2026 meliputi :

1. Agenda kebijakan reformasi birokrasi,
2. Agenda kebijakan penanggulangan kemiskinan,
3. Agenda kebijakan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah,
4. Agenda kebijakan peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM,
5. Agenda Kebijakan pembangunan sarana dan prasarana wilayah.

2.1. Agenda Kebijakan Pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru Selatan selama ini ditopang oleh tiga sektor unggulan yaitu sektor Administrasi pemerintahan, pertanian, dan jaminan social wajib, konstruksi, perdagangan dan jasa, serta pertanian, kehutanan

dan perikanan. Dalam lima tahun kedepan, diproyeksikan sektor ini akan tetap memberikan kontribusi terbesar pada ekonomi Kabupaten Buru Selatan, serta didukung dengan sektor pariwisata dan investasi yang semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung daya saing ekonomi Kabupaten Buru Selatan yang berbasis pada sektor-sektor unggulan, kebijakan perekonomian daerah Buru Selatan dalam lima tahun ke depan **ditujukan** untuk menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berdaya saing, berbasis potensi unggulan lokal, berorientasi pada ekonomi kerakyatan, dan berkelanjutan yang **diindikasikan** dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil. **Sasaran** yang dituju fokus pada dua hal yaitu:

1. Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah (pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata), dengan indikator laju pertumbuhan sektor pertanian, perikanan industri pengolahan, perdagangan, dan kontribusi sektor pariwisata pada PAD;
2. Meningkatnya peran investasi terhadap ekonomi daerah, yang diindikasikan dengan indikator kinerja dalam laju pertumbuhan investasi.

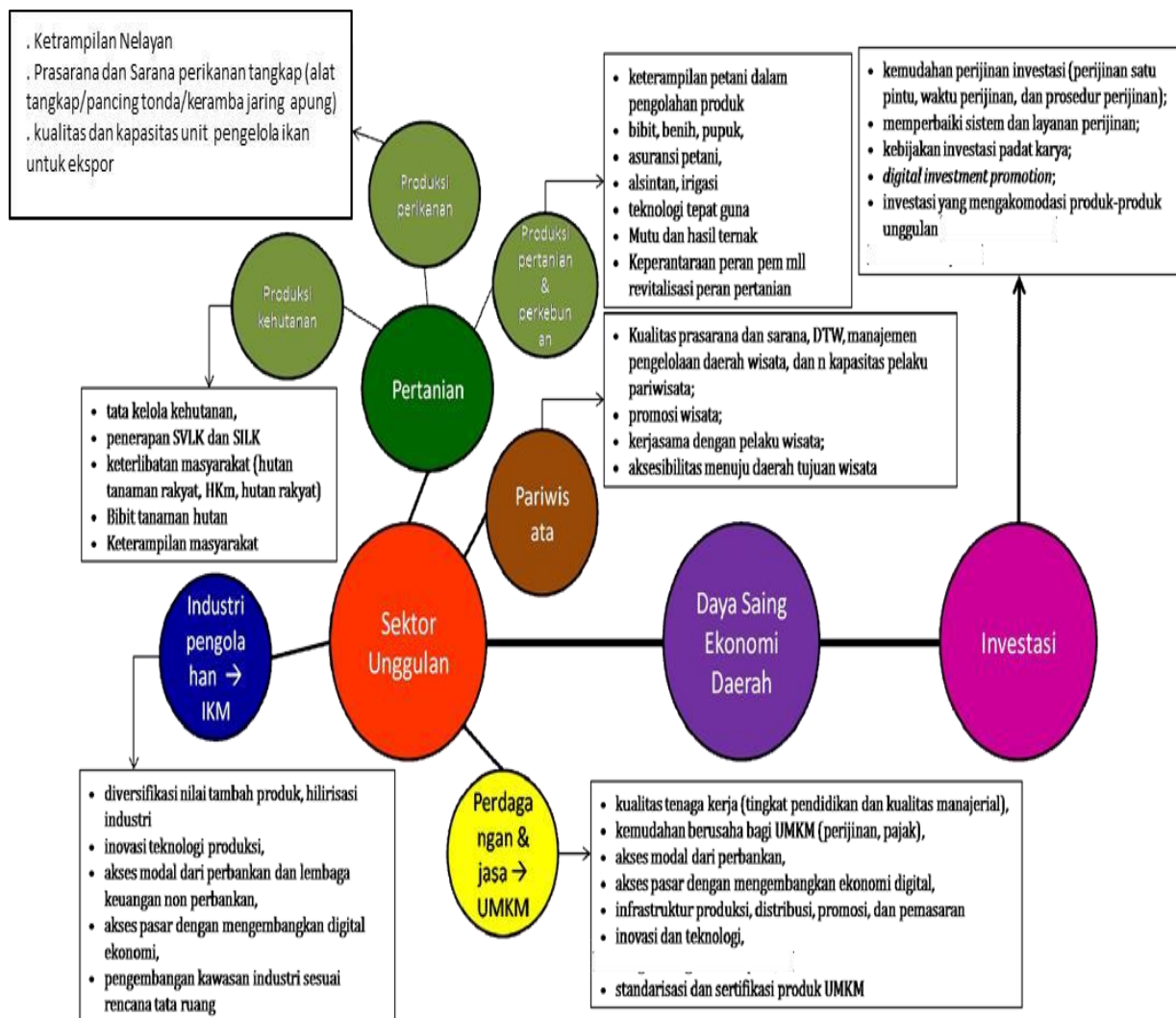
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut, maka **kebijakan** pembangunan ekonomi Kabupaten Buru Selatan kedepan diarahkan pada penguatan kontribusi sektor unggulan yang terintegrasi (produksi dan distribusi) dan mengarah pada digital ekonomi dan ekonomi kreatif berbasis sumber daya lokal. Sedangkan **strategi** yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

1. Meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan melalui:
 - a. peningkatan keterampilan petani dalam pengolahan produk untuk meningkatkan nilai tambah (*on farm* menuju *off farm*),
 - b. penyediaan bibit, benih yang berkualitas, dan pupuk,
 - c. penyediaan dan pemerataan alsintan,
 - d. peningkatan prasarana irigasi ;
 - e. pengembangan teknologi tepat guna di bidang pertanian dan perkebunan;
 - f. pengembangan jejaring pemasaran berbasis kelompok (*corporate farming*),
 - g. peningkatan mutu dan hasil ternak,

- h. peningkatan peran pemerintah dalam keberantaraan melalui revitalisasi peran pertanian
(penyeimbang, penelitian pengembangan, pendapatan dan pengurangan kemiskinan);
- 2. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil pengolahan perikanan melalui:
 - a. peningkatan keterampilan nelayan,
 - b. penyediaan prasarana dan sarana perikanan tangkap (alat tangkap ramah lingkungan, armada dan alat pancing tonda Keramba Jaring Apung, dll),
 - c. peningkatan kualitas dan kapasitas unit pengolah ikan untuk ekspor;
- 3. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil hutan melalui:
 - a. peningkatan kualitas tata kelola kehutanan,
 - b. penerapan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) dan SILK (Sistem Informasi Legalitas Kayu),
 - c. peningkatan keterlibatan masyarakat sebagai mitra usaha kehutanan (hutan tanaman rakyat, HKm, hutan rakyat),
 - d. penyediaan bibit tanaman hutan;
 - e. peningkatan keterampilan masyarakat dalam pengolahan hasil hutan;
- 4. Meningkatkan produksi dan produktivitas industri kecil, mikro, dan menengah melalui:
 - a. peningkatan nilai tambah diversifikasi produk, dan hilirisasi industri,
 - b. mengembangkan inovasi teknologi produksi,
 - c. fasilitasi akses permodalan dari perbankan dan lembaga keuangan non perbankan,
 - d. meningkatkan akses pasar dengan mengembangkan digital ekonomi,
 - e. pengembangan kawasan industri sesuai rencana tata ruang;
- 5. Mendorong pertumbuhan UMKM melalui:
 - a. peningkatan kualitas tenaga kerja (tingkat pendidikan dan kualitas manajerial),
 - b. memberikan kemudahan berusaha bagi UMKM (perijinan, pajak),
 - c. fasilitasi akses permodalan dari perbankan,
 - d. meningkatkan akses pasar dengan mengembangkan ekonomi digital,

- e. peningkatan infrastruktur produksi, distribusi, promosi, dan jejaring pemasaran,
 - f. pengembangan inovasi dan teknologi,
 - g. fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk UMKM;
6. Mendorong pariwisata berbasis masyarakat melalui:
- a. peningkatan kualitas prasarana dan sarana destinasi pariwisata, manajemen pengelolaan daerah wisata, dan kapasitas pelaku pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi wisata;
 - c. meningkatkan kerjasama dengan pelaku wisata;
 - d. meningkatkan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata;
7. Perbaiki iklim investasi yang semakin kondusif melalui:
- a. pemberian kemudahan perijinan investasi (perijinan satu pintu, waktu perijinan, dan prosedur perijinan);
 - b. memperbaiki sistem dan layanan perijinan;
 - c. mengembangkan kebijakan investasi padat karya;
 - d. mengembangkan *digital investment promotion*;
 - e. mengembangkan investasi yang mengakomodasi produk-produk unggulan;

Berikut gambaran kebijakan peningkatan daya saing ekonomi daerah Kabupaten Buru Selatan dalam diagram dan tabel sebagai berikut.



Gambar 6.1. Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah

Tabel 6.1. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Strategi Beserta Indikator Kinerja
Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
Menciptakan Stabilitas Ekonomi daerah yang berdaya saing, Berbasis Potensi Unggulan daerah, dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan	Pertumbuhan ekonomi (%)	1. Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan (pertanian, Perikanan, Industry pengolahan, perdagangan, pariwisata);	1. Pertumbuhan sektor pertanian (%), Perikanan (%) 2. Pertumbuhan sektor industri pengolahan (%) 3. Pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa (%) 4. Pertumbuhan kontribusi pariwisata pada PAD (%)	1. Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan melalui : a. Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan dalam pengolahan produk untuk meningkatkan nilai tambah (<i>on farm</i> menuju <i>off farm</i>) b. Penyediaan bibit benih yang berkualitas dan pupuk c. Pemberian asuransi petani d. Penyediaan Alsintan e. Peningkatan sarana prasaran irigasi f. Pengembangan teknologi tepat guna di bidang pertanian dan perkebunan g. Pengembangan jejaring pemasaran berbasis kelompok (<i>corporate farming</i>) h. Peningkatan mutu dan hasil ternak i. Peningkatan peran pemerintah dalam keperantaraan melalui revitalisasi peran pertanian (penyeimbang, penelitian pengembangan , pendapatan dan pengurangan kemiskinan) 2. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui : a. Peningkatan keterampilan nelayan b. Penyediaan prasarana dan sarana perikanan tangkap (alat tangkap ramah lingkungan/armada pancing tonda, keramba

-
- jaring apung, dll),
 - c. Penggunaan benih berkualitas dan pengembangan pakan ikan mandiri
 - d. Peningkatan kualitas dan kapasitas unit pengolahan ikan untuk ekspor
 - 3. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil hutan
 - a. Peningkatan kualitas tata kelola kehutanan
 - b. Penerapan SVLK (Sistim Verifikasi Legalitas Kayu) dan SILK (Sistem Informasi Legalitas Kayu)
 - c. Peningkatan keterlibatan masyarakat sebagai mitra usaha kehutanan (hutan tanaman rakyat, HKm, hutan rakyat)
 - d. Penyediaan bibit tanaman hutan
 - e. Peningkatan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan hasil hutan
 - 4. Meningkatkan produksi dan produktivitas industri kecil, mikro, dan menengah melalui :
 - a. Peningkatan nilai tambah diversifikasi produk dan hilirisasi industri
 - b. Mengembangkan inovasi teknologi produksi
 - c. Fasilitasi akses permodalan dari perbankan dan lembaga keuangan non perbankan
 - d. Meningkatkan akses pasar dengan mengembangkan digital ekonomi
 - e. Pengembangan kawasan industri sesuai rencana tata ruang
 - 5. Mendorong pertumbuhan UMKM melalui :
 - a. Peningkatan kualitas tenaga kerja (tingkat pendidikan dan manajerial)
 - b. Memberikan kemudahan berusaha bagi UMKM
-

-
- | | | |
|--|-------------------------------------|---|
| <p>2. meningkatnya peran investasi terhadap ekonomi daerah, yang diindikasikan dengan indikator kinerja dalam laju pertumbuhan investasi (%)</p> | <p>5. Pertumbuhan investasi (%)</p> | <p>(perijinan, maupun pajak)</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Fasilitasi akses permodalan dari perbankan d. meningkatkan akses pasar dengan mengembangkan ekonomi digital e. peningkatan infrastruktur produksi, distribusi, promosi, dan jejaring pemasaran f. pengembangan inovasi dan teknologi g. fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk UMKM <p>6. Mendorong pariwisata berbasis masyarakat melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. peningkatan kualitas prasarana dan sarana destinasi pariwisata, Manajemen pengelolaan daerah wisata, dan kapasitas pelaku pariwisata b. meningkatkan promosi wisata c. meningkatkan kerjasama dengan pelaku wisata d. meningkatkan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata <p>7. Perbaiki iklim investasi yang semakin kondusif melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemberian kemudahan perijinan investasi (perijinan satu pintu, waktu perijinan, dan prosedur perijinan) b. Memperbaiki sistem dan layanan perijinan c. Mengembangkan kebijakan investasi padat karya d. Mengembangkan <i>digital investment promotion</i> e. Mengembangkan investasi yang mengkomodasi produk-produk unggulan |
|--|-------------------------------------|---|
-

2.2. Agenda Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan dan pengangguran merupakan persoalan yang kompleks, yang tidak bisa ditangani secara instan tanpa kerjasama dari berbagai pihak. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan setiap unsur pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah Kabupaten, Provinsi dan pusat, serta unsur swasta dan masyarakat. Dalam agenda kebijakan pembangunan Kabupaten Buru Selatan kedepan. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran masih menjadi agenda utama yang harus dilakukan, yang bertujuan untuk menurunkan penduduk miskin di Buru Selatan. Sasaran utamanya adalah menurunkan penduduk miskin perdesaan (yang lebih dominan) dan penduduk miskin perkotaan secara proporsional.

Upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dalam lima tahun kedepan akan difokuskan pada dua hal utama yaitu penyediaan *basic life access* dan penguatan *sustainable livelihood*. Kebijakan penyediaan *basic life access* mengarah pada penyediaan kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi hak setiap masyarakat terutama masyarakat miskin. Kebijakan ini sifatnya “wajib” dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Buru Selatan, sebagai bentuk kewajiban negara untuk menyediakan kebutuhan dasar masyarakat.

Kebijakan kedua yaitu penguatan *sustainable livelihood* yang mengarah pada penguatan mata pencaharian masyarakat miskin agar berkelanjutan. Bahkan diharapkan kebijakan ini mengarah pada konsep “menaikkan kelas” masyarakat miskin dalam konteks kehidupan ekonomi masyarakat. Sehingga kebijakan ini fokus pada penguatan ekonomi masyarakat melalui upaya-upaya pemberdayaan dan pendampingan, serta perbaikan mental masyarakat agar mau “membangun” dirinya menuju pada kehidupan yang lebih baik.

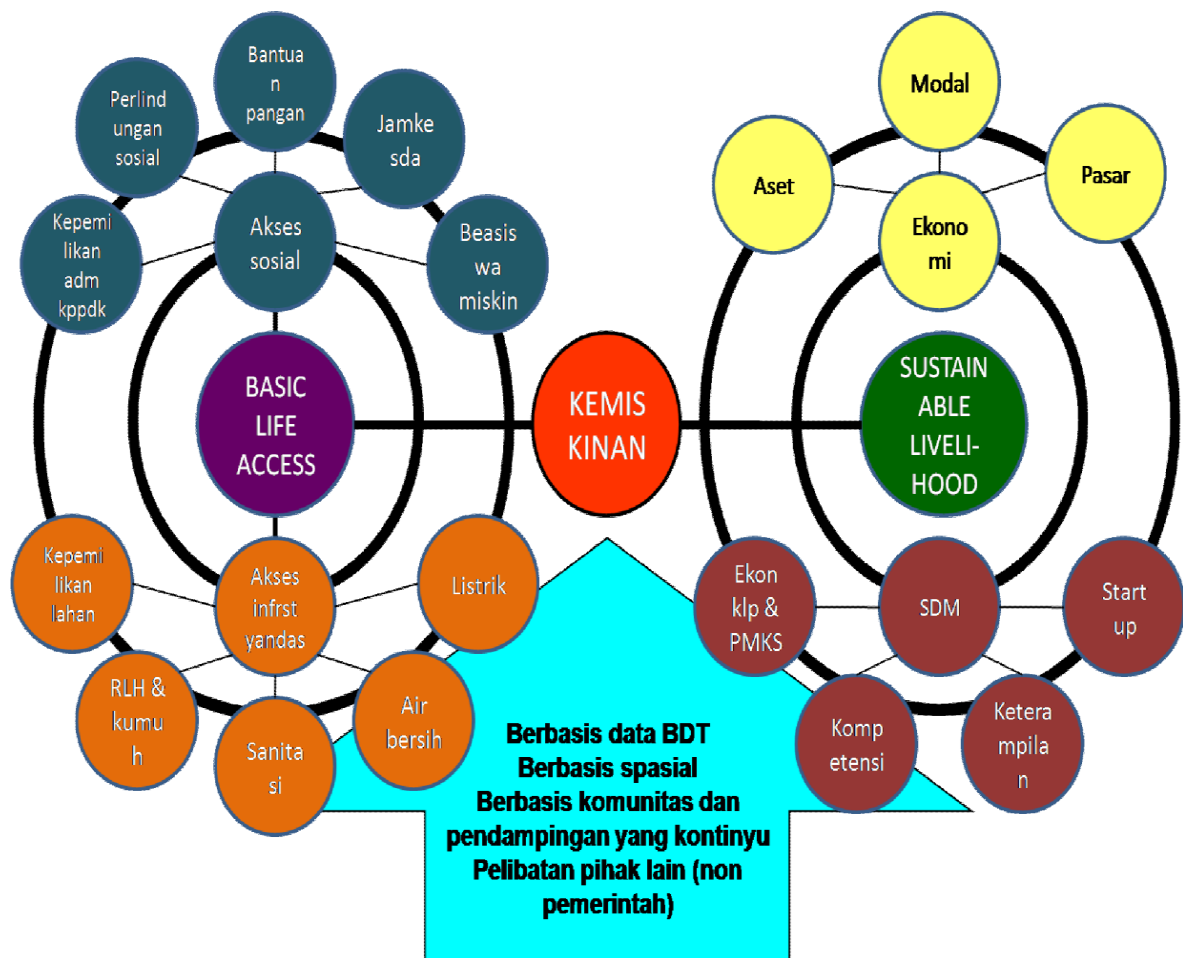
Strategi yang dapat dilakukan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dijabarkan sebagai berikut.

1. Penyediaan *basic life access* untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan meliputi:
 - a. akses rumah layak termasuk air bersih, sanitasi, listrik, komunikasi,

- b. penanganan kawasan permukiman kumuh,
 - c. akses pendidikan, kesehatan, dan pangan,
 - d. perlindungan sosial bagi masyarakat,
 - e. kepemilikan administrasi kependudukan,
 - f. fasilitasi kepemilikan sertifikat lahan;
2. Penguatan *sustainable livelihood* meliputi:
- a. fasilitasi akses terhadap aset, modal, manajemen, dan pasar,
 - b. penciptaan *start up* wirausaha baru,
 - c. peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja,
 - d. pemberdayaan ekonomi kelompok dan PMKS.
3. Dukungan implementasi strategi tersebut dengan perkuatan basis data, basis spasial, berbasis komunitas dan pendampingan yang kontinyu, serta pelibatan pihak lain (non pemerintah).

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Buru Selatan dalam lima tahun kedepan adalah persentase penduduk miskin secara total maupun dilihat dari persentase penduduk miskin perdesaan dan perkotaan.

Berikut gambaran kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten buru Selatan dalam diagram dan tabel.



Gambar 6.2. Penanggulangan Kemiskinan

Tabel 6.2. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Strategi Beserta Indikator Kinerja Penanggulangan Kemiskinan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
Menurunkan Penduduk miskin di Kabupaten Buru Selatan	Angka Kemiskinan (%)	Menurunkan penduduk miskin perkotaan dan perdesaan	1. Persentase penduduk miskin perkotaan (%) 2. Persentase penduduk miskin perdesaann (%)	1. Penyediaan basic life access untuk penduduk meliputi : a. Akses rumah layak termasuk air bersih, sanitasi, listrik, dan kominikasi b. Penanganan kawasan pemukiman kumuh c. Akses pendidikan, kesehatan, dan pangan d. Perlindungan sosial bagi masyarakat e. Kepemilikan administrasi kependudukan f. Fasilitasi kepemilikan sertifikasi lahan 2. Penguatan <i>sustainable livelihood</i> meliputi : a. Fasilitas akses terhadap aset, modal, manajemen, dan pasar b. Penciptaan <i>stat up</i> wirausaha baru c. Keterampilan dan kompetensi tenaga kerja d. Pemberdayaan ekonomi kelompok dan PMKS 3. Dukungan implementasi strategi tersebut dengan perkuatan basis data, basis spasial, berbasis komunitas dan pendampingan yang kontiyu, serta perlibatan pu]ihak lain (non pemerintah)

2.3. Agenda Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM

Salah satu pondasi dasar pembangunan yang menggerakkan setiap prosesnya adalah sumberdaya manusia. Oleh karena itu pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing menjadi penting untuk dilakukan dalam setiap proses pembangunan daerah. Dengan kondisi sumberdaya manusia Kabupaten Buru Selatan saat ini, maka dalam lima tahun kedepan pembangunan Kabupaten Buru Selatan akan meletakkan sumberdaya manusia sebagai subyek dan obyek utama dalam pembangunan. Pembangunan sumberdaya manusia **ditujukan** untuk membangun sumberdaya manusia Buru Selatan yang berkualitas dan berdaya saing, yang diukur dari indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). **Sasarannya** adalah:

1. Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat, dengan ukuran rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah (tahun);
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator, dengan indikator angka harapan hidup (tahun);
3. Meningkatnya serapan dan produktivitas tenaga kerja, dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (persen) dan produktivitas tenaga kerja (rupiah per kapita).

Guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sumberdaya manusia Kabupaten Buru Selatan maka **kebijakannya** mengarah pada:

1. Penguatan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan;
2. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak;
3. Peningkatan kualitas tenaga kerja berbasis kompetensi.

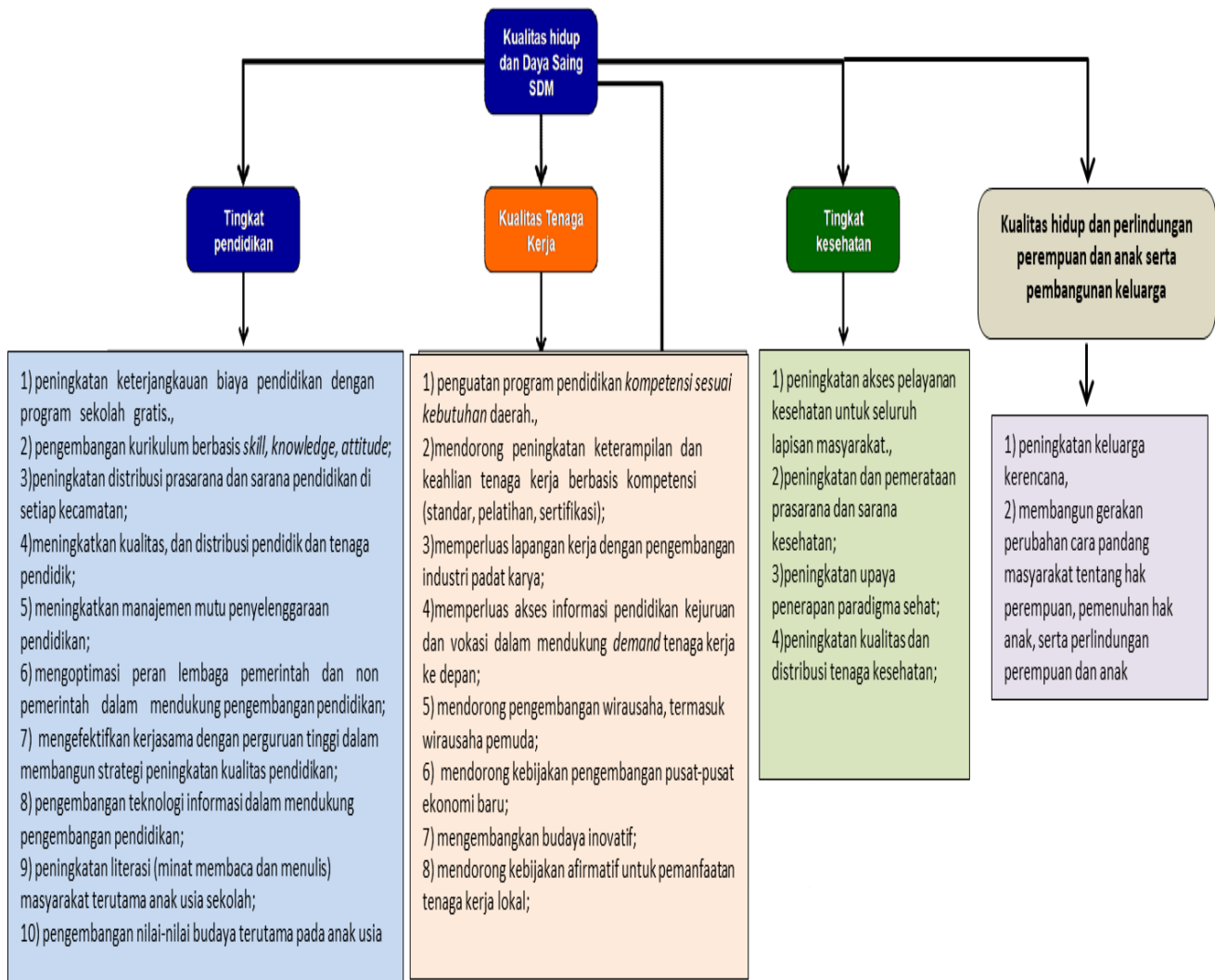
Strategi yang akan diimplementasikan meliputi:

1. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan melalui:
 - a. peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan dengan program sekolah gratis.;
 - b. pengembangan kurikulum berbasis *skill, knowledge, attitude*;

- c. peningkatan distribusi prasarana dan sarana pendidikan di setiap kecamatan;
 - d. meningkatkan kualitas, dan distribusi pendidik dan tenaga pendidik;
 - e. meningkatkan manajemen mutu penyelenggaraan pendidikan;
 - f. mengoptimasi peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam mendukung pengembangan pendidikan;
 - g. mengefektifkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam membangun strategi peningkatan kualitas pendidikan;
 - h. pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan pendidikan;
 - i. peningkatan literasi (minat membaca dan menulis) masyarakat terutama anak usia sekolah;
 - j. pengembangan nilai-nilai budaya terutama pada anak usia sekolah;
2. Perbaiki kualitas dan akses pelayanan kesehatan melalui upaya:
 - a. peningkatan akses pelayanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat,
 - b. peningkatan dan pemerataan prasarana dan sarana kesehatan,
 - c. peningkatan upaya penerapan paradigma sehat,
 - d. peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan,
 3. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak, serta pembangunan keluarga, dengan membangun gerakan perubahan cara pandang masyarakat tentang hak perempuan, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak.
 4. Mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi melalui:
 - a. penguatan program pendidikan *kompetensi sesuai kebutuhan* daerah;
 - b. mendorong peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja berbasis kompetensi (standar, pelatihan, sertifikasi);
 - c. memperluas lapangan kerja dengan pengembangan industri padat karya;
 - d. memperluas akses informasi pendidikan kejuruan dan vokasi dalam mendukung *demand* tenaga kerja ke depan;

- e. mendorong pengembangan wirausaha, termasuk wirausaha pemuda;
- f. mendorong kebijakan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru;
- g. mengembangkan budaya inovatif;
- h. mendorong kebijakan afirmatif untuk pemanfaatan tenaga kerja lokal.

Berikut gambaran kebijakan peningkatan kualitas hidup dan daya saing sumberdaya manusia Kabupaten Buru Selatan dalam diagram dan tabel.



Gambar 6.3. Pembangunan Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Tabel 6.3. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Strategi Beserta Indikator Kinerja Pembangunan Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
Membangun Sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	1. Indeks Pembangunan Manusia	1. Meningkatnya kualitas tingkat pendidikan masyarakat	1. Rata-rata lama sekolah (tahun) 2. Harapan Lama sekolah (tahun)	1. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan melalui : a. Peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan dengan program sekolah gratis b. Pengembangan kurikulum berbasis <i>skill, knowledge, attitude</i> c. Peningkatan distribusi prasarana dan sarana pendidikan di setiap kecamatan d. Meningkatkan kualitas , dan distribusi pendidik dan tenaga pendidik e. Meningkatkan manajemen mutu penyelenggaraan pendidikan f. Mengoptimalkan peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam mendukung pengembangan pendidikan g. Mengefektifkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam membangun strategi peningkatan kualitas pendidikan h. Pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan pendidikan i. Peningkatan minat baca masyarakat terutama anak usia sekolah j. Pengembangan nilai-nilai budaya terutama pada anak usia sekolah 2. Perbaikan kualitas dan akses pelayanan kesehatan melalui upaya : a. Peningkatan akses pelayanan kesehatan diseluruh lapisan masyarakat b. Peningkatan dan pemerataan prasarana dan
	2. Indeks Pembangunan Gender	2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3. Usia harapan hidup (tahun)	

				sarana kesehatan c. Peningkatan upaya penerapan paradigma sehat d. Peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan
				3. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak, serta pembangunan keluarga dengan membangun gerakan perubahan cara pandang masyarakat tentang hak perempuan, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3. Meningkatnya Serapan dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 2. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp/kapita)	4. Mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi melalui :	a. Penguatan program pendidikan kompetensi sesuai kebutuhan daerah b. Mendorong peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja berbasis kompetensi (standar, pelatihan, sertifikasi) c. Memperluas lapangan kerja dengan industri padat karya d. Memperluas akses informasi pendidikan kejuruan dan vokasi dalam mendukung demand tenaga kerja ke depan e. Mendorong pengembangan wirausaha termasuk wirausaha pemuda f. Mendorong kebijakan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru g. Mengembangkan budaya inovatif h. Mendorong kebijakan alternatif untuk pemanfaatan tenaga kerja lokal

2.4. Agenda Kebijakan Reformasi Birokrasi

Keberhasilan proses pembangunan daerah sangat berkorelasi dengan reformasi birokrasi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Oleh karena itu membangun aparatur yang berkualitas, kompeten, dan berkinerja baik menjadi syarat mutlak agar mampu mengimplementasikan semua bentuk cita-cita pembangunan daerah. Penting juga untuk membangun sistem pelayanan publik yang prima, kelembagaan yang efektif dan efisien, serta manajemen pemerintahan yang akuntabel dan bersih.

Dalam rangka mendukung proses pembangunan daerah Kabupaten Buru Selatan kedepan maka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) harus diimplementasikan, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Sasarannya adalah:

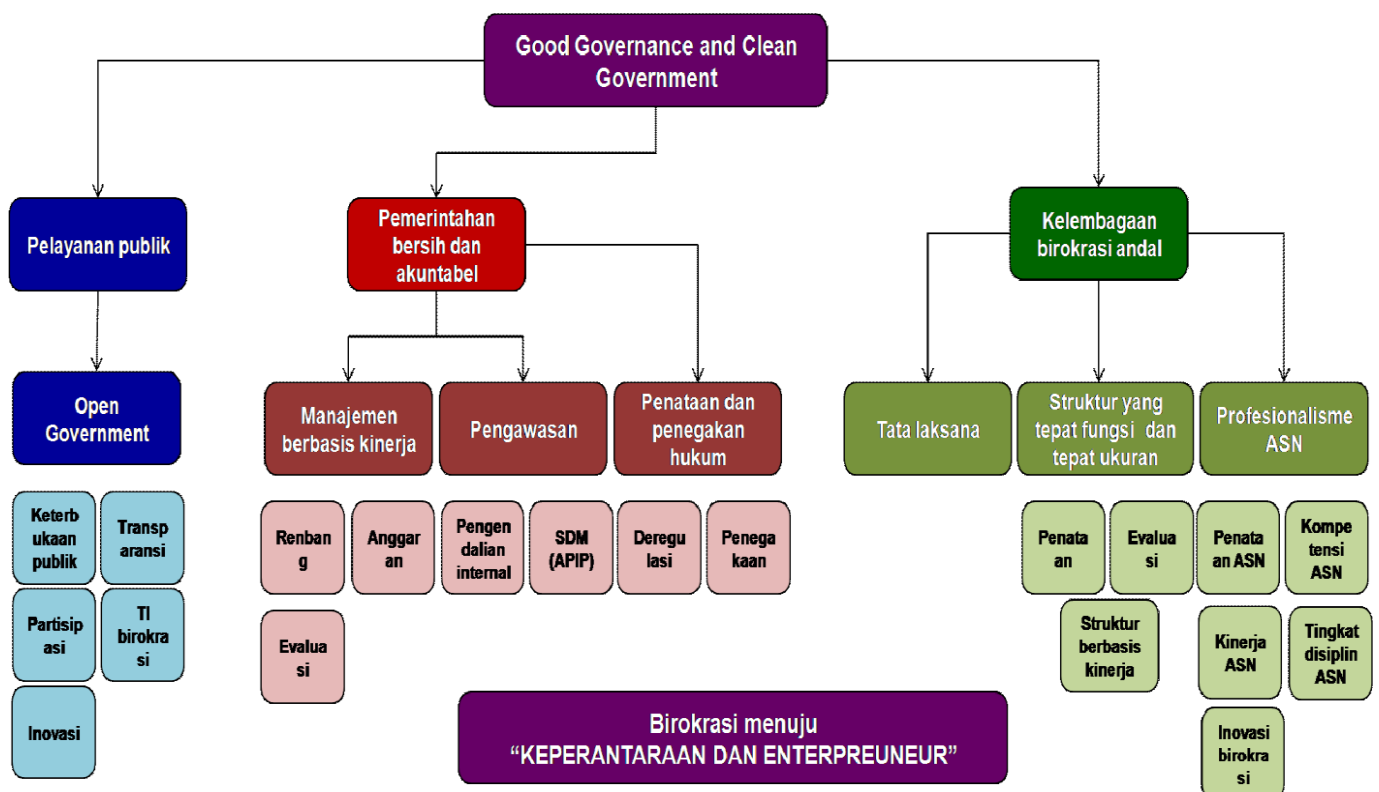
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator indeks kepuasan masyarakat;
2. Meningkatnya manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel, dengan indikator opini BPK, nilai SAKIP, dan indeks persepsi korupsi;
3. Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan profesionalitas ASN, dengan indikator indeks profesionalitas ASN dan rasio kelembagaan PD yang efektif dan efisien (persen).

Arah kebijakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran tersebut adalah peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta terbuka yang didukung dengan profesionalitas aparatur dan kelembagaan yang efektif serta efisien. Strategi yang dilakukan meliputi:

1. Membangun *open government* melalui upaya perkuatan keterbukaan informasi, transparansi, serta mendorong partisipasi publik, termasuk partisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Mendorong pengembangan ASN yang inovatif, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi;

3. Membangun sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
4. Meningkatkan pengawasan melalui perkuatan kapabilitas APIP dan perkuatan SPIP;
5. Meningkatkan pengendalian produk hukum, dan penegakkan perda;
6. Meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja, kompetensi, disiplin, dan penataan ASN;
7. Memperbaiki tata laksana organisasi;
8. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan dengan melakukan evaluasi berkala pada kinerja kelembagaan menuju struktur berbasis kinerja;
9. Menuju “keperantaraan dan *enterpreuneur*” dalam tata kelola pemerintahan.

Berikut gambaran kebijakan perwujudan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Buru Selatan dalam diagram dan tabel.



Gambar 6.4. Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

**Tabel 6.4. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Strategi Beserta Indikator Kinerja
Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih (Good Governance and Clean)	Indeks Reformasi Birokrasi	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Membangun open government melalui upaya Perkuatan, Keterbukaan informasi, Transparansi, serta mendorong partisipasi publik termasuk partisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
		2. Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel	2. Opini BPK 3. Nilai SAKIP 4. Indeks Persepsi Korupsi	2. Mendorong pengembangan ASN yang inovatif, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi 3. - Membangun sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran - Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
		3. Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan profesionalitas ASN	5. Indeks Profesionalitas ASN 6. Rasio Kelembagaan PD yang efektif (%)	4. Meningkatkan pengawasan melalui perkuatan kapabilitas APIP dan perkuatan SPIP 5. Meningkatkan pengendalian produk hukum dan penegakan perda 6. Meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja, kompetensi, disiplin, dan penataan ASN 7. Memperbaiki tata laksana organisasi 8. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan dengan melakukan evaluasi berkala pada kinerja kelembagaan menuju struktur berbasis kinerja 9. Menuju “Keperantaraan dan Enterpreuneur” dalam tata kelola pemerintah

2.5. Agenda Kebijakan Sarana Prasarana Wilayah

Pembangunan esensinya adalah dalam rangka mengurangi kesenjangan dan ketimpangan wilayah menuju pada masyarakat yang sejahtera. Kondisi di Kabupaten Buru Selatan saat ini berdasarkan pada Indeks Williamson dapat digambarkan bahwa tingkat kesenjangan wilayah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Buru Selatan masih cukup tinggi. Oleh karena itu, pembangunan yang berorientasi pada pemerataan menjadi hal yang penting untuk dilakukan dalam lima tahun kedepan. Upaya pemerataan dapat dilakukan dengan mendistribusikan berbagai aktivitas ekonomi di wilayah-wilayah tertinggal, yang didukung dengan kemudahan aksesibilitas sebagai prasarana distribusi barang dan jasa.

Untuk itu, lima tahun kedepan salah satu tujuannya adalah meningkatkan pemerataan pembangunan daerah, sasarannya :

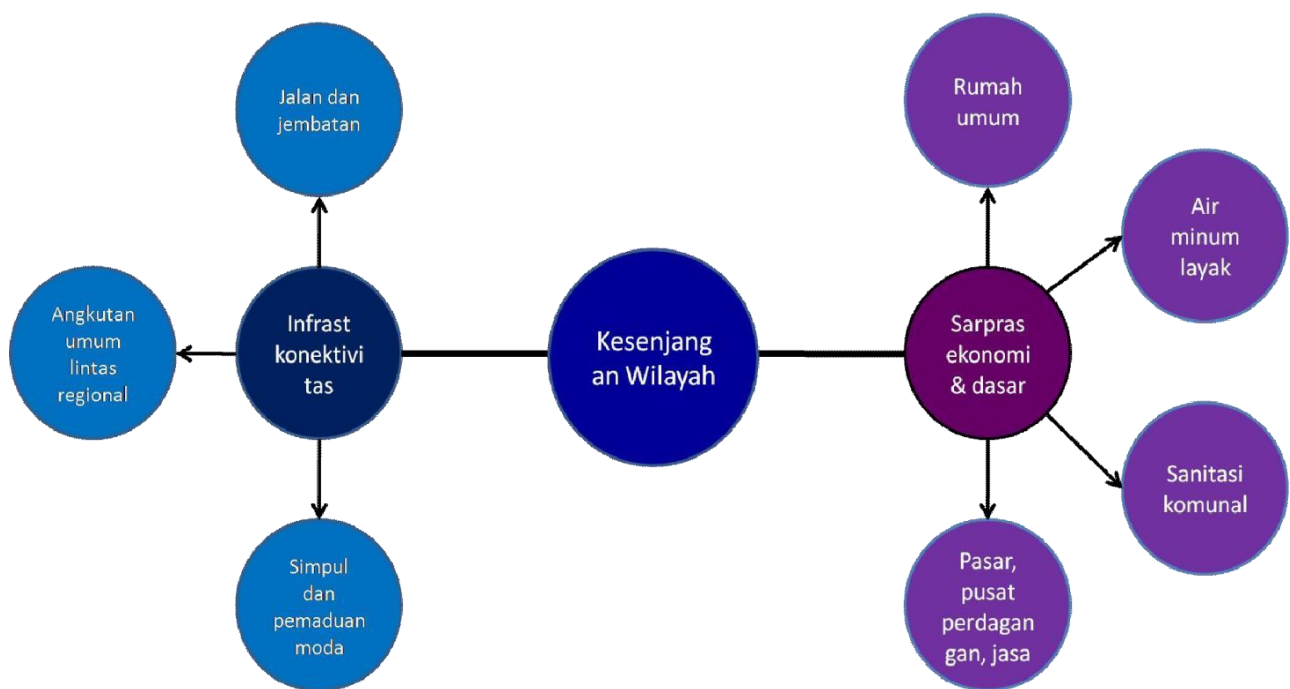
1. Meningkatnya pemerataan aksesibilitas wilayah, dengan indikator rasio jalan dalam kondisi baik dan Indeks Pelayanan Transportasi (dalam persen);
2. Meningkatnya pemerataan fasilitas dasar untuk masyarakat, dengan indikator berupa laju penurunan *backlog* rumah, cakupan pemenuhan air minum layak, cakupan pemenuhan sanitasi perkotaan, dan cakupan pemenuhan sanitasi perdesaan (dalam persen);
3. Meningkatnya pemerataan prasarana dan sarana ekonomi, dengan indikator indeks sarana ekonomi wilayah.

Kebijakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan dan sasaran tersebut diarahkan untuk penguatan konektivitas antar wilayah, didukung pemerataan prasarana dan sarana dasar dan ekonomi kecamatan dan pedesaan. Sedangkan strateginya meliputi:

1. Pembangunan sarana dan prasarana dalam wilayah ibukota kabupaten Buru Selatan;
2. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan yang menghubungkan Kota Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
3. Mengembangkan angkutan umum lintas regional, perkotaan, Kecamatan dan perdesaan;

4. Meningkatkan sarana dan prasarana simpul dan pemanduan moda transportasi diantaranya terminal, pelabuhan dan bandara;
5. Meningkatkan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
6. Meningkatkan jaringan air minum layak berbasis kawasan dan masyarakat;
7. Meningkatkan sanitasi layak melalui pengelolaan limbah komunal dan pengelolaan persampahan berbasis kawasan dan masyarakat;
8. Meningkatkan kualitas dan kapasitas pasar, pusat perdagangan, dan pusat jasa lainnya melalui penataan kawasan.

Berikut gambaran kebijakan sarana prasaran wilayah di Kabupaten Buru Selatan dalam diagram dan tabel.



Gambar 6.5. Sarana Prasarana Wilayah

**Tabel 6.5. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Strategi Beserta Indikator Kinerja
Pengurangan Kesenjangan Wilayah**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Daerah	Indeks Williamson	1. Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas Wilayah	1. Rasio jalan dalam kondisi baik (%) 2. Indeks Pelayanan Transportasi (%)	1. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan yang menghubungkan Kota, Kabupaten, Kecamatan dan Desa 2. Mengembangkan angkutan umum lintas regional, perkotaan, kecamatan dan perdesaan
		2. Meningkatnya Pemerataan Fasilitas Dasar Untuk Masyarakat	3. Laju Penurunan backlog rumah (%) 4. Cakupan pemenuhan air minum layak (%) 5. Cakupan pemenuhan sanitasi layak (%)	3. Meningkatkan sarana dan prasarana simpul dan pepaduan moda transportasi di antaranya terminal, pelabuhan, dan bandara 4. Meningkatkan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah 5. Meningkatkan jaringan air minum layak berbasis kawasan dan masyarakat
		3. Meningkatnya pemerataan prasarana dan sarana ekonomi	6. Indeks sarana ekonomi wilayah	6. Meningkatkan sanitasi layak melalui pengelolaan limbah komunal dan pengelolaan persampahan berbasis kawasan dan masyarakat 7. Meningkatkan kualitas dan kapasitas pasar pusat perdagangan dan pusat jasa lainnya melalui penataan kawasan

1.3. Artikulasi Campaign Programs (Program-Program Kampanye)

Perumusan program prioritas pembangunan daerah adalah tahap yang penting dalam perumusan kebijakan RPJMD, karena berkaitan dengan internalisasi tujuan dan rencana strategis Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam 5 (lima) tahun kedepan dalam perencanaan pembangunan daerah. Suatu program prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan janji-janji politik atau Campaign Programs (Program-Program Kampanye) Bupati dan dan Wakil Bupati terpilih.

Program-Program Kampanye Bupati dan dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Buru Selatan perlu ditransformasi kedalam substansi RPJMD pada level Sasaran/Strategi/Arah kebijakan/Program/kegiatan. Jika narasi program kampanye bersifat sangat mikro dan berada pada indikator output, maka didefinisikan kedalam level “kegiatan”, namun apabila sedikit lebih makro dan berada pada indikator outcome, maka dapat didefinisikan kedalam level “Program” dan selanjutnya disebut sebagai program prioritas. Program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan tahun 2021-2026 adalah **Program Desa Unggul** dengan programnya yaitu:

1. 5.000 lapangan Kerja Baru.
2. Desa Pintar, Desa Sehat.
3. 1.000 Perempuan Desa Mandiri.
4. Desa Produktif.
5. Nelayan dan Petani Unggul.

Tabel 6.6. Target Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026

Kode	Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Tahun Awal 2020	Target Kinerja						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggungja wab		
				2021	2022	2023	2024	2025	2026				
Meningkatkan Kemandirian Buru Selatan secara Berkelanjutan sebagai Kabupaten Yang Rukun, Adil, Sejahtera Berbasis Agro-marine													
1			Memperkuat sektor perhubungan untuk peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat										
1	1		Terkoneksinya sistim perhubungan sampai pada pusat aktifitas ekonomi masyarakat	Terkoneksinya sistim perhubungan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (374,86 km)	396,11	417,36	438,61	459,86	481,11	502,36		
					Panjang jalan dilalui roda 4 (545,06 Km)	566,31	587,56	608,81	630,06	651,31	672,56		
1	1	1	Membangun dan memaksimalkan sarana dan prasarana transportasi laut, darat secara memadai di Kabupaten Buru Selatan	Terbangunnya pelabuhan laut (unit)	Fasilitas sisi darat pelabuhan laut	5	5	5	5	5	5		
2			Pembentukan Pusat Pengembangan Produk Perikanan dan Pertanian Berbasis Potensi Unggulan Wilayah										
	1		Terciptanya klaster produk unggulan daerah berbasis agro marine	Adanya pusat unggulan pertanian dan perikanan	NTN (100,94%)	101,05	101,16	101,26	101,37	101,48	101,59		
					NTP (107,37%)	133,96	134,64	135,74	136,59	135,28	135,28		
					Kontribusi sektor Pertanian Terhadap PDRB (37,41%)	37,40	37,27	37,35	37,39	37,41	37,41		

2	1	1	Perancangan master plan cluster pengembangan produk perikanan dan pertanian	Tersedianya master plan pengembangan produk perikanan dan pertanian	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (2 kegiatan)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		
2	1	2	Peningkatan Kapasitas Petani, Nelayan (Pengetahuan Teknis, Teknologi, Manajemen Usaha)	Peningkatan Kegiatan Pelatihan Pertanian dan Perikanan	Kegiatan Pelatihan dan Bimtek Bagi Nelayan (Kegiatan)	1	1	1	1	1	1		
					Kegiatan Pelatihan dan Bimtek Bagi Petani (paket)	1	1	1	1	1	1		
2	1	3	Membentuk sentra produk perikanan dan pertanian Sesuai dengan kluster produk unggulan	Terbentuknya sentra produksi berbasis potensi sumberdaya alam wilayah	Produksi perikanan tangkap (ton)	10.541,2	10.689,5	10.866,9	11.077,3	11.125,2	10.785,29		
					Produksi perikanan budidaya (ton)	2,0	2,21	2,44	2,66	2,56	2,27		
					produktivitas palawija (ton/ha)	1.300	1.320,01	1342,52	1.364,18	1.354,74	1.324,93		
2	1	4	Membangun sarana dan prasarana secara proporsional dan berkelanjutan untuk mendukung klaster produk unggulan pengembangan di setiap wilayah	Terbangunnya sarana prasarana penunjang potensi unggulan daerah	Tersedianya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani (unit)	0	2	4	3	4	0		
					Tersedianya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian (unit)	4	0	0	0	0	0		

					Tersedianya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (5,6 Km)	5,6	10	10	10	10	10		
					Jumlah Bantuan Armada Tangkap dan Alat Penangkapan Ikan (24 paket	24	60	65	45	45	50		
					Jumlah Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan (paket)	5	5	5	5	5	5		
2	1	5	Penciptaan lapangan kerja	Terciptanya SDM berbasis potensi unggulan daerah	Menurunnya tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (2,31%)	5,91	6,02	5,95	5,85	5,82	5,93		
2	1	6	Membentuk Tatakelola Sistem Pemasaran Produk Unggulan Daerah	Terciptanya Tatakelola pemasaran produk unggulan daerah	Sistem Informasi Geografis Produk Unggulan Daerah (Ada, Tdk ada)	ada	ada	ada	Ada	ada	ada		
					Jumlah Pemasaran Produk Unggulan Berbasis Digital (.Jumlh Produk)	1	2	1	2	2	2		
3			Penguatan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan pusat pengembangan ekonomi kecamatan dengan mempertimbangkan geostrategic, geopolitik, dan potensi sumberdaya wilayah										
3	1		Pembentukan Dan Penguatan Tatakelola pusat usaha kecil mikro dan menengah sesuai potensi wilayah	Terbentuknya kelompok usaha mikro kecil dan menengah	Jumlah UMKM (480 unit)	527	557	587	617	647	677		

3	1	1	Membentuk Klaster Pengembangan UMKM berdasarkan potensi wilayah	Terbentuknya UMKM berbasis pengembangan bisnis agro-marine	Terwujudnya usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan prodak unggulan (paket)	1	1	1	1	1	1		
					Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMDA) (Rp M)	16	16,21	16,44	16,66	16,56	16,27		
3	1	2	Memfasilitasi tersedianya infrastruktur dan akses modal bagi pengembangan UMKM Produktif	Daya serap tenaga kerja	Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN %)	1,00	1,01	1,02	1,04	1,03	1,03		
3	1	3	Pengadaan tanah untuk peningkatan sarana prasarana pembangunan, perumahan layak huni.	Tersedianya lahan untuk perumahan swadaya dan perumahan khusus	Rasio permukiman layak huni (%)	85,44	87,66	89,21	90,58	89,64	87,63		
4			Pengembangan Sektor Pendidikan Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah										
4	1		Terciptanya SDM berbasis potensi unggulan daerah	Tersediannya SDM berbasis potensi Unggulan Daerah	Tingkat pengangguran terbuka (%)	5,91	6,02	5,95	5,85	5,82	5,93		
4	1	1	Pendidikan gratis dengan pola yang adil, profesional berorientasi output	Tingginya angka partisipasi sekolah	APS SD/MI (98,00)	98,3	98,32	98,34	98,36	98,38	98,4		
					APS SMP/MTs(95,21)	93,3	93,32	93,34	93,36	93,38	93,4		

4	1	2	Mengembangkan pendidikan anak usia dini (PAUD) untuk mencetak landasan yang kokoh bagi penguatan SDM	Tersedianya lembaga PAUD	Jumlah siswa pada jenjang TK/RA (siswa)	3098	3152	3222	3251	3297	3337		
4	1	3	Penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai, peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan pengembangan teknologi informasi	Tersedianya infrastruktur, SDM, dan pemanfaatan IT bidang pendidikan	Fasilitas pendidikan SD (%)	92,72	93,12	93,82	94,25	94,06	93,3		
					Fasilitas pendidikan SMP/MTs	92,4	92,88	93,72	94,47	94,32	92,2		
5			Perluasan Akses Kesehatan Yang Berkualitas Dan Terjangkau Bagi Masyarakat										
5	1		Tersedianya akses kesehatan bagi masyarakat	Terlayannya kebutuhan kesehatan masyarakat	Rasio Posyandu per satuan balita (/1.000) (16,14%)	12,26	12,52	12,71	12,88	12,77	12,53		
					Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (/1.000). (0,66%)	0,89	0,02	0,02	0,91	0,04	0,33		
					Rasio RS per satuan penduduk(/1.000) (0,03)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03		
					Rasio dokter per satuan penduduk (/1000) (0,20%)	0,19	0,23	0,24	0,24	0,23	0,23		
					Rasio tenaga medis per satuan penduduk (/1000) (7,39%)	6,28	6,42	6,75	7,1	7,03	6,59		

5	1	1	Pelayanan kesehatan gratis, disertai upaya penyediaan infrastruktur dan SDM kesehatan yang berkualitas sampai ke tingkat desa	Tersedianya infrastruktur, SDM dan pelayanan kesehatan sampai ketingkat desa	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (63,60%)	100	100	100	100	100	100		
5	1	2	Optimalisasi riset dan development di bidang kesehatan untuk mengantisipasi isu-isu kesehatan dan perkembangan penyakit menular	Terciptanya mekanisme riset dan development di bidang kesehatan	Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, DBD (50,00%)	100	100	100	100	100	100		
5	1	3	Meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan di seluruh wilayah Buru Selatan	Terciptanya Lingkungan bersih	Jumlah rumah tangga ber sanitasi (%)	49,01	49,1	50,92	52,93	52,76	50,3		
6			Penguatan dan Percepatan Pembangunan Pariwisata Melalui Penguatan Adat Budaya dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal sebagai Modal Pembangunan										
6	1		Pengembangan pembangunan pariwisata daerah berbasis kearifan lokal	Terciptanya destinasi wisata berbasis kearifan lokal	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (%)	25,2	25,25	25,3	25,35	25,33	25,27		

6	1	1	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Budaya Lokal Kabupaten Buru Selatan	Adanya peraturan daerah tentang Budaya Lokal	Perda Adat (dokumen)	10,2	10,45	10,88	11,3	11,18	10,62		
6	1	2	Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata	Peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan	Pengembangan objek wisata unggulan (jumlah)	1	1	1	1	1	1		
6	1	3	Pengembangan potensi pariwisata daerah secara profesional.	Terkelolanya potensi wisata lokal secara profesional	Tersedianya SDM profesional dibidang pariwisata (orang)	5	5	5	6	7	7		
6	1	4	Mendorong aktivitas keagamaan yang bersinergi dengan budaya lokal.	Jumlah kegiatan keagamaan yang bersinergi dengan budaya lokal	Rasio tempat ibadah per 1000 penduduk (1,79)	2,05	1,73	1,68	1,68	1,82	1,88		
6	1	5	Menggerakkan aktivitas kepemudaan di tingkat desa sesuai bakat dan kebutuhan, untuk mendukung pariwisata.	Meningkatnya minat pemuda di bidang olahrag, sosial seni, dan budaya	Jumlah kegiatan kepemudaan (Keg)	3	3	3	3	3	3		
6	1	6	Peningkatan harkat dan martabat serta kualitas hidup bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terpenuhinya sarana prasarana dan kebutuhan PMKS	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (unit)	1	1	1	1	1	1		

7			Reformasi Birokrasi Dan Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Profesional Dan Bersih Dari KKN									
7	1		Terwujudnya tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, bebas KKN	Terciptanya tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi (Skor) (N/A)	95	100	100	100	100	100	
7	1	1	Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah dalam menjalankan fungsinya secara efektif dan profesional	Tersedianya SDM ASN yang profesional	Pesentase kinerja ASN (%) (N/A)	90	100	100	100	100	100	
7	1	2	Mengoptimalkan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur serta kualitas layanan yang prima.	Terciptanya sistim akuntabilitas pemerintah yang berkualitas	Pesentase disiplin ASN (%) (N/A)	90	100	100	100	100	100	
7	1	3	Menyederhanakan alur birokrasi dengan sistem satu atap guna meningkatkan pelayanan publik yang efisien dan efektif	Terciptanya sistim pelayanan satu atap	Dokumen SOP pelayanan satu atap (N/A)	90	100	100	100	100	100	

7	1	4	Melakukan praktek pengelolaan keuangan daerah yang adil, transparan	Terciptanya sistim pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks persepsi korupsi (N/A)	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia		
---	---	---	---	--	-------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--	--

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan merupakan perspektif rencana penganggaran untuk lima tahun kedepan. Sebagai perspektif rencana, maka analisis harus didasarkan atas asumsi makro ekonomi dan kondisi sosial masyarakat yang diinginkan, dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Untuk itu, pada bagian ini akan diawali dengan proyeksi asumsi makro ekonomi, kondisi sosial masyarakat, pokok-pokok kebijakan fiskal, kemudian proyeksi pendapatan dan belanja daerah, dan terakhir perhitungan kerangka pendanaan yang akan menunjukkan potensi kapasitas riil keuangan daerah lima tahun kedepan. Terkait dengan kapasitas riil keuangan daerah, desain penganggaran sudah harus menunjukkan besaran anggaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan.

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan Daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih.

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah didasarkan atas asumsi makro ekonomi daerah, asumsi kondisi sosial masyarakat, dan asumsi pokok-pokok kebijakan fiskal. Ketiga asumsi ini memiliki korelasi secara langsung dan secara tidak langsung pada keuangan daerah ke depan, baik dari sisi pendapatan daerah maupun belanja daerah. Artinya, asumsi tersebut, selain akan menuntun proyeksi besaran pendapatan daerah, juga akan menentukan besarnya kebutuhan belanja daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan.

Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

2. Berbasis permasalahan serta isu strategis daerah.
3. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).
4. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.
5. Penerapan sub urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten.

7.1.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Pendapatan dan belanja daerah dalam perspektif rencana disajikan melalui hasil proyeksi pendapatan dan belanja daerah. Dasar utama dalam proyeksi pendapatan daerah mencakup empat determinan, yakni: (1) asumsi indikator makro ekonomi daerah; (2) kebijakan di bidang keuangan negara; (3) kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi keuangan daerah; serta (4) angka rata-rata pertumbuhan setiap obyek pendapatan daerah. Sedangkan untuk proyeksi belanja daerah, selain mengacu pada analisis asumsi indikator makro ekonomi daerah, juga mengacu pada analisis kebijakan. Berikut ini disajikan hasil proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Buru Selatan untuk periode 2021-2026 yang akan datang.

Untuk mendukung pelaksanaan program perangkat daerah, maka disusun proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 s/d Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 7.1. Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026

No	Uraian	Rata-rata Pertumbu han (%)	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	PENDAPATAN DAERAH	4.62	718,087,927,000	759,715,890,248	780,987,935,175	822,380,295,739	862,676,930,230	904,948,099,812
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.61	27,916,583,000	29,514,608,296	30,341,017,328	31,949,091,247	33,514,596,718	35,156,811,957
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	4.61	3,489,872,000	3,692,284,576	3,795,668,544	3,996,838,977	4,192,684,087	4,398,125,607
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4.62	3,522,753,000	3,705,936,156	3,809,702,368	4,011,616,594	4,208,185,807	4,414,386,912
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.50	3,438,219,000	3,637,635,702	3,739,489,502	3,937,682,445	4,130,628,885	4,333,029,700
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	4.62	17,465,739,000	18,478,751,862	18,996,156,914	20,002,953,231	20,983,097,939	22,011,269,738
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	4.62	675,171,344,000	714,331,281,952	734,332,557,847	773,252,183,413	811,141,540,400	850,887,475,879
1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.62	666,171,344,000	704,809,281,952	724,543,941,847	762,944,770,765	800,329,064,532	839,545,188,694
1.2.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	4.62	9,000,000,000	9,522,000,000	9,788,616,000	10,307,412,648	10,812,475,868	11,342,287,185
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.62	15,000,000,000	15,870,000,000	16,314,360,000	17,179,021,080	18,020,793,113	18,903,811,975
1.3.1	Pendapatan Hibah	4.62	2,000,000,000	2,116,000,000	2,175,248,000	2,290,536,144	2,402,772,415	2,520,508,263
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.14	13,000,000,000	13,754,000,000	14,139,112,000	14,888,484,936	15,618,020,698	16,383,303,712

Sumber: BPKAD Kabupaten Buru Selatan, 2021 (diolah)

Tabel 7. 2 Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	BELANJA DAERAH	4.10	743,084,625,119	764,635,525,822	783,751,413,967	825,435,001,350	866,706,751,418	908,139,548,598
2.1	BELANJA OPERASI	4.38	412,802,871,761	424,745,319,863	435,339,567,464	463,870,799,452	487,321,477,911	511,103,660,158
2.1.1	Belanja Pegawai	4.04	186,585,955,850	192,183,534,526	197,949,040,561	206,658,798,346	216,785,079,465	227,407,548,359
2.1.3	Belanja Barang/Jasa	4.79	199,497,415,096	205,040,699,498	209,143,808,488	228,117,881,139	240,016,666,601	251,778,722,479
2.1.4	Belanja Bunga	0.00	0	0	0	0	0	0
2.1.5	Belanja Subsidi	3.76	1,473,200,000	1,517,396,000	1,562,917,880	1,609,805,416	1,688,685,882	1,771,431,490
2.1.7	Belanja Hibah	3.52	8,180,629,965	8,426,048,864	8,578,830,330	8,836,195,240	9,269,168,807	9,723,358,078
2.1.8	Belanja Bantuan Sosial	3.66	17,065,670,850	17,577,640,976	18,104,970,205	18,648,119,311	19,561,877,157	20,422,599,752
2.2	BELANJA MODAL	3.77	177,000,160,358	182,310,165,169	187,779,470,124	193,412,854,228	202,994,509,800	212,940,875,076
2.2.1	Belanja Modal Tanah	3.76	10,711,720,000	11,033,071,600	11,364,063,748	11,704,985,660	12,278,529,958	12,880,177,926
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.76	51,252,491,351	52,790,066,092	54,373,768,074	56,004,981,117	58,749,225,191	61,627,937,226
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.79	58,430,756,478	60,183,679,172	61,989,189,548	63,848,865,234	67,081,885,345	70,368,897,727
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.76	56,286,154,179	57,974,738,804	59,713,980,969	61,505,400,398	64,519,165,017	67,680,604,103
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.74	319,038,350	328,609,501	338,467,786	348,621,819	365,704,288	383,258,094
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.54	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	13,000,000,000	13,637,000,000	14,017,330,291
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	7.54	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	13,000,000,000	13,637,000,000	14,017,330,291
2.4	BELANJA TRANSFER	3.49	143,281,593,000	147,580,040,790	150,632,376,380	155,151,347,671	162,753,763,707	170,077,683,074
2.4.1	Belanja Bantuan Keuangan	3.49	143,281,593,000	147,580,040,790	150,632,376,380	155,151,347,671	162,753,763,707	170,077,683,074
SURPLUS/DEFISIT		-20.5	-24,996,698,119	-4,919,635,574	-2,763,478,792	-3,054,705,611	-4,029,821,187	-3,191,448,786

Sumber: BPKAD Kabupaten Buru Selatan, 2021 (diolah)

Tabel 7.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
3	PEMBIAYAAN							
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.94	26,496,698,119	6,919,635,573	5,263,478,792	6,054,705,611	8,029,821,188	7,691,448,786
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.94	26,496,698,119	6,919,635,573	5,263,478,792	6,054,705,611	8,029,821,188	7,691,448,786
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan							
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan							
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah							
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman							
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah							
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	6.2	1,500,000,000	2,000,000,000	2,500,000,000	3,000,000,000	4,000,000,000	4,500,000,000
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan							
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintahan Daerah	6.2	1,500,000,000	2,000,000,000	2,500,000,000	3,000,000,000	4,000,000,000	4,500,000,000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang							
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah							
	PEMBIAYAAN NETTO	5.93	24,996,698,119	4,919,635,573	2,763,478,792	3,054,705,611	4,029,821,188	3,191,448,786
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)		0	0	0	0	0	0

Sumber: BPKAD Kabupaten Buru Selatan, 2021 (diolah)

Tabel 7. 4. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026.

No	Uraian	Realisasi 2019	Proyeksi						
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Penerimaan Pendapatan	711,012,421,983	649,936,435,171	718,087,927,000	759,715,890,248	780,987,935,175	822,380,295,739	862,676,930,230	904,948,099,812
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SILPA)	21,161,568,151	16,829,100,000	26,496,698,119	6,919,635,573	5,263,478,792	6,054,705,611	8,029,821,188	7,691,448,786
	Total Penerimaan	732,173,990,134	666,765,535,171	744,584,625,119	766,635,525,821	786,251,413,967	828,435,001,350	870,706,751,418	912,639,548,598
Dikurangi									
4	Belanja Operasi/ Belanja Tidak Langsung	538,187,475,964	536,214,857,192	412,802,871,761	424,745,319,863	435,339,567,464	463,870,799,452	487,321,477,911	511,103,660,158
5	Pengeluaran Pembiayaan	4,250,000,000	500,000,000	1,500,000,000	2,000,000,000	2,500,000,000	3,000,000,000	4,000,000,000	4,500,000,000
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan		189,736,514,170	130,050,677,979	330,281,753,358	339,890,205,958	348,411,846,504	361,564,201,898	379,385,273,507	397,035,888,440

Sumber: BPKAD Kabupaten Buru Selatan, 2021 (diolah)

Kebijakan pendanaan pembangunan daerah disusun dengan skala prioritas sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah kedalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Buru Selatan tahun 2021-2026, penyusunan kebijakan pendanaan pembangunan didasarkan pada tiga skala prioritas yaitu:keakan yaitu:

1. Prioritas I : Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Belanja Mengikat dan Wajib (BMW).
2. Prioritas II : Pemenuhan program pembangunan daerah.
3. Prioritas III : Pemenuhan program pembangunan lainnya.

Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% dan bidang kesehatan 10%. Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi dan misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat OPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan OPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi OPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan.

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti : belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan dengan mendahulukan pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

Tabel 7. 5. Alokasi Pendanaan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026

Rencana Alokasi	Baseline tahun 2020	Tahun																	
		2021			2022			2023			2024			2025			2026		
		Rp	Proporsi (%)	Pertumbuhan (%)	Rp	Proporsi (%)	Pertumbuhan (%)	Rp	Proporsi (%)	Pertumbuhan (%)	Rp	Proporsi (%)	Pertumbuhan (%)	Rp	Proporsi (%)	Pertumbuhan (%)	Rp	Proporsi (%)	Pertumbuhan (%)
BELANJA DAERAH PRIORITAS I	108,778,213,344	177,000,160,358	23.82	62.72	182,310,165,169	23.84	3.00	187,779,470,124	23.96	3.00	193,412,854,228	23.43	3.00	202,994,509,800	23.42	4.95	212,940,875,076	23.45	4.90
Belanja daerah Untuk Membiayai Program Pembangunan	108,778,213,344	177,000,160,358	23.82	62.72	182,310,165,169	23.84	3.00	187,779,470,124	23.96	3.00	193,412,854,228	23.43	3.00	202,994,509,800	23.42	4.95	212,940,875,076	23.45	4.90
BELANJA DAERAH PRIORITAS II	193,280,415,756	199,497,415,096	26.847	3.22	205,040,699,498	26.82	2.78	209,143,808,488	26.68	2.00	228,117,881,139	27.64	9.07	240,016,666,601	27.69	5.22	251,778,722,479	27.72	4.90
Belanja Barang/ Jasa OPD	193,280,415,756	199,497,415,096	26.847	3.22	205,040,699,498	26.82	2.78	209,143,808,488	26.68	2.00	228,117,881,139	27.64	9.07	240,016,666,601	27.69	5.22	251,778,722,479	27.72	4.90
BELANJA DAERAH PRIORITAS III	358,514,420,785	366,587,049,665	49.333	2.25	377,284,661,155	49.34	2.92	386,828,135,356	49.36	2.53	403,904,265,984	48.93	4.41	423,695,575,017	48.89	4.90	443,419,951,044	48.83	4.66
Belanja Pegawai	179,534,489,262	186,585,955,850	25.11	3.93	192,183,534,526	25.13	3.00	197,949,040,561	25.26	3.00	206,658,798,346	25.04	4.40	216,785,079,465	25.01	4.90	227,407,548,359	25.04	4.90
Belanja Subsidi	1,328,800,000	1,473,200,000	0.20	10.87	1,517,396,000	0.20	3.00	1,562,917,880	0.20	3.00	1,609,805,416	0.20	3.00	1,688,685,882	0.19	4.90	1,771,431,490	0.20	4.90
Belanja Hibah	37,870,511,000	8,180,629,965	1.10	(78.40)	8,426,048,864	1.10	3.00	8,578,830,330	1.09	1.81	8,836,195,240	1.07	3.00	9,269,168,807	1.07	4.90	9,723,358,078	1.07	4.90
Belanja Bantuan Sosial	10,151,846,132	17,065,670,850	2.30	68.10	17,577,640,976	2.30	3.00	18,104,970,205	2.31	3.00	18,648,119,311	2.26	3.00	19,561,877,157	2.26	4.90	20,422,599,752	2.25	4.40
Belanja Bantuan Keuangan	118,324,751,391	143,281,593,000	19.28	21.09	147,580,040,790	19.30	3.00	150,632,376,380	19.22	2.07	155,151,347,671	18.80	3.00	162,753,763,707	18.78	4.90	170,077,683,074	18.73	4.50
Belanja Tidak Terduga	11,304,023,000	10,000,000,000	1.35	(11.54)	10,000,000,000	1.31	-	10,000,000,000	1.28	-	13,000,000,000	1.57	30.00	13,637,000,000	1.57	4.90	14,017,330,291	1.54	2.79
	660,573,049,885	743,084,625,119	100	12.49	764,635,525,822	100.00	2.90	783,751,413,967	100.00	2.50	825,435,001,350	100.00	5.32	866,706,751,418	100.00	5.00	908,139,548,598	100.00	4.78

Sumber: BPKAD Kabupaten Buru Selatan, 2021 (diolah)

Tabel 7. 6. Alokasi Pendanaan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF											
				2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1.00	2	4	5	6											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				131,912,060,550		135,025,301,761		138,400,934,305		145,325,849,770		152,592,142,259		160,221,749,372
1	DINAS PENDIDIKAN				131,912,060,550		135,025,301,761		138,400,934,305		145,325,849,770		152,592,142,259		160,221,749,372
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1.00	82,919,666,000	1.00	84,578,059,320	1.00	86,692,510,803	1.00	91,027,136,343.15	1.00	95,578,493,160	1.00	100,357,417,818
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni SD/MI	%	97,96	48,992,394,550	98,06	49,972,242,441	98,15	51,221,548,502	98,25	53,782,625,927.13	98,35	56,471,757,223	98,45	59,295,345,085
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,06	-	8,18	85,000,000	8,30	87,125,000	8,43	92,352,500	8,55	96,970,125	8,68	101,818,631
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	95,63	-	96,10	250,000,000	96,58	256,250,000	97,07	271,625,000	97,55	285,206,250	98,04	299,466,563
5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Rasio Ketersediaan Sekolah SMP/MTs	%	94,71	-	94,94	65,000,000	95,18	66,625,000	95,42	70,622,500	95,66	74,153,625	95,90	77,861,306
6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,70	-	12,71	75,000,000	12,72	76,875,000	12,73	81,487,500	12,74	85,561,875	12,75	89,839,969

1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				139,214,177,012		142,248,460,552		145,804,672,066		154,051,053,604		161,753,606,285		169,841,286,599
2	DINAS KESEHATAN, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				91,453,652,318		93,532,725,364		95,871,043,498		101,620,743,608		106,701,780,789		112,036,869,828
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1.00	26,254,065,000	1.00	26,779,146,300	1.00	27,448,624,958	1.00	29,095,542,455	1.00	30,550,319,578	1.00	32,077,835,557
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satu penduduk /1.000	Rasio	0,69	64,416,717,318	0,73	65,705,051,664	0,76	67,347,677,956	0,80	71,388,538,633	0,84	74,957,965,565	0,88	78,705,863,843
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio tenaga medis per satuan penduduk /1.000	Rasio	7,76	320,000,000	8,15	326,400,000	8,55	334,560,000	8,98	354,633,600	9,43	372,365,280	9,90	390,983,544
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	66,60	462,870,000	66,93	472,127,400	67,27	483,930,585	67,61	512,966,420	67,94	538,614,741	68,28	565,545,478
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS)	%	60,80		61,11	250,000,000	61,41	256,250,000	61,72	269,062,500	62,03	282,515,625	62,34	296,641,406
3	RSUD Dr. SALIM ALKATIRI				47,760,524,694		48,715,735,188		49,933,628,568		52,430,309,996		55,051,825,496		57,804,416,771
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1.00	17,482,668,466	1.00	17,832,321,835	1.00	18,278,129,881	1.00	19,192,036,375	1.00	20,151,638,194	1.00	21,159,220,104
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk /1.000	Rasio	0,03	30,277,856,228	0,03	30,883,413,353	0,03	31,655,498,686	0,03	33,238,273,621	0,03	34,900,187,302	0,03	36,645,196,667

1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				73,287,630,350		75,499,382,957		77,386,867,531		81,256,210,907		85,319,021,453		89,584,972,525
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				73,287,630,350		75,499,382,957		77,386,867,531		81,256,210,907		85,319,021,453		89,584,972,525
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1.00	3,626,022,294	1.00	3,698,542,740	1.00	3,791,006,308	1.00	3,980,556,624	1.00	4,179,584,455	1.00	4,388,563,678
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas Genangan Banjir	Ha	0.00	3,852,453,655	0.00	3,929,502,728	0.00	4,027,740,296	0.00	4,229,127,311	0.00	4,440,583,677	0.00	4,662,612,861
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga pengguna Air Bersih	%	72.88	5,694,014,928	74.22	5,807,895,227	75.56	5,953,092,607	76.90	6,250,747,238	78.24	6,563,284,599	79.58	6,891,448,829
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Timbulan sampah yang ditangani	%	100		100.00	287,000,000	100.00	294,175,000	100.00	308,883,750	100.00	324,327,938	100.00	340,544,334
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga bersanitasi	%	76.78	2,917,519,751	77.48	2,975,870,146	78.17	3,050,266,900	78.88	3,202,780,245	79.59	3,362,919,257	80.30	3,531,065,220
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	100	4,593,338,059	100.00	4,685,204,820	100.00	4,802,334,941	100.00	5,042,451,688	100.00	5,294,574,272	100.00	5,559,302,986
7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Rasio	14.23	2,162,377,883	14.91	2,205,625,441	15.58	2,260,766,077	16.26	2,373,804,381	16.94	2,492,494,600	17.16	2,617,119,330
8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	Rasio	45.15	11,032,860,755	47.30	11,253,517,970	49.45	11,534,855,919	51.60	12,111,598,715	53.75	12,717,178,651	55.90	13,353,037,584
9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	Rasio	45.15	-	47.30	204,000,000	49.45	209,100,000	51.60	219,555,000	53.75	230,532,750	55.90	242,059,388

10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	Km	251.62	38,854,093,025	257.72	39,631,174,886	263.89	40,621,954,258	270.03	42,653,051,971	276.17	44,785,704,569	282.30	47,024,989,797
11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	66.75	-	69.93	255,000,000	73.11	261,375,000	75.28	274,443,750	79.46	288,165,938	82.64	302,574,234
12	PROGRAM PENATAAN RUANG	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Rasio	332.36	554,950,000	353.61	566,049,000	374.86	580,200,225	396.11	609,210,236	417.36	639,670,748	438.61	671,654,285
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				3,556,167,000		4,190,290,340		4,295,047,599		4,509,799,978		4,735,289,977		4,972,054,476
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN				3,556,167,000		4,190,290,340		4,295,047,599		4,509,799,978		4,735,289,977		4,972,054,476
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1.00	2,868,097,000	1.00	2,925,458,940	1.00	2,998,595,414	1.00	3,148,525,184	1.00	3,305,951,443	1.00	3,471,249,016
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	49.04	-	49.53	198,000,000	50.02	202,950,000	50.52	213,097,500	51.03	223,752,375	51.54	234,939,994
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase permukiman yang tertata	%	95.69	-	95.90	245,000,000	96.11	251,125,000	96.30	263,681,250	96.49	276,865,313	96.66	290,708,578
4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase lingkungan permukiman kumuh	%	4.31	481,330,000	4.10	490,956,600	3.89	503,230,515	3.70	528,392,041	3.51	554,811,643	3.34	582,552,225
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, ARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	74.48	206,740,000	75.15	210,874,800	75.83	216,146,670	76.51	226,954,004	77.20	238,301,704	77.90	250,216,789

6	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rasio permukiman layak huni	Rasio	0.90	-	0.95	120,000,000	1.00	123,000,000	1.05	129,150,000	1.10	135,607,500	1.15	142,387,875
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				7,125,613,000		3,643,333,460		3,734,416,797		4,321,137,636		4,537,194,518		4,764,054,244
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				3,440,523,000		3,643,333,460		3,734,416,797		4,321,137,636		4,537,194,518		4,764,054,244
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1.00	2,791,147,000	1.00	2,846,969,940	1.00	2,918,144,189	1.00	3,064,051,398	1.00	3,217,253,968	1.00	3,378,116,666
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	%	1.00	649,376,000	1.00	662,363,520	1.00	678,922,608	1.00	1,112,868,738.40	1.00	1,168,512,175	1.00	1,226,937,784
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	0.23	-	0.23	134,000,000	0.23	137,350,000	0.23	144,217,500	0.23	151,428,375	0.23	158,999,794
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				3,685,090,000		3,758,791,800		3,852,761,595		4,045,399,675		4,247,669,658		4,460,053,141
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1.00	3,025,160,000	1.00	3,085,663,200	1.00	3,162,804,780	1.00	3,320,945,019	1.00	3,486,992,270	1.00	3,661,341,883
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Resiko Bencana	%	0.0065	659,930,000	0.0056	673,128,600	0.0053	689,956,815	0.0051	724,454,656	0.0046	760,677,389	0.0039	798,711,258

1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				4,540,079,600		4,745,881,192		4,864,528,222		5,107,754,633		5,363,142,365		5,631,299,483
8	DINAS SOSIAL				4,540,079,600		4,745,881,192		4,864,528,222		5,107,754,633		5,363,142,365		5,631,299,483
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1.00	3,691,940,100	1.00	3,765,778,902	1.00	3,859,923,375	1.00	4,052,919,543	1.00	4,255,565,520	1.00	4,468,343,796
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100.00	107,548,300	100.00	109,699,266	100.00	112,441,748	100.00	118,063,835	100.00	123,967,027	100.00	130,165,378
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	100	82,181,513	100	83,825,143	100	85,920,772	100.00	90,216,810	100.00	94,727,651	100	99,464,034
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	62.41	625,087,145	65.53	752,588,888	68.81	771,403,610	72.25	809,973,791	75.86	850,472,480	79.65	892,996,104
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	33,322,542	100	33,988,993	100	34,838,718	100.00	36,580,654	100.00	38,409,686	100	40,330,171

2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				69,166,000		588,549,320		603,263,053		633,426,206		665,097,516		698,352,392
9	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				69,166,000		588,549,320		603,263,053		633,426,206		665,097,516		698,352,392
1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	1.00	69,166,000	1.00	70,549,320	1.00	72,313,053	1.00	75,928,706	1.00	79,725,141	1.00	83,711,398
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat pengangguran terbuka	%	1.00	-	1.00	120,000,000	1.00	123,000,000	1.00	129,150,000	1.00	135,607,500	1.00	142,387,875
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	1.00	-	1.00	100,000,000	1.00	102,500,000	1.00	107,625,000	1.00	113,006,250	1.00	118,656,563
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penduduk yang bekerja	%	1.00	-	1.00	298,000,000	1.00	305,450,000	1.00	320,722,500	1.00	336,758,625	1.00	353,596,556
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				50,850,000		648,867,000		665,088,675		698,343,109		733,260,264		769,923,277
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				50,850,000		648,867,000		665,088,675		698,343,109		733,260,264		769,923,277
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	1.00	-	1.00	150,000,000	1.00	153,750,000	1.00	161,437,500	1.00	169,509,375	1.00	177,984,844
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio KDRT	%	0.00	-	0.00	100,000,000	0.00	102,500,000	0.00	107,625,000	0.00	113,006,250	0.00	118,656,563

3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Partisipasi perempuan di lembaga swasta / partisipasi angkatan kerja perempuan	%	57.62	-	57.73	167,000,000	57.85	171,175,000	57.96	179,733,750	58.08	188,720,438	58.19	198,156,459
4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	100	50,850,000	100	51,867,000	100	53,163,675	100.00	55,821,859	100.00	58,612,952	100	61,543,599
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	100	-	100	100,000,000	100.00	102,500,000	100.00	107,625,000	100.00	113,006,250	100	118,656,563
6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	100	-	100	80,000,000	100.00	82,000,000	100.00	86,100,000	100.00	90,405,000	100	94,925,250
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETAHANAN PANGAN				5,390,117,000		5,497,919,340		5,635,367,324		5,917,135,690		6,212,992,474		6,523,642,098
11	DINAS KETAHANAN PANGAN				5,390,117,000		5,497,919,340		5,635,367,324		5,917,135,690		6,212,992,474		6,523,642,098
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1.00	2,965,538,443	1.00	3,024,849,212	1.00	3,100,470,442	1.00	3,255,493,964	1.00	3,418,268,662	1.00	3,589,182,096
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	kkal/ka p/hr	64.07	1,506,236,700	65.05	1,536,361,434	75.05	1,574,770,470	80.05	1,653,508,993	88.10	1,736,184,443	100.00	1,822,993,665

3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYRAKAT	Ketersediaan pangan utama	%	0.94	756,322,425	1.34	771,448,874	1.74	790,735,095	2.14	830,271,850	2.54	871,785,443	2.94	915,374,715
4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Ketersediaan pangan utama	%	0.94	93,898,269	1.34	95,776,234	1.74	98,170,640	2.14	103,079,172	2.54	108,233,131	2.94	113,644,787
5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	100	68,121,163	100	69,483,586	100	71,220,676	100.00	74,781,710	100.00	78,520,795	100	82,446,835
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				11,638,850,000		12,519,627,000		12,832,617,675		13,474,248,559		14,147,960,987		14,385,810,219
12	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN				11,638,850,000		12,519,627,000		12,832,617,675		13,474,248,559		14,147,960,987		14,385,810,219
1	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Luas Lahan bersertifikat	%	0.02	-	0.04	110,000,000	0.07	112,750,000	0.13	118,387,500	0.25	124,306,875	0.47	130,522,219
2	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	100.00	-	100.00	100,000,000	100.00	102,500,000	100.00	107,625,000	100.00	113,006,250	100.00	118,656,563
3	PRGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Luas Lahan bersertifikat	%	0.02	11,638,850,000	0.04	11,871,627,000	0.07	12,168,417,675	0.13	12,776,838,559	0.25	13,415,680,487	0.47	13,616,915,694
4	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Luas Lahan bersertifikat	%	0.02	-	0.04	118,000,000	0.07	120,950,000	0.13	126,997,500	0.25	133,347,375	0.47	140,014,744
5	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Luas Lahan bersertifikat	%	0.02	-	0.04	100,000,000	0.07	102,500,000	0.13	107,625,000	0.25	113,006,250	0.47	118,656,563
6	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Luas Lahan bersertifikat	%	0.02	-	0.04	80,000,000	0.07	82,000,000	0.13	86,100,000	0.25	90,405,000	0.47	94,925,250

7	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Luas Lahan bersertifikat	%	0.02	-	0.04	70,000,000	0.07	71,750,000	0.13	75,337,500	0.25	79,104,375	0.47	83,059,594
8	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Luas Lahan bersertifikat	%	0.02	-	0.04	70,000,000	0.07	71,750,000	0.13	75,337,500	0.25	79,104,375	0.47	83,059,594
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				5,876,872,400		7,204,409,848		7,384,520,094		7,753,746,099		8,141,433,404		8,548,505,074
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				5,876,872,400		7,204,409,848		7,384,520,094		7,753,746,099		8,141,433,404		8,548,505,074
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1.00	5,107,826,800	1.00	5,209,983,336	1.00	5,340,232,919	1.00	5,607,244,565	1.00	5,887,606,794	1.00	6,181,987,133
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Kabupaten/Kota	ada/tidak ada	tidak ada	-	ada	600,000,000	ada	615,000,000	ada	645,750,000	ada	678,037,500	ada	711,939,375
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN /ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	ada/tidak ada	tidak ada	64,287,200	ada	65,572,944	ada	67,212,268	ada	70,572,881	ada	74,101,525	ada	77,806,601
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota	ada/tidak ada	tidak ada	-	ada	120,000,000	ada	123,000,000	ada	129,150,000	ada	135,607,500	ada	142,387,875
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	78.00	-	80.00	80,000,000	82.00	82,000,000	84.00	86,100,000	86.00	90,405,000	88.00	94,925,250

		Kabupaten/Kota													
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	78.00	-	80.00	120,000,000	82.00	123,000,000	84.00	129,150,000	86.00	135,607,500	88.00	142,387,875
7	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota (jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina)	Orang	0.00	-	2.00	100,000,000	3.00	102,500,000	4.00	107,625,000	5.00	113,006,250	6.00	118,656,563
8	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	ada/tidak ada	tidak ada	-	tidak ada	100,000,000	tidak ada	102,500,000	ada	107,625,000	ada	113,006,250	ada	118,656,563
9	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase cakupan area pelayanan	%	0.40	-	1.00	90,000,000	2.00	92,250,000	3.00	96,862,500	4.00	101,705,625	5.00	106,790,906

10	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota	%	50.00	704,758,400	60.00	718,853,568	70.00	736,824,907	80.00	773,666,153	85.00	812,349,460	90.00	852,966,933
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				5,414,111,000		5,802,393,220		5,947,453,051		6,244,825,703		6,557,066,988		6,884,920,338
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				5,414,111,000		5,802,393,220		5,947,453,051		6,244,825,703		6,557,066,988		6,884,920,338
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1.00	3,350,163,900	1.00	3,417,167,178	1.00	3,502,596,357	1.00	3,677,726,175	1.00	3,861,612,484	1.00	4,054,693,108
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	%	94.58	1,707,522,100	95.00	1,741,672,542	95.85	1,785,214,356	97.00	1,874,475,073	97.42	1,968,198,827	98.26	2,066,608,768
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio bayi berakte kelahiran	%	77.24	339,475,000	78.12	346,264,500	79.39	354,921,113	80.02	372,667,168	80.62	391,300,527	81.23	410,865,553
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINSTRASI KEPENDUDUKAN	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah/ belum	sudah	16,950,000	sudah	17,289,000	sudah	17,721,225	sudah	18,607,286	sudah	19,537,651	sudah	20,514,533
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten	ada/tidak ada	ada	-	ada	280,000,000	ada	287,000,000	ada	301,350,000	ada	316,417,500	ada	332,238,375
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				4,345,874,000		4,702,791,480		4,820,361,267		5,061,379,330		5,314,448,297		5,580,170,712
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				4,345,874,000		4,702,791,480		4,820,361,267		5,061,379,330		5,314,448,297		5,580,170,712
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1.00	3,151,562,600	1.00	3,214,593,852	1.00	3,294,958,698	1.00	3,459,706,633	1.00	3,632,691,965	1.00	3,814,326,563

2	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	6.48	-	6.80	170,000,000	7.14	174,250,000	7.50	182,962,500	7.87	192,110,625	8.27	201,716,156
3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	6.48	-	6.80	100,000,000	7.14	102,500,000	7.50	107,625,000	7.87	113,006,250	8.27	118,656,563
4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	100	892,513,000	100	910,363,260	100	933,122,342	100	979,778,459	100.00	1,028,767,382	100	1,080,205,751
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat /LPM	%	100	301,798,400	100	307,834,368	100	315,530,227	100.00	331,306,739	100.00	347,872,075	100	365,265,679
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				2,161,915,000		2,653,153,300		2,719,482,133		2,855,456,239		2,998,229,051		3,148,140,504
16	DINAS KESEHATAN, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				2,161,915,000		2,653,153,300		2,719,482,133		2,855,456,239		2,998,229,051		3,148,140,504
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0.44	-	0.46	300,000,000	0.49	307,500,000	0.51	322,875,000	0.54	339,018,750	0.56	355,969,688
2	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan peserta KB aktif	%	54.77	2,161,915,000	55.05	2,205,153,300	55.32	2,260,282,133	55.60	2,373,296,239	55.88	2,491,961,051	56.16	2,616,559,104
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	30.55	-	30.70	148,000,000	30.86	151,700,000	31.01	159,285,000	31.17	167,249,250	31.32	175,611,713
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				2,940,958,900		2,999,778,078		3,074,772,530		3,228,511,156		3,389,936,714		3,559,433,550
17	DINAS PERHUBUNGAN				2,940,958,900		2,999,778,078		3,074,772,530		3,228,511,156		3,389,936,714		3,559,433,550

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1.00	2,564,724,000	1.00	2,616,018,480	1.00	2,681,418,942	1.00	2,815,489,889	1.00	2,956,264,384	1.00	3,104,077,603
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat	%	9.42	108,340,950	9.89	110,507,769	10.38	113,270,463	10.90	118,933,986	11.45	124,880,686	12.02	131,124,720
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah arus penumpang angkutan umum Kapal Laut dan Very	Orang	13.645	267,893,950	14.327	273,251,829	15.043	280,083,125	15.796	294,087,281	16.585	308,791,645	17.415	324,231,227
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				2,887,224,000		2,944,968,480		3,018,592,692		3,169,522,327		3,327,998,443		3,494,398,365
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				2,887,224,000		2,944,968,480		3,018,592,692		3,169,522,327		3,327,998,443		3,494,398,365
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1.00	2,381,522,700	1.00	2,429,153,154	1.00	2,489,881,983	1.00	2,614,376,082	1.00	2,745,094,886	1.00	2,882,349,630
2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	62.72	309,059,300	72.72	315,240,486	77.72	323,121,498	82.72	339,277,573	87.72	356,241,452	92.72	374,053,524
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah Sistim Informasi Manajemen / SIM	ada/tidak ada	ada	196,642,000	ada	200,574,840	ada	205,589,211	ada	215,868,672	ada	226,662,105	ada	237,995,210
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				2,853,983,000		3,351,062,660		3,434,839,227		3,606,581,188		3,786,910,247		3,976,255,760
19	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				2,853,983,000		3,351,062,660		3,434,839,227		3,606,581,188		3,786,910,247		3,976,255,760
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		2,443,511,600		2,492,381,832		2,554,691,378		2,682,425,947		2,816,547,244		2,957,374,606

2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi aktif	%	70.00	-	72.10	75,000,000	74.26	76,875,000	76.49	80,718,750	78.79	84,754,688	81.15	88,992,422
3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	%	70.00	-	72.10	65,000,000	74.26	66,625,000	76.49	69,956,250	78.79	73,454,063	81.15	77,126,766
4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi aktif	%	70.00	-	72.10	50,000,000	74.26	51,250,000	76.49	53,812,500	78.79	56,503,125	81.15	59,328,281
5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi aktif	%	70.00	330,571,400	72.10	337,182,828	74.26	345,612,399	76.49	362,893,019	78.79	381,037,670	81.15	400,089,553
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	%	70.00	-	72.10	120,000,000	74.26	123,000,000	76.49	129,150,000	78.79	135,607,500	81.15	142,387,875
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	100.00	79,900,000	100.00	81,498,000	100.00	83,535,450	100.00	87,712,223	100.00	92,097,834	100.00	96,702,725
8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	100.00	-	100.00	130,000,000	100.00	133,250,000	100.00	139,912,500	100.00	146,908,125	100.00	154,253,531
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				3,294,977,000		3,940,876,540		4,039,398,454		4,241,368,376		4,453,436,795		4,676,108,635
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				3,294,977,000		3,940,876,540		4,039,398,454		4,241,368,376		4,453,436,795		4,676,108,635
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1.00	2,773,731,000	1.00	2,829,205,620	1.00	2,899,935,761	1.00	3,044,932,549	1.00	3,197,179,176	1.00	3,357,038,135
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	Jenis	20.00	-	20.00	340,000,000	21.00	348,500,000	21.00	365,925,000	21.00	384,221,250	22.00	403,432,313

3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	PMDN	252	128,796,000	277	131,371,920	319	134,656,218	383	141,389,029	479	148,458,480	633	155,881,404
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Lama proses perijinan	Hari	2.00	392,450,000	2.00	400,299,000	2.00	410,306,475	2.00	430,821,799	2.00	452,362,889	2.00	474,981,033
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	Jenis	20.00	-	20.00	140,000,000	21.00	143,500,000	21.00	150,675,000	21.00	158,208,750	22.00	166,119,188
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	ada/tidak ada	ada	-	ada	100,000,000	ada	102,500,000	ada	107,625,000	ada	113,006,250	ada	118,656,563
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				3,913,934,000		4,192,212,680		4,297,017,997		4,511,868,897		4,737,462,342		4,974,335,459
21	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				3,913,934,000		4,192,212,680		4,297,017,997		4,511,868,897		4,737,462,342		4,974,335,459
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1.00	2,752,621,600	1.00	2,807,674,032	1.00	2,877,865,883	1.00	3,021,759,177	1.00	3,172,847,136	1.00	3,331,489,493
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	100.00	661,312,400	100.00	674,538,648	100.00	691,402,114	100.00	725,972,220	100.00	762,270,831	100	800,384,372
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga	%	100.00	500,000,000	100.00	510,000,000	100.00	522,750,000	100.00	548,887,500	100.00	576,331,875	100	605,148,469
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	%	100.00	-	100	200,000,000	100.00	205,000,000	100.00	215,250,000	100.00	226,012,500	100.00	237,313,125
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				2,202,449,000		2,291,497,980		2,348,785,430		2,466,224,701		2,589,535,936		2,719,012,733
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH				2,202,449,000		2,291,497,980		2,348,785,430		2,466,224,701		2,589,535,936		2,719,012,733

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1.00	2,082,610,650	1.00	2,124,262,863	1.00	2,177,369,435	1.00	2,286,237,906	1.00	2,400,549,802	1.00	2,520,577,292
2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	%	2.36	119,838,350	2.48	122,235,117	2.60	125,290,995	2.73	131,555,545	2.87	138,133,322	3.02	145,039,988
3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	%	100	-	100	45,000,000	100	46,125,000	100.00	48,431,250	100.00	50,852,813	100	53,395,453
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				-		265,000,000		271,625,000		285,206,250		299,466,563		314,439,891
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH				-		265,000,000		271,625,000		285,206,250		299,466,563		314,439,891
1	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	orang	2.00	-	2.00	80,000,000	2.00	82,000,000	2.00	86,100,000	2.00	90,405,000	2.00	94,925,250
2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	100	-	100	75,000,000	100	76,875,000	100.00	80,718,750	100.00	84,754,688	100	88,992,422
3	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	100	-	100	110,000,000	100	112,750,000	100.00	118,387,500	100.00	124,306,875	100	130,522,219
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				6,431,999,000		6,738,638,980		6,907,104,955		7,252,460,202		7,615,083,212		7,995,837,373

24	DINAS PERIKANAN				6,431,999,000		6,738,638,980		6,907,104,955		7,252,460,202		7,615,083,212		7,995,837,373
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1.00	2,992,422,350	1.00	3,052,270,797	1.00	3,128,577,567	1.00	3,285,006,445	1.00	3,449,256,768	1.00	3,621,719,606
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	ton	15.008	2,886,124,550	15.083	2,943,847,041	15.158	3,017,443,217	15.234	3,168,315,378	15.310	3,326,731,147	15.387	3,493,067,704
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	ton	3.065	193,444,700	3.081	197,313,594	3.096	202,246,434	3.111	212,358,756	3.127	222,976,693	3.143	234,125,528
4	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan bina kelompok nelayan	%	60.00	-	68.00	178,000,000	75.00	182,450,000	80.00	191,572,500	85.00	201,151,125	90.00	211,208,681
5	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Nilai tukar nelayan	%	117.00	360,007,400	118.00	367,207,548	119.00	376,387,737	120.00	395,207,124	121.00	414,967,480	122.00	435,715,854
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				2,455,360,864		3,425,468,081		3,511,104,783		3,686,660,022		3,870,993,024		4,064,542,675
25	DINAS PARIWISATA				2,455,360,864		3,425,468,081		3,511,104,783		3,686,660,022		3,870,993,024		4,064,542,675
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1.00	2,033,918,864	1.00	2,074,597,241	1.00	2,126,462,172	1.00	2,232,785,281	1.00	2,344,424,545	1.00	2,461,645,772
2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kunjungan wisata	%	75.62	358,600,000	76.00	865,772,000	76.36	887,416,300	76.76	931,787,115	77.15	978,376,471	77.53	1,027,295,294
3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PAD sektor pariwisata	%	45.06	62,842,000	45.29	64,098,840	45.52	65,701,311	45.74	68,986,377	45.97	72,435,695	46.20	76,057,480

4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	PAD sektor pariwisata	%	45.06	-	45.29	221,000,000	45.52	226,525,000	45.74	237,851,250	45.97	249,743,813	46.20	262,231,003
5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Lama kunjungan Wisata	Kali	52.00	-	52.00	200,000,000	52.00	205,000,000	52.00	215,250,000	52.00	226,012,500	52.00	237,313,125
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					10,585,815,685		11,042,531,999		11,318,595,299		11,884,525,064		12,478,751,317	13,102,688,883
26	DINAS PERTANIAN				10,585,815,685		11,042,531,999		11,318,595,299		11,884,525,064		12,478,751,317		13,102,688,883
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1.00	5,874,389,000	1.00	5,991,876,780	1.00	6,141,673,700	1.00	6,448,757,384	1.00	6,771,195,254	1.00	7,109,755,016
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kontribusi sektor pertanian /perkebunan terhadap PDRB	%	36.78	1,903,001,085	36.96	1,941,061,107	37.15	1,989,587,634	37.33	2,089,067,016	37.52	2,193,520,367	37.71	2,303,196,385
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kontribusi sektor pertanian /perkebunan terhadap PDRB	%	36.78	2,586,880,000	36.96	2,638,617,600	37.15	2,704,583,040	37.33	2,839,812,192	37.52	2,981,802,802	37.71	3,130,892,942
4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan bina kelompok petani	%	46.79	155,010,000	55.04	158,110,200	63.38	162,062,955	71.72	170,166,103	80.06	178,674,408	88.40	187,608,128
5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan bina kelompok petani	%	46.79	-	55.04	145,000,000	63.38	148,625,000	71.72	156,056,250	80.06	163,859,063	88.40	172,052,016

6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Nilai tukar petani	%	140.29	-	140	100,000,000	141.69	102,500,000	142.40	107,625,000	143.11	113,006,250	143.83	118,656,563
7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok petani	%	46.79	66,535,600	55.04	67,866,312	63.38	69,562,970	71.72	73,041,118	80.06	76,693,174	88.40	80,527,833
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				7,652,455,984		7,805,505,104		8,000,642,731		8,400,674,868		8,820,708,611		9,261,744,042
27	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				7,652,455,984		7,805,505,104		8,000,642,731		8,400,674,868		8,820,708,611		9,261,744,042
1	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYAT DAN EKOSISTEMNYA	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	Rasio	0.26	7,652,455,984	0.26	7,805,505,104	0.26	8,000,642,731	0.26	8,400,674,868	0.26	8,820,708,611	0.26	9,261,744,042
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				3,290,945,000		3,556,763,900		3,645,682,998		3,827,967,147		4,019,365,505		4,220,333,780
28	DINAS PERDAGANGAN				3,290,945,000		3,556,763,900		3,645,682,998		3,827,967,147		4,019,365,505		4,220,333,780
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1.00	2,685,455,000	1.00	2,739,164,100	1.00	2,807,643,203	1.00	2,948,025,363	1.00	3,095,426,631	1.00	3,250,197,962
2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Lama proses perijinan	Hari	2.00	-	2.00	100,000,000	2.00	102,500,000	2.00	107,625,000	2.00	113,006,250	2.00	118,656,563
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	7.64	191,105,000	7.68	194,927,100	7.71	199,800,278	7.75	209,790,291	7.79	220,279,806	7.83	231,293,796

4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	20.18	136,300,000	21.19	139,026,000	22.25	142,501,650	23.36	149,626,733	24.53	157,108,069	25.76	164,963,473
5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Ekspor Bersih Perdagangan	Poin	0.00	123,543,000	0.00	126,013,860	0.00	129,164,207	0.00	135,622,417	0.00	142,403,538	0.00	149,523,715
7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	7.64	-	7.68	100,000,000	7.71	102,500,000	7.75	107,625,000	7.79	113,006,250	7.83	118,656,563
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				850,365,000		1,087,372,300		1,114,556,608		1,170,284,438		1,228,798,660		1,290,238,593
29	DINAS PERDAGANGAN				850,365,000		1,087,372,300		1,114,556,608		1,170,284,438		1,228,798,660		1,290,238,593
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	7.64	850,365,000	7.68	867,372,300	7.71	889,056,608	7.75	933,509,438	7.79	980,184,910	7.83	1,029,194,155
2	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Lama proses perijinan	Hari	2.00	-	2.00	100,000,000	2.00	102,500,000	2.00	107,625,000	2.00	113,006,250	2.00	118,656,563
3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Sistim Informasi Manajemen / SIM	ada/tidak ada	ada	-	ada	120,000,000	ada	123,000,000	ada	129,150,000	ada	135,607,500	ada	142,387,875
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				52,880,440,010		53,938,048,810		55,286,500,030		58,050,825,032		60,953,366,284		62,568,043,024
30	SEKRETARIAT DAERAH				23,568,417,000		24,039,785,340		24,640,779,974		25,872,818,972		27,166,459,921		28,524,782,917
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1.00	23,568,417,000	1.00	24,039,785,340	1.00	24,640,779,974	1.00	25,872,818,972	1.00	27,166,459,921	1.00	28,524,782,917
31	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				7,968,000,000		8,127,360,000		8,330,544,000		8,747,071,200		9,184,424,760		9,643,645,998

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1.00	738,450,000	1.00	753,219,000	1.00	772,049,475	1.00	810,651,949	1.00	851,184,546	1.00	893,743,773
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terselenggaranya Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Tahun	1.00	7,229,550,000	1.00	7,374,141,000	1.00	7,558,494,525	1.00	7,936,419,251	1.00	8,333,240,214	1.00	8,749,902,225
32	BAGIAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				1,067,000,000		1,088,340,000		1,115,548,500		1,171,325,925		1,229,892,221		1,291,386,832
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1.00	712,506,900	1.00	726,757,038	1.00	744,925,964	1.00	782,172,262	1.00	821,280,875	1.00	862,344,919
2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terselenggaranya Program Perekonmian dan Pembangunan	Tahun	1.00	354,493,100	1.00	361,582,962	1.00	370,622,536	1.00	389,153,663	1.00	408,611,346	1.00	429,041,913
33	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				1,016,000,000		1,036,320,000		1,062,228,000		1,115,339,400		1,171,106,370		1,229,661,689
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1.00	553,047,500	1.00	564,108,450	1.00	578,211,161	1.00	607,121,719	1.00	637,477,805	1.00	669,351,696
2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terselenggaranya Program Perekonmian dan Pembangunan	Tahun	1.00	462,952,500	1.00	472,211,550	1.00	484,016,839	1.00	508,217,681	1.00	533,628,565	1.00	560,309,993
34	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA				1,620,997,805		1,653,417,761		1,694,753,205		1,779,490,865		1,868,465,409		1,961,888,679

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1.00	674,068,805	1.00	687,550,181	1.00	704,738,936	1.00	739,975,882	1.00	776,974,677	1.00	815,823,410
2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terselenggaranya Program Perekonmian dan Pembangunan	Tahun	1.00	946,929,000	1.00	965,867,580	1.00	990,014,270	1.00	1,039,514,983	1.00	1,091,490,732	1.00	1,146,065,269
35	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM				1,693,000,000		1,726,860,000		1,770,031,500		1,858,533,075		1,951,459,729		2,049,032,715
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1.00	721,979,200	1.00	736,418,784	1.00	754,829,254	1.00	792,570,716	1.00	832,199,252	1.00	873,809,215
2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terselenggaranya Program Perekonmian dan Pembangunan	Tahun	1.00	971,020,800	1.00	990,441,216	1.00	1,015,202,246	1.00	1,065,962,359	1.00	1,119,260,477	1.00	1,175,223,500
36	BAGIAN HUKUM				1,500,000,000		1,530,000,000		1,568,250,000		1,646,662,500		1,728,995,625		1,815,445,406
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1.00	994,037,400	1.00	1,013,918,148	1.00	1,039,266,102	1.00	1,091,229,407	1.00	1,145,790,877	1.00	1,203,080,421
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terselenggaranya Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Tahun	1.00	505,962,600	1.00	516,081,852	1.00	528,983,898	1.00	555,433,093	1.00	583,204,748	1.00	612,364,985
37	BAGIAN UMUM				12,005,025,205		12,245,125,709		12,551,253,852		13,178,816,544		13,837,757,372		14,529,645,240

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1.00	9,650,752,205	1.00	9,843,767,249	1.00	10,089,861,430	1.00	10,594,354,502	1.00	11,124,072,227	1.00	11,680,275,838
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terselenggaranya Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Tahun	1.00	2,354,273,000	1.00	2,401,358,460	1.00	2,461,392,422	1.00	2,584,462,043	1.00	2,713,685,145	1.00	2,849,369,402
38	BAGIAN ORGANISASI				1,258,000,000		1,283,160,000		1,315,239,000		1,381,000,950		1,450,050,998		1,522,553,547
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1.00	1,258,000,000	1.00	1,283,160,000	1.00	1,315,239,000	1.00	1,381,000,950	1.00	1,450,050,998	1.00	1,522,553,547
39	BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOLER				1,184,000,000		1,207,680,000		1,237,872,000		1,299,765,600		1,364,753,880		-
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1.00	1,184,000,000	1.00	1,207,680,000	1.00	1,237,872,000	1.00	1,299,765,600	1.00	1,364,753,880	1.00	-
4.02	SEKRETARIAT DPRD				34,338,490,864		35,025,260,681		35,900,892,198		37,695,936,808		39,580,733,649		41,559,770,331
40	SEKRETARIAT DPRD				34,338,490,864		35,025,260,681		35,900,892,198		37,695,936,808		39,580,733,649		41,559,770,331
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1.00	23,673,678,864	1.00	24,147,152,441	1.00	24,750,831,252	1.00	25,988,372,815	1.00	27,287,791,456	1.00	28,652,181,028

2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada/tidak ada	ada	10,664,812,000	ada	10,878,108,240	ada	11,150,060,946	ada	11,707,563,993	ada	12,292,942,193	ada	12,907,589,303
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5.01	PERENCANAAN				9,613,770,000		9,806,045,400		10,051,196,535		10,553,756,362		11,081,444,180		11,635,516,389
41	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				9,613,770,000		9,806,045,400		10,051,196,535		10,553,756,362		11,081,444,180		11,635,516,389
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1.00	6,439,212,200	1.00	6,567,996,444	1.00	6,732,196,355	1.00	7,068,806,173	1.00	7,422,246,481	1.00	7,793,358,806
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada/tidak ada	ada	2,044,574,600	ada	2,085,466,092	ada	2,137,602,744	ada	2,244,482,882	ada	2,356,707,026	ada	2,474,542,377
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	1,129,983,200	100	1,152,582,864	100	1,181,397,436	100.00	1,240,467,307	100.00	1,302,490,673	100.00	1,367,615,206
5.02	KEUANGAN				172,117,329,000		175,559,675,580		179,948,667,470		188,946,100,843		198,393,405,885		208,313,076,179
41	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				168,250,154,000		171,615,157,080		175,905,536,007		184,700,812,807		193,935,853,448		203,632,646,120

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1.00	9,795,692,300	1.00	9,991,606,146	1.00	10,241,396,300	1.00	10,753,466,115	1.00	11,291,139,420	1.00	11,855,696,391
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP/WD P	WDP	157,752,711,900	WDP	160,907,766,138	WTP	164,930,460,291	WTP	173,176,983,306	WTP	181,835,832,471	WTP	190,927,624,095
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP/WD P	WDP	701,749,800	WDP	715,784,796	WTP	733,679,416	WTP	770,363,387	WTP	808,881,556	WTP	849,325,634
									-		-		-		-
43	DINAS PENDAPATAN DAERAH				3,867,175,000		3,944,518,500		4,043,131,463		4,245,288,036		4,457,552,437		4,680,430,059
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1.00	3,560,175,000	1.00	3,631,378,500	1.00	3,722,162,963	1.00	3,908,271,111	1.00	4,103,684,666	1.00	4,308,868,899
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan PAD (Rp. Milyar)	Rp. Milyar	20.12	307,000,000	24.12	313,140,000	29.12	320,968,500	34.12	337,016,925	39.12	353,867,771	44.12	371,561,160
5.03	KEPEGAWAIAN				6,983,559,000		7,123,230,180		7,301,310,935		7,666,376,481		8,049,695,305		8,452,180,071
44	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				6,983,559,000		7,123,230,180		7,301,310,935		7,666,376,481		8,049,695,305		8,452,180,071
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1.00	2,515,999,000	1.00	2,566,318,980	1.00	2,630,476,955	1.00	2,762,000,802	1.00	2,900,100,842	1.00	3,045,105,884
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Jumlah ASN	Orang	2,484	4,467,560,000	2,534	4,556,911,200	2,58	4,670,833,980	2,636	4,904,375,679	2,689	5,149,594,463	2,743	5,407,074,186

5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1,219,419,000		1,243,807,380		1,274,902,565		1,338,647,693		1,405,580,077		1,475,859,081
45	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				1,219,419,000		1,243,807,380		1,274,902,565		1,338,647,693		1,405,580,077		1,475,859,081
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (PIM IV, III, II)	%	26.94	1,219,419,000	27.48	1,243,807,380	28.03	1,274,902,565	28.59	1,338,647,693	29.16	1,405,580,077	29.74	1,475,859,081
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				287,430,000		893,178,600		915,508,065		961,283,468		1,009,347,642		1,059,815,024
46	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				287,430,000		893,178,600		915,508,065		961,283,468		1,009,347,642		1,059,815,024
2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	100	287,430,000	100	893,178,600	100	915,508,065	100.00	961,283,468	100.00	1,009,347,642	100.00	1,059,815,024
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN														
6.01	INSPEKTORAT DAERAH				4,165,279,000		4,248,584,580		4,354,799,195		4,572,539,154		4,801,166,112		5,041,224,418
47	INSPEKTORAT DAERAH				4,165,279,000		4,248,584,580		4,354,799,195		4,572,539,154		4,801,166,112		5,041,224,418
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1.00	2,502,466,700	1.00	2,552,516,034	1.00	2,616,328,935	1.00	2,747,145,382	1.00	2,884,502,651	1.00	3,028,727,783
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kapabilitas APIP	Level	2.01	1,602,989,000	2.02	1,635,048,780	2.03	1,675,925,000	2.04	1,759,721,249	2.05	1,847,707,312	2.06	1,940,092,678

3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Maturitas SPIP	Level	2.30	59,823,300	2.42	61,019,766	2.54	62,545,260	2.66	65,672,523	2.80	68,956,149	2.94	72,403,957
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7.01	KECAMATAN				12,956,666,000		13,515,799,320		13,853,694,303		14,546,379,018		15,273,697,969		16,037,382,868
48	KECAMATAN NAMROLE				1,778,632,000		1,864,204,640		1,910,809,756		2,006,350,244		2,106,667,756		2,212,001,144
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1.00	1,610,220,700	1.00	1,642,425,114	1.00	1,683,485,742	1.00	1,767,660,029	1.00	1,856,043,030	1.00	1,948,845,182
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Tahun	1.00	19,707,500	1.00	20,101,650	1.00	20,604,191	1.00	21,634,401	1.00	22,716,121	1.00	23,851,927
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat Kecamatan	Tahun	1.00	33,766,600	1.00	34,441,932	1.00	35,302,980	1.00	37,068,129	1.00	38,921,536	1.00	40,867,613
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan	Tahun	1.00	-	1.00	50,000,000	1.00	51,250,000	1.00	53,812,500	1.00	56,503,125	1.00	59,328,281
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Tahun	1.00	32,766,800	1.00	33,422,136	1.00	34,257,689	1.00	35,970,574	1.00	37,769,103	1.00	39,657,558
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Tingkat Kecamatan	Tahun	1.00	82,170,400	1.00	83,813,808	1.00	85,909,153	1.00	90,204,611	1.00	94,714,841	1.00	99,450,583

49	KECAMATAN LEKSULA				3,151,129,000		3,264,151,580		3,345,755,370		3,513,043,138		3,688,695,295		3,873,130,060
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1.00	3,011,144,500	1.00	3,071,367,390	1.00	3,148,151,575	1.00	3,305,559,153	1.00	3,470,837,111	1.00	3,644,378,967
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Tahun	1.00	16,275,600	1.00	16,601,112	1.00	17,016,140	1.00	17,866,947	1.00	18,760,294	1.00	19,698,309
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat Kecamatan	Tahun	1.00	64,592,700	1.00	65,884,554	1.00	67,531,668	1.00	70,908,251	1.00	74,453,664	1.00	78,176,347
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan	Tahun	1.00	-	1.00	50,000,000	1.00	51,250,000	1.00	53,812,500	1.00	56,503,125	1.00	59,328,281
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Tahun	1.00		1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Tingkat Kecamatan	Tahun	1.00	59,116,200	1.00	60,298,524	1.00	61,805,987	1.00	64,896,286	1.00	68,141,101	1.00	71,548,156
50	KECAMATAN WAESAMA				1,915,956,000		2,004,275,120		2,054,381,998		2,157,101,098		2,264,956,153		2,378,203,960
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1.00	1,814,834,091	1.00	1,851,130,773	1.00	1,897,409,042	1.00	1,992,279,494	1.00	2,091,893,469	1.00	2,196,488,142
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Tahun	1.00	18,508,460	1.00	18,878,629	1.00	19,350,595	1.00	20,318,125	1.00	21,334,031	1.00	22,400,732

3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat Kecamatan	Tahun	1.00	27,207,893	1.00	27,752,051	1.00	28,445,852	1.00	29,868,145	1.00	31,361,552	1.00	32,929,630
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan	Tahun	1.00	-	1.00	50,000,000	1.00	51,250,000	1.00	53,812,500	1.00	56,503,125	1.00	59,328,281
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Tahun	1.00	26,419,700	1.00	26,948,094	1.00	27,621,796	1.00	29,002,886	1.00	30,453,030	1.00	31,975,682
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Tingkat Kecamatan	Tahun	1.00	28,985,856	1.00	29,565,573	1.00	30,304,712	1.00	31,819,948	1.00	33,410,945	1.00	35,081,493
51	KECAMATAN KEPALA MADAN				2,205,592,000		2,299,703,840		2,357,196,436		2,475,056,258		2,598,809,071		2,728,749,524
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1.00	2,044,985,100	1.00	2,085,884,802	1.00	2,138,031,922	1.00	2,244,933,518	1.00	2,357,180,194	1.00	2,475,039,204
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Tahun	1.00	9,250,000	1.00	9,435,000	1.00	9,670,875	1.00	10,154,419	1.00	10,662,140	1.00	11,195,247
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat Kecamatan	Tahun	1.00	44,358,700	1.00	45,245,874	1.00	46,377,021	1.00	48,695,872	1.00	51,130,665	1.00	53,687,199

4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan	Tahun	1.00	-	1.00	50,000,000	1.00	51,250,000	1.00	53,812,500	1.00	56,503,125	1.00	59,328,281
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Tahun	1.00	28,116,400	1.00	28,678,728	1.00	29,395,696	1.00	30,865,481	1.00	32,408,755	1.00	34,029,193
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Tingkat Kecamatan	Tahun	1.00	78,881,800	1.00	80,459,436	1.00	82,470,922	1.00	86,594,468	1.00	90,924,191	1.00	95,470,401
51	KECAMATAN AMBALAU				2,018,074,000		2,108,435,480		2,161,146,367		2,269,203,685		2,382,663,870		2,501,797,063
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1.00	1,871,581,000	1.00	1,909,012,620	1.00	1,956,737,936	1.00	2,054,574,832	1.00	2,157,303,574	1.00	2,265,168,753
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Tahun	1.00	6,317,100	1.00	6,443,442	1.00	6,604,528	1.00	6,934,754	1.00	7,281,492	1.00	7,645,567
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat Kecamatan	Tahun	1.00	56,621,400	1.00	57,753,828	1.00	59,197,674	1.00	62,157,557	1.00	65,265,435	1.00	68,528,707
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan	Tahun	1.00	-	1.00	50,000,000	1.00	51,250,000	1.00	53,812,500	1.00	56,503,125	1.00	59,328,281
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Tahun	1.00	13,637,700	1.00	13,910,454	1.00	14,258,215	1.00	14,971,126	1.00	15,719,682	1.00	16,505,667

6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Tingkat Kecamatan	Tahun	1.00	69,916,800	1.00	71,315,136	1.00	73,098,014	1.00	76,752,915	1.00	80,590,561	1.00	84,620,089
53	KECAMATAN FENAFAPAN				1,887,283,000		1,975,028,660		2,024,404,377		2,125,624,595		2,231,905,825		2,343,501,116
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1.00	1,712,035,900	1.00	1,746,276,618	1.00	1,789,933,533	1.00	1,879,430,210	1.00	1,973,401,721	1.00	2,072,071,807
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Tahun	1.00	6,149,500	1.00	6,272,490	1.00	6,429,302	1.00	6,750,767	1.00	7,088,306	1.00	7,442,721
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat Kecamatan	Tahun	1.00	83,798,300	1.00	85,474,266	1.00	87,611,123	1.00	91,991,679	1.00	96,591,263	1.00	101,420,826
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan	Tahun	1.00	-	1.00	50,000,000	1.00	51,250,000	1.00	53,812,500	1.00	56,503,125	1.00	59,328,281
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Tahun	1.00	31,556,100	1.00	32,187,222	1.00	32,991,903	1.00	34,641,498	1.00	36,373,573	1.00	38,192,251

6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Tingkat Kecamatan	Tahun	1.00	53,743,200	1.00	54,818,064	1.00	56,188,516	1.00	58,997,941	1.00	61,947,838	1.00	65,045,230
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM														
8.01	KESATUAN BANGSA DN POLITIK				4,578,291,900		4,669,857,738		4,786,604,181		6,160,934,391		6,468,981,110		6,792,430,166
54	BADAN KESATUAN BANGSA,POLITIK				4,578,291,900		4,669,857,738		4,786,604,181		6,160,934,391		6,468,981,110		6,792,430,166
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1.00	2,650,608,900	1.00	2,703,621,078	1.00	2,771,211,605	1.00	2,909,772,185	1.00	3,055,260,794	1.00	3,208,023,834
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEABANGSAAN	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	%	100	250,000,000	100.00	255,000,000	100	261,375,000	100.00	274,443,750	100.00	288,165,938	100.00	302,574,234
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kegiatan pembinaan politik daerah	Keg	1.00	1,023,828,000	1.00	1,044,304,560	1.00	1,070,412,174	1.00	1,823,932,782.70	1.00	1,915,129,422	1.00	2,010,885,893
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Keg	1.00	48,150,000	1.00	49,113,000	1.00	50,340,825	1.00	87,857,866	1.00	92,250,760	1.00	96,863,298

5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Terselenggaranya Pembinaan Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	100	375,020,000	100	382,520,400	100	392,083,410	100.00	411,687,581	100.00	432,271,960	100	453,885,558
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Terlaksananya Forkopimda	%	100	230,685,000	100	235,298,700	100	241,181,168	100.00	653,240,225.88	100.00	685,902,237	100	720,197,349
TOTAL					743,084,625,119		764,635,525,821		783,751,413,967		825,435,001,350		866,706,751,418		908,139,548,598

7.2. Skenario Pinjaman Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah

Skenario pinjaman daerah didasari dalam PP 54/2005 dan PP 30/2011 pada prinsipnya diturunkan dari UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah.

Selain itu, dalam UU 17/2003 tentang Keuangan Negara bab V mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah, serta Pemerintah/Lembaga Asing disebutkan bahwa selain mengalokasikan Dana Perimbangan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah. Dengan demikian, pinjaman daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Secara konseptual, terdapat dua model pembiayaan bagi pemerintah daerah. Model pertama, memandang pemerintah daerah terutama didasarkan pada *ability to pay* -nya. Berkebalikan dengan model pertama, model benefit memandang pemerintah daerah sebagai agen yang menghasilkan pelayanan yang sudah teridentifikasi (*identifiable services*) kepada warga masyarakatnya yang sudah teridentifikasi pula (*identifiable local residents*). Model benefit ini paling sesuai dengan analisis ekonomi. Menurut pandangan ini, pemerintah daerah dipandang sebagai sebuah perusahaan yang menghasilkan jasa dimana *marginal willing to pay a price* sama dengan *marginal benefit* yang mereka terima. Pendekatan kedua tersebut dipandang lebih adil (*equitable*) dalam konteks dimana tidak ada seorang pun yang membayar kurang (atau lebih) daripada apa *willingness to pay* nya, dan secara ekonomi efisien.

a. DASAR HUKUM

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. UU Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
6. PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
7. PP Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 4 Tahun 2011 tentang Tatacara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tatacara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2020 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Difisit APBD, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah.

b. PRINSIP DASAR PINJAMAN DAERAH

Beberapa prinsip dasar dari pinjaman daerah di antaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah.
2. Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah.
3. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas.

4. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.
5. Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak lain.
6. Pinjaman Daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan Pemerintah Daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
7. Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah.
8. Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.
9. Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam APBD.

c. PERSYARATAN PINJAMAN

Persyaratan umum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pinjaman adalah sebagai berikut:

1. Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Penerimaan umum APBD tahun sebelumnya adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang kegunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu.
2. Memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh Pemerintah. Nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (Debt Service Coverage Ratio/DSCR) paling sedikit 2,5 (dua koma lima). DSCR dihitung dengan rumus sebagai berikut: **DSCR**

$$= \frac{(PAD + (DBH - DBHDR) + DAU) - BW}{2,5 \text{ Angsuran Pokok Pinjaman} + \text{Bunga} + \text{Biaya Lain}}$$

3. Dalam hal Pinjaman Daerah diajukan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah harus tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah.
4. Khusus untuk Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang wajib mendapatkan persetujuan dari DPRD.

d. SUMBER PINJAMAN

Pinjaman Daerah bersumber dari:

1. Pemerintah Pusat, berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan Pinjaman Dalam Negeri, dan/atau penerusan Pinjaman Luar Negeri;
2. Pemerintah Daerah lain;
3. Lembaga Keuangan Bank, yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
5. Masyarakat, berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

e. JENIS DAN JANGKA WAKTU PINJAMAN

1. Pinjaman Jangka Pendek

Merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran dan Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Pendek yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang berkenaan.

2. Pinjaman jangka Menengah

Merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman (pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain) harus

dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan.

3. Pinjaman Jangka Panjang

Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Panjang yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lain seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

f. PENGGUNAAN PINJAMAN

Penggunaan Pinjaman Daerah telah diatur sebagaimana jenis pinjamannya, yaitu:

- a. Pinjaman Jangka Pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.
- b. Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.
- c. Pinjaman Jangka Panjang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang (i) menghasilkan penerimaan langsung, (ii) menghasilkan penerimaan tidak langsung, (iii) memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
- d. Khusus Pinjaman Jangka Panjang dalam bentuk Obligasi Daerah digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut.

g. PROSEDUR PINJAMAN DAERAH

1. Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang dananya bersumber dari Pinjaman Luar Negeri.
2. Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang dananya bersumber dari Pusat Investasi Pemerintah.
3. Pinjaman Daerah yang dananya bersumber dari Perbankan
4. Pinjaman Daerah yang dananya bersumber dari Masyarakat (Obligasi Daerah)

h. LARANGAN PENJAMINAN

1. Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain;

2. Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan;
3. Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.

i. PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN

1. Seluruh kewajiban pinjaman daerah yang jatuh tempo wajib dianggarkan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan;
2. Dalam hal daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjamannya kepada Pemerintah, kewajiban membayar pinjaman tersebut diperhitungkan dengan DAU dan/atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak daerah tersebut.

j. PELAPORAN PINJAMAN

1. Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Pemerintah setiap semester dalam tahun anggaran berjalan;
2. Dalam hal daerah tidak menyampaikan laporan, Pemerintah dapat menunda penyaluran Dana Perimbangan.

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

8.1. Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Utama pemerintah daerah Kabupaten Buru Selatan memuat indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran sebagai tolak ukur penilaian kinerja pemerintahan. IKU daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah dalam pencapaian indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Buru Selatan.

Penetapan indikator kinerja utama selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026

No	Visi Dan Misi	Tujuan Dan Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2020	Target Tahun					Kondisi Akhir 2026
					2021	2022	2023	2024	2025	
VISI										
Meningkatkan Kemandirian Buru Selatan secara Berkelanjutan sebagai Kabupaten Yang Rukun, Adil, Sejahtera Berbasis Agro-marine										
1	MISI I	Memperkuat sektor perhubungan untuk peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat								
		Tujuan								
		Terkoneksinya sistim perhubungan sampai pada pusat aktifitas ekonomi masyarakat	Terkoneksinya sistim perhubungan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (245,48 km)	251,62	257,75	263,89	270,03	276,17	282,30
				Panjang jalan dilalui roda 4 (385,76 Km)	389,23	392,73	396,27	399,84	403,43	407,07
		Sasaran								
		Membangun dan memaksimalkan sarana dan prasarana transportasi laut, darat secara memadai di Kabupaten Buru Selatan	Terbangunnya pelabuhan laut (unit)	Fasilitas sisi darat pelabuhan laut (8 Unit)	8	8	8	8	8	8
2	MISI 2	Pembentukan Pusat Pengembangan Produk Perikanan dan Pertanian Berbasis Potensi Unggulan Wilayah								
		Tujuan								
		Terciptanya klaster produk unggulan	Adanya pusat unggulan	NTN(115,00 %)	117,00	118,00	119,00	120,00	121,00	122,00

		daerah berbasis agro marine	pertanian dan perikanan	NTP (139,59 %)	140,29	140,99	141,69	142,40	143,11	143,83
				Kontribusi sektor Pertanian Terhadap PDRB (36,60 %)	36,78	36,96	37,15	37,33	37,52	37,71
		Sasaran								
		1. Perancangan master plan cluster pengembangan produk perikanan dan pertanian	Tersedianya master plan pengembangan produk perikanan dan pertanian	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (ada/tidak ada)	Ada	ada	ada	ada	ada	ada
		2. Peningkatan Kapasitas Petani, Nelayan (Pengetahuan Teknis, Teknologi, Manajemen Usaha)	Peningkatan Kegiatan Pelatihan Pertanian dan Perikanan	Cakupan bina kelompok nelayan (55,00 %)	60,00	68,00	75,00	80,00	85,00	90,00
				Cakupan bina kelompok petani (38,54 %)	46,79	55,04	63,38	71,72	80,06	88,40
		3. Membentuk sentra produk perikanan dan pertanian Sesuai dengan kluster produk unggulan	Terbentuknya sentra produksi berbasis potensi sumberdaya alam wilayah	Produksi perikanan tangkap (14,933 ton)	15.008	15.083	15.158	15.234	15.310	15.387
				Produksi perikanan budidaya (3,050 ton)	3.065	3.081	3.096	3.111	3.127	3.143
				Kontribusi sector pertanian(palawija) terhadap PDRB (3,34 %)	3,38	3,42	3,46	3,50	3,54	3,58
		4. Membangun sarana dan prasarana secara proporsional dan berkelanjutan untuk mendukung kluster produk unggulan pengembangan di setiap wilayah	Terbangunnya sarana prasarana penunjang potensi unggulan daerah	Luas irigasi dalam kondisi baik (100,00 %)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Tersedianya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian (unit)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

				Tersedianya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (5,6 Km)	5,6	10	10	10	10	10
				Jumlah Bantuan Armada Tangkap dan Alat Penangkapan Ikan (24 Paket	24	60	65	45	45	50
				Jumlah Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan (paket)	5	5	5	5	5	5
		5. Penciptaan lapangan kerja	Terciptanya SDM berbasis potensi unggulan Daerah	Menurunya tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (2,31%)	2,30	2,29	2,28	2,26	2,25	2,24
		6. Membentuk Tatakelola Sistem Pemasaran Produk Ungulan Daerah	Terciptanya Tatakelola pemasaran produk unggulan daerah	Sistem Informasi Geografis Produk Unggulan Daerah (Ada, Tdk ada)	Ada	ada	ada	ada	ada	ada
				Jumlah Pemasaran Produk Unggulan Berbasis Digital (.Jumlh Produk)	1	2	1	2	2	2
3	MISI 3	Penguatan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan pusat pengembangan ekonomi kecamatan dengan mempertimbangkan geostrategic, geopolitik, dan potensi sumberdaya wilayah								
		Tujuan								
		Pembentukan Dan Penguatan Tatakelola pusat usaha kecil mikro dan menengah sesuai potensi wilayah	Terbentuknya kelompok usaha mikro kecil dan menengah	Jumlah UMKM (480 unit)	527	557	587	617	647	677
		Sasaran								

		1. Membentuk Klaster Pengembangan UMKM berdasarkan potensi wilayah	Terbentuknya UMKM berbasis pengembangan bisnis agro-marine	Terwujudnya usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan prodak unggulan (paket)	1	1	1	1	1	1
				Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMDA) (Rp 20,59 M)	22,88	25,17	27,68	30,45	33,50	36,85
		2. Memfasilitasi tersedianya infrastruktur dan akses modal bagi pengembangan UMKM Produktif	Daya serap tenaga kerja	Rasio daya serap tenaga kerja (Rasio: 239)	252	265	278	292	307	322
		3. Pengadaan tanah untuk peningkatan sarana prasarana pembangunan, perumahan layak huni.	Tersedianya lahan untuk perumahan swadaya dan perumahan khusus	Rasio permukiman layakhuni (Rasio: 0,86)	0,90	0,95	1,00	1,05	1,10	1,15
4	MISI 4	Pengembangan Sektor Pendidikan Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah								
		Tujuan								
		Terciptanya SDM berbasis potensi unggulan daerah	Tersediannya SDM berbasis potensi Unggulan Daerah	Tingkat partisipasi angkatan kerja (73,99 %)	74,73	75,48	76,23	76,99	77,76	78,54
		Sasaran								
		1. Pendidikan gratis dengan pola yang adil, profesional berorientasi output	Tingginya angka partisipasi sekolah	APM SD/MI (97,86 %)	97,96	98,06	98,15	98,25	98,35	98,45
				APM SMP/MTs(80,19 %)	80,27	80,35	80,43	80,51	80,59	80,67

		2. Mengembangkan pendidikan anak usia dini (PAUD) untuk mencetak landasan yang kokoh bagi penguatan SDM	Tersedianya lembaga PAUD	Jumlah siswa pada jenjang TK/RA (3.415 siswa)	3.432	3.449	3.466	3.484	3.501	3.519
		3. Penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai, peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan pengembangan teknologi informasi	Tersedianya infrastruktur, SDM, dan pemanfaatan IT bidang pendidikan	Sekolah kondisi bangunan baik SD/MI (83,18 %)	83,60	84,01	84,43	84,86	85,28	85,71
				Sekolah kondisi bangunan baik SMP/MTs (85,11 %)	85,54	85,96	86,39	86,83	87,26	87,70
5	MISI 5	Perluasan Akses Kesehatan Yang Berkualitas Dan Terjangkau Bagi Masyarakat								
		Tujuan								
		Tersedianya akses kesehatan bagi masyarakat	Terlayannya kebutuhan kesehatan masyarakat	Rasio Posyandu per satuan balita /1.000 (16,14 %)	16,22	16,30	16,38	16,47	16,55	16,63
				Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk /1.000 (0,66 %)	0,69	0,73	0,76	0,80	0,84	0,88
				Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk /1.000 (0,03 %)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
				Rasio dokter per satuan penduduk /1000 (0,20 %)	0,21	0,22	0,23	0,24	0,26	0,27
				Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (63,60 %)	66,78	70,12	73,62	77,31	81,17	85,23

		Sasaran								
		2. Optimalisasi riset dan development di bidang kesehatan untuk mengantisipasi isu-isu kesehatan dan perkembangan penyakit menular	Terciptanya mekanisme riset dan development di bidang kesehatan	Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, DBD (50,00 %)	52,50	55,13	57,88	60,78	63,81	67,00
		3. Meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan di seluruh wilayah Buru Selatan	Terciptanya Lingkungan bersih	Jumlah rumah tangga bersanitasi (76,10 %)	76,78	77,48	78,17	78,88	79,59	80,30
6	MISI 6	Penguatan dan Percepatan Pembangunan Pariwisata Melalui Penguatan Adat Budaya dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal sebagai Modal Pembangunan								
		Tujuan								
		Pengembangan pembangunan pariwisata daerah berbasis kearifan lokal	Terciptanya destinasi wisata berbasis kearifan lokal	Kunjungan wisata (75,24 %)	75,62	76,00	76,38	76,76	77,15	77,53

		Sasaran								
		1. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Budaya Lokal Kabupaten Buru Selatan	Adanya peraturan daerah tentang Budaya Lokal	Perda Adat (ada/tidak ada)	Ada	ada	ada	ada	ada	ada
		2. Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata	Peningkatan jumlah Kunjungan Wisatawan	Pengembangan objek wisata unggulan (jumlah)	1	1	1	1	1	1
		3. Pengembangan potensi pariwisata daerah secara professional.	Terkelolanya potensi wisata lokal secara profesional	Tersedianya SDM profesional dibidang pariwisata (orang)	5	5	5	6	7	7
		4. Mendorong aktivitas keagamaan yang bersinergi dengan budaya lokal.	Jumlah kegiatan keagamaan yang bersinergi dengan budaya lokal	Rasio tempat ibadah per 1000 penduduk (Rasio: 1,95)	1,96	1,97	1,98	1,99	2,00	2,01
		5. Menggerakkan aktivitas kepemudaan di tingkat desa sesuai bakat dan kebutuhan, untuk mendukung pariwisata.	Meningkatnya minat pemuda di bidang olahrag, sosial seni, dan budaya	Persentase organisasi pemuda yang aktif (100 %)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		6. Peningkatan harkat dan martabat serta kualitas hidup bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terpenuhinya sarana prasarana dan kebutuhan PMKS	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (unit)	1	1	1	1	1	1
7	MISI 7	Reformasi Birokrasi Dan Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Profesional Dan Bersih Dari KKN								
		Tujuan								
		Terwujudnya tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, bebas KKN	Terciptanya tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi (Skor)	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Sasaran								
		Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah dalam menjalankan fungsinya secara efektif dan professional	Tersedianya SDM ASN yang profesional	Pesentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (PIM IV, III, II) (%)	26,94	27,48	28,03	28,59	29,16	29,74
		Mengoptimalkan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur serta kualitas layanan yang prima.	Terciptanya sistim akuntabilitas pemerintah yang berkualitas	Pesentase disiplin ASN (%)	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Menyederhanakan alur birokrasi dengan sistem satu atap guna meningkatkan pelayanan publik yang efisien dan efektif	Terciptanya sistim pelayanan satu atap	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah (ada/tidak ada)	Ada	ada	ada	ada	ada	ada
		Melakukan praktek pengelolaan keuangan daerah yang adil, transparan	Terciptanya sistim pengelolaan keuangan yang akuntabel	Opini BPK terhadap laporan keuangan (WTP/WDP)	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Tabel 8.2. TARGET INDIKATOR KINERJA KUNCI RPJMD KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.0	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.01	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-0,01	5,00	5,01	5,02	5,03	5,04	5,05
1.02	Laju inflasi (%)	2,70	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
1.03	PDRB per kapita (Rp.)	22,100,000	22,431,500	22,767,973	23,109,492	23,456,134	23,807,976	24,165,096
1.04	Indeks Gini	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28	0,27	0,26
1.05	Rasio Penduduk miskin (%)	15.75	15.59	15.44	15.28	15.13	14.98	14.83
1.06	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	73.99	74.73	75.48	76.23	76.99	77.76	78.54
1.07	Tingkat pengangguran terbuka (%)	2.31	2.30	2.29	2.28	2.26	2.25	2.24
1.08	Rasio penduduk yang bekerja (%)	97.69	97.70	97.71	97.72	97.74	97.75	97.76
2.0	Kesejahteraan Sosial							
2.01	Pendidikan							
2.01.01	Angka melek huruf (%)	97.68	97.78	97.88	97.97	98.07	98.17	98.27
2.01.02	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12.69	12.70	12.71	12.72	12.73	12.74	12.75
2.01.03	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	7.94	8.06	8.18	8.30	8.43	8.55	8.68

2.01.04	Angka Partisipasi Kasar							
	- SD/MI	114.64	100	100	100	100	100	100
	- SLTP/MTs	88.48	88.92	89.37	89.81	90.26	90.71	91.17
	- SMA/SMK/MA	98.26	98.36	98.46	98.56	98.65	98.75	98.85
2.01.05	Angka Partisipasi Murni							
	- SD/MI	97.86	97.96	98.06	98.15	98.25	98.35	98.45
	- SLTP/MTs	80.19	80.27	80.35	80.43	80.51	80.59	80.67
	- SMA/SMK/MA	65.79	65.86	65.92	65.99	66.05	66.12	66.19
2.01.06	Rasio Angka Pendidikan yang ditamatkan :							
2.01.06.01	Tidak Tamat SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.06.02	SD/MI	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.01.06.03	SMP/MTS	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.01.06.04	SMA/SMK/MA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.01.06.05	D1/D2/D3	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.01.06.06	D4/S1/S2/S3	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.03	Kesehatan							
2.03.01	Angka Kelangsungan Hidup Bayi per / 1000 kelahiran hidup (%)	99.14	100	100	100	100	100	100
2.03.02	Angka Usia Harapan Hidup (Th)	66.27	66.60	66.93	67.27	67.61	67.94	68.28
2.03.03	Persentase Gizi buruk (%)	8.70	8.05	7.44	6.89	6.37	5.89	5.45
2.04	Kesempatan Kerja							
2.04.01	Rasio Penduduk Yang Bekerja (%)	97.69	97.79	97.89	97.98	98.08	98.18	98.28
2.04.02	Angka Partisipasi Kerja (%)	63.53	64.48	65.45	66.43	67.43	68.44	69.47
2.05	Angka Kriminalitas							
2.05.01	Rasio Kriminalitas (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Fokus Seni dan Budaya							
3.01	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (Kali)	3	3	3	3	3	3	3
3.02	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya (Unit)	2	2	2	2	2	2	2
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	Pelayanan Urusan Wajib							
1.00	Pendidikan							
1.01	Pendidikan dasar:							
1.01.01	SD/MI							
	a. Angka Partisipasi Sekolah (%)	98.00	98.25	98.49	98.74	98.98	99.23	99.48
	b. Rasio Ketersediaan Sekolah	97.77	98.01	98.26	98.51	98.75	99.00	99.25
	c. Rasio guru/ murid	54.50	54.78	55.06	55.34	55.62	55.90	56.18
	d. Rasio guru/ murid per kelas rata-rata (per-1.000)	52.55	54.05	55.55	57.05	58.55	60.05	61.55
1.01.02	SMP/MTs							
	a. Angka Partisipasi Sekolah (%)	95.21	95.45	95.69	95.93	96.17	96.41	96.65
	b. Rasio Ketersediaan Sekolah (%)	94.47	94.71	94.94	95.18	95.42	95.66	95.90
	c. Rasio guru/ murid	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	d. Rasio guru/ murid per kelas rata-rata (per- 10.000)	45.60	47.10	48.66	50.21	51.77	53.36	54.88
1.02	Pendidikan Menengah							
	1. Angka Partisipasi Sekolah (%)	76.93	77.12	77.32	77.51	77.70	77.90	78.09
	2. Rasio ketersediaan sekolah (%)	41.41	41.51	41.62	41.72	41.83	41.93	42.04

	3. Rasio guru terhadap murid	60.63	60.78	60.93	61.09	61.24	61.39	61.55
	4. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata (per-10.000)	53.19	54.69	56.25	57.81	59.36	60.92	62.48
	5. Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (%)	97.68	97.78	97.88	97.97	98.07	98.17	98.27
1.03	Fasilitas Pendidikan							
	1. Sekolah kondisi bangunan baik SD/MI (%)	83.18	83.60	84.01	84.43	84.86	85.28	85.71
	2. Sekolah kondisi bangunan baik SMP/Mts (%)	85.11	85.54	85.96	86.39	86.83	87.26	87.70
	3. Sekolah kondisi bangunan baik SMA/SMK/MA (%)	100	100	100	100	100	100	100
1.04	PAUD							
	Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA (siswa)	3,415	3,432	3,449	3,466	3,484	3,501	3,519
1.05	Angka Putus Sekolah							
1.05.01	SD/MI	0.75	0.38	0.19	0.09	0.05	0.02	0.01
1.05.02	SMP/MTs	4.80	2.40	1.20	0.60	0.30	0.15	0.08
1.05.03	SMA/SMK/MA	22.18	21.07	20.02	19.02	18.07	17.16	16.30
1.06	Angka Kelulusan							
	1. Angka Kelulusan SD/MI (%)	97.00	97.49	97.97	98.46	98.95	100.00	100.00
	2. Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	96.00	96.86	97.74	98.62	99.50	100.00	100.00
	3. Angka Kelulusan SMA/SMK/MA (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	4. Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	96.00	96.86	97.74	98.62	100.00	100.00	100.00
	5. Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	97.00	97.87	98.75	99.64	100.00	100.00	100.00

	6. Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%)	95.15	95.63	96.10	96.58	97.07	97.55	98.04
2	Kesehatan							
2.01	Rasio Posyandu per satuan balita (/1.000)	16.14	16.22	16.30	16.38	16.47	16.55	16.63
2.02	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (/1.000)	0.66	0.69	0.73	0.76	0.80	0.84	0.88
2.03	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (/1.000)	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
2.04	Rasio dokter per satuan penduduk (/1000)	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24	0.26	0.27
2.05	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (/1000)	7.39	7.76	8.15	8.55	8.98	9.43	9.90
2.06	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	2.40	2.52	2.65	2.78	2.92	3.06	3.22
2.07	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (%)	91.00	91.46	91.91	92.37	92.83	93.30	93.76
2.08	Cakupan kelurahan UCI (%)	43.00	43.22	43.43	43.65	43.87	44.09	44.31
2.09	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)	96.31	96.79	97.28	97.76	98.25	98.74	99.24
2.10	Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, DBD (%)	50.00	52.50	55.13	57.88	60.78	63.81	67.00
2.11	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	63.60	66.78	70.12	73.62	77.31	81.17	85.23
2.12	Cakupan kunjungan bayi (%)	70.29	73.80	77.49	81.37	85.44	89.71	94.20
2.13	Cakupan puskesmas (%)	216.67	100	100	100	100	100	100
2.14	Cakupan pembantu puskesmas (%)	46.91	53.48	60.96	69.50	79.23	90.32	100.00
2.15	PHBS (%)	60.50	60.80	61.11	61.41	61.72	62.03	62.34

3	Pekerjaan Umum							
3.01	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	63.89	66.75	69.93	73.11	75.28	79.46	82.64
3.02	Rasio tempat ibadah per 1000 penduduk	1.95	1.96	1.97	1.98	1.99	2.00	2.01
3.03	Rasio tempat ibadah mesjid per 1000 penduduk umat Islam	1.71	1.72	1.73	1.74	1.74	1.75	1.76
3.04	Rasio tempat ibadah gereja per 1000 penduduk umat kristen	2.59	2.60	2.62	2.63	2.64	2.66	2.67
3.05	Persentase rumah tangga bersanitasi (%)	76.10	76.78	77.48	78.17	78.88	79.59	80.30
3.06	Persentase rumah tangga pengguna Air Bersih (%)	71.54	72.88	74.22	75.56	76.90	78.24	79.58
3.07	Rasio TPU per satuan penduduk per 1000 penduduk	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.08	Panjang jalan dilalui roda 4 (Km)	385.76	389.23	392.73	396.27	399.84	403.43	407.07
3.09	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) (Km)	245.48	251.62	257.75	263.89	270.03	276.17	282.30
3.10	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.11	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3.12	Luas irigasi dalam kondisi baik (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4.	Perumahan							
4.01	Rasio rumah layak huni	0.12	0.13	0.15	0.16	0.18	0.19	0.21
4.02	Rasio permukiman layak huni	0.86	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15
4.03	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	41.61	43.50	45.84	47.78	49.72	51.66	53.60

4.04	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)	31.78	34.96	38.45	42.30	46.53	51.18	56.30
4.05	Persentase permukiman yang tertata (%)	95.46	95.69	95.90	96.11	96.30	96.49	96.66
4.06	Persentase lingkungan permukiman kumuh (%)	4.54	4.31	4.10	3.89	3.70	3.51	3.34
4.07	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	31.78	28.92	26.32	23.95	21.79	19.83	18.05
4.08	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (%)	5.64	5.36	5.09	4.84	4.59	4.36	4.15
4.09	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%)	73.82	74.48	75.15	75.83	76.51	77.20	77.90
5	Penataan Ruang							
5.01	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	34.00	45.15	47.30	49.45	51.60	53.75	55.90
5.02	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	13.55	14.23	14.91	15.58	16.26	16.94	17.16
6	Perencanaan Pembangunan Daerah							
6.01	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA (ada/tidak ada)	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
6.02	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (ada/tidak ada)	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
6.03	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (ada/tidak ada)	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada

6.04	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA (ada/tidak ada)	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
6.05	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
6.06	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
6.07	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7	Perhubungan							
7.01	Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang)	35,712	37,498	39,372	41,341	43,408	45,579	47,857
7.02	Rasio ijin trayek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.03	Jumlah uji kir angkutan umum	0.00	0.00	0.00	146.00	146.00	146.00	146.00
7.04	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
7.05	Persentase layanan angkutan darat (%)	8.97	9.42	9.89	10.38	10.90	11.45	12.02
7.06	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7.07	Pemasangan Rambu rambu	35.00	36.50	38.00	39.50	41.00	42.50	44.00
7.08	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0.28	0.29	0.31	0.32	0.34	0.36	0.38
7.09	Jumlah arus penumpang angkutan umum Darat (orang)	15,548	16,325	17,142	17,999	18,899	19,844	20,836
7.10	Jumlah arus penumpang angkutan umum Kapal Laut dan Very (orang)	12,995	13,645	14,327	15,043	15,796	16,585	17,415
7.11	Jumlah arus penumpang angkutan umum Pesawat Udara (Orang)	7,169	7,527	7,904	8,299	8,714	9,150	9,607

8	Lingkungan Hidup							
8.01	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8.02	Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8.03	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Kabupaten/Kota	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8.04	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	78.00	78.00	80.00	82.00	84.00	86.00	88.00
8.05	Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota (jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina) / (Org.)	0.00	0.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
8.06	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup (ada/tidak ada)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada
8.07	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota (%)	45.00	45.00	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00
8.08	Timbulan sampah yang ditangani (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

8.09	Presentase cakupan area pelayanan (%)	0.40	0.40	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
8.10	Presentase jumlah sampah yang tertangani (%)	74.00	74.00	74.50	75.00	75.50	76.00	76.50
8.11	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota	50.00	50.00	60.00	70.00	80.00	85.00	90.00
9	Pertanahan							
9.01	Luas Lahan bersertifikat (%)	0.01	0.02	0.04	0.07	0.13	0.25	0.47
9.02	Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
10	Kependudukan dan Catatan Sipil							
10.01	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk (%)	94.16	94.58	95.00	95,85	97,00	97,42	98,26
10.02	Rasio bayi berakte kelahiran (%)	76.36	77.24	78.12	79,39	80,02	80,62	81,23
10.03	Rasio pasangan berakte nikah (%)	62.72	63.28	63.85	64.43	65.01	65.59	66.18
10.04	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten (ada/tidak ada)	ada	Ada	ada	ada	ada	ada	ada
10.05	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK (sudah/belum)	sudah	Sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah
10.06	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	92.64	93.47	94.32	95.16	96.02	96.88	97.76
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
11.02	Partisipasi perempuan di lembaga swasta / partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	57.50	57.62	57.73	57.85	57.96	58.08	58.19
11.03	Rasio KDRT (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

11.04	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
11.05	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera							
12.01	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0.42	0.44	0.46	0.49	0.51	0.54	0.56
12.02	Rata-rata jumlah anak per keluarga (Orang)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00
12.03	Rasio akseptor KB (%)	16.87	17.71	18.60	19.53	20.51	21.53	22.61
12.04	Cakupan peserta KB aktif (%)	54.50	54.77	55.05	55.32	55.60	55.88	56.16
12.05	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	30.40	30.55	30.70	30.86	31.01	31.17	31.32
13	Sosial							
13.01	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	58.98	62.41	65.53	68.81	72.25	75.86	79.65
13.02	Persentase PMKS yang tertangani (%)	58.98	62.41	65.53	68.81	72.25	75.86	79.65
13.03	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	58.98	62.41	65.53	68.81	72.25	75.86	79.65
13.04	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

13.05	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
13.06	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
13.07	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
13.08	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
14	Ketenagakerjaan							
14.01	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.03	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	8.80	9.24	9.70	10.19	10.70	11.23	11.79
14.04	Keselamatan dan perlindungan (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
14.05	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
14.06	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.07	Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)	4.81	5.05	5.30	5.57	5.85	6.14	6.45

15	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
15.01	Persentase koperasi aktif (%)	67.90	70.00	72.10	74.26	76.49	78.79	81.15
15.02	Persentase UKM non BPR/LKM aktif (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.03	Persentase BPR/LKM aktif (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.04	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
16	Penanaman Modal							
16.01	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	227	252	277	319	383	479	633
16.02	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	20,594,242,289	22,882,491,432	25,170,740,575	27,687,814,096	30,456,595,506	33,502,255,705	36,852,481,276
16.03	Rasio daya serap tenaga kerja	239	252	265	278	292	307	322
16.04	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	20.43	22.80	25.17	27.68	30.45	33.50	36.85
17	Kebudayaan							
17.01	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (Keg)	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
17.02	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
17.03	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
17.04	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
18	Pemuda dan Olah Raga							
18.01	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
18.02	Persentase wirausaha muda (%)	41.33	43.40	45.57	47.84	50.24	52.75	55.39

18.03	Cakupan pembinaan olahraga (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
18.04	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%)	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
18.05	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
18.06	Jumlah atlet berprestasi	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
18.07	Jumlah prestasi olahraga	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri							
19.01	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (Keg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
19.02	Kegiatan pembinaan politik daerah (Keg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
20.01	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	1.21	1.27	1.33	1.40	1.47	1.54	1.62
20.02	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	1.40	1.47	1.54	1.62	1.70	1.79	1.88
20.03	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
20.04	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah (Ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
20.05	Penegakan PERDA (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
20.06	Cakupan patroli petugas Satpol PP (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
20.07	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

20.08	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) (%)	1.78	1.87	1.96	2.06	2.16	2.27	2.39
20.09	Cakupan pelayanan bencana kebakaran (%)	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
20.10	Tingkat waktu tanggap/response time rate (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.11	Indeks Resiko Bencana (%)	0.0065	0.0065	0.0056	0.0053	0.0051	0.0046	0.0039
20.12	Desa Rawan Bencana (desa)	37.00	37.00	34.00	33.00	32.00	30.00	29.00
20.13	Desa Tanggu Bencana (desa)	45.00	45.00	48.00	49.00	50.00	52.00	54.00
20.14	Tingkat Fasilitas Penanganan Pasca Bencana (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
20.15	Tingkat Penanganan Bencana (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
20.16	Jumlah Sistem Informasi Manajemen / SIM (ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
20.17	Maturitas SPIP (Level)	2.29	2.30	2.42	2.54	2.66	2.80	2.94
20.18	Kapabilitas APIP (Level)	2.00	2.01	2.02	2.03	2.04	2.05	2.06
21	Ketahanan Pangan							
21.01	Ketersediaan pangan utama Beras / Non Beras							
21.01.01	Ketersediaan pangan utama (%)	0.74	0.94	1.34	1.74	2.14	2.54	2.94
21.01.02	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (kkal/kap/hr)	63.05	64.07	65.05	75.05	80.05	88.10	100.00
21.01.03	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
22	Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan							
22.01	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

22.02	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat /LPM (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
22.03	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
22.04	Persentase LSM aktif (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
22.05	Persentase LPM Berprestasi (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
22.06	Persentase PKK aktif (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
22.07	Persentase Posyandu aktif (%)	49.60	52.08	54.68	57.42	60.29	63.30	66.47
22.08	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
22.09	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
23	Statistik							
23.01	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi (ada/tidak ada)	ada	Ada	ada	ada	ada	ada	ada
23.02	Buku "kabupaten dalam angka" (ada/tidak ada)	ada	Ada	ada	ada	ada	ada	ada
23.03	Buku "PDRB" (ada/tidak ada)	ada	Ada	ada	ada	ada	ada	ada
24	Kearsipan							
24.01	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
24.02	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (orang)	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00

25	Komunikasi dan Informatika							
25.01	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
25.02	Cakupan Layanan Telekomunikasi	59.02	62.72	72.72	77.72	82.72	87.72	92.72
25.03	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon(%)	65.26	65.91	66.57	67.24	67.91	68.59	69.27
25.04	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	15.33	16.10	16.90	17.75	18.63	19.57	20.54
26	Perpustakaan							
26.01	Persentase Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (%)	2.25	2.36	2.48	2.60	2.73	2.87	3.02
26.02	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	50.00	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	75.00
26.03	Rasio perpustakaan persatuan penduduk /1.000	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013
26.04	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
26.05	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (%)	65.00	66.30	67.63	68.98	70.36	71.77	73.20
	URUSAN PILIHAN							
1	Pertanian							
1.01	Kontribusi sektor pertanian /perkebunan terhadap PDRB (%)	36.60	36.78	36.96	37.15	37.33	37.52	37.71

1.02	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)	3.34	3.38	3.42	3.46	3.50	3.54	3.58
1.03	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	1.21	1.31	1.81	2.31	2.81	3.31	3.81
1.04	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	1.94	1.95	1.96	1.97	1.98	1.99	2.00
1.05	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1.06	Cakupan bina kelompok petani (%)	38.54	46.79	55.04	63.38	71.72	80.06	88.40
1.07	Nilai tukar petani (%)	139.59	140.29	140.99	141.69	142.40	143.11	143.83
2	Kehutanan							
2.01	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
2.02	Kerusakan Kawasan Hutan (%)	2.11	2.00	1.90	1.81	1.72	1.63	1.55
2.03	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
3	Energi dan Sumber Daya Mineral							
3.01	Persentase rumah tangga pengguna listrik(%)	86.84	87.27	87.71	88.15	88.59	89.03	89.48
3.02	Rasio ketersediaan daya listrik	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3.03	Persentase pertambangan tanpa ijin (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

4	Pariwisata							
4.01	Kunjungan wisata (%)	75.24	75.62	76.00	76.38	76.76	77.15	77.53
4.02	Lama kunjungan Wisata (kali)	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00
4.03	PAD sektor pariwisata (%)	44.84	45.06	45.29	45.52	45.74	45.97	46.20
5	Kelautan dan Perikanan							
5.01	Produksi perikanan (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5.02	Konsumsi ikan (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5.03	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	55.00	60.00	68.00	75.00	80.00	85.00	90.00
5.04	Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5.05	Nilai tukar nelayan (%)	115.00	117.00	118.00	119.00	120.00	121.00	122.00
5.06	Produksi perikanan tangkap (ton)	14,933	15,008	15,083	15,158	15,234	15,310	15,387
5.07	Produksi perikanan budidaya (ton)	3,050	3,065	3,081	3,096	3,111	3,127	3,143
6	Perdagangan							
6.01	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	7.60	7.64	7.68	7.71	7.75	7.79	7.83
6.02	Ekspor Bersih Perdagangan (Poin)	-	-	-	-	-	-	-
6.03	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	19.22	20.18	21.19	22.25	23.36	24.53	25.76
7	Perindustrian							
7.01	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	4.22	4.43	4.65	4.89	5.13	5.39	5.66
7.02	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

8	Transmigrasi							
8.01	Transmigran swakarsa (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.	ASPEK DAYA SAING							
1	Kemampuan Ekonomi Daerah							
1.01	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp)	670,614	684,027	697,707	711,661	725,895	740,412	755,221
1.02	Pengeluaran konsumsi pangan perkapita (Rp)	380,918	388,537	396,307	404,233	412,318	420,564	428,976
1.03	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (Rp)	289,696	295,490	301,400	307,428	313,576	319,848	326,245
1.04	Produktivitas total daerah (Juta/Kapita/Tahun)	1,438,432	1,467,200	1,496,544	1,526,475	1,557,005	1,588,145	1,619,908
1.05	Nilai Tukar Petani	139.59	140.29	140.99	141.69	142.40	143.11	143.83
2	Fasilitas Wilayah / Infrastruktur							
2.01	Aksesibilitas Daerah							
2.01.01	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0.28	0.29	0.31	0.32	0.34	0.36	0.38
1.02	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum							
1.02.01	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum (Orang)	35,712	37,498	39,372	41,341	43,408	45,579	47,857
1.02.02	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (Ton)	1893	1,988	2,087	2,191	2,301	2,416	2,537
1.03	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun							

1.03.01	Jumlah orang melalui dermaga per tahun (Orang)	69,208	72,669	76,302	80,117	84,123	88,329	92,746
1.03.02	Jumlah barang melalui dermaga per tahun (Ton)	3,704	3,890	4,084	4,288	4,503	4,728	4,964
1.03.03	Jumlah orang melalui lapangan terbang per tahun (Orang)	23,499	24,674	25,907	27,203	28,563	29,991	31,490
1.03.04	Jumlah barang melalui lapangan terbang per tahun (ton)	235	247	259	272	286	300	315
1.03.05	Jumlah orang melalui terminal per tahun (Orang)	1,918	2,014	2,115	2,221	2,332	2,448	2,571
1.03.06	Jumlah barang melalui terminal per tahun (Kg)	9,592	10,071	10,575	11,104	11,659	12,242	12,854
2.02	Penataan Wilayah							
2.02.01	Ketaatan terhadap RTRW (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.02.02	Luas wilayah produktif (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.02.03	Luas wilayah industry (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.02.04	Luas wilayah banjir (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02.05	Luas wilayah kekeringan (%)	6.00	5.70	5.42	5.14	4.89	4.64	4.41
2.02.06	Luas wilayah perkotaan (%)	0.80	0.85	0.89	0.93	0.98	1.03	1.08
2.03	Fasilitas Perbankan dan lembaga keuangan non bank							
2.03.01	Jenis dan jumlah bank dan cabang (Unit)	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00
2.03.02	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang (Unit)	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00
2.04	Hotel dan Restoran							
2.04.01	Jenis, kelas, dan jumlah restoran (unit)	35.00	36.00	37.00	38.00	39.00	40.00	41.00
2.04.02	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel (unit)	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00

2.04.02.01	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel berbintang (unit)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.04.02.02	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel melati (unit)	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
2.05	Air Bersih, Listrik, Komunikasi dan Informasi							
2.05.01	Persentase RT pengguna air bersih (%)	71.54	72.88	74.22	75.56	76.90	78.24	79.58
2.05.02	Rasio ketersediaan daya listrik	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2.05.03	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%)	86.84	87.27	87.71	88.15	88.59	89.03	89.48
2.05.04	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)	65.26	65.91	66.57	67.24	67.91	68.59	69.27
3	Iklim Berinvestasi							
3.01	Angka kriminalitas (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.02	Jumlah demo (kali)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.03	Lama proses perijinan (Hari)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
3.04	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah (Jenis)	19.00	20.00	20.00	21.00	21.00	21.00	22.00
3.04.01	Jumlah dan macam pajak daerah (Jenis)	7.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	10.00
3.04.02	Jumlah dan macam retribusi daerah (Jenis)	12.00	12.00	12.00	13.00	13.00	13.00	13.00
3.05	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha (Buah)	19.00	20.00	20.00	20.00	21.00	21.00	21.00
3.06	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa (%)	6.17	6.48	6.80	7.14	7.50	7.87	8.27

4	Sumber Daya Manusia							
4.01	Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)	4.81	5.05	5.30	5.57	5.85	6.14	6.45
4.02	Rasio ketergantungan (%)	61.98	61.42	60.87	60.32	59.78	59.24	58.71

BAB IX

PENUTUP

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program unggulan kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan gambaran kondisi keuangan daerah, serta program perangkat daerah disertai pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun ke depan yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN dan RPJMD Provinsi Maluku.

9.1. Pedoman Transisi

Dalam menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah disusunlah pedoman transisi. Pedoman transisi kemudian disusun pada tahun 2026 atau setelah RPJMD periode 2021-2026 berakhir. Proses penyusunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buru Selatan tahun 2009-2029 untuk tetap menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Namun RKPD transisi tersebut tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya.

Program-program pada masa transisi ini diharapkan mengarah pada target kinerja yang belum tercapai selama periode perencanaan sebelumnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Program-program dimaksud bersifat tahunan sehingga hasil dan dampaknya dapat di evaluasi pada akhir tahun perencanaan.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Implementasi RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026 diperlukan komitmen bersama untuk dilaksanakan secara konsisten berdasarkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, dan masyarakat, termasuk dunia usaha, dalam melaksanakan pembangunan agar mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026 ini dengan sebaik-baiknya;
2. SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan berkewajiban

menyusun Rencana Strategis (Renstra-SKPD) Tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026, yang selanjutnya sebagai acuan menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD.

3. Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2021-2026 dipublikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan, serta menjadi acuan bagi Bupati/Wakil Bupati, SKPD dan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.
4. Kepala daerah dalam hal ini Bupati wajib untuk mempublikasikan RPJMD kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD. Dengan demikian, masing-masing anggota DPRD dalam rangka menjaring aspirasi/reses ke daerah pemilihannya, sejalan dengan kerangka kebijakan dan program dalam RPJMD.
5. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Buru Selatan berkewajiban melakukan pembinaan, konsultasi, pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).
6. Bappeda Kabupaten Buru Selatan berkewajiban melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta evaluasi hasil terhadap dokumen RPJMD 2021-2026.

Bagian ini disusun sebagai landasan dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu lima tahun ke depan. Selanjutnya diharapkan peran aktif seluruh pelaku pembangunan dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah di Kabupaten Buru Selatan.